

RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 47 MASA SIDANG III TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 30 DESEMBER 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK RISALAH

Jenis Rapat

Paripurna

Rapat Ke

47 (empat puluh tujuh)

Masa Sidang

- 111

Tahun

2019

Sifat Rapat

Terbuka

Hari / Tanggal

: Senin / 30 Desember

Waktu

: Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Tempat

: Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

JI. Sultan Trenggono No 45 Demak

Pimpinan Rapat

: H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE

(Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Didampingi:

1. H.M. Natsir

(Bupati Demak)

2. Drs. Djoko Santoso

(Wakil Bupati Demak)

3 Nur Wahid, SH.I

(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Pembawa Acara

Devi Noor, S.Ak

Hadir

ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK

36

anggota dari 50 anggota

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

Staf Ahli Bupati Demak

2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak

Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak

FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK

Komandan Kodim Demak

2. Kepala Polres Demak

3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak

Ketua Pengadilan Negeri Demak

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

Ahmad Nur Wahyudi, SH,MH
 (Plt. Sekretaris DPRD)

2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM

(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

RAPAT PARIPURNA KE-47 MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019 DPRD KABUPATEN DEMAK

DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP

RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
2011-2031 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Demak, Senin 30 Desember 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh.

- Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;
- Ykh. Sdr. unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;
- Ykh. Sdr. Wakil Ketua DPRD beserta segenap Anggota DPRD;
- Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah dan Plt. Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

- Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili;
- Ykh. Para Camat se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili;
- Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat Paripurna hari ini, kami mengajak kepada segenap hadirin untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat ridlo-Nya kita masih dipertemukan di ruang Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir disini mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin....

Atas nama DPRD kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara sekalian atas kehadirannya memenuhi undangan kami.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: "Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD "

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak...... orang, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Maka dengan mengucap

"Bismillahirrohmaanirrohiim" Rapat Paripurna
ke-47 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III
(tiga) Tahun 2019 dengan acara Persetujuan
Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap

Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Demak, pada hari ini Senin 30 Desember 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

---- dok ---- dok ---dok ----

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Bahwa Rapat Paripurna yang kita selenggarakan ini adalah sebagai tindak lanjut Surat Bupati Demak Nomor 180/2983/2019 Desember 2019, perihal 23 tanggal Pemberitahuan Substansi Raperda tentang Perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak, yaitu Raperda tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah

Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, Selanjutnya Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi A, B, C dan D serta Bappeda Litbang dan Bagian Hukum membahas Catatan-catatan Kementrian ATR/BPN tentang Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Kabupaten Demak pada tanggal 27 Desember 2019, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD Demak Nomor 13/BAMUS.DPRD/2019, pada hari ini Senin, tanggal 30 Desember 2019 merupakan agenda Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil Rapat Pimpinan DPRD bersama Eksekutif yang membahas Materi tersebut, maka Kami persilakan kepada Sekretariat DPRD untuk membacakannya, dipersilakan.

SEKRETARIAT DPRD (.....):

Membacakan:

- 1. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan Nomor 19/PIM.DPRD/2019. (terlampir)
- 2. Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 59 Tahun 2019 tentang Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, (terlampir).
- 3. Berita Acara Persetujuan DPRD dan Bupati Demak Nomor 60/PB Tahun 2019 tentang Raperda atas Perubahan Peraturan Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, (terlampir).

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,
Selanjutnya berkaitan dengan
pengambilan keputusan kami tawarkan kepada
segenap anggota DPRD dan mohon jawaban
secara tegas:

KEPUTUSAN RANCANGAN "APAKAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERSETUJUAN BUPATI DEMAK DPRD DAN **BERSAMA** RAPERDA ATAS PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK DITETAPKAN UNTUK 2011-2031 **TAHUN** MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN DAPAT **DPRD** SEKRETARIAT **OLEH** DISETUJUI?"

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB: SETUJU.

Dok	•	•••	•••
-----	---	-----	-----

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih atas persetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Setelah kami tawarkan kepada seluruh anggota DPRD, sebagai proses persetujuan bersama selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth. Sdr. Bupati Demak untuk menyampaikan sambutan berkaitan dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031.

Kepada Yth. Sdr. Bupati Demak, dipersilakan.

BUPATI DEMAK (HM NATSIR.):

Membacakan sambutan Bupati Demak berkaitan dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan sambutan berkaitan dengan persetujuan DPRD.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, Untuk penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD yang telah kita setujui, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA:

- Hadirin yang kami hormati.
- Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 59 Tahun 2019 tentang Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6

- Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak,
- Penandatanganan Berita Acara Persetujuan DPRD dan Bupati Demak Nomor 60/PB Tahun 2019 tentang Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Sebelumnya mohon kepada Bupati, Wakil Bupati Demak, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.
- Hadirin dimohon berdiri.
- Penandatanganan oleh **Ketua DPRD** Kabupaten Demak, <u>dipersilakan</u>.
- Penandatanganan selesai, kepada Bupati, Wakil bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Demak dipersilakan kembali ke tempat.
- Hadirin dipersilakan duduk kembali.
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih

PIMPINAN RAPAT:

Terimakasih kami sampaikan kepada Pembawa Acara, yang telah mengatur jalannya penandatanganan surat keputusan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-

Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillaahi robbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang-III (tiga) Tahun 2019 dengan acara Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok......

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Demak, Senin 30 Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571 Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab@gmail.com

Nomor

005/ 1119

Sifat

Lampiran

Perihal

UNDANGAN

Demak, 27 Desember 2019

Kepada:

Yth. Bpk/Ibu

Anggota DPRD Kabupaten Demak

Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

> Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran

Saudara pada:

Hari

Senin

Tanggal

30 Desember 2019

Pukul

: 09.00 WIB

Tempat

Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara

- 1. Rapat Paripurna Persetujuan Catatan-catatan Kementerian ATR tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Kabupaten Demak;
- 2. Rapat Paripurna Pelaporan Reses dan Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019 (Internal).

Pakaian

P.S.R (Pakaian Sipil Resmi)

maklum dan atas kehadirannya untuk menjadikan Demikian disampaikan terima kasih.

> BUPATEN DEMAK KETU

DEWAN RERWAKILAN RAKYAT DAERAH

AHRUDIN BISKI SLAMET, SE W

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Bupati Demak;

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;

3. Arsip.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516 Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website: http://dprd.demakkab.go.id, Email: dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

HARI

: SENIN

TANGGAL.

30 DESEMBER 2019

PUKUL

: 09.00 WIB S/D SELESAI

TEMPAT

: RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK

ACARA

: RAPAT PARIPURNAPERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-

2031 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	РКВ	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
(4)	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	1 m	
(<u>5</u>)	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	2
(· 6)	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
(8)	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	·
(9)	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9 (10)	
(10)	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		· · ·
(11)	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	17/2h	
/12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12 S M	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13 Molys	
(14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	РКВ	15	ļ
(16	SUKARMIN	РКВ	16	
17.	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	РКВ	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18 (1)	<u> </u>
<u>19</u>	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20) PARSIDI, S.T., M.T.	РКВ	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
422	NUR SUSAKTIYO	РКВ	22 Aug	_

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA	ANGAN	KET
1	2	3	1,110		5
(23)	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23		••••••
24	MUNTOHAR	GERINDRA	X	24	
(25/	MARWAN.	GERINDRA	25	Y	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26 M	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GÉRINDRA	27 5	- "	
(28)	JAYADI	GERINDRA.		28 / 14	: <u> </u>
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
(30)	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
(31)	SUTRISNO	GOLKAR	3 - 00		·
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	,	32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	·
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	7	36	
. 37	MARTONO	NASDEM	37		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
39	SULKAN	NASDEM	39		
40	GUNAWAN	NASDEM	<i>f f f f f f f f f f</i>	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
(42)	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	10.	42	
(43)	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	T	· · · ·
(44)	RUMAIN	PPP .		44 Ju	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
45	ABU SAID	PPP	45		
(46)	SUBARI.	PPP		46 //	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		·
4	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	//	48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49 Trans	1/_1	
50)	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50 \$ 54	<u></u>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK.

Menimbang

- : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
 - b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
- 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
- Rakvat Dewan Perwakilan 8. Peraturan Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut:

Jum'at

2019

Senin

2019

- 1. Rapat Pimpinan DPRD bersama : 27 Desember membahas Catatan-Eksekutif catatan Kementerian ATR/BPN (Pukul 09.00) Peraturan Perubahan tentang Daerah Kab. Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Demak
- 2. a. Rapat Paripurna Persetujuan : 30 Desember Bupati dan bersama DPRD Materi terhadap -Demak (Pukul 09.00) Substantif dari Kementerian ATR/BPN tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011
 - Pelaporan Paripurna b. Rapat Reses (Internal)
 - Kinerja Alat c. Laporan Kelengkapan DPRD Kab. Demak Tahun 2019

KEDUA

: Kunjungan kerja ke Luar Provinsi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak tanggal 6 s/d 8 Januari 2020

KETIGA

: Alat – alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari - hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

KEEMPAT

: Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak

KELIMA

: Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak Pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BIRRI SLAMET



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 – 2031
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: PB.04.02/1535-200/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031, perlu segera ditindaklanjuti dengan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bersama Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 10. Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 2031;

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.04.02/1535-: 200/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Substansi atas Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031;
 - 2. Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D serta Bappeda Litbang dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak membahas Persetujuan Substansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011 Tahun 2031 Nomor 19/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA

: Keputusan ini sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031.

KETIGA

: Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Daerah Peraturan Kabupaten Demak, sebagaimana dalam dimaksud diktum KESATU selaras penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.04.02/1535-200/XII/2019 20 Desember 2019 tanggal perihal

BERITA ACARA

NOMOR 60/PB TAHUN 2019

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 – 2031
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR

: BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA

KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 2031, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
- PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 30 Desember 2019

PIHAK PERTAMA BUPATI DEMAK, PIHAK KEDUA KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,

H.M. NATSIR

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

BERSAMA PIMPINAN KOMISI A, B, C DAN D SERTA BAPPEDA LITBANG DAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK

NOMOR 19/LAP.PIM/DPRD/2019

MEMBAHAS

PENYELARASAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
DARI KEMENTERIAN AGRARIA TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD
BERSAMA PIMPINAN KOMISI A, B, C DAN D SERTA BAPPEDA LITBANG
DAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK
MEMBAHAS PERSETUJUAN SUBSTANSI KEMENTERIAN AGRARIA TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

NOMOR 19/LAP.PIM/DPRD/2019

I. PENDAHULUAN

A. DASAR:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Neg gara Republik Indonesia Nomor 22043);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubanh dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6).

B. TUJUAN:

- Menyelaraskan Persetujuan Substansi Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.
- 2. Sebagai dasar persetujuan penetapan Raperda atas atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT:

Jenis rapat adalah Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Rapat dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

E. PESERTA RAPAT:

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dihadiri oleh:

1. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE. : Ketua DPRD

2. Maskuri, S.Ag. : Wakil Ketua DPRD

3. Nur Wahid, SH.I. : Wakil Ketua DPRD

4. Abu Naim : Waki Ketua Komisi A

5. Mukti Kholil, SH. : Ketua Komisi B

6. Saiful Hadi, S.Sos, MH. : Sekretaris Komisi B

7. Sutrisno : Wakil Ketua Komisi C

8. Mohamad Sodikin : Sekretaris Komisi C

9. Ulin Nuha, S.Pd.I. : Ketua Komisi D

10. Faozan, SH.

: Sekretaris Komisi D

Dari Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

11. Drs. Taufik Rifa'l, M.Si.

: Kepala Bappeda Litbang

12. Ahmad Nur Azizul Miftah, ST,MM. : Kabid Ekonomi dan Prasarana Wilayah

13. Ali Akhmadi, S.KM, M.Kes.

: Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya

14. Purwanto, ST.

: Kasubbid Infrastruktur

15. Rach Edi Setio Utomo, SH, MH.

: Kasubbag Produk Hukum Daerah

16. Wahyu Agus Suroso, SH.

: Pelaksana Bagian Hukum

Dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

17. Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH.

: Plt. Sekretaris DPRD

18. Sunardi, SH.

Kasubbag Kajian Hukum dan perundang-

undangan

19. Budhi Prabowo, S.Kom.

: Kasubbag Rapat dan Risalah

F. SISTEMATIKA LAPORAN:

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi A, B, C dan D serta Bappeda Litbang dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak bertujuan untuk membahas Persetujuan Substansi Kementerian Agararia Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

II. PENDAHULUAN;

III. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN;

IV. KESIMPULAN;

V. PENUTUP.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI RAPAT:

Materi Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi A, B, C dan D serta Bappeda Litbang dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak bertujuan untuk membahas Persetujuan Substansi Kementerian Agararia Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional terhadap Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, sebagai berikut:

1. Surat dari Bupati Demak Nomor 180/2983/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Pemberitahuan dan Tindak Lanjut Persetujuan Substansi Raperda tentang Perubahan Perda RTRW Kab. Demak beserta lampirannya;

2. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.04.02/1535-200/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;

3. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;

B. HASIL PEMBAHASAN:

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 disepakati sebagai berikut :

- 1. Judul dirubah untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2. Konsideran Menimbang dirubah mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- 3. Konsideran Mengingat dirubah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait materi raperda.
- 4. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 1 A, Pasal 1 B, dan Pasal 1 C karena sesuai kesepakatan bahwa di wilayah Jawa Tengah garis pantai yang dipakai dasar pembuatan peta adalah garis pantai tahun 2013.
- 5. Pasal 2, 4, 5, 11 dan 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 64, 65, 66 diubah karena menyesuaikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Pasal 6, 7, 45, 46, 57, 58, 59, 60 diubah karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kedungsepur, wilayah Demak masuk dalam Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur.
- 7. Pasal 8, 14 dihapus, pasal selanjutnya menyesuaikan.
- 8. Pasal 13, 15, 16, 77, 80, 81, 83, 84, 88, 94, 95, 99, 136, BAB XVI KETENTUAN PENUTUP pada Pasal II diubah, Pasal 96 dihapus karena menyesuaikan rencana pembangunan terminal Tipe B, rencana reaktivasi jalur KA di Jawa Tengah dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah.
- 9. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 84A, di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 2 pasal yaitu Pasal 85A dan 85B, di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 87A karena menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah.
- 10.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) yakni Pasal 16A dan Pasal 16B menyesuaikan rencana pembangunan pelabuhan Pengumpan Lokal Morodemak.
- 11.Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 33A, di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 43A karena menyesuaikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 12 Pasal 37, 44, 53, 54, 55, 56 diubah karena menyesuaikan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- 13. Pasal 38, 39, 40, 41 diubah karena menyesuaikan luasan dalam file ship.
- 14. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 52A karena menyesuaikan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

- 15. Pasal 61 diubah dan Pasal 63 dihapus karena masukan dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Demak bahwa tidak perlu menetapkan pertambangan mineral non logam dan/atau batuan.
- 16. Pasal 67, 68, 69 diubah dan Pasal 72 dihapus karena menyesuaikan rekomendasi Kementerian Pertahanan.
- 17. Pasal 75 diubah karena masukan program terkait Pusat Kegiatan Nasional
- 18. Pasal 100, 102, 105, 107, 110 diubah, pasal 106 dihapus karena menyesuaikan rencana sistem perkotaan, jaringan energi, prasarana lainnya dan penyempurnaan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota untuk memudahkan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- 19.BAB IX KELEMBAGAAN, pasal 129 diubah karena menyesuaikan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengakomodir kelembagaan.

Secara detail perubahan pasal-pasal tersebut tercantum dan selaras dengan Tabel Persandingan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Demak 2011-2031 dan Raperda Perubahannya (sebagaimana terlampir).

III. KESIMPULAN

Setelah diadakan rapat konsultasi Pimpinan DPRD, maka dapat disimpulkan bahwa Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah atas Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk dilaksanakan Persetujuan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak serta Bappeda Litbang dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak yang membahas Persetujuan Substansi Kementerian Agararia Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

Demak, Desember 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Ketua,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE. Pimpinan Rapat



PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH TANGGAL 30 DESEMBER 2019

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK



Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH TANGGAL, 30 DESEMBER 2019

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan
 Negeri Demak;
- Yang kami hormati Wakil Bupati Demak;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam acara rapat paripurna "Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak menjadi Peraturan Daerah".

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami atas nama jajaran Pemerintah Daerah untuk menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya untuk membahas, mengawal dan mengkaji secara komprehensif dan mendalam baik filosofis, sosiologi dan yuridis dalam rangka proses penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Perjalanan panjang proses persetujuan Rancangan Perda tentang Perubahan Perda RTRW sudah dimulai sejak tahun 2016, berdasarkan hasil pembahasan awal antara Legislatif dan Eksekutif, kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Rekomendasi Persetujuan Substansi oleh Gubernur Jawa Tengah, hasil Validasi KLHS terhadap Revisi RTRW, Rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial, dan terakhir telah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Sekali lagi kami atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD atas kerjasamanya dalam menyelesaikan Raperda ini sehingga dapat dilanjutkan dengan persetujuan bersama.

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Raperda ini nantinya harus melewati satu tahapan lagi yaitu Evaluasi Gubernur, sehingga dibutuhkan kekompakan dan kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif guna mengawal proses Evaluasi Gubernur tersebut.

Diharapkan Raperda ini nantinya dapat melengkapi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dunia usaha, mendorong iklim investasi Daerah dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita sekalian, untuk mengemban amanat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak yang kita cintai.

Wallohul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

BUPATI DEMAK,



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031



BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK,

- Menimbang: a. bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak dan daerah sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Demak sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana lata ruang wilayah Kabupaten Demak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Neg gara Republik Indonesia Nomor 22043);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

- Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
- 25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 26. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 27. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 30. Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
- 31. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
- 35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
- 36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
- 37. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

- 40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perunahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 42. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
- 43. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
- 44. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Końservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
- 45. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
- 46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
- 48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- 49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- 50. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
- 51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
- 52. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Rekiamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
- 53. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
- 54. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- 55. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
- 56. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
- 57. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
- 58. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- 59. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
- 60. Peraturan Pemerintah Nomer 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomer 5574);
- 61. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- 62. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

- 63. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);
- 64. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
- 65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
- 66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubanh dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
- 67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
- 68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 69. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
- Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 5. Bupati adalah Bupati Demak.
- 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- 9. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
- 10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- 11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- 12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- 14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- 16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 17. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

- 18. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
- Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- 20. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 22. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- 23. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
- 25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
- 27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- 28. Kawasan budi daya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian.
- Satuan Wilayah Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan SWP adalah beberapa wilayah Kecamatan yang memiliki keterkaitan fungsi pengembangan.
- 30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 32. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
- 33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

- 34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- 35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 36. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- 37. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
- 38. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
- 39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 40. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- 41. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- 42. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- 43. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
- 44. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
- 45. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
- 46. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 47. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
- 48. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 49. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
- 50. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

- 51. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
- 52. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
- 53. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
- 54. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 55. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- 56. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- 57. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- 58. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 59. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 60. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 61. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- 62. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
- 63. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
- 64. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
- 65. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
- 66. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan

- dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
- 67. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
- 68. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- 69. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 70. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
- 71. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- 72. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
- 73. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
- 74. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- 75. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- 76. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 77. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- 78. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.
- 79. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga

- kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- 80. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- 81 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- 82. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
- 83. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
- 84. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- 85. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
- 86. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- 87 Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 88. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 89. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- 90. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- 91. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 92. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

- 93. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya; dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- 94. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi.
- 95. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
- 96. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- 97. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- 98. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
- 99. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 100. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- 101. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- 102. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
- 103. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 104. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 105. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 1 A, Pasal 1 B, dan Pasal 1 C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Pasal 1B

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 1C

- (1) Wilayah kabupaten meliputi seluruh administrasi kabupaten dengan luas kurang lebih 99.532 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak pada posisi 6° 43′ 26″ 7° 09′ 43″ Lintang Selatan dan 110° 27′ 58″ 110° 48′ 47″ Bujur Timur dengan batas administrasi meliputi:
 - a. Sebelah utara : Laut Jawa;
 - b. Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;
 - c. Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; dan
 - d. Sebelah barat : Kota Semarang.
- (2) Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 14 (empatbelas) kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Bonang;
 - b. Kecamatan Demak;
 - c. Kecamatan Dempet;
 - d. Kecamatan Gajah;
 - e. Kecamatan Guntur;
 - f. Kecamatan Karangtengah;
 - g. Kecamatan Karanganyar;
 - h. Kecamatan Karangawen;
 - i. Kecamatan Kebonagung;
 - j. Kecamatan Mijen;
 - k. Kecamatan Mranggen;
 - 1. Kecamatan Sayung;
 - m. Kecamatan Wedung; dan
 - n. Kecamatan Wonosalam.
- (3) Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten mencakup:
 - o. tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang;
 - p. rencana struktur ruang;
 - q. rencana pola ruang;

- r. penetapan kawasan strategis;
- s. arahan pemanfaatan ruang; dan
- t. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Ketentuan Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

4. Ketentuan Pasal 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan sawah irigasi; dan
 - b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Strategi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. menentukan zona kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan hortikultura; dan
 - b. mengembangkan budidaya tanaman buah-buahan; dan
 - c. intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan.
- (3) Strategi pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. mengembangkan kawasan pesisir yang berbasis minapolitan;
 - b. melindungi kawasan yang terkena abrasi;
 - c. mengembangkan kawasan pengolahan perikanan; dan
 - d. mengembangkan kawasan konservasi mangrove sebagai pelindung abrasi, perlindungan keanekaragaman hayati dan wisata alam.
- (4) Strategi pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan sistem keterkaitan ekonomi kawasan perkotaan-perdesaan;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL; dan
 - c. mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan sebagai PPK.
- (5) Strategi pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpulsimpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di kawasan perdesaan;
 - c. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air yang mengutamakan air permukaan dan pembatasan air bawah tanah dengan prinsip berkelanjutan; dan

- d. mengembangkan sistem sanitasi skala lingkungan dan wilayah;
- e. mengembangkan sistem TPA dengan sanitary landfilldan waste to energy;
- f. mengembangkan sistem pengelolaan limbah cair rumah tangga pada kawasan perkotaan
- (6) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya
 - b. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung; dan
 - c. memindahkan secara bertahap permukiman yang berada di kawasan rawan banjir dan/atau rob dan/atau abrasi dan/atau kawasan lindung;
 - d. mengembangkan sistem agroforestry (wanatani) pada kawasan pertanian lahan kering;
 - e. mengembangkan kawasan konservasi pada kawasan lindung sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan wisata alam;
 - f. mengembangkan ruang terbuka hijau pada sempadan jalan, rel kereta dan TPA.
- (7) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :
 - a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan ruang kawasan perkotaan perkotaan secara efisien dan kompak;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; dan
 - d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perketaan.
- (8) Strategi pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi :
 - a. menentukan batas kawasan peruntukan industri;
 - mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 - c. meningkatkan pengelolaan kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan.
 - d. mengembangkan kegiatan agroindustri pada kawasan industri yang berdekatan dengan kawasan pertanian dan perikanan.
- (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.
- 5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:

ŧ

- (1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas:
 - a. rencana sistem perkotaan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. struktur perkotaan; dan
 - b. sistem wilayah.
- (2) Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PKN;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (3) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. penetapan satuan wilayah pembangunan; dan
 - b. rencana fungsi satuan wilayah pembangunan.
- 7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari kawasan perkotaan Semarang Kendal Demak Ungaran Salatiga Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Demak; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Mranggen.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Kawasan Perkotaan Gajah;
 - b. Kawasan Perkotaan Dempet;
 - c. Kawasan Perkotaan Guntur;
 - d. Kawasan Perkotaan Sayung;
 - e. Kawasan Perkotaan Karangtengah;
 - f. Kawasan Perkotaan Bonang;
 - g. Kawasan Perkotaan Wedung;
 - h. Kawasan Perkotaan Karangawen;
 - i. Kawasan Perkotaan Wonosalam;
 - j. Kawasan Perkotaan Karanganyar;
 - k. Kawasan Perkotaan Mijen; dan

- 1. Kawasan Perkotaan Kebonagung.
- (4) Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan Perkotaan Wedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf g didorong untuk berperan sebagai PKL.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;
 - b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet;
 - c. Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur;
 - d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung;
 - e. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di Kecamatan Karangtengah;
 - f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang;
 - g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen;
 - h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam;
 - Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar;
 - j. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;
 - k. Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung; dan
 - 1. Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung.
- (6) Kawasan perkotaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disusun rencana detail tata ruangnya.
- 8. Pasal 8 Dihapus
- 9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi sungai, danau; dan
- c. sistem jaringan transportasi laut.
- 10 Ketentuan Pasal 12diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rencana prasarana jaringan jalan;dan
 - b. rencana angkutan umum.
- 11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. jalan desa;
 - c. jalan khusus;
 - f. terminal penumpang;dan
 - g. terminal barang.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - Jalan arteri primer meliputi:
 - 1. Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus Jati;
 - Jalan Lingkar Demak;
 - 3. Jalan Bts. Kota Demak Trengguli;
 - 4. Jalan Trengguli Bts. Kab. Demak/Kudus; dan
 - Jalan Bts. Kota Semarang Bts. Kota Demak.
 - b. Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) meliputi:
 - 1. Jalan Trengguli Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;
 - 2. Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara Margoyoso;
 - c. Jalan tol meliputi:
 - 1. Jalan tol Semarang Demak;
 - Jalan tol Demak Tuban; dan
 - 3. exit tol berada di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wonosalam.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:
 - a. Jalan Semarang Godong;
 - b. Jalan Demak Godong;
 - c. Jalan Semarang Demak Jepara (jalan pesisir); dan
 - d. Rencana jalan lingkar Mranggen.
- (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer meliputi:
 - a. Jalan Demak Bonang Wedung;
 - b. Jalan Onggorawe Waru Mranggen;
 - c. Jalan Mranggen Kangkung Kebonbatur Banyumeneng/ Girikusumo;
 - d. Jalan Kangkung Sumberejo Margohayu Wonosekar Tlogorejo;
 - e. Jalan Karangawen Jragung;
 - f. Jalan Karangtengah Guntur Karangawen;
 - g. Jalan Pamongan Bulusari Banjardowo (Kota Semarang);
 - h. Jalan Onggorawe Suradadi;
 - i. Jalan Karangtengah Tambakbulusan;
 - j. Jalan Desa Sriwulan Bedono Timbulsluko Surodadi Tambakbulusan – Morodemak - Purworejo ;

- k. Jalan Desa Berahan Wetan Babalan Kedungmutih Kedungkarang Tedunan;
- 1. Jalan Wedung Bungo Jetak Mijen;
- m. Jalan Karanganyar Kedungwaru kidul Gempolsongo Mijen;
- n. Jalan Bungo Mutih Kulon;
- o. Jalan Karangnyar Sambung Sidomulyo Merak;
- p. Jalan Gajah Dempet;
- q. Jalan Dempet Sidomulyo;
- r. peningkatan ruas jalan Dempet Kebonagung;
- s. Jalan Karangtengah Pasar Wonosalam Doreng Megonten;
- t. Jalan Demak Pasar Wonosalam;
- u. Jalan Mranggen Batursari Pucanggading / TVRI Kebonbatur; dan
- v. Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati
- (5) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh Daerah.
- (6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan di kawasan industri di Kecamatan Sayung dan Karangtengah.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. terminal peņumpang Tipe A direncanakan di Kawasan Perkotaan Demak;
 - b. terminal penumpang Tipe B direncanakan di Kawasan Perkotaan Mranggen;
 - c. terminal penumpang Tipe C direncanakan meliputi:
 - 1. Kawasan Perkotaan Mranggen;
 - 2. Kawasan Perkotaan Wedung;
 - 3. Ibukota Kecamatan Wonosalam;
 - 4. Ibukota Kecamatan Gajah;
 - 5. Ibukota Kecamatan Karanganyar;
 - 6. Ibukota Kecamatan Mijen;
 - 7. Ibukota Kecamatan Bonang;
 - 8. Ibukota Kecamatan Sayung;
 - 9. Ibukota Kecamatan Karangtengah;
 - 10. Ibukota Kecamatan Guntur;
 - 11. Ibukota Kecamatan Dempet;
 - 12. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan
 - 13. Ibukota Kecamatan Kebonagung.
- (8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di Kecamatan Sayung.
- 12. Pasal 14 Dihapus
- 13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Rencana angkutan umum sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan angkutan umum Kawasan Perkotaan Kendal Demak Ungaran Salatiga Semarang Purwodadi (Kedungsepur); dan
 - b. rencana pelayanan angkutan umum.
- (2) Pengembangan angkutan umum Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penyediaan bus perkotaan dan fasilitas pendukungnya yang menghubungkan Kawasan Kedungsepur.
- (3) Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum meliputi:
 - a. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Lasem;
 - b. Semarang-Demak-Kudus;
 - c. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Juana;
 - d. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;
 - e. Kudus-Demak-Semarang-Secang-Wonosobo-Purwokerto;
 - f. Semarang-Demak-Kudus-Rembang-Blora-Cepu;
 - g. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;
 - h. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang;
 - Semarang-Demak-Kudus-Pati;
 - Semarang-Demak-Kudus-Jepara;
 - k. Jepara-Kudus-Demak-Semarang-Pekalongan-Tegal;
 - Tegal-Semarang-Demak-Kudus;
 - m. Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Bangsri;
 - n. Solo-Salatiga-Semarang-Demak-Kudus-Pati;
 - o. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi;
 - p. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora;
 - q. Semarang-Demak-Purwodadi-Solo;
 - r. Wedung-Demak-Godong-Purwodadi;
 - s. Morodemak-Bonang-Demak;
 - t. Mranggen-Karangawen-Guntur-Karangtengah; dan
 - u. Rute lainnya.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan rencana jaringan kereta api nasional terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

- a meliputi:
- a. jalur kereta api cepat Jakarta Surabaya;
- b. jalur Utara menghubungkan Jakarta Semarang Surabaya;
- c. pengembangan kereta api regional Semarang Kudus Pati Juwana Rembang – Lasem – Jatirogo – Bojonegoro; dan
- d. pengembangan jaringan kereta api perkotaan Kedungsepur.
- (4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari dan menuju:
 - a. kawasan industri;
 - b. kawasan Wisata; dan
 - c. kawasan lainnya.
- (5) Rencanastasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa revitalisasi stasiun penumpang kereta api berada di:
 - a. Kecamatan Demak;
 - 'b. Kecamatan Mranggen; dan
 - c. Kecamatan Sayung.
- 15.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. jaringan sungai untuk transportasi di Kecamatan Bonang.
- b. jalur transportasi sungai untuk wisata meliputi:
 - 1. Kecamatan Sayung; dan
 - 2. Kecamatan Karangtengah.
- c. pengembangan dermaga sebagai infrastruktur pendukung.

Pasal 16B

- (1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. pelabuhan umum;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan pelabuhan pengumpan lokal Morodemak berada di Kecamatan Bonang
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai berupa Pelabuhan Morodemak;
 - b. Pangkalan pendaratan ikan (PPI) meliputi:
 - 1. Pelabuhan Perikanan Babalan;
 - 2. Pelabuhan Perikanan Betahwalang;
 - 3. Pelabuhan Perikanan Bungo; dan
 - 4. Pelabuhan Perikanan Wedung.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- 17. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengeolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan pipa BBM Cepu Rembang- Pengapon Semarang
 - b. jaringan pipa gas regional meliputi:
 - 1. Kepodang Rembang Pati Jepara Semarang; dan
 - 2. Blora Grobogan Demak Semarang;
- (3) Jaringan pipa BBM Cepu Rembang Pengapon Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui :
 - a. Kecamatan Sayung;
 - b. Kecamatan Karangtengah;
 - c. Kecamatan Gajah; dan
 - d. Kecamatan Karanganyar.
- (4) Rencanajaringan pipa gas regional Kepodang- Rembang Pati Jepara Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 melalui:
 - a. Kecamatan Sayung;
 - b. Kecamatan Karangtengah;
 - c. Kecamatan Gajah; dan
 - d. Kecamatan Karanganyar.
- (5) Rencanajaringan pipa gas regional Blora Grobogan Demak Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 melalui:
 - a. Kecamatan Mranggen;
 - o. Kecamatan Karangawen; dan
 - Kecamatan Kebonagung.
- 18. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:

- a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik; dan
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- 19. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa pembangunan sumber energi listrik alternatif yang bersumber dari matahari, air, angin, sampah, dan sumber lainnnya yang ramah lingkungan.
- (2) Ifrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b berupa rencana transmisi tenaga listrik terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi :
 - 1. saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
 - 2. saluran udara tegangan tinggi.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
 - saluran udara tegangan menengah; dan
 - 2. saluran udara tegangan rendah.
 - c. gardu induk.
- (3) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi melalui:
 - 1. Kecamatan Mranggen; dan
 - 2. Kecamatan Karangawen.
 - b. saluran udara tegangan tinggi melalui:
 - 1. Kecamatan Sayung;
 - 2. Kecamatan Karangtengah;
 - 3. Kecamatan Demak:
 - 4. Kecamatan Wonosalam;
 - 5. Kecamatan Dempet;
 - 6. Kecamatan Gajah;
 - 7. Kecamatan Bonang;
 - 8. Kecamatan Wedung;
 - 9. Kecamatan Karanganyar; dan
 - 10. Kecamatan Mijen.
- (4) Fengembangan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 terdapat diseluruh wilayah Daerah
- (5) Pengembangan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Sayung;
 - b. Kecamatan Karangtengah;
 - c. Kecamatan Demak;
 - d. Kecamatan Mranggen; dan
 - e. Kecamatan Dempet
- (6) Sampai dengan tahun 2031 seluruh wilayah Daerah direncanakan sudah terlayani sistem energi listrik.
- 20. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak.
- 21. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan.
- (2) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.
- 22. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b berupa jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan bersama menara telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.
- (4) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- 23. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d terdiri atas:

- a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten, dan
- b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- 24. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a berupa peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna.
- (2) Peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna berupa peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai meliputi:
 - a. Daerah Aliran Sungai Babon;
 - b. Daerah Aliran Sungai Tuntang;
 - c. Daerah Aliran Sungai Jragung;
 - d. Daerah Aliran Sungai Serang.
 - e. Daerah Aliran Sungai Dolok;
 - f. Daerah Aliran Sungai Kaliombo; dan

- g. Daerah Aliran Sungai Setu.
- 25. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT).
- (3) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melputi:
 - a. sungai;
 - b. embung; dan
 - c. bendungan.
- (4) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Sungai Serang;
 - b. Kali Wulan;
 - c. Kali Kenceng;
 - d. Kali Loben;
 - e. Kali Jajar;
 - f. Kali Tuntang Lama;
 - g. Kali Jragung;
 - h. Kali Setu;
 - i. Kali Dolog;
 - j. Kali daleman;
 - k. Kali Mondoliko; dan
 - l. Kali Babon.
- (5) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pengembangan embung dengan fungsi pengendalian banjir meliputi:
 - a. Kecamatan Karangawen;
 - b. Kecamatan Guntur;
 - c. Kecamatan Dempet;
 - d. Kecamatan Mijen;
 - e. Kecamatan Karanganyar;
 - f. Kecamatan Bonang; dan
 - g. Kecamatan Wedung.
- (6) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Bendungan Gerak Kadilangu;
 - b. Bendungan Gerak tedunan;
 - c. Bendungan Gerak Pucanggading;
 - d. Bendungan Gerak Barang;

- e. Bendungan Gerak Jragung;
- Bendungan Gerak Guntur;
- g. Bendungan karet Wonokerto;
- h. Bendungan Karet Jatirogo;
- i. Bendungan Karet kalu Kumpulan;
- j. Bendungan Gerak Glapan;
- k. Bendungan Gerak Sedadi; dan
- 1. Bendungan Gerak Klambu Kiri.
- (7) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Cekungan Air Tanah Kudus
 - b. Cekungan Air Tanah Semarang Demak
- (8) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir dan rob;
 - c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
 - a. Sistem jaringan irigasi primer meliputi:
 - 1. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di:
 - a) Daerah Irigasi Sedadi;
 - b) Daerah Irigasi Glapan Timur;
 - c) Daerah Irigasi Glapan Barat;
 - d) Dacrah Irigasi Klambu Kiri; dan
 - e) Daerah Irigasi Jragung;
 - 2. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada
 - a) Daerah Irigasi Guntur;
 - b) Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Batu;
 - c) Daerah Irigasi Penggaron;
 - d) Daerah Irigasi Sumberejo; dan
 - e) Daerah Irigasi Polder Batu,
 - Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah yang berada 3.
 - a) Daerah Irigasi Gablok;
 - b) Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran; dan
 - c) Daerah Irigasi Dolok.
- b. Sistem jaringan irigasi sekunder berada di seluruh wilayah Daerah.
- Sistem pengendali banjir dan rob sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
 - b. pembangunan sabuk pantai;

- c. pengendalian pengambilan air tanah; dan
- d. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir.
- (11) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan jaringan air minum perpipaan di seluruh kawasan perkotaan; .
 - b. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan; dan
 - c. pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku.
- (12) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d berupa peningkatan pelayanan jangkauan pelayanan air bersih kepada kelompok pengguna.
- 26.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdriri atas:

- a. sistem jaringan persampahan;
- b sistem penyediaan air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. sistem jaringan drainase; dan
- f. sistem jaringan evakuasi bencana.
- 27. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :
 - a. rencana lokasi tempat pemrosesan akhir;
 - b. rencana lokasi tempat penampungan sementara; dan
 - c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- (2) Lokasi tempat pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir Kalikondang;
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir Candisari;
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir Berahan Kulon; dan
 - d. pengelolaan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diarahkan menggunakan pendekatan sanitary landfill dan teknologi yang dapat mereduksi sampah.
- (3) Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu.
- (4) Rencana lokasi tempat penampungan sementara sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal.

- (5) Rencana lokasi tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.
- (6) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya.
- 28. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas :
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan unit air baku berupa pengembangan sumber air permukaan berasal dari:
 - 1. Sungai Jajar;
 - 2. Sungai Wonokerto;
 - 3. Sungai Tuntang; dan
 - 4. Sungai Wulan;
 - 5. Sungai Dombo Sayung; dan
 - 6. Sungai lainnya sesuai kajian.
 - b. pengembangan unit pengolahan berupa pengembangan fasilitas pengolah air minum meliputi:
 - 1. Kecamatan Sayung;
 - 2. Kecamatan Demak;
 - 3. Kecamatan Wedung;
 - 4. Kecamatan Mranggen;
 - Kecamatan Dempet;
 - 6. Kecamatan Karanganyar; dan
 - 7. Kecamatan Mijen.
 - c. pengembangan unit produksi berupa peningkatan kapasitas produksi PDAM Tirta Darma.
 - d. pengembangan unit distribusi berupa pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR).
 - e. pengembangan unit pelayanan meliputi:
 - pencapaian 100% pelayanan kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen.
 - 2. pengembangan pelayanan air minum pada kawasan yang rawan air minum.
 - 3. Pengembangan pelayanan untuk kawasanperuntukan industri
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
 - a. pengembangan sumur dangkal berada di seluruh kawasan permukiman perdesaan yang tidak mendapatkan pelayanan jaringan perpipaan;
 - b. pengembangan sumur pompa berada di Kecamatan yang kualitas air tanah dangkalnya tidak baik; dan

- .c. pengembangan bak penampungan air hujan direncanakan di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan konsep pemanenan air hujan (rain
- 29. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c

- a. pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;
- b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga
- c. pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.
- 30.Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 33 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 A

- (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.
- (2) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah B3
- 31.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 32. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan ekosistem mangrove;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.
- 33.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 322 (tiga ratus dua puluh dua hektar)
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 182 (seratus delapan puluh dua hektar); dan
 - b. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 140 (seratus empat puluh
- 34. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang lebih 4.471 (empat ribu empat ratus tujuh puluh satu) hektar terdiri atas:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungaj;
- c. sempadan saluran irigasi;
- d. sempadan embung; dan
- e. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- 35. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

- a. Kecamatan Bonang;
- b. Kecamatan Karangtengah;
- c. Kecamatan Sayung; dan
- d. Kecamatan Wedung.
- 36.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; dan
 - e. sungai yang terpengaruh pasang air laut.
- (2) Sempadan sungai meliputi:
 - a. Sungai Babon dan anak sungainya
 - b. Sungai Bum dan anak sungainya
 - Sungai Dolog dan anak sungainya;
 - d. Sungai Jajar dan anak sungainya;
 - Sungai Jebor/ Gejoyo dan anak sungainya;
 - Sungai Jragung dan anak sungainya;
 - Sungai Kenceng dan anak sungainya;

- h. Sungai Lobener dan anak sungainya;
- i. Sungai Serang Lama dan anak sungainya;
- j. Sungai Serang-Lusi dan anak sungainya;
- k. Sungai Tulung/ Setu dan anak sungainya;
- l. Sungai Tuntang dan anak sungainya; dan
- m. Sungai Tuntang Lama dan anak sungainya.
- (3) Ukuran dan ketentuan pengaturan sempadan sungai sesuai peraturan perundangan-undangan.
- 37. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 serta disisipkan1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 43 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 A

- (1) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berupa ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan
- (2) Ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ruang terbuka hijau pekarangan;
 - b. ruang terbuka hijau taman dan hutan kota;
 - ruang terbuka hijau jalur hijau jalan;
 - d. ruang terbuka hijau fungsi tertentu;
- (3) Pengembangan ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;
 - b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 309 (Tiga ratus sembilan) hektar;
 - c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 51 (Lima puluh satu) hektar;
 - d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 10 (Sepuluh) hektar;
 - e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 22 (Dua puluh dua) hektar;
 - f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 43 (Empat puluh tiga) hektar;
 - g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 59 (Lima puluh sembilan) hektar;
 - h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 208 (Dua ratus delapan) hektar;
 - i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 61 (Enam puluh satu) hektar;
 - j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 16 (Enam belas) hektar;
 - k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 431 (Empat ratus tiga puluh satu) hektar;
 - l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 193 (Seratus sembilan puluh tiga) hektar;
 - m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 66 (Enam puluh enam) hektar; dan
 - n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 259 (Dua ratus lima puluh sembilan) hektar.

38.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berupa kawasan pantai berhutan bakau.

39.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terletak di sepanjang pesisir pantai dengan luas kurang lebih 701 (tujuh ratus satu) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 28 (Dua puluh delapan) hektar;
 - Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 30 (Tiga puluh) hektar;
 - c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 35 (Tiga puluh lima) hektar; dan
 - d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 608 (Enam ratus delapan) hektar.
- (2) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundangundangan masih ditetapkan sebagai kawasan ekosistem mangrove yang selanjutnya disebut kawasan peruntukan industri/ kawasan pantai berhutan bakau dengan luas kurang lebih 448 (empat ratus empat puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 101 (Seratus satu) hektar;
 - b. Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang lebih 90 (Sembilan puluh) hektar; dan
 - c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 257 (Dua ratus lima puluh tujuh) hektar.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 40.Ketentuan Pasal 46 ditambahkan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d

- a. Masjid Agung Demak;
- b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; dan
- c. cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati.
- 41.Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah; dan

- (2) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Cekungan Air Tanah Kudus; dan
 - b. Cekungan Air Tanah Semarang-Demak.
- 42. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupa kawasan plasma nutfah.
- (2) Kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
 - a. Kecamatan Sayung;
 - b. Kecamatan Karangtengah;
 - c. Kecamatan Bonang; dan
 - d. Kecamatan Wedung.
- 43. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.
- 44. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan luas kurang lebih 3.278 (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap;
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 568 (Lima ratus enam puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Karangawen.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.710 (dua ribu tujuh ratus sepuluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.961 (Seribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar; dan
 - b. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 749 (Tujuh ratus empat

45. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Kawasan pertaniari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan; dan
- b. kawasan hortikultura.

46. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dengan luas kurang lebih 56.763 (Lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 5.085 (Lima ribu delapan puluh lima) hektar;
- b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 4.145 (Empat ribu seratus empat puluh lima) hektar;
- c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 4.914 (Empat ribu sembilan ratus empat belas) hektar;
- d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 4.392 (Empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar;
- e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 4.714 (Empat ribu tujuh ratus empat belas) hektar;
- f. Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang lebih 2.894 (Dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) hektar;
- g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 5.786 (Lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektar;
- h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 3.282 (Tiga ribu dua ratus delapan puluh dua) hektar;
- Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 3.354 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar;
- j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 4.189 (Empat ribu seratus delapan puluh sembilan) hektar;
- k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 3.081 (Tiga ribu delapan puluh satu) hektar;
- Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) hektar;
- m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 5.526 (Lima ribu lima ratus dua puluh enam) hektar;
- n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 3.841 (Tiga ribu delapan ratus empat puluh satu) hektar;

47. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dengan luas kurang lebih 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) hektar meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;

- b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 47 (empat puluh Tujuh) hektar;
- c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan) hektar:
- d. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;
- e. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar;
- f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) hektar;
- g. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;
- h. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 59 (lima puluh Sembilan) hektar;
- i. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektar;
- j. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar;
- k. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar; dan
- Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar.
- 48. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan 56.530 (Lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh) hektar;
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 55.520 (lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh) hektar; dan
 - b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.010 (seribu sepuluh) hektar.
- (3) Penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- 49. Ketentuan Pasal ö0 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas :
 - a. budidaya tambak;
 - b. budidaya air tawar;
 - c. fasilitas perikanan tangkap; dan
 - d. pengolahan perikanan.
- (2) Budidaya tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.062 (Enam ribu enam puluh dua) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar;
 - b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 457 (empat ratus lima pulun tujuh) hektar;
 - c. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;

- d. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) hektar; dan
- e. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 4.130 (empat ribu seratus tiga puluh) hektar.
- (3) Budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Mijen;
 - b. Kecamatan Gajah
 - c. Kecamatan Karanganyar;
 - d. Kecamatan Wonosalam;
 - e. Kecamatan Dempet;
 - f. Kecamatan Kebonangung;
 - g. Kecamatan Karangawen; dan
 - h. Kecamatan Mranggen.
- (4) Fasilitas perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang;
 - b. Pangkapan pendaratan ikan meliputi:
 - 1. Kecamatan Bonang; dan
 - 2. Kecamatan Wedung.
- (5) Pengembangan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Kecamatan Bonang; dan
 - b. Kecamatan Wedung.
- 50. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

- 51. Pasal 63 Dihapus
- 52. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dengan luas lebih 7.646 (tujuh ribu enam ratus empat puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hektar;
 - b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar;
 - c. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar;
 - d. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 1050 (seribu lima puluh) hektar;
 - e. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar;

- f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga)
- g. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 251 (dua ratus lima puluih satu) hektar:
- h. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 163 (seratus enam puluh
- Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 5.313 (lima ribu tiga ratus tiga belas) hektar; dan
- Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektar.
- (2) Pengembangan kawasan industri terpadu berada di Kecamatan Sayung dan Karangtengah.
- (3) Pembangunan perusahaan industri di kawasan peruntukan industri yang berbatasan langsung dengan kawasan peruntukan permukiman wajib menyediakan kawasan penyangga dalam bentuk sabuk hijau.
- (4) Pembukaan akses perusahaan industri menuju jalan arteri primer mempertimbangkan ketentuan pengaturan akses masuk ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundang-undangan.
- 53. Ketentuan Pasal 65 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdiri
 - a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata budaya; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - . a. Pantai Morosari dan Mangrove di Kecamatan Sayung;
 - b. Pantai Morodemak dan Mangrove Kecamatan Bonang;
 - c. Pantai Surodadi di Kecamatan Sayung;
 - d. Hutan Wisata Wonosekar;
 - e. Waduk Bengkah;
 - f. Pantai Tambakbulusan dan Mangrove di Kecamatan Karangtengah; dan
 - g. Pantai Nggojoyo dan Mangrove di Kecamatan Wedung.
- (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - Masjid Agung Demak;
 - b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu;
 - c. Museum Masjid Agung;
 - d. Tradisi Grebeg Demak; dan
 - e. Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Bendung Gerak Kali Jajar;
 - b. Bendung Karet Kalijajar;
 - c. Bendung Karet Kali Kumpulan;
 - d. Taman Ria Kota Demak

- e. Agrowisata Kebonbatur; dan
- f. Agrowisata Jambu Lele.

54. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g dengan luas kurang lebih 19.055 (sembilan belas ribu dua lima puluh lima) hektar terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 8.527 (Delapan ribu lima ratus duapuluh tujuh) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 248 (Dua ratus empat puluh delapan) hektar;
 - Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 1.486 (Seribu empat ratus delapan puluh enam) hektar;
 - c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 255 (Dua ratus lima puluh lima) hektar;
 - d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 48 (Empat puluh delapan) hektar:
 - e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 110 (Seratus sepuluh) hektar:
 - f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 217 (Dua ratus tujuh belas) hektar;
 - g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 301 (Tiga ratus satu) hektar;
 - h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.045 (Seribu empat puluh lima) hektar;
 - i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 303 (Tiga ratus tiga)
 - j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) hektar:
 - k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 2.159 (Dua ribu seratus lima puluh sembilan) hektar;
 - Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 736 (Tujuh ratus tiga puluh enam) hektar;
 - m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 329 (Tiga ratus dua puluh sembilan) hektar; dan
 - n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 1.214 (Seribu dua ratus empat belas) hektar.
- (1) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.528 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 1.338 (Seribu tiga ratus tiga puluh delapar:) hektar;
 - b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 311 (Tiga ratus sebelas) hektar;
 - c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 955 (Sembilan ratus lima

- puluh lima) hektar;
- d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 778 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar;
- e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 1.365 (Seribu tiga ratus enam puluh lima) hektar;
- Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 468 (empat ratus enam puluh delapan) hektar;
- g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 571 (Lima ratus tujuh puluh satu) hektar;
- h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 837 (Delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar;
- i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 547 (Lima ratus empat puluh tujuh) hektar;
- Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 647 (Enam ratus empat puluh tujuh) hektar;
- k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 1.099 (Seribu sembilan puluh sembilan) hektar;
- Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh
- m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 755 (Tujuh ratus lima puluh lima) hektar; dan
- n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 635 (Enam ratus tiga puluh lima) hektar.

55.Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 67diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut: Pasal 67

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
 - a. Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi :
 - 1. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh Kecamatan;
 - 2. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Demak;
 - 3. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di berada di seluruh
 - 4. Pos angkatan laut berada di Kecamatan Bonang.
 - b. Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi:
 - 1. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh Kecamatan; dan
 - 2. kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Demak.
- (2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 56. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Kawasan strategis wilayah terdiri atas:

- a. kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di Daerah; dan
- b. kawasan strategis Daerah.

57. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas :

- a. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedungsepur);
- b. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak;
- 58. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 buruf b
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. dihapus
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Peta rencana kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
- 59. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi : pertumbuhan ekonomi
 - a. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar;
 - b. kawasan industri terpadu Sayung;
 - c. kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan
 - d. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang.
- (2) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - `a. Industri:
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. outlet pemasaran hasil komoditas Daerah; dan
 - d. permukiman perkotaan.
- (3) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis kawasan industri terpadu Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kawasan industri; dan
 - b. kawasan permukiman perkotaan.
- (4) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa

- pengembangan wisata bahari.
- (5) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan.
- 60. Pasal 72 Dihapus
- 61.Ketentuan Pasal 75 poin a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Arahan perwujudan sistem perkotaan meliputi :

- a. pengembangan PKN dilakukan melalui peningkatan keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan Kedungsepur
- b. pengembangan PKL dilakukan melalui :
 - 1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
 - 2. penyusunan peraturan zonasi;
 - 3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - 4. penyusunan panduan rancang kota; dan
 - pengendalian kegiatan komersial / perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
- c. pengembangan PPK dilakukan melalui:
 - 1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
 - 2. penyusunan peraturan zonasi;
 - 3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 - pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja.
- d. pengembangan PPL dilakukan melalui:
 - 1. penyusunan rencana detail tata ruang kota; dan
 - 2. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja.
- 62. Pasal 76 Dihapus
- 63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi meliputi:

- a. pengembangan sistem prasarana jaringan jalan dilakukan melalui:
 - 1. pengembangan dan peningkatan jalan arteri primer meliputi:
 - a) Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus Jati;
 - b) Jalan Lingkar Demak;
 - c) Jalan Bts. Kota Demak Trengguli;
 - d) Jalan Trengguli Bts. Kab. Demak/Kudus; dan
 - e) Jalan Bts. Kota Semarang Bts. Kota Demak.
 - 2. pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) meliputi:
 - a) Jalan Trengguli Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;

- b) Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara Margoyoso;
- 3. pengembangan dan peningkatan Jalan tol meliputi:
 - a) Jalan tol Semarang Demak;
 - b) Jalan tol Demak Tuban; dan
 - c) exit tol di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wonosalam.
- 4. pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:
 - a) Jalan Semarang Godong;
 - b) Jalan Demak Godong;
 - c) Jalan Semarang Demak Jepara (jalan pesisir); dan
 - d) Rencana jalan lingkar Mranggen.
- 1. peningkatan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi:
 - a) Jalan Demak Bonang Wedung;
 - b) Jalan Onggorawe Waru Mranggen;
 - c) Jalan Mranggen Kangkung Kebonbatur Banyumeneng/ Girikusumo;
 - d) Jalan Kangkung Sumberejo Margohayu Wonosekar Tlogorejo;
 - e) Jalan Karangawen Jragung;
 - f) Jalan Karangtengah Guntur Karangawen;
 - g) Jalan Pamongan Bulusari Banjardowo (Kota Semarang);
 - h) Jalan Onggorawe Suradadi;
 - i) Jalan Karangtengah Tambakbulusan;
 - j) Jalan Desa Sriwulan Bedono Timbulsluko Surodadi Tambakbulusan Morodemak Purworejo ;
 - k) Jalan Desa Berahan Wetan Babalan Kedungmutih Kedungkarang Tedunan;
 - l) Jalan Wedung Bungo Jetak Mijen;
 - m) Jalan Karanganyar Kedungwaru kidul Gempolsongo Mijen;
 - n) Jalan Bungo Mutih Kulon;
 - o) Jalan Karangnyar Sambung Sidomulyo Merak;
 - p) Jalan Gajah Dempet;
 - q) Jalan Dempet Sidomulyo;
 - r) peningkatan ruas jalan Dempet Kebonagung;
 - s) Jalan Karangtengah Pasar Wonosalam Doreng Megonten;
 - t) Jalan Demak Pasar Wonosalam;
 - u) Jalan Mranggen -- Batursari Pucanggading / TVRI Kebonbatur; dan
 - v) Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati
- 2. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan diseluruh wilayah Daerah
- b. Pengembangan angkutan umum dilakukan melalui:
 - studi kelayakan sistem angkutan;
 - 2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai; dan
 - 3. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal.

- c. pengembangan sarana transportasi dilakukan melalui:
 - 1. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di Kawasan Perkotaan Demak;
 - 2. pembangunan terminal penumpang tipe B berada di Kawasan Perkotaan Mranggen;
 - 3. peningkatan terminal penumpang tipe C meliputi:
 - a) Kawasan Perkotaan Mranggen;
 - b) Kawasan Perkotaan Wedung;
 - c) Ibukota Kecamatan Wonosalam;
 - d) Ibukota Kecamatan Gajah;
 - e) Ibukota Kecamatan Karanganyar;
 - f) Ibukota Kecamatan Mijen;
 - g) Ibukota Kecamatan Bonang;
 - h) Ibukota Kecamatan Sayung;
 - i) Ibukota Kecamatan Karangtengah;
 - j) Ibukota Kecamatan Guntur;
 - k) Ibukota Kecamatan Dempet;
 - l) Ibukota Kecamatan Karangawen; dan
 - m) Ibukota Kecamatan Kebonagung.
 - 1. pengembangan terminal barang direncanakan di Kecamatan Sayung.
- d. Pengembangan jaringan transportasi kereta api dilakukan melalui
 - 1. penetapan jalur perlintasan; dan
 - 2. pembangunan stasiun kereta api.

64. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi :

- a. pelestarian sumberdaya air dilakukan melalui:
 - 1. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air;
 - 2. pengawasan dan Penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam;
 - 3. pembangunan embung meliputi :
 - a) Kecamatan Karangawen;
 - b) Kecamatan Guntur;
 - c) Kecamatan Dempet;
 - d) Kecamatan Mijen;
 - e) Kecamatan Karanganyar;
 - f) Kecamatan Bonang; dan
 - g) Kecamatan Wedung.
- b. peningkatan pelayanan air minum dilakukan melalui:
 - pengembangan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum; dan

- perbaikan jaringan pipa air minum yang ada secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air minum.
- 65. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:

- a. programsistem jaringan persampahan meliputi:
 - 1. peningkatan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir;
 - 2. peningkatan dan pengembangan tempat penampungan sementara;
 - 3. program pengelolaan sampah 3R;
 - 4. penyediaan tempat sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;
 - 5. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan
 - 6. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.
- b. Program sistem penyediaan air minum meliputi:
 - 1. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah;
 - 2. pengembangan jaringan distribusi utama;
 - 3. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan; dan
 - 4. pengembangan dan peningkatan reservoir.
- c. Program sistem pengelolaan air limbah meliputi:
 - 1. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri
 - 2. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;
 - 3. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan; dan
 - 4. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
- d. program sistem jaringan drainase meliputi:
 - 1. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - 2. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
 - 3. normalisasi saluran sungai; dan
 - 4. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan.
- e. Perwujudansistem jaringan evakuasi bencana dilakukan melalui :
 - 1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - 2. pengembangan ruang evakuasi bencana.
- 66.Ketentuan Pasal 83 diubah dengan menambahkan huruf d, sehingga berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 83

Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat meliputi :

- a. arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui :
 - 1. penetapan batas sempadan pantai;

- 2. pengelolaan kawasan tanah timbul;
- 3. penetapan batas kawasan pasang surut; dan
- 4. penghijauan.
- b. arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui :
 - 1. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
 - 3. penertiban bangunan di atas sempadan sungai; dan
 - 4. penghijauan.
- c. arahan perlindungan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui :
 - 1. penetapan sempadan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan irigasi;
 - 3. penertiban bangunan di atas sempadan irigasi; dan
 - 4. penghijauan.
- d. perwujudan ruang terbuka hijau dilakukan melalui :
 - 1. pembangunan, pengembangan dan penataan alun-alun, lapangan, taman dan hutan kota;
 - 2. pengadaan tanah bagi pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau publik;
 - 3. pengembangan jalur hijau sepanjang bahu jalan;
 - 4. pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan
- .,5. penataan makam sebagai ruang terbuka hijau.
- 67. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Arahan perlindungan konservasi berupa arahan perlindungan kawasan ekosistem mangrove dilakukan melalui:

- a. pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove; dan
- b. penghijauan.
- c. arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui:
 - 1. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
 - 2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.
- 68.Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 serta disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 84 A sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84 A

Arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui:

- a. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
- b. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.
- 69.Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 serta disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 85 A dan Pasal 85 B, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

Arahan perlindungan terhadap kawasan lindung geologi meliputi:

c. pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah;

- d. membatasi eksploitasi air tanah dalam secara berlebihan; dan
- e. kerjasama pengelolaan CAT dengan Pemerintah Daerah lain.

Pasal 85B

Arahan perlindungan terhadap kawasan lindung lainnya meliputi:

- a. pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan plasma nutfah; dan
- b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- 70.Diantara Pasal 87 dan dan Pasal 88 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 87 A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 A

Arahan perwujudan kawasan perikanan dilakukan melalui:

- a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi penetapan zona penangkapan ikan;
- b. peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI;
- c. pengembangan produksi perikanan tambak;
- d. peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar; dan
- e. pengembangan umkm pengolah hasil perikanan.
- 71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Arahan perwujudan kawasan pertambangan dan energi dilakukan melalui:

- a. identifikasi potensi tambang;
- b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi; dan
- c. pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah.
- 72. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui :

- a. pemantapan kawasan/lokasi pertahanan dan keamanan pendukung perwujudan kesatuan ruang Daerah;
- b. identifikasi kepemilikan aset TNI dan POLRI;
- c. menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat;
- d. peningkatan kantor Kodim 0716;
- e. peningkatan kantor Koramil dan Polsek berada di seluruh wilayah Kabupaten Demak; dan
- f. peningkatan Pos Angkatan Laut Demak yang berada di Kompleks Pelabuhan Morodemak.
- 73.Ketentuan Pasal 95 ditambahkan huruf b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi meliputi :

a. perwujudan kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan - Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar dilakukan melalui:

- 1. pengaturan pengembangan pengendalaian pemanfaatan ruang;
- 2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;
- pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan; dan
- 4. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri.
- b. perwujudan kawasan industri terpadu Sayung dilakukan melalui:
 - 1. pengembangan kawasan industri berserta fasilitasnya; dan
 - 2. pengembangan kawasan permukiman perkotaan beserta fasilitasnya.
- c. perwujudankawasan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung dilakukan melalui:
 - 1. pembangunan sarana tambat perahu/ kapal;
 - 2. pengembangan kegiatan wisata bahari; dan
 - 3. pembangunan sarana pendukung wisata utama.
- a. perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang dilakukan melalui:
 - 1. peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
 - 2. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi;
 - 3. pengembangan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan
 - 4. pengembangan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.

74. Pasal 96 DIHAPUS

75. Ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. sistem pengelolaan lingkungan; dan
 - g. sistem prasarana lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- 76. Ketentuan Pasal 100 ayat (3) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK);
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan; diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala Nasional sesuai rencana Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kecamatan/beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya, dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kegiatan Kecamatan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan; diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya, dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kawasan perdesaan.
- 77. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan;
 - b. peraturan zonasi pada siste jaringan kereta api; dan
 - c. peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer meliputi:
 - 1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 - 2. diperbolehkan bersyarat pemasangan iklan dan media informasi pada daerah milik jalan;
 - 3. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan
 - 4. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan tol meliputi:
 - dilarang melakukan kegiatan yang dapat menganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol;
 - 2. diperbolehkan bersyarat pemberdayaan di bidang jalan tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. diwajibkan membuat bangunan pengaman pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten berupa jalan kolektor primer meliputi:
 - 1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 - 2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan
 - dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan desa meliputi:
 - 1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 - 2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau.
- e. ketentuan um'um peraturan zonasi untuk jalan khusus meliputi:
 - diperbolehkan bersyarat pembangunan dan pengembangan jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
 - 2. diperbolehkan bersyarat jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
 - 3. diperbolehkan jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizmkan digunakan untuk umum.
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal penumpang meliputi:
 - diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata;
 - 2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;
 - 3. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan
 - 4. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi

terminal sebagai fasilitas umum.

- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal barang meliputi:
 - diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa;
 - 2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;
 - 3. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan
 - 4. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.
- (3) Peraturan zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
 - b. dilarang membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah;
 - c. dilarang melakukan pemanfaatan lahar, yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - d. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (4) Peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
 - c. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.

78. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c meliputi:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bersyarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa pipa minyak dan gas bumi;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri, permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertambangan dan pariwisata:
 - c. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan budi daya;
 - d. dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran; dan
 - e. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;
- b. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung ketenagalistrikan;
- c. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;
- d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik; dan
- e. dilarang kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi dan distribusi listrik.

79. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf f meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem penyediaan air minum;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pengelolaan air limbah;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pengelolaan limbah B3;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem drainase; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga;
 - c. diperbolehkan bersyarat penyimpanan dan/atau tempat pengelahan limbah B3 di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga;
 - d. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan tempat pemrosesan akhir; dan
 - e. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan tempat pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan mengembangkan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan fasilitas sistem penyediaan air minum di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;
 - c. dilarang mendirikan bangunan di atas sistem penyediaan air minum kecuali untuk pengelolaan air minum; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah diatas sistem pengelolaan air limbah;
- b. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
- c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem pengelolaan air limbah; dan
- d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem pengelolaan air limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkankan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. diperbolehkankan bersyarat melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (B3);
 - c. dilarang melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa proses pengelolaan yang benar.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan drainase diatas sistem drainase;
 - b. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang sistem drainase;
 - c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem drainase; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem drainase.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:
 - diperbolehkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana;
 - dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi dilarang.
 - b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:
 - diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi;
 - 2. dilarang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat menganggu fungsi ruang evakuasi.

80. Pasal 106 Dihapus

81. Ketentuan Pasal 107 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ekosistem mangrove;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zona peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang mampu meningkatkan resapan air kedalam tanah;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya pertanian, hutan rakyat, dan perkebunan;
- d. diperbolehkan terbatas bangunan yang dilengkapi dengan sarana peresapan air;
 - e. diperbolehkan terbatas untuk wisata; dan
 - f. dilarang kegiatan pertambangan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi, intrusi air laut dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 - 2. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;
 - 3. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, bangunan pengendali air, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai:
 - 4. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman yang sudah ada yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah; dan
 - 5. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, dan kelestarian fungsi kawasan.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan memperhatikan ketentuan:
 - diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;
 - 2. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - 3. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;
 - diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - 5. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang

- fungsi pengelolaan sungai, pemanfaatan air, wisata alam, dermaga, fasilitas energi dan fungsi lainnya yang membutuhkan lokasi ditepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6. diperbolehkan terbatas permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan; dan
- dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, dan kelestarian fungsi sungai.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi disusun dengan memperhatikan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air irigasi;
 - 3. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
 - 4. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepan, dan pipa air minum;
 - 5. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan irigasi; dan
 - 6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air irigasi.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan embung disusun dengan memperhatikan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan penghijauan dan pelestarian sumber mata air;
 - 2. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan menunjang budi daya perikanan, pemanfaatan air bersih dan irigasi pengairan;
 - 3. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi rekreasi dan wisata air dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas badan air embung/waduk; dan
 - 4. dilarang mendirikan bangunan rumah dan permukiman baru.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau disusun dengan ketentuan:
 - diperbolehkan pembangunan lapangan, lapangan, taman, hutan kota dan sejenisnya yang dapat berfungsi sebagai kawasan evakuasi bencana;
 - diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan rekreasi, olah raga, perayaan hari besar, pentas seni, perdagangan kecil/mikro dan jasa secara terbatas pada sebagian lokasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan
 - 3. dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada ruang terbuka hijau.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. diperbolehkan melakukan penanaman bibit bakau;
 - b. dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;
 - c. dilarang penebangan liar hutan bakau dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau; dan
 - d. dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak

wilayah pesisir.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata;
 - b. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata;
 - c. diperbolehkan terbatas pembangunan permukiman diluar zona inti dan zona penyangga: dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya.
- (6) Peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir disusun dengan memperhatikan:
 - diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengendalian banjir dan menambah ruang terbuka hijau;
 - 2. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum/fasilitas sosial, dan bangunan penting lainnya; dan
 - 4. dilarang melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi disusun dengan ketentuan:
 - diperbolehkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;
 - 2. diperbolehkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
 - diperbolehkan terbatas untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang pasang dan abrasi;
 - 4. diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan wisata pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan serta bangunan umum untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - 5. diperbolehkan terbatas pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan; dan
 - 6. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan longsor disusun dengan ketentuan:
 - diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana longsor;
 - diperbolehkan pemasangan informasi lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - 3. diperbolehkan mendirikan bangunan penahan longsor dan prasarana untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

3

- diperbolehkan mengembangkan kegiatan budi daya hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, dan perkebunan dengan penanaman vegetasi yang tepat dan dibatasi pada jenis tanaman yang dapat mencegah longsor;
- diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata alam, industri, permukiman, dan pembangunan prasarana utama dengan konstruksi bangunan tahan longsor, rekayasa struktural untuk menjaga kestabilan lereng; dan
- dilarang mendirikan bangunan pada kelerengan lebih dari 40% (empat puluh perseratus), tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan kekeringan disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penghijauan;
 - diperbolehkan mendirikan bangunan instalasi air dan bak penampungan air;
 - 3. diperbolehkan membuat embung/waduk penampung air hujan untuk menjaga stabilitas neraca air;
 - 4. diperbolehkan terbatas mengembangkan kegiatan budi daya pertanian dan perkebunan;
 - 5. diperbolehkan terbatas pemanfaatan air tanah di kawasan rawan bencana kekeringan; dan
 - dilarang melakukan pengambilan air tanah dan air permukaan secara berlebihan, yang menyebabkan kekurangan air baku.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan angin topan disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan kegiatan penghijauan pada kawasan atas arah angin untuk meredam gaya angin puting beliung;
 - diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan yang tidak sesuai standar bangunan dan kelengkapan elemen bangunan yang telah memperhitungkan beban angin; dan
 - 3. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah angin tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang mendorong meresapkan air ke dalam tanah;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk wisata alam;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 - e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gberupa plasma nutfah meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; dan
 - b. dilarang kegiatan yang mengakibatkan terganggu dan musnahnya plasma nusfah.

82. Ketentuan Pasal 108 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas disusun dengan ketentuan;
 - 1. diperbolehkan pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan pengelolaan hutan bersama masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
 - 5. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap disusun dengan ketentuan;
 - 1. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan:
 - 2. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
 - 3. diperbolehkan secara terbatas pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - 4. dilarang pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan; dan
 - 5. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umura peraturan zonasi pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan tanaman pangan disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertanian;
 - 2. diperbolehkan bersyarat mengalihfungsikan lahan pertanian pangan

- berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- diperbolehkan bersyarat usaha peternakan dan perikanan skala kecil dan menengah;
- dilarang tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah; dan
- 5. dilarang kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak kualitas tanah.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hortikultura disusun disusun dengan ketentuan:
 - diperbolehkan pengembangan budi daya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hutan rakyat;
 - diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
 - diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam;
 - 4. diperbolehkan bersyarat untuk rumah tunggal dan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian; dan
 - 5. dilarang kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan.
 - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri perikanan;
 - c. diperbolehkan terbatas penyelenggaraan bangunan komersial dan/atau pariwisata perikanan; dan
 - d. dilarang segala melakukan kegiatan budi daya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pembangkit energi;
 - c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung industri;
 - d. diperbolehkan bagi industri kecil dan industri menengah berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan peruntukan industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - e. diperbolehkan bersyarat mengembangkan perumahan dan fasilitas pendukungnya;
 - f. diperbolehkar: bersyarat pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri;
 - g. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan industri untuk memanfaatkan air permukaan; dan

- h. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
 - diperbolehkan bersyarat pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan
 - b. diperbolehkan terbatas pengembangan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - c. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata;
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama dan
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. diperbolehkan pembangunan pariwisata;
 - d. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengen mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - e. dilarang kegiatan industri menengah dan besar.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. diperbolehkan pembangunan pariwisata;
 - d. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - e. diperbolehkan pembangunan bersyarat fasilitas penampung dan usaha
 - f. dilarang kegiatan industri menengah dan besar.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bersyarat pembangunan kawasan pertahanan keamanan di semua kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk disekitarnya; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.
- 83. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Ketentuan yang belum termuat dalam ketentuan umum peraturan zonasi akan ditentukan dengan mekanisme pembahasan di TKPRD.

84. Judul bab IX diubah sebagai berikut:

BAB IX

KELEMBAGAAN

85. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.
- 86. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah disusun Rencana Rinci Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan program untuk kepentingan umum dapat dilakukan di kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pada lokasi yang belum diatur RTRW Dacrah akibat permasalahan presisi batas Daerah, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya mempertimbangkan;
 - kondisi eksisting; dan
 - keserasian dengan rencana tata ruang dengan kawasan disekitarnya;
 - 3. dampak yang ditimbulkan.
 - c. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan presisinya dilakukan melalui kajian dan/atau koordinasi dengan stakeholder terkait.
 - d. pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.
- (3) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) berdasarkan kajian dan/ atau rekomendasi TKPRD atau organisasi perangkat daerah yang berwenang.
- (4) Ketentuan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan Bupati.
- (5) RTRW Daerah dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal

2019

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak pada tanggal

2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan, akibat adanya perkembangan

lingkungan strategis dan dinamika internal.

Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspekaspek sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya.

Faktor-faktor tersebut di atas akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik dikarenakan adanya kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Revisi RTRW Kabupaten Demak telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena secara eksternal, telah terjadi perubahan kebijakan nasional dan provinsi yang tertuang di dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan.

Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Kabupaten Demak dapat berfungsi sebagai:

- a. matra keruangan dari pembangunan Kabupaten;
- b. dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang Kabupaten;
- c. alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
- d. alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan kawasan strategis Kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

😘 Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 1A

Cukup jelas

Pasal 1B

Cukup jelas

Pasal 1C

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 4

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1)

Deliniasi PKN Kedungsepur ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pengembangan kawasan perkotaan Sayung dilakukan secara terpadu dengan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Deliniasi PPL dapat meliputi desa-desa disekitar desa inti.

Ayat (6)

Penyusunan rencana detail tata ruang di kawasan perkotaan PKL dan PPK ditentukan berdasarkan prioritas kebutuhannya.

Penetapan deliniasi kawasan perkotaan PKL dan PPK yang disusun rencana detailnya dilakukan pada saat dilakukan penyusunan rencana detail tata ruang.

```
Angka 8
```

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 11

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 12

Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jalan Nasional adalah adalah jalan yang kewenangan penyelenggraannya oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Jalan Provinsi adalah adalah jalan yang kewenangan penyelenggraannya oleh Pemerintah Provinsi.

Ayat (4)

Jalan Kabupaten adalah adalah jalan yang kewenangan penyelenggraannya oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Jalan Desa adalah adalah jalan yang kewenangan penyelenggraannya oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Ayat (7)

77

Huruf a

Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Huruf b

Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

Huruf c

Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Angka 13

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana pengembangan bus perkotaan dan fasilitas pendukungnya Kedungsepur dilakukan berdasarkan rencana Pemerintah Pusat dan rencana Pemerintah Provinsi, dan/atau kerja sama daerah dalam wilayah Kedungsepur

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 16

Ayat (1)

Pengembangan jalur dan stasiun kereta api merupakan bagian dari reaktivasi kereta api Semarang – Rembang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengembangan jalur kereta api khusus berdasarkan hasil kajian.

Ayat (5)

Dalam hal revitalisasi stasiun, jika dalam kajian revitalisasi, stasiun yang ada tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan pemindahan lokasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi kereta api.

Angka 15

Pasal 16 A

Cukup Jelas

Pasal 16 B

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf b

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (2)

Terminal khusus dapat diselenggarakan Pemerintah atau swasta

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 16

Pasal 17

Cukup Jelas

Angka 17

Pasal 18

Cukup Jelas

Angka 18

Pasal 19

Cukup Jelas *

Angka 19

Pasal 20

Cukup Jelas

Angka 20

Pasal 21

Cukup Jelas

Angka 21

Pasal 22

Cukup Jelas

Angka 22

Pasal 23

Cukup Jelas

Angka 23

```
Pasal 24
```

Cukup Jelas

Angka 24

Pasal 25

Cukup Jelas

Angka 25

Pasal 26

Cukup Jelas

Angka 26

Pasal 27

Cukup Jelas

Angka 27

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sanitary Landfill adalah metode pemusnahan sampah dengan cara menimbun dan memadatkan sampah kedalam lubang cekung yang berada di tanah

Ayat (3)

Sistem penanganan sampah di Kabupaten Demak dilakukan dengan kosep 3R. Konsep 3R adalah penanganan sampah dengan cara Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (mendaur ulang) sampah mulai dari sumbernya.

- a. Reduce adalah upaya mengurangi volume sampah.
- b. Reuse adalah upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat.
- Recycle adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 29

Cukup Jelas

```
Angka 29
```

Pasal 30

Cukup Jelas

Angka 30

Pasal 33 A

Cukup Jelas

Angka 31

Pasal 36

Peruntukan didasarkan atas dominasi fungsi atama yang ada dalam kawasan tersebut

Angka 32

Pasal 37

Cukup Jelas

Angka 33

Pasal 38

Kawasan respan air masih dapat digunakan untuk kegiatan budidaya, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan optimal air masuk kedalam tanah.

Angka 34

Pasal 39

Cukup Jelas

Angka 35

Pasal 40

Cukup Jelas

Angka 36

Pasal 41

Cukup Jelas

Angka 35

Pasal 43 A

Cukup Jelas

Angka 38

Pasal 44

Cukup Jelas 🕝

Angka 39

```
Cukup Jelas
      Ayat (2)
         Cukup Jelas
    · Ayat (3)
         Cukup Jelas
  Angka 40
    Pasal 46
       Huruf a
          Cukup Jelas
       Huruf b
          Cukup Jelas
      Huruf c
          Bupati menetapkan kawasan Cagar Budaya berdasarkan hasil kajian
          dan/atau rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
 Angka 41
   Pasal 52A
      Cukup Jelas
 Angka 42
   Pasal 53
      Cukup Jelas
Angka 43
   Pasal 54
      Cukup Jelas
Angka 44
   Pasal 55
     Cukup Jelas
Angka 45
  Pasal 56
     Cukup Jelas
Angka 46
  Pasal 57
     Cukup Jelas 💃
```

Pasal 47

Ayat (1)

Angka 47

Pasal 58

Cukup Jelas

Angka 48

Pasal 59

Cukup Jelas

Angka 49

Pasal 60

Cukup Jelas

Angka 50

Pasal 61

Cukup Jelas

Angka 51

Cukup Jelas

Angka 52

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Konsep kawasan industri terpadu ini pada prinsipnya merupakan pengembangan pusat ekonomi baru. Bentuk pengembangan pusat ekonomi baru berupa kawasan industri dan kawasan permukiman beserta fasilitasnya, atau berupa kawasan perkotaan baru yang basis ekonominya industri

Ayat (3)

Pembangunan sabuk hijau bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran udara dan suara.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 53

Pasal 65

Menurut PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Indusk Pariwisata Nasional, Kabupaten Depak termasuk dalam Destinasi Pariwisata (DPN) Semarang-karimunjawa dan sekitarnya dan merupakan bagian dari Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Demak-Kudus dan sekitarnya dengan menitikberatkan pada wisata religi di Kawasan Perkotaan dan Wisata Bahari.

Angka 54

Pasal 66 Cukup Jelas

Angka 55
Pasal 67
Cukup Jelas

Angka 56 Pasal 68 Cukup Jelas [°]

Angka 57 Pasal 69 Cukup Jelas

Angka 58
Pasal 70
Cukup Jelas

Angka 59 Pasal 71 Cukup Jelas

Angka 60 Cukup Jelas

Angka 61 Pasal 75 Cukup Jelas

Angka 62 Cukup Jelas

Angka 63 Pasal 77 Cukup Jelas Angka 64

Pasal 80

Cukup Jelas

Angka 65

Pasal 81

Cukup Jelas

Angka бб

Pasal 83

Cukup Jelas

Angka 67

Pasal 84

Cukup Jelas

Angka 68

Pasal 84 A

Cukup Jelas

Angka 69

Pasal 85 A

Cukup Jelas

Pasal 85 B

Cukup Jelas

Angka 70

Pasal 87 A

Cukup Jelas

Angka 71

Pasal 88

Cukup Jelas

Angka 72

Pasal 94

Cukup Jelas

Angka 73

Pasal 95

Cukup Jelas

Angka 74

Cukup Jelas

Angka 75

Pasal 99

Cukup Jelas

Angka 76

Pasal 100

Cukup Jelas

Angka 77

Pasal 101

Cukup Jelas

Angka 78

Pasal 102

Cukup Jelas

Angka 79

Pasal 105

Cukup Jelas

Angka 80

Cukup jelas

Angka 81

Pasal 107

Cukup Jelas

Angka 82

Pasal 108

Cukup Jelas

Angka 83

Pasal 110

Cukup Jelas

Angka 84

Cukup jelas

Angka 85

Pasal 129

Cukup jelas

Angka 86

Ayat (1)

Dalam rangka mendukung kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebelum disusun Rencana Rinci Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten ditetapan, Bupati dapat Peraturan Bupati tentang ketentuan operasional pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Ayat (2)

Huruf a

Jenis kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan

Huruf b

Permasalahan presisi batas Daerah berupa kesalahan penggambaran batas Daerah dalam peta.

Huruf c

Lokasi masih bersifat Indikatif adalah lokasi yang belum presisi, karena masih membutuhkan kajian lebih rinci dan/atau teknis.

Huruf d

Fasilitas pendukung program sistem jaringan prasarana dapat menyatu atau terpisah dengan lokasi jaringan prasarana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam rangka mendukung kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, Bupati dapat membuat Peraturan Bupati tentang ketentuan operasional pemanfaatan ruang

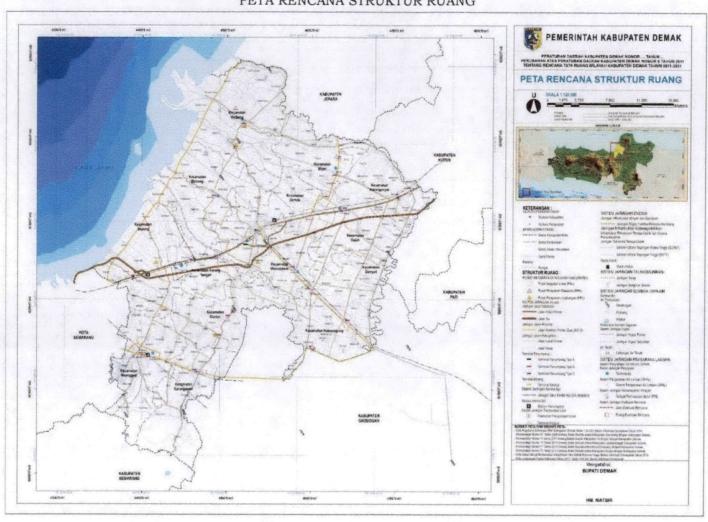
Ayat (6)

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan paraturan perundang-undangan, perubahan batas negara yang ditetapkan undang-undang, dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Lampiran II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA POLA RUANG

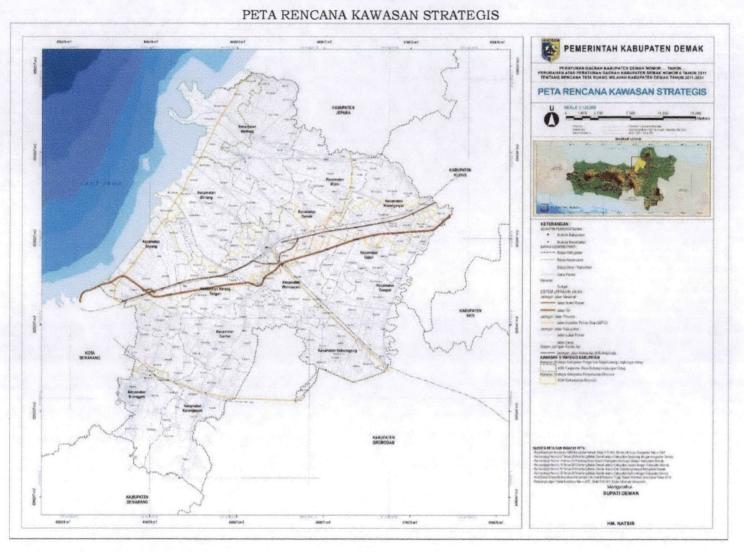


Lampiran III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031



Lampiran III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

•				KAI	SUPA	XI.E.V	DE	MAK TA	HUN 2011-20	31
		INDIKASI PROGRAM REVISI RTRV	V KABUF	PATEN	DEM	IAK 2	2011	-2031		
				None of	1.5		1.78			(4
A	LEGALISASI PERDA RTRW									
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG		 			4	╂-╂-	 		Bagian Hukum
1	Perwujudan Pusat Kegiatan			+++	++			ļ		
	a. Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program :			+++	+	+	-	 		
	Program pengembangan Pusat Kegiatan Nasional			+++	+	+	-	<u> </u>	 	
	- Peningkatan paduserasi	Kawasan Perkotaan Kedungsepur							APBN APBD	- Kementerian ATR/BPN - Dinas PUSDATARU Provinsi
	- Peningkatan Kerjasama pembangunan	3-07-1		• . •		<u>.</u>			Provinsi	Jawa Tengah
	2. Program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal					7		·•		
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.	 Kawasan Perkotaan Demak Kawasan Perkotaan 							APBD	- Baperlitangda - Dinas PUPR Kabupaten
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.	Mranggen Kawasan Perkotaan Wedung							APBD	Demak Dinas PUPR
	Program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	·	1-1						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.	- IKK Gajah - IKK Dempet - IKK Guntur - IKK Sayung		Stefanor			an en	til en stjere plyster selvener	APBD	- Baperlitangsa - Dinas PUPR

	(1,COST PROGRAM (TANAS)		70					A DEPARTMENT AND A SECOND
								·
		- IKK Karangtengah						
		- IKK Bonang						
		- IKK Dempet	1					
		- IKK Gájah	1					
		- IKK Karanganyar	1	100	6			*-
		- IKK Mijen - IKK Kebonagung	}					
	b. Perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui program:	THE REDUINGUING		-				
	penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perdesaaan;	Seluruh Kabupaten					APBD	- Baperlitangda
	pengembangan pusat pelayanan perdesaan						APDU	- Dinas PUPR
	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi					:		
1	Sistem Jaringan Transportasi Jalan			╂╼╂╼╂	┞╸ ╏╸╏╸╏			
	a. Program pengembangan sistem prasarana jalan			+++				
\perp	1. Peningkatan ruas jalan Nasional							·
-						6	APBN	Kementerian PUPR
1	2. Peningkatan Jalan Provinsi						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi
4	3. Peningkatan Jalan Kabupaten						ADDD	Jawa Tengah
	4. Pengembangan dan peningkatan jalan						APBD	Dinas PUPR
+	lingkungan diseluruh wilayah Kabupaten						APBD	Dinas PUPR
	Pengembangan ruang tebuka hijau jalur dan pulau jalan			·			ADDD	Dinas PUPR
1	b. Pengembangan prasarana angkutan umum:						APBD	Dinas Lingkungan Hidup
1				Same of the last	and the second			
\perp	1. Pembangunan Terminal Tipe A	Kawasan Perkotaan Demak			•		APBN	Kementerian Perhubungan
ı	2. Pembangunan Terminal Tipe B	Kawasan Perkotaan			. ``			

					per a service de la constante d
元					
KO K					
		Mranggen			1
		- Kawasan Perkotaan Mranggen;			
		- Kawasan Perkotaan Wedung;			
		- Ibukota Kecamatan Wonosalam;	"		
- 1	ø:	- Ibukota Kecamatan Gajah;			
		- Ibukota Kecamatan Karanganyar;			
- 1		- Ibukota Kecamatan Mijen;			
- 1	_	- Ibukota Kecamatan			1
- 1	Peningkatan terminal tipe C;	Bonang;			j .
		- Ibukota Kecamatan		APBD	D
- 1		Sayung;		*** DD .	Dinas Perhubungan
- 1		- Ibukota Kecamatan			1.
- 1		Karangtengah;			
ı	•	- Ibukota Kecamatan Guntur;			1
	·	- Ibukota Kecamatan		*A	
- 1	•	Dempet;			
		- Ibukota Kecamatan			
- 1		Karangawen;			1
		- Ibukota Kecamatan			1
1	4. Pengembangan terminal angkutan barang	Kebonagung			
e.	Pengembangan second dangkutan barang	- Kecamatan Sayung			
+	Pengembangan sarana angkutan umum			APBD	Dinas Perhubungan
+	1. Studi kelayakan sistem angkutan				
1	2. Penyediaan pemberhentian untuk			APBD	Dinas Perhubungan
	angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai				
	Penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan			APBD	Dinas Perhubungan
	rangoi pelayanan			APBD	Dinas Perhubungan

					LIERLANSTANSSERVICACIÓN DE
			20 (43 E31)		
	terminal.	100			
2.2	Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api				
	1. Penetapan jalur perlintasan kereta api	Jakarta – Surabaya; - jalur Utara			
		menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya; pengembangan kereta api regional Semarang – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jaiirogo – Bojonegoro; dan pengembangan jaringan kereta api perkotaan Kedungsepur. Jalur Khusus		APBN Swasta	- Kementerian Perhubungan - Swasta
	2. pembangunan stasiun kereta api.	- Kecamatan Demak; - Kecamatan Mranggen;		AFBN	
3.3	Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	- Kecamatan Sayung.		ACDIV	- Kementerian Perhubungan
	- Pembangunan dan peningkatan dermaga	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Bonang		APBD	- Dinas PUPR - Dinas Perhubungan - Dinas pariwisata
4	Jaringan transportasi laut			:	- Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kecamatan Bonang		APBD	- Dinas PUPR - Dinas Perhubungan
ᆚ.	- Peningkatan Pelabuhan Perikanan	- Kecamatan Sayung			- Dinas Kelautan dan Perikanan
				APBD	- Dinas PUPR

				4519/4114 27/4/	THE PARTY OF THE WAY
	The Court Francis				:
m	Perwujudan Sistem Energi	- Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Bonang - Kecamatan Wedung			- Dinas Kelautan dan Perikanan
3.1	Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi				
	- Peningkatan Jaringan pipa BBM Cepu - Rembang- Pengapon Semarang	- Kecamatan Sayung; - Kecamatan Karangtengah; - Kecamatan Gajah; - Kecamatan Karanganyar		APBN : Swata	- Kementerian ESDM
	- Peningkatan jaringan pipa gas regional Kepodang- Rembang - Pati - Jepara - Semarang	- Kecamatan Karanganyar - Kecamatan Sayung; - Kecamatan Karangtengah; - Kecamatan Gajah; - Kecamatan Karanganyar.		APBN Swata	- Kementerian ESDM - Swasta
2	- Peningkatan jaringan pipa gas regional Blora - Grobogan - Demak - Semarang Jaringan intrastruktur ketenagalistrikan	- Kecamatan Mranggen; - Kecamatan Karangawen; - Kecamatan Kebonagung.		APBN Swata	- Kementerian ESDM - Swasta
	 Peningkatan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi 	- Kecamatan Mranggen; dan - Kecamatan Karangawen.		APBN	- Kementerian ESDM
	Peningkatan saluran udara tegangan tinggi Peningkatan saluran udara tegangan	 Kecamatan Sayung; Kecamatan Karangtengah; Kecamatan Demak; Kecamatan Wonosalam; Kecamatan Gajah; Kecamatan Bonang; Kecamatan Wedung; Kecamatan Karanganyar; dan Kecamatan Mijen. 		APBN	- PLN - Kementerian ESDM - PLN
\perp	menengah dan tegangan rendah	Seluruh Kabupaten		APBN	- Kementerian ESDM

								en (1907) de la companya de la compa
	Company of the Compan		4.504	ine.	· Paranter			
<u> </u>	- Peningkatan gardu induk							
	sumgarian gardu induk	- Kecamatan Sayung;	 					- PLN
		- Kecamatan Karangtengah:	1					
	·	- Kecamatan Demak:						
		- Kecamatan Mranggen;					APBN	- Kementerian ESDM
	- pembangunan prasarana listrik yang	- Kecamatan Dempet	~					- PLN
	bersumber dari energi alternatif							
		Seluruh Kabupaten	1				APBN	- Kementerian ESDM
īV	- Pengaturan pembangunan SPBU dan SPBE	Seluruh Kabupaten					APBD	- Dinas PUPR
	Perwujudan Sistem Telekomunikasi				 - - - 		APBD	Dinas PUPR
	 peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap kecamatan 							
	Notation and the second and the seco	Seluruh Kabupaten	- 1					Y.
		imbupaten					APBN	- Kementerian Kominfo - PT. Telkom
	- pembangunan instalasi baru dan					W W.	Swasta	- Swasta
	pengoperasian instalasi penyaluran	Seluruh Kabupaten	į					
		- Statum Kabupaten					APBN	- Kementerian Kominfo
	- peningkatan sistem hubungan telepon		<u> </u>				Swasta	A 1. ICIKOIII
	otomatis, termasuk telepon umum	Seluruh Kabupaten	ĺ					- Swasta
		Sourch Rabupaten	ļ				APBN	- Kementerian Kominfo
	- pengembangan menara telekemunikasi di						Swasta	- PT. Telkom
	setiap kecamatan	Solvent to						- Swasta
_		Seluruh Kabupaten					APBN	- Kementerian Kominfo
\perp	Perwujudan Sistem Sumber Daya Air						Swasta	- PT. Telkom
	- peningkatan pengalalan pan					77		- Swasta
T	- normalisasi sungai dan saluran irigasi;	DAS Jratun Seluna		 	╁╌╁╌┼	+	 	
-	dan saluran rigasi;							
		Seluruh sungai dan 15 D.I					APBN	- Kementerian PUPR
Ĺ	<u>· </u>	Sungar dan 15 D.I		રવે અહિ	Georgia And Capitalists		APBD Prov	- Dinas PUSDATARU Prov.
Γ	- pembangunan dan perbaikan operasional		1 1			•	APBD	Jawa tengah
	Perbantan operasional	15 D.I						- Dinas PUPR

			(2)	instansfere ars the
	prasarana jaringan irigasi	\$ P\$ P\$ (1)		
	- pembangunan embung;	Vocani de V	APBD Prov APBD	- Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUPR
·	- pelestarian sumber mata air dan	- Kecamatan Karangawen; - Kecamatan Guntur; - Kecamatan Dempet; - Kecamatan Mijen; - Kecamatan Karanganyar; - Kecamatan Bonang; - Kecamatan Wedung	APBN APBD Prov APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUPR
	konservasi daerah resapan air pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam.	The state of the s	APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
		 Kecamatan Karangtengah; Kecamatan Demak; Kecamatan Bonang; dan Kecamatan Wedung 	APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
1	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya			·
	a. Sistem Persampal:an			
	- peningkatan dan pengembangan TPA	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUPR
	 peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST 	Seluruh Kabupaten		- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas PUPR
	- program pengelolaan sampah 3R;	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas Lingkungan Hidup
	- penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan	Seluruh Kawasan Perkotaan	APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
†	- studi kelayakan manajemen pengelolaan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
		Seluruh Kabupaten	ו עמינה	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup

					A TOTAL STATE OF THE STATE OF T	ills or dissipation for the same
9				Name of the second seco		
	 usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik 					
	b. Sistem Jaringan Air Bersih				APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
	 penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR); 	Seiuruh Kabupaten	+			221.gxungan ridup
	- pengembangan jaringan distribusi utama;				APBD	- Dinas PUPR - PDAM
 .	- penambahan kapasitas dan revitalisasi	Seluruh Kabupaten			APBD	- Dinas PUPR
	Jangar perdesaan diseluruh kecamatan.	Seluruh Kabupaten			APBD	- PDAM - Dinas PUPR
	- Pembangunan reservoir	Seluruh Kawasan Perkotaan			APBD	- PDAM
-	c. Sistem Jaringan air Limbah		 			- Dinas PUPR - PDAM
	- pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri	Kecamatan Sayung;	 			
		Kecamatan Karangtengah; Kecamatan Mijen; Kecamatan Mranggen; dan			APBD	- Dinas PUPR
+	- pemantapan instalasi pengolahan limbah -	Kecamatan Karangawen Kawasan Perkotaan			Swasta	- Dinas Lingkungan Hidup - Swasta
	tinja;	Demak;				
İ		Kawasan Perkotaan Mranggen;				
		Kawasan Perkotaan Wedung;				
	· -	Ibukota Kecamatan Wonosalam;			APBD	- Dinas PUPR
	-	Ibukota Kecamatan Gajah;		production and the second second second second		- Dinas Lingkungan Hidup
L	-	Ibukota Kecamatan Karanganyar;				

				BNSTANRIOTE JAILS (1757)
(a (e	- Ibukota Kecamatan Mijen; - Ibukota Kecamatan Bonang; - Ibukota Kecamatan Sayung; - Ibukota Kecamatan Karangtengah; - Ibukota Kecamatan Guntur; - Ibukota Kecamatan Dempet; - Ibukota Kecamatan Lempet; - Ibukota Kecamatan Karangawen; dan - Ibukota Kecamatan			
- pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan;	Kebonagung Seluruh Kawasan IKK		APBN APBD Provinsi	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah
	Seluruh Kabupaten		APBD APBN APBD Provinsi	- Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah
d. Sistem Jaringan Drainase			APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;	Seluruh Kabupaten			
- normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;	eluruh Kabupaten	_	APBD	Dinas PUPR
- normalisasi saluran sungai; dan	-		APBD	Dinas PUPR
s	eluruh Kabupaten		APBN APBD Provinsi	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov.

								e strong	
	esta (ilia par Eugipeano martis de Cario)								Taken Service Telescopies
			Pob			426	*		
	Francisco Company								
									l l
	- memantapkan rencana pengembangan dan					ns yours small	en character respectively.	APBD	- Dinas PUPR
	pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan	Seluruh Kawasan Perkotaan		·					Dinas PUPR
VI	e. Sistem Evakuasi Bencana		1					APBD	
	- pengembangan jalur evakuasi bencana	- Kecamatan Mranggen;	 -	i lea					
		- Kecamatan Guntur;							
		- Kecamatan Sayung;	1						ŀ
		- Kecamatan Karangtengah;	1						
		- Kecamatan Bonang;	ĺ						.:
		- Kecamatan Wedung;	ſ					4.55	- Dinas PUPR
	İ	- Kecamatan Demak;	I					APBD	- BPBD
	!	- Kecamatan Wonosalam;	ı			•• .			5.55
		- Kecamatan Karangawen:	- [
		dan							455
	nengembangan europa	- Kecamatan Karanganyar	- 1 - 1					- i	
	- pengembangan ruang evakuasi bencana								
	DEDIMI WID AND DOC							APBD	- Dinas PUPR
	PERWUJUDAN POLA RUANG		 }	- -		`	·		- BPBD
	Perwujudan Kawasan Lindung			+	- -	++			
	Perwujudan Kawasan Lindung			++-		\perp			
•	a. kawasan yang memberikan perlindungan								
	ternadap kawasan bawahannya			\perp		\prod			
- 1	- pengendalian kegiatan atau hal hal								
- 1	beisuat menghalangi masiiknya air hijim -	Kecamatan Karangawen;	1 1						
	at dalam tanan;	dan	1 1		1 2 4 7			APBD	- Dinas PUPR
	- pengaturan berbagai usaha dan/atau	Kecamatan Mranggen.							- Dinas Lingkungan Hidup
	Kegialan lahan di kawasan wasa	33							
.	memberikan perlindungan terhadap			ill History	no Cercina	orient.			- Dinas PUPR
-	kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat; dan			•-				APBD	1
	-J		1 1						- Dinas Lingkungan Hidup

				EVE 75 (DISTANS) PELAGRAM
- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.			: APBD	- Dinas PUPR
b. kawasan perlindungan setempat				- Dinas Lingkungan Hidup
1. arahan perlindungan sempadan sungai dan saluran dilakukan melalui program :		 		
- penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan				
perdesaan; - penetapan pemanfaatan ruang	Seluruh kecamatan yang		. APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
sempadan sungai dan irigasi	diberada di kawasan perlindungan setempat		APBD	- Dinas PUPR
irigasi; dan			APBD	Dinas Lingkungan HidupDinas PUPRDinas Lingkungan Hidup
- penghijauan				- Satpol PP
2. arahan perlindungan sempadan pantai		-	APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
dilakukan melalui program : penetapan batas sempadan pantai;	•			
		·	APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
- pengelolaan kawasan tanah timbul;	Kecamatan Sayung			- Dinas kelautan & Perikanan - Dinas PUPR
Denetanan hatas kowana	Kecamatan Karangtengah Kecamatan Bonang		APBD	- Dinas Lingkungan Hidup
- penetapan batas kawasan pasang - surut; dan	Kecamatan Wedung			- Dinas kelautan & Perikanan - Dinas PUPR
- penghijauan.			APBD	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan
			APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup

Control of the contro									
	EOLASI SAN	1,000	•						September 1997
3. arahan perlindungan sepadan embung			2	9					1
- penetapan batas sempadan embung									
- penertiban pemanfaatan ruang di	 			•				APBD	Dinas PUPRDinas Lingkungan Hidup
sekitar embung pengelolaan embung						6		APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
- pengijauan								APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
4. arahan perlindungan terhadap ruang								APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
terbuka hijau penetapan ruang terbuka hijau								APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
- pengelolaan ruang terbuka hijau								APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
penertiban bangunan di sekitar suan								APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
terbuka hijau c. Perwujudan RTH				٠.				APBD	- Dinas PUPR
- pengembangan taman lingkungan						TT			- Dinas Lingkungan Hidup
- pengembangan jalur hijau								APBD	- Dinas PUPR
- pengembangan ruang terbuka bijau								APBD	- Dinas PUPR
pengaman lingkungan								APBN APBD Provinsi APBD	 Kementerian PUPR Dinas Perkim Prov. Jawa tengah Dinas PUPR
- penghijauan makam			- 7.7	++				4 7 7 7	- Dinas Perkim
d. kawasan ekosistem mangrove				╅╃	+	+	 	APBD	Dinas PUPR
arahan perlindungan kawasan ekosistem		 		4-4	44	4			

					A THE HOME LANGE PRIZABLE AND THE
CONTROL OF THE STATE OF THE STA	FORAS				-
mangrove dilakukan melalui program :		2018			
- pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;				 APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
- percepatan reboisesi kawasan cagar alam yang telah rusak;				APBD	- Dinas kelautan & Perikanan - Dinas PUPR
malalaukan				APBD	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan
- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.				APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup
e. Kawasan Cagar budaya	-	 		` `	- Dinas kelautan & Perikanan
 arahan perlindungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan melalui program : 					
- pelestarian bangunan cagar budaya;	 Masjid Agung Demak; Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; dan Cagar budaya lainnya 			APBD	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga. 	yang ditetapkan Bupati.			APBD	- Dinas Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
f. kawasan bencana alam				 -	- Dinas Pariwisata
 arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui program: 			 		
- pembangunan tanggul penahan abrasi; dan	 Kecamatan Sayung Kecamatan Karangtengah Kecamatan Bonang Kecamatan Wedung 			APBN APBD Provinsi APBD	 Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup

- penghijauan tepi pantai.		TUM DE			
2. arahan perlindungan kawasan rawan				APBD	 Dinas Lingkungan Hidup Dinas kelautan dan Perikanan
banjir dilakukan melalui program:			<u> </u>		
 pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya; pengembangan jalur ruang evakuasi; 	 Kecamatan Mranggen; Kecamatan Guntur; Kecamatan Sayung; Kecamatan Karangtengah; Kecamatan Bonang; Kecamatan Mijen; 			APBN APBD Provinsi APBD	 Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup BPBD
dan	 Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kebonagung; Kecamatan Dempet; Kecamatan Gajah; Kecamatan Wedung; Kecamatan Demak; 	·		APBN APBD Provinsi APBD	 Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup
- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.	- Kecamatan Wonosalam; dan - Kecamatan Karangawen			APBD	- BPBD
arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program:					
- pembangunan sumur dalam;	- Kecamatan Bonang; - Kecamatan Demak; - Kecamatan Dempet; - Kecamatan Gajah; - Kecamatan Guntur; - Kecamatan Karanganyar;			APBN APBD Provinsi APBD	 Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup
- pengembangan bangunan penyimpan air; dan	Kecamatan Karangawen; Kecamatan Karangtengah; Kecamatan Kebonagung;			APBN APBD Provinsi	- BPBD - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah

				145 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	- pengembangan kegiatan dan/atau	- Kecamatan Mijen; - Kecamatan Mranggen; - Kecamatan Sayung; - Kecamatan Wedung; dan		APBD	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	komoditas pertanian hemat air.	- Kecamatan Wonosəlam.		APBN APBID Provinsi APBD	 Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup BPBD
	 arahan perlindungan kawasan rawan angin topan dilakukan melalui program: 				Drbb
	 pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya; 	Kecamatan Bonang; Kecamatan Demak; Kecamatan Dempet;		APBD	- Dinas PUPR - BPBD
	- pengembangan jalur ruang evakuasi; dan	- Kecamatan Gajah; - Kecamatan Guntur;		APBD	- Dinas PUPR - BPBD
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan.	 Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Karangawen; Kecamatan Karangtengah; Kecamatan Kebonagung; Kecamatan Mijen; Kecamatan Mranggen; Kecamatan Sayung; 		APBD	- BPBD
		 Kecamatan Wedung; dan Kecamatan Wonosalam. 			
n ı	Perwujudan Kawasan Budidaya				
	a. Perwujudan kawasan hutan produksi				
	Penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya	- Kecamatan Karangawen; - Kecamatan Mranggen		APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
	2. Pemberian bantuan bibit tanaman tahunan	- Kecamatan Karangawen;	The second second	APBD	DLH

		pada lahan yang berkelerengan 25-40%	- Kecamatan Mranggen			
	ļ	yang dikuasai masyarakat;	Secumental Whaliggen			
		Perwujudan kawasan pertanian				
	,	 Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; 	Seluruh Kabupaten		APBD Provinsi APBD	- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah
		 pengembangan tanaman semusim produktif di kawasan pertanian hortikultura; 	Seluruh Kabupaten		APBD Provinsi APBD	- Dinas Pertanian dan Pangan - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan
		3. peningkatan produksi tanaman perkebunan dan buah-buahan; dan	Seluruh Kabupaten		APBD Provinsi APBD	- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan
		t. pengembangan peternakan unggas, ternak kecil dan ternak besar.	Seluruh Kabupaten		APBD Provinsi APBD	- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah
	c. P	erwujudan kawasan perikanan				- Dinas Pertanian dan Pangan
	1	. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi penetapan zona penangkapan ikan			APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		. peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI	 Kecamatan Sayung; Kecamatan Karangtengah; Kecamatan Bonang; Kecamatan Wedung 		APBD	- Dinas Perhubungan - Dinas Kelautan dan Perikanan
\perp	3	. pengembangan produksi perikanan tambak			APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4	. peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar			APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
	5.	. pengembangan umkm pengolah hasil perikanan			APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan

		7. 7. 7. 7. 7. 7.						2 (31) (1) (4) 37,00	
d.	. Perwujudan kawasan pertambangan								
	1. Identifikasi potensi tambang	Seluruh Kabupaten	 					APBD	Dinas ESDM Provinsi Jawa
	Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksplorasi.	Seluruh Kabupaten						Provinsi APBD	Tengah Dinas ESDM Provinsi Jawa
e.	Perwujudan kawasan Industri	(**	 	·				Provinsi	Tengah
	 Mengarahkan kegiatan industri ke kawasan industri 	Seluruh Kabupaten		+				APBD	Dinas Penanaman Modal dar
	Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;	Seluruh Kabupaten		-				APBD	- Dinas Perdagangan, Koper Usaha Kecil dan Menengal
	 Penyediaan prasarana dan sarana kawasan industri; 	Seluruh Kabupaten		+				APBD	- Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perindustrian dan Ten
	4. Peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.	Seluruh Kabupaten		-				APBD	Kerja Dinas Kependudukan dan
f.	Perwujudan kawasan pariwisata								Pencatatan Sipil
	1. pengembangan atraksi wisata;	kecamatan yang memiliki kawasan wisata		+-	:-		-÷	APBD	Dinas Pariwisata
	2. pengembangan pusat informasi wisata; dan	kecamatan yang memiliki potensi pengembangan kawasan wisata						APBD	Dinas Pariwisata
	3. peningkatan dan pengembangan objek wisata	kecamatan yang memiliki potensi pengembangan kawasan wisata						APBD Provinsi APBD	Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Dinas Pariwisata kabupaten
g.	Perwujudan kewasan permukiman perketaan			+		77			Demak Demak
	1. Penyediaaan Sarana dan prasarana permukiman perkotaan;	Seluruh Kabupaten						APBN APBD Provinsi	- Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa tengah

				E UNITY	
1				-	- Dinas Perkim
2.	Pembangunan dan pengembangan rumah susun		· co	APBN APBD Provinsi APBD	 Kementerian PUPR Dinas Perakim Prov. Jawa tengah Dinas PUPR Dinas Perkim
3.	Mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota;	Seluruh Kabupaten		APBN APBD Provinsi APBD	 Kementerian PUPR Dinas Perakim Prov. Jawa tengah Dinas PUPR Dinas Perkim
4.	Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan.	Seluruh Kabupaten		APBN APBD Provinsi APBD	 Kementerian PUPR Dinas Perakim Prov. Jawa tengah Dinas PUPR
h. Pe	rwujudan kawasan permukiman rdesaan				- Dinas Perkim
1.	perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	Seluruh Kabupaten		APBN APBD Provinsi APBD	Kementerian PUPR Dinas Perakim Prov. Jawa tengah Dinas PUPR
2.	Pengembangan kawasan perdesaan melalui: pembentukan PPL; dan pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya	Seluruh Kabupaten		APBD	- Dinas Perkim - Baperlitbangda
3.	Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong	Seluruh Kabupaten		APBN	- Kementerian PUPR

	perkembangan kawasan perdesaan.			26	27703							
	r per activation percessan.										Provinsi APBD	tengah - Dinas PUPR
	i. Kawasan pertahanan dan keamanan		 	+			П				·	- Dinas Perkim
	- Peningkatan fasilitas hankam		 	+		+	╁╌╁╴	╁┼	- -	 		
<u> </u>	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS		 	+			- -	╁╌┼	+	 		
	 a. perwujudan kawasan sepanjang koridor jaian arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar: 			-								
	 pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang; 					:					· APBD	- Dinas PUPR
	- penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan; dan	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah									APBD	- Baperlitbangda - Dinas PUPR
	 pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan. 	- Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan krnaganyar									APBD	- Baperlitbangda - Dinas PUPR - Baperlitbangda
	 peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri 			,	1				-		APBD	- Dinas Perindustrian dan
	b. perwujudan kawasan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung	·							П	•		tenaga kerja
_	 pembangunan sarana tambat perahu/ kapal; pengembangan kegiatan wisata bahari; dan 										APBD	- Dinas PUPR - Baperlitbangda Dinas Kelautan dan Perikanan
		Kecamatan Sayung									APBD	- Dinas PUPR - Baperlitbangda Dinas Kelautan dan Perikanan
_	- pembangunan sarana pendukung wisata utama . perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan										APBD	- Dinas PUPR - Baperlitbangda Dinas Kelautan dan Perikanan
_	. Permujudan kawasan rejabuhan Perikanan		F.			T		$\neg \neg$	\neg		† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Pantai Morodemak berada di Kecamatan					
Bonang					
- peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;				APBD	- Dinas PUPR - Dinas Kelautan dan Perikanan
- pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi;	· ·			APBD	- Dinas PUPR - Dinas Kelautan dan Perikanan
 peningkatan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan peningkatan sarana wisata di kawasan 	Kecamatan Bonang			APBD	- Dinas PUPR - Dinas Kelautan dan Perikanan
Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak				APBD	- Dinas PUPR - Dinas PAriwisata - Dinas Kelautan dan Perikanan
e. kawasan rawan abrasi dan rob pantai berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Bonang					Perikanan
- pembangunan sarana penahan gelombang;		6.		APBD	- Dinas PUPR - Dinas Kelautan dan Perikanan
- penghijauan kawasan pantai; dan	 Kecamatan Sayung Kecamatan Karangtengah Kecamatan Bonang 			APBD	- Dinas PUPR - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan
rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena abrasi f. kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul				APBD	- Dinas PUPR - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan
berada di Kecamatan Wedung					

d

- pendataan lokasi dan luas tanah timbul; dan		\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
- pengelolaan tanah timbul bersama	Kecamatan Wedung	APBD	- Dinas PUPR - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan
masyarakat	(e	APBD	- Dinas PUPR - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR



TABEL PERSANDINGAN

PERDA 6/2011 TENTANG RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 DAN RAPERDA PERUBAHANNYA

TABEL PERSANDINGAN MATERI PERDA 6/2011 DAN RAPERDA REVISI RTRW KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEM	EN DEMAK 2011-2031 AK	INASI LINTASISEKTOR (KORLINSEK) DRAFT REVISI BUPATI DEMAK	ESARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	-SESUDAH KORLINSEK
PERATURAN DAERAH KABUPAT TAHUN 201	EN DEMAK NOMOR 6	PROVINSI JAWA TENGAH	Bagian Hukum Kabupaten Demak	DRAFT REVISION DE BUPATI DEMAK
TENTANG		PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK	Johnak	PROVINSI JAWA TENGALI
RENCANA TATA RUANG WILA	YAH KABUPATEN	NOMOR TAHUN 2016 TENTANG	Masukan :	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
DEMAK TAHUN 201 DENGAN RAHMAT TUHAN Y	1-2031	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAFE		NOMOR TAHUN
BUPATI DEMA	ANG MAHA ESA		perubahan Perda sebagaimana	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUS
	, .	THE THE TOTAL PROPERTY OF THE	Ketentuan dalam UU 12/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	tentang Pembentukan	NOMOR 6 TAHUN 2014
		BUPATI DEMAK,	peraturan perundang-undangan	TENTANG
			<u>Tanggapan</u>	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Menimbang :		·	Sudah disesuaikan	DEMAKTAHUN 2011-2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
a. bahwa untuk mengarahkan		Menimbang	Vat.	BUPATI DEMAK,
Kabupaten Demak dengan n wilayah secara berdaya guna, berdaya guna, berdaya guna, berdaya selaras, seimbang, dan berkelar meningkatkan kesejahteraan pertahanan keamanan perlu Rewilayah Kabupaten Demak; b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tarenataan Ruang disebutkan baruang wilayah kabupaten deperaturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimban dimaksud huruf a dan huruf beraturan Daerah tentang Renwilayah Kabupaten Demak Tahun	emantaatkan ruang erhasil guna, serasi, njutan dalam rangka masyarakat dan encana Tata Ruang dalam Pasal 26 hun 2007 tentang hwa Rencana tata itetapkan dengan gan sebagaimana perlu membentuk	dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah	Konsideran menimbang mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis	Menimbang a. bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak dan daerah sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Demak sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana lata ruang wilayah Kabupaten Demak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
flengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undal	Me. ng Dasar Negara 1.	ngingat: Kabupaten Demak 2011-2031;	onsideran mengingat Medasarkan atas pertimbangan 1.	Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031; engingat:

DRAFT:RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)

PERDA 6/2011/RTRW/KABUPATEN DEMAK 2011 2031

Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043):
- Undang-Undang Nemor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38881

- Republik Indonesia Tahun 1945:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Neg gara Republik Indonesia Nomor 22043):
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412):
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan

SARAN/MASUKAN/S RERTANYAAN

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi raperda.

Masukan:

Kemenhan, agar dimasukan:

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5574);

Kemendagri, agar dimasukan:

- Peraturan Prisiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali meniadi Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Provek

SESUDAH KORLINSEK DRAFT REVISION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF

Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Neg gara Republik Indonesia Nomor 22043):
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412):
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang -8. Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59):
- 15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 16: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

- DRAET REVISI Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725):
- 13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725):
- 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan

SARANMASUKAN PERTANYAAN

Strategis Nasional:

- Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang tentang. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara republik Indonesia: Tahun

SESUDAH KORLINSEK DRAFT/REVISITED

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4700);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan

DRAFT:RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)

PERDA 6/2011 RTRW/KABUPATEN DEMAK 2011 2031 Republik Indonesia Nomor 4700):

- 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Nomor 4723):

- 20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
- 22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959):
- 24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851):
- 16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
- 17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966):
- 18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052):
- 19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052):
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059):
- 21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembarañ Negara ... Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068):
- 22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran

SARAN/MASUKAN PERTANYAAN

2017 Nomor 1854);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167):

Kemen ATR/ BPN, agar dimasukan:

 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nemor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394)

Kemen ESDM, agar dimasukan:

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27):

Tanggapan:

- Masukan Kemenhan sudah diakomodir
- Masukan Kemendari
- ✓ Peraturan Presiden

SESUDAH KORLINSEK

- DRAFT REVISION Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851):
- 16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
- 17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966):
- 18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068):
- 22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)

PERDA 6/2011 RTRW:KABUPATEN DEMAK 2011 2031 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

- 26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 28. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068):
- 29. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 30. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran 28. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
- 31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Fahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang

- DRAFT REVISI Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188):
- 24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214):
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492):
- 27. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512):
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 30. Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608):
- 31. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan

SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN

- Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 hanya memiliki masa berlaku sampai 2019
- Peraturan Menteri sebaiknya tidak dimasukan dalam konsideran mengingat pada Perda.
- Masukan Kementerian ATR/ BPN
- ✓ Peraturan Menteri sebaiknya tidak dimasukan dalam konsideran mengingat pada Perda.
- Masukan Kementerian EDM
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 hanya memiliki masa berlaku sampai 2019

SESUDAH KORLINSEK DRAFT REVISION

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5188):
- 24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
- 25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492):
- 27. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 28. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512):
- 29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587):
- 30. Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
- 31. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan

PΕ	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031		DRAFT REVISI		ARAN/MASUKA PERTANYAAN		SESUDAH KORLINSEK
	Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	7 20			DRAFFREVISI
	Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24,		3013);	1			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);	32	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002				[3013),
			tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Popublik	1	•		32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 200
J.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang		indonesia lahun 2002 Nomor 119 Tambahan	1			I CHAIR TULAL NOW I AMPLEA NORTH Destrict
	Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	1			macrosia rangii ZUUZ Nomor 110 Tombele
	Republik Indonesia Nomor 3445);		4242),	1		į	Lembarar Negara Republik Indonesia Mana
6	Persturan Demoriateh Names Co.T. 1	33	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004	1			12 12),
u.	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang		teritang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara	1		- 1	33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian		Republik indonesia Lahun 2004 Nomor 45	j		{	torrang i ciidddullaan Tanah (Lembaran Nassa
	Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132);	İ	Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia	ĺ		- 1	TOPOUN INCORESIA LANDO JOON NAME OF
			Nomor 4363);				rambandi Lembaran Negara Republik Indonesia
•	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang	34.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004			l	11011101 4000),
	Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan		teritang Perindungan Hutan (Lembaran Negara L				34. Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 2004
	Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara		republik indonesia lahun 2004 Nemer 147 l			ĺ	Chang Foundandan Hutan /Lomboron No.
i	Republik Indonesia Nomor 3816);		Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia I			- 1	TOPODIN INCOMESIA LANDO MONA MATERIA
·	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang		Nombi 4403) sebagaimana telah diubah dangan l	•	•	i	Turnbarian Ethioalan Magara Dopublik I. J.
· ·	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran		Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 L	•			TOUR TOUR SECRETARIANS FOR ANALES
í	Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,		tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah			ĺ	Political Felliellian Nomor on Tabus 2000
-	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia		Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan			İ	toritang refundian Afas Paraturan Damastal
1	Nomor 3838);		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000			- 1	Tromor 45 Tanun 2004 tentang Perlindungan List
	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang		Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);			- 1	(Combardit Neuald Kentinlik Indonosia Tak 2000
	Fingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang	35					Tomor 107, rainpanan Lembaran Negara Danuku
V	Vilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia	JJ.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005			13	., 451,6619 (401)() (40)()
7	ahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara		tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik		•	3	5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005
F	Republik Indonesia Nomor 3934);		Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan			1	toriding yaldii 101 Hemberen Negers D. Jun 1
	eraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		•	ı	modificate religion 2005 Nomor 22 Tamber 1
}	lutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia		4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali			1	Tollibural Neudla Rehilblik Indonosia Nami
Т	ahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran		terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2017 tentang			ŀ	100) Schadaillialla Ielah diubah babanan 1 " I
N	legara Republik Indonesia Nomor 4242);		Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jaian Tol			- 1	terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2017 tentang
Р	eraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang	36	Persturan Popporintal Name 40 7				Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
Р	enatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik	٠.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005			36	Peraturan Demarks I alian Fol.
In	idonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan		entang Pengembangan Sistem Penyediaan Air			"	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
L	embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);		All Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran		. •	. j	Terrory Chuennannan Cictor Danier
Р	eraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang	1	legara Republik Indonesia Nomor 4490)			· 	"""" (Longold) Negara Dasukii, it- i
P	erlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 3	7. F	eraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005				Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
In	donesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan	. h	entang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang			37	Peraturan Pemerintah N
Le	embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)	N	omor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung				Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
SE	ebagaimana telah diubah dengan Peraturan	(embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005		•		tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
	Jongan i Gratulali			•	• •	- 1	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

PE	RDA 6/2011:RTRW:KABUPATEN DEMAK 2011-2031	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARANIMASUKANI	
0.000	Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang		PFRTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	DRAFT/REVISI
	Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran	indulesia Nothor 4532);		Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Barry
	Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137,	The second of the control of the second of t		1
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	I tellially Jalan (Lembaran Nogara Design)		38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 00
	Nomor 5056);	I Induited a failuit 2003 Nomor 86 Tambaban I		J Contains Jaigh (Leinharan Magaza D. 1
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang	Letitodian Negara Republik Indonesia Nomor I		"" "" I TOUR TRIBUIL AND NOT OF TAKE I
	Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia	4000),		Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
	Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara			,,
	Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah	l cilidiy idd Hulan dan Penvisinaa Dansaa i		39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200
	diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44	Gigeloladii Huldh Sena Pemanfaatan Lista- I		I WHOM I DIE TIME TO DODING TO D
	Talluli 2009 tentang Peruhahan Atas Poraturan	(Letitodian Negara Renublik Indonesia Tahun 2007 (
	Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol	Nomo 42, Tambanan Lembaran Megara Danubik L) (Sometimental Neural & Republik Indonesia Talaa ee
	(Leniuaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2000 l	induited Notiful 40901 Sebagaimana totak diukak		1 Provide the Individual Lembaran Nagara D. 11
	Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik I	derigan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1		"" TO TO THE THE PROPERTY OF T
	indonesia Nomor 5019);	2000 leitlatid Peritahan Atas Daraharan		The second of th
	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang	Tellicinital Notifor b Pahin 2007 tentang Tata		Peringnan Alas D.
	rengembangan Sistem Penyediaan Air Misum I	Hudii udii Penvisinan Rencana Dongolala I		- Cincintal Notion b Jahun 2007 1
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006	Tuddir Seild Pemantaatan Hutan /Lombossa L		I Takin dali Felivisinan Donoone D
- 1	Nomor 33, rambahan Lembaran Negara Republik L	regala Republik Indonesia Tahun 2009 Monios 40		The second control control in the second con
	ndunesia Nomor 4490)	Nomer 4944)		1 11999 G NEDUDIK INCONPENS LABUR ADDO NI. 45
. F	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang	1401101 40 14),		Tanadian Comparati Negara Republic Indonesis
F	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28			1 1014),
	anun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran L	tentany Penyelenggaraan Penanggulangan I		40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
1,	vegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 T	Denodia (Lenibaran Negara Republik Indonesis I		I STRAIG FELIVERIDODATAON D
ı	ambanan Lembaran Negara Republik Indonesia	randii 2000 Nomor 42 Jambaban Lomboron I		Bencana (Lembaran, Negara Banuta)
١	IUIIUI 45321:	Negara Republik Indonesia Nomor 4828).	1	
F	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang	11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008		Tregard republik indenesia Memor Appol.
Ir	igasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	lentang Kencana Tata Ruang Wilayah Masianal I	j	41. Peraturan Pemerintah Nomos oc T.
2	006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara	(Letitudidit Negara Kenublik Indonesia Tahun 2000 I	ł	Chang Nellalla Tala Ruana Milanak M
R	epublik Indonesia Nomor 4624);	Nomon 40, Tambanan Lembaran Negara Dopublik I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ρ	eraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang	indulesia Nomor 4833), sehagaimana talah diubah		To remode an incomparable for the contract of
Já	alan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	menjadi Feraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun I	i	
20	203 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara	2017 tentang perunahan atas Peraturan	1	Clawd Cemernish Nomes 40 T.
R	epublik Indonesia Nomor 4655);	Femerican Nomer 26 Tahun 2009 tantan 1		TO CONTROL OF THE CON
P		Rendand Tata Ruang Wilayah Nasional	wite Sign .	TOTAL NUMBER OF TAKEN AND THE TAKEN
Ta	ata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan	2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009		The same is all a very an indication of
H	itan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara	remaily Penyelenggaraan Perkeretagnian	! •	42. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 L
Re	epublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,	(Leitibaran Negara Republik Indonesia Tohun 2000 I		Cinding Fellyelennnareen Deutsteil
Ta	ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik		(Lembaran Negara Republik Indones:
	Trogula Nopuolik illuoliesia	Indonesia Nomor 5048);		Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

P	DRAFT/RAPERDA SEBELUM KOORD ERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031		SARAN/MASUKAN/	CECIO
J-188	Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan		PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang			DRAFT/REVISION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6	I terriary Nepelaburan (Lembaran Mogora Danuba L		43. Peraturan Pemerintah Nomer Ct. T.
	Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan	1 . Indulesia lation 2009 Nomor 151 Tomboba-		
	Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan	Lenibaran Negara Kepublik Indonesia Names I	•	
	Hutan (Lembaran Nagara Danubili da Pemantaatan	1 5070) Sebagaimana telah diubah dan 1		Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
	Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	I relativistic Permeninian Nomor 64 Tahun 2045 I		5070) sebagaimana talah iindonesia Nom
	2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara	I remaily Perupanan Atas Paraturan Damastral I		5070) sebagaimana telah diubah deng
	Republik Indonesia Nomor 4814);	Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;		Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 20
J.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang	44. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009		Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerint
	Pembagian Urusan Pemerintahan Antara			I divisió de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata
	Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan	tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara		1 " I claudi Pemerintah Nomor 70 Tahun 000
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran J	Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171,		1 Contains Notice Vasi Energi / Comboses A.
	Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);		
	Lambahan Lambaran Nasasa Da Lii	140(1)01 50053),		1 Same and a Legitical Medara Constitution
	Nomor 3747);	45. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009	•	
	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang	terriary Lary Linias Dan Angkutan Koroto Ani I		45. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 200
	Tata Cara Pelaksanaan Kerjasarna Daerah	(Lennyardi Neuzra Rennhik Indonesia Tahun 2002 J		
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007	Notifor 176, Tambanan Lembaran Negara Populati I	·	(==····>ui ui) Neudid Reniniik Indonesia T i aaa
	NOMOC 112 Lambahan Lambassa N	indoplesia Molliot 2086);	•	Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republi
	Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);	46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010	·	Indonesia Nomor 5086);
	Postburge Power 1 1 1	tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	· ·	46. Peraturan Domorinals As
	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010	1	46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
	Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara	Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik	1	
	Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132,	Indonesia Nomor 5103);	·	
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	47. Peraturan Pemerintah Names oo T	· .	Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
	Nomor 4777),		•	
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang	tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara		47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
	Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara I	Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28,		
	Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 134	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia		
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Nothor 51 (0);	:	
	Nomor 4779);	8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010	· ·	
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang	Lending Pelaksanaan Kediatan Hash- I		8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
	Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan	reitanibangan Mineral Dan Ratubara (Lombora)		
I	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomes oo T		
	Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	rambanan Lemparan Negara Republik Indonesia I	į	
	2008 Nomor 21 "Tambabas Tambabas Tambabas	Nomo: 5111), Sepagalmana telah diubah dua tari 1	1	
,	2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);	COUNTIL UCHUAN PERSINTAN Demorintah Managara 22 1		
·	Posebuse Described NOTION 40 17);	randi 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atao I		terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77
t	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang	Penalulah Pemenntah Nomor 23 Tahun 2010 l	1.	
Ì	renyelenggaraan Penanggulangan Bencana l	rentally Pelaksanaan Kenjatan Hooka		Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008	Pertambangan Mineral Dan Batubara;		Tentang Polskopper Nomor 23 Tahun 2010
ľ		Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010		Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
				Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010

PI	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 Indonesia Nomor 4828)	DPACT DE LA CONTRACTOR	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
			PERTANYAAN	
55.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang	tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran		
	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran	I regard Republik Indonesia Tahun sebagainan I		tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembara
	Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,	l cour diubail deligati Peratitran Pemerintoh Managari		
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	1 100 ration 2010 Tentang Peruhahan Kadua Akaa 1		
	Nomor 4833);	1 Cratural Felliefinian Nomor 24 Tabus 2040 (
36		renang Penggunaan Kawasan Hutan		Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 201
<i>,</i> 0.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang	50. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2040		Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
	rengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Megara	tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka		50 Peraturan Damariah Kawasan Hutan;
	Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92	Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya		50. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010
	rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara		
	Nomo: 4000);	Republik Indonesia Tohun 2010		The gooding tallial Macional Fames II is a
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang	Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44,		
	Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);		
	Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara		•	I Tambululi Lelilipalati Negara Dopublik I-1.
	Republik Indonesia Nomor 4859);	51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010		1
8.	Peraturan Pemerintah Namer 45 Tul.	tentany belitur Dan Tata Cara Doron Monuscit I		51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
٠.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang	Dalam Feliatian Ruang (Lembaran Magaza L		
	Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian	Nopolik iliuollesia tantin 2010 Nomer 440 l		
	Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah	rambanan Lembaran Negara Republik Indonesia l		
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008	Nonio 3100),		Tambahan Lembaran Noore D. William 118,
	Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik	52. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
	indollesia Northor 4861);	tentang Reklamasi dan Pasca Tambang		
١.	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 teritang	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010		52. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
	Reliabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Megara	Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik	1	
	Republik indonesia Lahun 2008 Nomor 204 L	Indonesia Nomor 5172);		
	lamnanan lambaran Nassas a	53. Peraturan Pemerintah Namas 4 7	·	
- 1	Nomor 4947);	The second of th	1	
. F	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang	tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan	ł:	53. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
ŀ	Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik	Terraman Pangan Berkelanjutan /Lomboros	1	
j	Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan	regard Republik Indonesia Tahun 2011 Nomes o I		
Ì	embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);	rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I	.	
_	Postatura Daniel I Land	1401101 5165),	j	
ר	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang	4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011	· ·	
Г	euoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan	Citially Sullual (Lembaran Megara Desulting	t	54. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
(1	embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009	indulesia ranun 2011 Nomor 74 Tambahan I		tentang Sungai (Lamba Nomor 38 Tahun 2011)
1/	Omor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		tentang Sungai (Lembaran Negara Republik
11	idonesia Nomor 5004);	5230); " "Montesia Nonioi	1	
Ρ	eraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 55	5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012	1	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
٦	enyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara L	tentang Insentif Porlindungs		
7	epublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 120 l	tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian		5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
Tá	ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik		
No	omor 5048);	Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		
	<u> </u>	Lembardii Negara Kepublik Indonesia Nomor	! .	Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan

PE	MATERIAL MATERIAL PROPERTY AND ARROAD AND ARROAD AR	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	OF OF STREET
63.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2000 tanan	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
	Laid Lilids Dall Andkulan Kereta Ani /lambana	1 "		DRAFT REVISION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
	Tregala Nepublik Indonesia Tahun 2000 Nomes 470	Nomor 37 Tabus 2040		5279);
	rambahan Lembarah Negara Republik Indonesia	I wilding Felluciolaan Dagrah Alicon o		56. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20
	140/1101/3000),	1 (2011) Darat Negara Republik Indonesia Tahun 2012 I		tentang Pengelolaan Dagget Ati
64.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang	1 dinor 02, rambanan Lembaran Negara Republik 1		
	rata Cara Perupanan Perintukan Dan Cunnat	1 ""donesia Notifol 5292]:		
	Nawasan Mulan Hembaran Nogara Danibu	1 oracoran i chichilian Republic Indonesia ki		
	indulesia rahun 2010 Nomor 15 Tombobon	I Samuri 2010 (Cilidill) Kerellinan Doto Dosess I		57. Peraturan Pemerintah Populati La
	Lerribaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).	I roung (Echipatan Negara Danukii, i I		
D. 1	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tantan	I randii 4010 NOMOF 8 Tambabaa I I		Ruang (Lembaran Negara Republik Indones
	reflection dall Pendavagunaan Tanah Todantas	1 County (Indonesia Nomor 5303).		
1	(Lenibardii Negara Kebublik Indonesia Tahun 2040 i	Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tohun 2010		
,	Notice to, tambanan Lembaran Megara Dopublik I	toritaria dall'illalli l'intae dan Anglantee i i		58. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 201.
•	140116318 1401101 5098);	Combardi Neudia Reninik Indonosia Tah 2040 I	•	tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalar (Lembaran Negara Ropublik lad
3. F	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tantan	Tomor 199, Idilibalian Lembarar Mogara Dan, Liv. 1		
,	citycicityddiadii Penataan Ruana (Lomboss I	""dencia (40)(0) 5408):		Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5468 V
	regala Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24 T	59. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014		Indoneia Nomor 5468);
T	ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	tentang Pelaksanaan Undang undang Ale		1 60 Daniel -
• • •	101101 3 103),	randii 2011 Rilland Informaci Casa 111	•	tentang Pelaksangan Undang 9 Fahun 2014
. P	eraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang	TEOINDUIGH NEURIA REPUBLIK INAGRASIS T. 1		tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
	COMMUNICAL LIMITEDINA Maritim // continue to	Nombi 91, Tarribarian Lembaran Negara Republik I		
- 17	epublik iliuotiesia lahtin 2010 Nomos oz l	machesia Norror 5502);		Nomor 31 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502)
	ambanan Lenipatan Neuara Rebublik Indonesia l			Indonesia Nomor 5502);
1.4	01101 3 (09),	Contains Mightight Jalan (Lemboron N. 1		60. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014
Pe	eraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang	NOPUDIN HUUHESIA TANIN 2014 Na 000 I		tentang Penataan Wilayah B
V V	ilayan Fertambandan (Lembaran Magara Danibur L	rumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia I		tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Kangaran K
1111	dollesia lalluli 2010 Nomor 28 Tambahan I	101101 0004),		Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Le	embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);	1. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015	•	
Pe	eraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang	Contains Nawasall Industri / ombassa N		61. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
Pe	elaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral	"VPAOIII HUUHESIA TANIIN JOTE "Maisa. AAE T	·	tentang Angkutan Johan 4 Tahun 2014
Da	III Dalubara (Lembaran Negara Republik Indonesis, i	rambahan Lembahan Negara Republik Indonesia		tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,
Ta		7.57161 00007,		Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia
110	Publik ilidollesia Nothor 51111.	2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22		Nomor 5594);
Pe	raturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang	THE PORT OF THE PROPERTY OF TH	}	62. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015
Pe	nggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara	amount of Toylis Jawa Janaah / amt - 1		tentano Kawasan Industria (142 Tahun 2015
Re	publik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30,	Ductair Flovinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nome- I		Republik Indonesia Tohun 2045
Tar	HUGHAH LEMBARAN MAGARA Danukili, i	104),		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noi	mor 5112);			
Per	aturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang	Tandh 2004 Billialin Garle Compaden /	. 10	63. Peraturan Presiden Bonutari
	Smorther Former 30 Tanun 2010 tentang	Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor		63. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kondal R
		2 23. 1101101		Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran,

PE	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOOR RDA'6/2011/RTRW KABUPATEN DEMAK 2011:203		DRAFT REVISI	SAR	ANMASUKAN		SESUDAHKORLINSEK
	Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suak	a l	46 Seri F Numor 7)		RTANYAAN		CONCINSEN
	Wargasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya	a	The second of the second secon			508695E	DRAFTIREVISI
	Dali Talliali VVISala Alam /Lembaran Namen	_ [dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengal	· [- 1	Salatiga, Semarang Dan Duniada is di
	Republik Indonesia Tahun 2010 Nomes 44	· 1	Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas	: 1		ĺ	Sala republik indunesia renin 2017 ki.
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia		· Graduali Daerdii Provinsi Jawa Tengah Nama- 44	1			- · p
	1101101 31 10),	- 1	Tanun 2004 Teniana taris Sampadan / Land	1		16	64. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang	.	Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomoi 9);				
	Denoungan (Lembaran Negara Republik Indanasia	م ما	<i>⊙</i>),	i		1	(ECHIDAIAH NEMBRA Danieli)
	Taliuli 2010 NOMOr 45. Tambahan Lembaran Magaza	64		1			Tahun 2019 Nomor 163);
	Republik Indonesia Nomor 5117);	1	"and 4001 (Cilidin Pendendalian I in al	1		6	5. Peraturan Daerah Provinci I.
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang	1	The state of the s	l		- 1	 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2: Tahun 2003 tentang Para Halland
	Bentik Dan Tata Care Daran M.	1	. To vindi dawa Tendah Tahun 2007 Namas Co	1		- 1	
	Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam	1	Tomor 2, Tallipalian Lembaran Daorah Daori- :	l		1	
	Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);	1	odwa rengan Montor 41.	!		- 1	Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomoi 134);
1 .	Poroturon President Name of Table	65.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tanan N			66	
t.	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang	1	Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah			100	 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Corio Somo di III
	Guyduddii Tanan Bagi Pelaksanaan Dombongunaa	:	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029				Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tu
,	Ontuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah	1	(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomer 6 Taruh Islama Tengah Tahun				
,	deligali relaturan Presiden Nomor 65 Tohun 2002	1	2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah				
·	entang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomes	1	Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);				
	o diluli 2000 tentang Pendadaan Tanah Post		Persturan Desait IX I			1	
,	elaksanaan Pembangunan Untuk Kenentingan I	50.	Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6			ŀ	
_	oniani,		randii 4000 leniana Rencono Domboo				
. F	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22		osingha raniana (RPJP) Depreb // omb			-	
•	and 2003 telliging Pengelolaan Kawasan Linduan I		Pasidii Nabupateli Demak Tahun 2006 Nomes o I				
્d	i Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi		Seri E Nomor 6);			67.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
J	awa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);			•			
Р	eraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11						
Ť	ahun 2004 tentang Cosis Command 1					1	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E
ח	ahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran						Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4)
9	aerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 eri E Nomor 7);		1				Jawa Tengah Nomor 4);
		•				68	Peraturan Danah D
P6	eraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5					00.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
. 10	arur 2007 leniang Pengendalian Lingkungan Lidus I						
U	Floring Jawa Tengah (Lembaran Daerah Drovins: L						
Ja	IWA TENGAN TANUN 2007 Nomor 5 Sori E Nomer o T						
Ia	imbahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah						
110	/// (T),		1000	2 (*12) -	(Z · .		
Pe	raturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6		·				
1 a	IIIII 40.10 Tentano Rencana Tata Ruana Wilayah I						
Ţίζ	Julia: Jawa: Tengah Tahun 2009-2020 /Lomborns T				1.		
Da	erah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,			*			THOUSE INCIDENTAL TRANSPORT AND A TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TRANSPORT
					,	69. Pe	awa Tengah Tahun 2009-2029;

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 203	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SECUDATION
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tenga Nomor 28);	DRAFT REVISION	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK DRAFT REVISI
 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil delah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demae (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2003 Nomor 33 Seri D Nomor 16). 	di		Tahun 2006 tentang Rencana Pembangun Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor Seri E Nomor 6);
 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahur 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupater Demak Tahun 2005 Nomor 8 Seri E Nomor 4); 	,		
 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6); 	·		
 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 7); 			
 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2); 			
Dengan Persetujuan Bersama :	Dengan Persetujuan Bersama :	Bagian Hulaum Kal	
EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK,	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK,	Bagian Hukum Kabupaten Demak Masukan :	Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan
MEMUTUSKAN : enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG	MEMUTUSKAN:	Judul mengacu pada	BUPATI DEMAK,
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031.	Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG	perubahan Perda sebagaimana ketentuan dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan	MEMUTUSKAN : Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
	WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031	peraturan perundang-undangan Tanggapan	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
		Sudah disesuaikan	KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	is a second and the second sec	
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK-2011-2031	The contract of the contract o	SARANMASUKAN	SESUDAH KORLINSEK
BAB I	DRAFT/REVISI	PERTANYAAN	(DRAFT REVISIT
KETENTUAN UMUM			
Pasal 1	:		
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Pasal I		D
Daerah adalah Kabupaten Demak.	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor		Pasal I
Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.	6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor
	Kabupaten Demak Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor,		6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011–2031 (Lembaran
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang	Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak		J Dacian Napubalen Demak Tahun 2014 Namas
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia	Nomor), diubah sebagai berikut :		Transparian Centibarah Daerah Kabupatan Damat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang			Nomor), diubah sebagai berikut :
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan		
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat	Pasal 1 berbunyi sebagaiberikut :		Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi
Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah			sebagai berikut:
	Pasal 1		<u>_</u> .
5. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :		Pasal 1
Bupati adalah Bupati Demak.	Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik		Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya	Indonesia yang memegang kekuasaan		Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan kekuasaan.
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat	pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri		pemerintahan negara Republik Indonesia yang
Daerah Kabupaten Demak.	sebagaimana dimaksud daiam Undang-Undang		. dibanta oleh wakil Presiden dan
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		Sebagainana ulmaksud dalam IIndang U-J I
ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam	Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.	1	Pasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia	3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan	i	2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah
dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.	perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara		3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan
9 Tota rugage adolph united atmitted and the	Pemerintah Provinsi.		perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi
ruang.	4. Daerah adalah Kabupaten Demak.	1.	4. Daerah adalah Kabupaten Demak.
10 Rencana Tata Ruana Wileyoh Kohungton Dawet	Bupati adalah Bupati Demak. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai ungur		5. Bupati adalah Bupati Demak.
yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Demak	popular pubat senagai diisti		5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari	penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang		Ponticipadia Pemerintahan Daoreh I
wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan,	menjadi kewenangan daerah otonom.		"" Pelaksanaan Urusan nemerintahan
strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang	7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang	_	menjadi kewenangan daerah olonom
wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis	selanjunya disebut DPRD adalah Dewan I	7	. Dewan Perwakilan Rakvat Dooreh
kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah	Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.		Security of Discours Described in
kabupaten, dan ketentuan pengendalian i	B. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepaia	8	retwakidii kakyat Daerah Kahiinaten Demak
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.	daerah yang terdiri dari seksetariat daerah yang terdiri dari seksetariat	-	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
11. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk	daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis		daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,
	amas dadran, rembaya teknis		sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis

PE	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORI RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011:2031	19313	DRAFT REVISI		SARAN/MASUKAN/		SESUDAH KORLINSEK
	mempertahankan kedaulatan negara koutuber	22.62 744	daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah kacamatan di daerah		PERTANYAAN		
	wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan	n I.	daerah, kecamatan, dan kelurahan.		0	Sec. 25.	DRAFT REVISI
	keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan	n l		1		- 1.	daerah, kecamatan, dan kelurahan.
	gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara		Daerah Selain Pemerintah Daerah Kabupaten	1		- 3	9. Pemerintah Daerah Lain adalah Dan Kal
2.	Struktur ruang adalah susunan pusat pusat	٠ ا ،	Belliak.	1	•	-	Daerah Selain Pemerintah Daerah Kabupatan
	permukiman dan sistem jaringan prasarana dan	. `	O. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,				- smart
	Salalia yang benungsi sebagai pendukung kegistan	. 1	ruding laut udli [Udlig lidara termacuk mana 4:			1	10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat
	sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis		dalam bumi sebagai sam kesahian wilayah tangga	1		- [
	memiliki hubungan fungsional.	'	manusia uan maknilik lain hidun molekukaa	1		-	
3.	Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam		Register, udil memelinara kelangsingan hiduppya	1		-	THE TOTAL GOLD TOTAL TOTAL BIRLING
	suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk	1	. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola	1			kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
	fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi	ı	ruang.			11	Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang
	budidaya.	12	Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata			-	ruang.
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	ruang.			1 12	
	Penataan ruang adalah suatu sistem proses	13	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak	ĺ	_		Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
	perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.		vang selanjutnya disebut DTDW Kabupaten Demak				
	Ponyologana pemaniaaian ruang.		yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Demak adalah ropoga teta			1 "	B. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak
•	Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan		Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat			1	
	yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan	1	umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan,			i	- Then decide religions for the state of the
	dan pengawasan penataan ruang.	ĺ	kebijakan, strategi penataan ruang wilayah			1	
	Pengaturan penataan ruang adalah upaya	1	kabupaten, rencana struktur ruang wilayah		•	ĺ	
	pembentukan landasan hukum bagi pemerintah l		kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten,		1		
	pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan i	ĺ	penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan		,	I	
	ruang. ·		permanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan kelentuan pengandalian				
. 1	Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk		ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.		J		
-	meningkatkan kinerja penataan ruang yang l	14	Struktur stone		ł		Periodicalian nomentantan
. (diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah	17.	Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat		· 1		The state of the s
(dan masyarakat.		permunicial dall sistem latingan praegrang den		1	14.	Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat
}	Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya		Solution yang penungsi sebagai pandulum I				
ŗ	pencapaian tujuan penataan ruang melalui		kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara		1		
ŗ		4 5	moration menninki nunundan tunggional		. [
r	uang dan pengendalian pemanfaatan ruang.	10.	Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang				The street with the control of the street of
F	Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar		actions sudice wildyan vand melinuti peruntukan l			10.	Fuld fulling adalah diet-ibua:
'n	penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan		ruang untuk lungsi lindung dan peruptukan ruang l				
9	esuai dengan kotontuan narahara diwujudkan		arrak lungsi budi daya.		. 1		"3 """ I Uliusi midilion non nomintali !
,,,	esuai dengan ketentuan peraturan perundang-	16.	Penataan ruang adalah suatu sistem proses		i i		
	ndangan.		perencandan tata Mano nemanfaatan ruang dan l	. ,	1	6. F	Penataan ruang adalah ayat,
-	Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk		pengendahan pemantaatan ruang:	•		р	perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan
11	nenentukan struktur ruang dan pola ruang yang 1	17.	Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan		:	р	pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
ŭ			yang meliputi pengaturan, pembinaan		11		
	uang.		pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.	٠.		v	Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan ang meliputi pengaturan, pembinaan
Р	emanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 18		Pengaturan penataan ruang adalah upaya			,	elaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

perpatan deserta pembayaannya. 2 Pengandalan pemandaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan terbit bata ruang. 3 Rencana tata ruang adalah masil perencanaan tata ruang. 4 Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkat yang tatas dan sistemnya dihetukan berdasarkan aspek administratif dan/atia sepek fungsional. 5 Kawasan indung adalah wilayah yang memikik fungsi utama lindung ateu budidaya. 6 Kawasan indung adalah wilayah yang dietarkan dengan ininga utama melindungi utama melindungi utama melindungi ateu budidaya. 7 Kawasan budidaya adalah wilayah yang dietarkan dengan ininggi utama melindungi dalah utama perana manga adalah utama perana muanga dalah utama peran	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORI	JINASI LINTAS SEKTOR WORLDOOF	50 100 000 000	
strikfur ruang dan pola ruang sasuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaanya. Pengendialan penanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkati yang berandah muang diselengarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah hasil perencanaan tata ruang. Si Kawasaan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama laindung adalah wilayah yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian langkungam ilingungam pembangunan berkasiputan. Kawasaan budidaya aralah wilayah yang ditetapkan dingungam pembangunan berkasiputan. Kawasaan budidaya aralah wilayah yang memiliki fungsi utama pertanian dan kawasan budidaya pengangam pembangunan pertanian dan kawasan budidaya yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian inglungam ilingungam ilingungam ilingungam pembangunan berkasiputan. Kawasaan budidaya aralah wilayah yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian pengkangaraan penataan ruang dalah upaya pengangan kepentangan pembangunan berkasiputan. Perencanaan tata ruang adalah upaya ungung kelentuan peratanan pertanan pertanan kemasuk pengalakan berkasan perdagam pembangunan pentanan pertanan pertanan kemasuk pengalakan pengangam pembangunan pentanan pertanan pertanan kemasuk pengalakan pengangam pembangan pembangan pembangan pembangan pembangan pembangan pembangan pembangan pembangan pembangan pembangan pengangan kepentungan pembangan pembangan pengangan pembangan pembangan pengangan kepentungan pembangan pengangan pembangan pengangan pembangan pengangan kepentungan pembangan pengangan pembangan pengangan pembangan pengangan pembangan pengangan pembangan pengangan pengangan pembangan pengangan pe	RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011/2024	WOLINIAS SERIOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program besetar pembiyangnah pennerintah daerah dan masyarakat dalam pennerintah daerah dan masyarakat dalam pennerintah daerah dan masyarakat dalam pennerintah daerah dan masyarakat dalam pennerintah	struktur ruang dan pola ruang coausi da	The state of the s	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK.
perpara beserta pembiayaannya. 2. Pengendalain pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujukkan tertiti tala ruang. 3. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserfa segenap unsur terkail yang bata dian sistemnya ditentukan berdasarkan aspak administratif danfariah sapak (mingsi utama melindungi kelestahan lindung atabah wilayah yang memiliki fungsi utama melindungi kelestahan ingikungan hilup yang mencangan pembangan tata ruang melalui populusupan dan	pembentukan landasan hukum bagi pemerintah	The state of the s	DRAFTREVISION	
22. Pengendalian pemantantan ruang adalah upaya untuk mewijukkan teriti bata ruang. 23. Rencana tata ruang adalah nasil perencanaan tata ruang adalah nasil perencanaan tata ruang adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek darimisikratif dan/atau sapok fungsional. 25. Kawasan adalah wilayah yang merupikil fungsi utama lindung atau budidaya. 26. Kawasan sindung adalah wilayah yang ditelapkan dengara fungsi utama meindungi kalestanan inipokungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya batan dan ilai sejarah serta budidaya. 27. Pengawasan penataan ruang adalah upaya untuk meningkakan kinegia penataan ruang adalah upaya gar pengenalan lindung atau budidaya. 28. Kawasan indung adalah wilayah yang ditelapkan dengara fungsi utama meindung kalestanan inipokungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya butan dan nilai sejarah serta budiwas abaga berdaya guna dan berhasil guna berjaman penataan ruang adalah upaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 29. Pemantanan ruang adalah upaya dan pemantaan ruang adalah upaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 29. Pemantanan ruang adalah upaya untuk meningkakan kinegia penataan ruang adalah upaya gar penyelenggarakan oleh pementahan penataan ruang, dapat depat dapat berdaya guna dan berhasil guna bertanan ruang adalah upaya untuk menujukkan setuat dengan ketentuan penataan ruang dapat depat dapat berdaya guna dan berhasil guna bertanan penataan ruang dapat dapat upaya untuk menujukkan setuat dengan ketentuan penataan ruang dapat dapat upaya untuk menujukkan setuat dengan ketentuan penataan ruang dapat dap	program beserta pembiayaanaya	perneninan daeran dan masyarakat dalam	1	pembentukan landasan hukum basi
untiluk mewujudkan teribi tatar unang. Rencana tar unang adalah hasil perencanaan tata unang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesaluan geografis beserita segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan-idau sapak kingsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama inindunga adalah wilayah yang ditelapkan dengan fungsi utama meindungi kelestarian iningkungan hidup yang mencakus puntuk yang dalah hasil perencanaan tata unang adalah upaya adam dengan fungsi utama meindungi kelestarian iningkungan hidup yang mencakus puntuh kemenjakkan kesaluan penataan ruang adalah upaya adam dengan fungsi utama meindungi kelestarian nuang adalah upaya adam dengan fungsi utama meindungi kelestarian nuang adalah upaya agar pernanfaatan ruang adalah upaya agar pernanfaatan	Pongondalian and f	penataan ruang.	1	pemerintah daerah dan masura pemerint
Rencana tata ruang adalah nasil perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang adalah nasil perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang adalah nasil perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang adalah nasil perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang adalah nasil perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang adalah nasil perencanaan tata ruang pengalish beserta segenap unsur terkat yang batas dan iststemaya ditentukkan berdasarkan aspek administratif dan/atau sapek (rungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian ingkungan hidup yang mencayan budidaya. Kawasan indung adalah wilayah yang ditetapkan dengar fungsi utama melindungi kelestarian ingkungan hidup yang mencayah pustan dan an niali sejarah serta budiya bangsa guan kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan pedalah wilayah yang mempunyai keplahan utama petranian termasuk pengelokan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai lempat permukiman perekasan, pelayanan sosial dan kegiatan dengan perekasan, pelayanan sosial dan kegiatan dengan perekasan, pelayanan sosial dan kegiatan perekasan, permusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan dengan perekasan, pelayanan sosial dan kegiatan perekasan, perekasan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan dengan perekasan, pelayanan sosial da	rengendalian pemantaatan ruang adalah upaya	19. Pembinaan penataan ruang adalah upawa		penataan ruang
tuang. 4 Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkati yang utatas dari sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dari/ahatau aspek kingsional. 5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 6. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama melindungah delapah fungsi utama melindungah delapah fungsi utama melindungah delapah fungsi utama melindungah delapah fungsi utama melindungah delapah fungsi utama melindungah delapah fungsi utama melindungah kelestarian fingkungan hidup yang menecabup anam pentaban ruang dalah upaya agar penanfastan ruang dalah upaya agar pengelengaranan pentaban ruang dalah upaya agar pengelengaranan pentaban ruang dalah upaya agar pengelengaranan pentaban ruang dalah upaya agar pengelengaranan pentaban ruang dalah upaya agar pengelengaranan pentaban ruang dalah upaya agar pengelengaranan pentaban ruang dalah upaya agar pengelengaranan pentaban ruang adalah upaya untuk memujutkan struktur ruang dan pola ruang yang mengelapah pendelapan pentaban ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesual dengan ketentuan penduran pentaban ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesual dengan ketentuan penduran pentaban ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesual dengan terpatanan dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan pendalah wilayah yang mempunyai kegiahan utama pertanian termesuk pengelodanan penanfastan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesual dengan ketentuan pengeran	untuk mewujudkan tertib tata ruang.	moninglestics that tuding addidin upaya untuk		19 Pembinaan panata-
daerah dan masyarakat. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserita segenap unsur terkat yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/datu aspek kingsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama indunga adalah wilayah yang memiliki fungsi utama indunga adalah wilayah yang ditelapkan dengan fungsi utama melindungah utama melindungah utama melindungah utama melindungah adan budidaya. Kawasan indung adalah wilayah yang ditelapkan dengan fungsi utama melindungah kabesatahan lingkungan hidup yang mencekbung batan dan nilai sejarah serta budaya bungsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya atalah wilayah yang memulakan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan menusuja, terdi dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Pemanafaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang mentukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, peleyahan sebagai tempat permukiman perkesaan, peleyanan sebagai tempat permukiman perkesaan peleyanan sebagai tempat permukiman perkesaan perkenakan dalah wilayah yang mempunyai kegalaan dana bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan perkeksan Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata	diselenggarakan oleh pemerintah ruang yang		meningkatkan kinasi	
 Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segangan punsur terkati yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atalah wilayah yang memiliki fungsi utama dengar fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya butahan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditelapkan dengar fungsi utama berkelanjutan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dinarafaakan secara terencana dan terarah sehingga dipan berkelanjutan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dinarafaakan secara terencana dan terarah sehingga dipan berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdasan, pelayaran jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan tama berkotaan, permusakan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan terman perkotaan pemusakan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan terman perkotaan pemusakan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan terman perkotaan pemusakan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan terma perkotaan pemusakan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan terman perkotaan pemusakan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan terman perkotaan pemusakan dan distribusi bermatikan dan dan memilindung dalah wilayah yang memiliki fungsi utama melindung adalah wilayah yang memiliki fungsi utama melindung adalah wilayah yang memiliki fungsi utama melindung adalah wilayah yang memiliki fungsi	ruany.	daerah dan masyarakat		The management of the contract
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kawasan indung adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan indung adalah wilayah yang dietapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian ingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya atam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bang sa guna kepentingan pembanganunan berkelanjutan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang diretapkan dengan fungsi dana berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan pertanian dan kawasan budidaya pertanian termasuk pengelokan utama pertanian termasuk pengelokan subatuan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkesaan, pelayanan sosial dan kegiatan ckonomi. Kawasan perkotaan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan cerman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekonomi. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah wilayah kabupaten adalah mengan susunan dingasi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekonomi.	Wilayah adalah ruang yang merunakan kesatuan	20 Pelaksanaan manda	1	1
dan istermya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian fungkungan hidup yang mencekup sumber daya atam, sumber daya butand ana nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan akwasan budidaya adalah wilayah yang dimahilaalkan secara terencana dan terarah selingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan perananan peranan peranan peranan perananan n peranananan peranananan perananan perananan peranananan peranananan peranananan peranananan peranananan peranananan peranananan perananan peranananan ranananan per	geografis beserta segenan unsur terkait vang batas	20. relaksariaan penataan ruang adalah upaya	1	1 Gastan dan masyarakat
administralif dan/datau aspek fungsional. 5. Kawasan dalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 5. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya ang guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 5. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian dingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan hilai sejarah serta budaya ang guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 5. Kawasan budidaya arlalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusa, terdiri dari kawasan budidaya non pertanian. 5. Kawasan budidaya non pertanian. 5. Kawasan budidaya non pertanian. 5. Kawasan budidaya non pertanian. 5. Kawasan budidaya non pertanian. 6. Kawasan budidaya non pertanian. 6. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 5. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kawasan sebagai tempat permukiman perdesan, permukiman perdesan, permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 5. Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 6. Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 5. Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi dapat dan kegiatan ekonomi. 5. Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan perakan ruang adalah uapay ang	dan sistemnya ditentukan herdasarkan asaala	pencapaian tujuan penataan ruang melalui	}	20. Pelaksanaan penataan ruang adalah upa
 Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan indung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serata budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimahatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan perkesan, pelayanan, asa pemerintahah, pelayanan- sosial dan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan perkotaan permuskan dan distribusi pelayanan jasa permentahan, pelayanan sosial dan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permentahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan perkotaan permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permentahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan perkotaan permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permentahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permentakan ruang adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemangatan ruang adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemangatan ruang adalah wilayah yang ditentukan berdasarkan secara terencana tata ruang melakuin permukiman perkotaan,	administratif dan/atau asnek fungsional	pelaksanaan perencanaan tata ruang.		l Policapaidi luludii Denataan ruang malai
indung atau budidaya. S. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditelapkan dengan fungsi utama melindungi kelestariah ingkungan hidup yang mencakup sumber daya atam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dinanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi dehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegilatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya atam dengan susunan fungsi kawasan perdesaan perkesaan, peleyanan sosial dan kegilatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan perkesa	Kawasan adalah wiloyah wasa sa iliya s	penianiaatan ruang dan pengandalian		pelaksanaan perencanaan tata rusa
S. Kawasan lindung adalah wilayah yang diletapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan niali sejarah serta budaya bungsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dinantatikan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya perfarian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan distribusi pelayanan jasa permerintahan, pelayanan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan parkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan parkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang adalah upaya untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang melalui penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui penyusunan dan penetapan rencana tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang merupakan besorta pemberapan penetasan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan penataan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan penataan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan penataan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan penataan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan	liadung atau budidayan yang memiliki fungsi utama	pemanaatan ruang.		pemantaatan ruang dan panggar dalia
dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimantatakan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan suburan penentanian perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikan pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permikan pemusatan dan distribusi pelayanan jas	Kama a in a buddaya.	21. Pengawasan penataan ruang adalah unaya agar		pemanfaatan ruang.
dengan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdasaan adalah wilayah yang mempunyai kejatan utama perkotaan, pemusatan dan distribusi nengiatan eperkotaan, pemusatan dan distribusi apengkanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa permerintahan, perdasaan, pemusatan dan distribusi apengkanan jasa pemerintahan, pemusatan dan distribusi pengkanan jasa pemerintahan, pemusatan dan distribusi dan dan distribusi apengkanan jasa pemerintahan, pemusatan dan distribusi dan dalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susuman diwujukan tertib tata ruang adalah upaya untuk mewujukan struktur ruang dan pelaksanaan program beserta pemusakan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi dan	Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan	l boulderiddiggii benataan mana 3 i		21. Pengawasan penataan ruang adalah
perundang-undangan. Perencanaan tata ruang adalah suatu prose untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdaya guna dan berhasil guna bagi kebidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdasaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permitahan, pemusatan dan distribusi pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan gerkotaan gerkotaan gerkotaan, permusatan dan distribusi pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten dalah ruanga adalah wilayah yang mencakup sumber daya budakan dengan fungsi kawasan lindung adalah wilayah yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya budakan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan perkotaan pemusatan dan distribusi pelayanan perkotaan pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan perkotaan pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jakan pemusatan dan dist	gengan lungsi utama melindungi kelepterien	diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan		penyelenggaraan penataan upaya aga
sungsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelotana sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekonomi. 22. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang mengunya dapat berdaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang mengulayan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang mengulayan dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama perdesaan, pelayanan sosiai dan kegiatan utama perkotaan dalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekonomi. 23. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang merupakan kesarta ruang delah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang mempunya pembangunan perkotaan perdesaan perdesaan program beserta pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang mempunya pembangunan perdesaan perdesaan perdesaan program beserta pembinya permukiman perkotaan perdesaan, pelayanan sosiai dan kegiatan utama perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekonomi. 24. Pengendalian pem	lingkungan hidup yang mencakun sumber daya alam		1	diwujudkan sesuai dogga katat
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang melidul penyusunan dan penetapan rencana tata ruang adalah suatu prose menentukan struktur ruang dan pola ruang yang dimantalakan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan asa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan perkotaan, pelayanan perkotaan, pelayanan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan perkotaan, pelayanan perkotaan, pelayanan perkotaan, pelayanan perkotaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintaha	sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya l	22. Perencanaan tata ruang adalah suotu assa	1	perundang-undangan ketentuan peratura
berkelanjutan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdosan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan sosial dan kegiatan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan sosial dan kegiatan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.	pangsa guna kepentingan pembangunan l	menentukan struktur ruang dan melang proses untuk	1	i
Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekenomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekenomi. Kawasan lindung adalah wilayah yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam kenonomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah kabupaten adalah ruang yang mencakup sumber daya alam terarah sehingga dapat budi penyusunan dan perkatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencaan tata ruang melalui penyusunan dan perkasanan program beserta pembiayaannya. 24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang darah upaya untuk mewujudkan struktur ruang darah upaya untuk mewujudkan struktur ruang darah upaya untuk mewujudkan teribat tata ruang. 25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian	perkelanjutan.	meliputi penyusunan dan pensianan yang		menophykan at the mang adalah suatu proses untul
dinanfaalkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya atam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian tengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekonomi. Kawasan indung atau budi daya. Za Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang melalui penyusunan pembiayaannya. Za Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang melalui penyusunan pembiayaannya. Za Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang melalui penyusunan pembiayaannya. Za Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang melalui penyusunan pembiayaannya. Za Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang melalui penyusunan pembiayaannya. Za Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang melalui penyusunan pembiayaannya. Za Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang melalui penyusunan pembiayaannya. Za Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang melalui pe	Kawasan budidaya adalah wilayah yang	ruang		monomundi Silukili iliaha dan nole
dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permerintahan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekepiatan permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekepiatan permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekenomi. 23. Pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan penkasanan program beserta pembiayaannya. 24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sisteminya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. 26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dengan fungsi utama pembangungan pembangungan pembangungan pembangungan pembangungan pembangungan pembangungan pembangungan pembangungan p	dimanfaatkan secara terencana dan teraruh sehingga	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		menput penyusunan dan penelapan rencana tata
kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan perdesaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan utama perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 25. Pemantatan ruang adalah upaya memejayanan permanan pergeram tata ruang melaya paman paya pemenjayanan perdesaan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang menc	dapat berdaya guna dan berbasil guna basi	25. Pernamatan ruang adalah upaya untuk	1.	·g.
pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan kegiatan den distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan kegiatan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya bangsa guna kepentingan pembangungan pendanan program beserta pembaksanaan program pembayananya. 24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk mewujudkan tertib tata ruang. 25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dalah ruang yang mempulaki fungsi utama adalah wilayah yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya budaya bangsa guna kepentingan pembangungan pembangungan pembangungan pembangungan pembangungan p	Kehidupan manusia terdiri dari kawasan hudida	mewujuukan Siiukiir filang dan nola mang gagusi l	∫ 3	23. Pemanfaatan ruang adalah upaya uptuk
Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana sistem perkotaan adalah rencana sistem perkotaan adalah wilayah kabupaten dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan/atau aspek fungsional. 26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 27. Kawasan indunya dalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya budaya bangsa guna kepentingan pembangungan dalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang pembanganya. 28. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan/atau aspek fungsional. 29. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dalah fungsi utama pembanganya. 29. Kawasan lindunga dalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindung atau budi daya. 29. Kawasan lindunga dalah wilayah yang d	pertanjan dan kawasan budidaya pon portanjan	derigan renealla tata ruang melalui penyusupan l		
kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, erkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian tuang. 24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk mewujudkan tertib tata ruang. 25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta	Cawasan pordonaga adalah wii	pelaksanaan program besorta l		and tellegial to the state of t
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan sosial dan kegiatan dengan susunan fungsi kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. 26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 27. Kawasan lindung atau budi daya. 28. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. 28. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dan sistemnya ditentukan berdasarkan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 29. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. 29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama melindung atau budi daya. 29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama melindung atau budi daya. 29. Kawasan lindung atau budi daya. 21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk mewujudkan tertib tata ruang. 22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. 29. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya budaya bangsa guna kepentingan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pe	agistan, utama a antari	pembiayaannya.		pelansalidali ninniam hanad
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Zi Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan/atau aspek fungsional. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya budaya bangsa guna kepentingan pembangunan dalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya budaya bangsa guna kepentingan pembangunan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ruang adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya budaya. 27.	umber days elementarian termasuk pengelolaan	24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya	1	pembiayaannya.
jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertahah permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Zosi Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Zosi Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Zosi Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Zosi Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Zosi Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atala budi daya. Zosi Kawasan lindung atalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya budaya bangsa guna kepentingan pembangungan pembangungan dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Zosi Kawasan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya budaya bangsa guna kepentingan pembangungan pembangungan pembangungan dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Zosi Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Zosi Kawasan adalah vilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindunga dalah wilayah yang di		untuk mewujudkan tertib tata ruang	2	4. Pengendalian nemanfaatan nigas at t
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permerintahan, pelayanan sosial dan dengan fungsi utama melindungi kelestarian kegiatan ekonomi. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan sekonomi. Sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya bangsa guna kepentingan pembangunan alam, sumber daya hustan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Kawasan lindung atau budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya bangsa guna kepentingan pembangunan alam, sumber daya hustan yang nencakup sumber alam, sumber daya hustan yang nencakup sum	ebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan	25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kenal	İ	untuk mewujudkan tertih tata mang adalah upaya
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Rencana sistem perkotaan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan adalah rencana susunan fungsi utama dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan alam, sumber daya buatan dan perkotaan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan alam, sumber daya buatan dan palah rencana susunan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Kawasan lindung atau budi daya. 26. Kawasan lindung atau budi daya. 27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan alam, sumber daya b	isa pemerintanan, pelayanan sosial dan kegiatan	geografis beserta segenan uncur todali kesatuan	2	5 Wileyah adalah menangi
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan dan sistemnya ditentukan berdasarkan adan sistemnya ditentukan berdasarkan dan sistemnya ditentukan berdasarkan adan sistemnya adailah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan berdasarkan adan sistemnya ditentukan berdasarkan adan sistemnya ditentukan berdasarkan a	l l	dan sistemnya ditentukan bordasatas		Dengrafis boasts are yang merupakan kesatuan
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekonomi. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekonomi. 26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan dalah rencana susunan fungsi utama adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan	awasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai	administratif dan/atau aspok funccion d		
tungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekonomi. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susungan kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekonomi. 27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan lindung atau budi daya. 28. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 29. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindung adalah wilayah yang ditetapkan lingkungan hidup yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 29. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindung adalah wilayah yang ditetapkan lingkungan hidup yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 29. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindung adalah wilayah yang ditetapkan lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan lindung atau budi daya.	glatan utama bukan pertanjan dengan susunan li	% Kawasan adalah wit	· ;	Olocollitta Ciletilikan Powood
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekonomi. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susungan keguaran sosiai dan budi daya. 27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan dalah rencana susungan keguaran sosiai dan budi daya. 28. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fundang atau budi daya. 29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fundang atau budi daya. 21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang memiliki fundang atau budi daya. 29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fundang atau budi daya. 21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindung adalah wilayah yang ditetapkan lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan lingkungan hidup yang memiliki fundang atau budi daya.	ngsi kawasan sebagai tempat permukiman l	utama lindua adalah wilayah yang memiliki fungsi		Gudi dali/alali aspek filogelogol
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekonomi. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susungan keguaran satutungan pembangunan satutungan p	erkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan iasa	utama iindung atau budi daya.	26	. Nawasan adalah wilayah yang memiliki ku !
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosiai dan kegiatan ekonomi. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susungan keguaran satutusan keguaran keguaran satutusan keguaran keguaran keguaran keguaran keguaran keguaran keguaran keguaran ke	mukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi	wilded middly addid wildyan vang ditotoples		atama iniuuniy alah bildi daya
Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susuman kabupaten dara	elayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan	derigat fullusi litama melindungi kalastaria. !	27	Kawasan lindung adalah wilayah
Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susuman kabupaten budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan di milatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangsa guna kepentingan pembangga pembangga pembangga pembangga pembangga pembangga pembangga pembangga pembangga pembangga pem	giatan ekonomi.	iiigkungan nidup vang mencakun sumbor daya l	.	
adalah rengana susunan kerupanan pada-tah dari dan pilah salah pembangunan langsa guna kepentingan pembangunan		didili, Sullibel daya buatan dan nilai sejarah asata 1		""J" J" J" J" J" J" J" J" J" J" J" J" J"
pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang lasa berkelanjutan. berkelanjutan. berkelanjutan. budaya bangsa guna kepentingan pembangi	alan rencana susunan kawasan nada-ta	budaya bangsa guna kepentingan pembangunan l		
person registration of datafit wilayah Kabupaten yang loo kawasan pembahai	sai kegiatan di dolom wilayat t	berkelanjutan.		budaya bangsa guna kepentingan sejarah serta
Derkelaninian	out regidual of dalam wilayah kabupaten yang 28	3. Kawasan budi daya adalah	1	berkelanjutan.
28. Kawasan budi daya adalah wilayah yang 28. Kawasan budi daya adalah wilayah y	t di seni	badi daya adalah wilayah yang	28	Kawasan hudi

ĮΥ!	TARREST TO THE PROPERTY OF THE	RDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
	menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencar	dimanfaatkan seessa taraa	PERTANYAAN	DRAFT REVISION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
	yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupa	an terarah	A STATE OF THE STA	
	dan dominasi tungsi tertentu dalam wilaya			dimanfaatkan secara terencana dan terara
	kabupaten.	dove notes in indiada, teruir dan kawasan budi		
31.	. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdi	daya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian.	1	
	uan atas satu atau lebih pusat kenjatan nada wilaya	h 20 C-4 1455		portainan dan kawasan budi daya sa
	peruesaari sepagai system produksi pertanian da	, , , ,		/
	pengelolaan sumber daya alam tertentu yan	Kanana kangan Swip adalah beberapa wilayah		29. Satuan Wilayah Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan SWP adalah kelalah selanjutnya
	ununjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dar	yang memiliki keterkaitan fungsi l	j	
	hierarki keruangan satuan sistem permukiman dar	. L bendempangau.	l .	yany memiliki keterkeiten f.
	sistem agrobisnis.	The resident peruesadil analah wilayah was I	i	Pangambangan.
32.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutar	mempunyai kediatan litama pertanjan termenti	1	30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang
	adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan	' Pengelolddii Sumber daya alam dengan guaya -		
	menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan	' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
	membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan	perdesadir, perayanan iasa namorintahat l	1	
	pertanian pangan dan kawasannya secara	polayanan sosiai dan kediatan ekonomi	1	
	berkelanjutan.	31. Kawasan perkotaan adalah wilayah	1	pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
3		I monpunya keulalah lilama bukan sama-i	. 3	31. Kawasan perketaas adal k
٠.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah	I dengan susunan lungsi kawasan sahagai tamaat l		31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang
	bidang lahan pertanjan yang ditetapkan untuk	I Permovindi perkoraan nemucatan dan distrik si		mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
	dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna	Pelayaliali idad Dermiikiman nerkotaan nomusik	1	dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
	menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian,	I doubtold belavarian taga pamorintahan l		permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman pada di
! .	ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.	pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.		
۲.	adalah Berkelanjutan Pangan Berkelanjutan	32. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten	·	dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
		adalah rencana susunan kawasan perkotaan		Rencana sistem and delineration exonomi.
	pemanfaatannya agar kesesuaian dan	sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah		2. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten
	ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan	kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini	.	
	sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada	maupun rencana yang membentuk hirarki	ĺ	
,	masa yang akan datang.	pelayanan dengan yang membentuk nirarki pelayanan dengan dengan dan dominasi fungsi	ļ.	Tanu menininkyan katastan
. 1	Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang	tertentu dalam wilayah kabupaten.		
٠.,	penalaan ruangnya diprioritaskan karena mempinyai-l	33. Pusat Keciatan Macional	1	Figure delical rakinan dan damin i
- 1	pengaruh sangat penting secara nasional terhadan l	33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut	33.	The saidin whatan valuated
•	kedadiatan negara, pertahanan dan keamanan l	PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi	J 33.	
- 1	negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau l	untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.	•	
. 11	ingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetankan l	34. Pusat Kegiatan Wilayah yang salasi d	. 1	
5	sepagai wansan dunia.			The state of the s
K	Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang	1 TVV audidit Kawasac nerkotaan yang bortungsi t	34.	Pusat Kegiatan Wilayah yang palasi k
ρ	penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 1	arrow melayani kediatan skala provinci otov l		
·'n	pengaruh sangat penting dalam lingkun provinci l	beberapa kabupaten/kora.		The molarati Recipient evolution beautiful
te	erhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau	35. Pusat Kegiatan Lekal yang selanjutnya disebut		
lir	ngkungan, dan katau	in audidit kawasan perkotaan yang berfungsi l	35.	Pusat Kegiatan Lokal yong and the
		untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau		
			• '	untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau

2	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOOR	<u> </u>	ISI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	ÇÃĐ	AN/MASUKAN	The Area	The San Associated Indiana San Association (Control of San
P	ERUA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-203	建度	DRAFT REVISI	P	RTANYAAN:	V.	SESUDAH KORLINSEK
37	7. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yan	1	beberapa kecamatan.	5 P			DRAFT REVISI
	penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunya	1 / 2	6. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya				beberapa kecamatan.
	pengaruh sangat penting dalam lingkup daeral) `	disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang				36. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya
	terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau		berfungsi untuk melayani kegiatan skala			j	disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang
	lingkungan.		kecamatan atau beberapa desa.			j	berfungsi untuk melayani kegiatan skala
5.	. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang	3	7. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya				reconnatan atau peperapa desa
	meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunar	1	disebut PPL adalah pusat permukiman yang			İ	37. Pusat Pelayanan Lingkungan yang salari k
	pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan		berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar			1	dioopat it audidii niissi normukiman
	bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah,		desa.	•			berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar
	di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah	38	3. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri			- 1	desa.
	dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;		dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada			[38. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri
	Wildruch sungai adalah kasatasan ili		wilayah perdesaan sebagai system produksi				dan alas salu alah lehih nusat kasistan
•	Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan	1	pertanian dan pengelolaan sumber daya alam			- 1	wildydii peruesaan senagai evetom and duri
	sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya		tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan				Portainan udii pendelolaan eumbor dous -i-
	kurang dari atau sania dengan 2.000 km2.		lungsional dan hierarki keruangan sajuan sistem l				Circuita yang ulumukkan olah adanya katadi is
	Daerah aliran sungai adalah autah di ka		permukiman dan sistem agrobisnis.			j	rungsional dan nierarki kernangan sahaa sistem
•	Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan	39	. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang				Demindri dali Sistem agrobishis
	yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,		meliputi segala bagian jalan, termasuk bandunan l			;	39. Jalan adalah prasarana transportasi dasat irang
	menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari		peiengkap dan perlengkapannya yang			1	menput segala baylan lalan, termasuk hangunan l
	curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang		diperuntukkan bagi lalu lintas, yang herada pada			ļ	Politighap (Idf) Derlenakananaya
	batas di darat merupakan pemisah topografis dan		permukaan tanan, di atas permukaan tanah di l			1	diperuntukkan badi lalu lintas yang boroda 1
	batas di laut sampai dengan daerah perairan yang		pawan permukaan tanah dan/atau air, serta di atas l				pornucadii lalidii. Qi alas nermukaan tanah 😅 l
	masih terpengaruh aktivitas daratan.		permukaan air, kecuali jalan kereta ani, jalan lori 1				bawan pennukadi (Bhan dan/atan air sorto di atta 1
	Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur	40	dan jalan kabel.		:	╽.	permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
	dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih	40.	Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi			1	dan jalah kabel.
	persitat terbuka, tempat tumbuh tanaman, haik yang l		melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan l			4	0. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi
	tumbuh secara aiamiah maupun yang sengaja		Jarak Jaun, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah l			- 1	molecular displayed the manage of the second
	ditanam.	44	jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.			- 1	Jaran Jauli, Reception rata-rata finanti don timo
	Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut	41.	Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi			111	Jeidir masuk ulbatasi secara berhaya nuna
	PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk		melayani angkutan pengumpul atau pembagi	·		· T.	Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi
	melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau	•	dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan				molutain anukiran nananmani atak
	beberapa provinsi.	12	rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.			- 1	dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan
	Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut	+4.	Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi			142	Take rate occupilly, their littless reports while at the state of
	PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi l	-	melayani angkutan setempat dengan ciri	٠.		72	Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi
	untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa		perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.		•	1	moordin diuniidii setempat dana
	kabupaten/kota.	43	lalan behas hombeten adit i i i i i i i i i i i i i i i i i i		•	- }	perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
	Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL	٠٠.	Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk		•	43	Jalan hehas hambatan additional and the same
ì	adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk l		lalu lintas menerus dengan pengendalian jalah		•		Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk
1	melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa		masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan				lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya
			r			Ι.	persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan

45. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kewasan perkotaan yang direncanakan akan bertungsi melayari kegiatan skala kabupatan adalah keterutan yang direncanakan akan bertungsi melayari kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan dara kewasan perkotaan yang berfugui dalah kewasan yang berfugui dalah keterutan yang berfugui dalah keterutan yang selanjutnya disebut PKL adalah busat permukianan pangka menengah Ima kabupatan perkotaan yang selanjutnya disebut pkerpakan Kawasan perkotaan yang selanjutnya disebut pkerpakan kakawasan perkotaan yang berfugui nutuk melayari kegiatan skala antar desa. 47. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut kawasan perkotaan salah bertung dalah permukianan pang berfugui nutuk melayari kegiatan skala antar desa. 48. Arian penandaan nuang wilayah kabupatan apara wilayah untuk menyajari kegiatan skala antar desa. 49. Arian penandaan nuang wilayah kabupatan apara mengan wilayah untuk menyajari kegiatan skala antar desa. 49. Arian penandaan nuang wilayah kabupatan pengantan mengan mengan wilayah untuk menyajari kegiatan skala antar desa. 49. Arian penandaan nuang wilayah kabupatan pengan keritan pengandaan pengan wilayah kabupatan pengandaan mangan permukan terasah pengandaan pengan wilayah kabupatan pengandaan pengan keritan pengandaan pengan keritan pengandaan pengan	AFT-RAPERDA SEBELUM KOORDINAS	INTAS SEK FOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	
45. Pissat Kogistan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PRL padaha kawasan perketanahan sakab semusa air yang terdapat pada, di atas, atupun di bawah permukaan sanah, termasuk dalah semusa air yang terdapat pada, di atas, atupun di bawah permukaan sanah, termasuk dalah pengeritah ini air permukaan, air hajan, dalah semusa air yang terdapat pada, atupun di bawah permukaan sanah, termasuk dalah pengeritah ini air permukaan, air hajan, dan air latul yang berada di darat. Pissat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusst permukiman yang berada di atar. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang berfungsi untuk melayani keglatan sakal kabupaten pada permukaan tanah. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut permukiman pengeritahan air air dasa. Air hahan pengeritahangan wilayah untuk melayani keglatan sakal antar dasa. Air ham pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengeritahangan wilayah untuk melayani keglatan sakal kangan pengahan melalah pengeritahan dan dalah pengeritahan dalah pengeritahan dan dalah pe	MINADUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
deseut PRUs addah kawasan perkotaan yang dengaran kada bertungsi melayan kegiatan skala kecamatan skala bertungsi melayan kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 6. Pusat Pelayanan Kawasan perkotaan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukanan tanah salah semua air yang terdapat dalam lapisan dalah untuk melayani kegiatan skala ata desa desa desa permukaan tanah. 7. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukanan tanah dalah air yang terdapat dalam lapisan dalah arahan pengerhanan skala antar desa. 8. Arahan pemantahatan ruang wilayah kabupaten basata bahatan pengembangan wilayah untuk merujudakan struktur ruang dan pelaksanaan program pentahan/pengembangan wilayah untuk bergara bebasara penderpembangan kabupaten basarat pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama, bubupaten basarat pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama, sumber pendanaen, instansi pelaksana disaksun untuk selap bibuktona peruntukan yang mengatur lentang penyaran mengatur lentang penyaran mengatur lentang penyaran dan rebaksanaan. Peraturan zonasi adalah keretutan yang mengatur lentang penyaran utama, lokasi pengendahanyan mempathan dalah air bungan yang selanjutnya disebut dalah air bungan yang berasal dari mengan atan dalah semua air bunga pengendahanyan mempathan kerupat pengendahanyan mempathan kerupat pengendahanyan mempathan pengendahanyan mempathan pengendahanyan mempathan kerupat pengalah mengalah pengalah		pagar ruang milik jalan.		DRAET/REVISIA PROPERTY OF THE
uioseuti PPLD adara kewasan perkolaan yang di rencanakan abrungsi mang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayan keglatan kala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingtungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukanan yang berfungsi untuk melayan keglatan skala aritar desa. Arihan pemanfaatan ruang wilayah kubupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudakan sutuktur ruang dan polar ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melatu penyusunan dan pelaksanaan pergambangan kabupaten beserta penpenbangan RTRW kabupaten melatu penyusunan dan pelaksanaan pengembangan kabupaten beserta penpenbangan kabupaten pengan pentangan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan pentangan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan pendalah pengan kabupaten pengan pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan kabupaten pengan pengan kabupaten pengan pengan kabupaten pengan pengan kabupaten pengan pengan kabupaten pengan pengan kabupaten pengan pengan kabupaten pengan pengan kabupaten pengan pengan kabupaten pengan pengan pengan pengan pengan pengan pengan pengan pengan pe	Lokai promosi yang selanjutnya 44.	Air adalah semua air yang terdanat pada, di atas		pagar ruang milik jalan
Radupaten atau beberapa kecamatan Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Arahan penandatan nang milayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah kabupaten sesual dengan RTRW kabupaten menujudkan strottur ruang dan pota ruang wilayah kabupaten sesual dengan RTRW kabupaten menujudkan strottur ruang dan pota ruang wilayah kabupaten sesual dengan RTRW kabupaten menujudkan strottur ruang dan pota ruang wilayah kabupaten sesual dengan RTRW kabupaten menujudkan sanan pengembangan wilayah kabupaten sesual dengan RTRW kabupaten menujudkan sanan pengembangan kebupaten berataan/pengembangan kebupaten berataan/pengan timak timun tunah tangga yang beratan/pengan timak timun dalah pangan pengelahan atau tangan berataan/pengan timak timun dalah pangan pengelahan atau balawan debatan dibakan timun dalah pangan pengelahan atau balawan debatan dalah atau dalah dalah atau dalah dalah atau dalah dalah dalah dalah dalah dalah dalah d	dalah kawasan perkotaan yang di	ataupun di bawah permukaan tanah termasuk		44. Air adalah semua air yang terdenah "
5. Pusat Pelayanan Kawasan perkanan yang berlanjuhnya disebut PPL adalah musah perkanan katu beberapa dasa. 7. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjuhnya disebut PPL adalah pusat permukinan yang berfungsi untuk melayani kegilahan skala antan dasah batun di bawah permukaan tanah. 7. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjuhnya disebut PPL adalah pusat permukinan yang perfungsi untuk melayani kegilahan skala antan dasah satu batuan di bawah permukaan tanah. 7. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjuhnya disebut PPL adalah pusat permukinan yang perfungsi untuk melayah kejalahan kelayah kejalahan kelayah kejalahan pengembangan wilayah katupaten madalah arahan pengembangan wilayah katupaten melatui penyusunan dan pelaksanaan program utana, dan waktu pelaksanaan program utana, sumber pendanaan, instansi pelaksana, program utana, sumber pendanaan, instansi pelaksana, ang program utana, sumber pendanaan, instansi pelaksana, program utana, sumber pendanaan, instansi pelaksana, program utana, pendangatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dalah sumul utuk selap biok/zana permutikan yang penetapan zonanya dalam rencana rind tala ruang. 8. Peraturan zonasi adalah kebentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dalah selaksana pengara utana jengka menengah lima tahunan dalah petunjuk yang memuat usulan program utana, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, zonanya dalam rencana rind tala ruang. 8. Peraturan zonasi adalah kebentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dalah selaksana dalam ranaban dalah permukikan yang memuat usulan program utana, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, zonanya dalam rencana rind tala ruang. 8. Peraturan zonasi adalah kebentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dalah selaksan dalam ranah dalah selaksan dalam ranah dalah pemanfaatan ruang dalah selaksan dalam ranah dalah selaksan dalam ranah dalah selaksan dalam ranah dalah selaksan dalam ranah dalah selaksan dalam ranah dalah selaksan dalah ranah pemanfaatan ruang dalah tentan berlangsung pengaliran,	berfungsi melayani kegiatan skala	Jaidin pengenjan ini air permukaan air tanah air		ataupun di bawah permukaan tanah
PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan yang setanjunya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Arahan penandaatan ruang wilayah kabupaten adalah samah antah adalah air yang terdapat dalam tanga yang selanjuhnya disebut kiri baku adalah air yang dapat bermukikan pengembangan wilayah untuk menujukkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesal dengan RTRW kabupatan menandalah ruang wilayah kabupaten adalah kelentuan yang mengatur tantah pengembangan wilayah menujukkan samu tangan yang menandah samu tertentus sebagai air baku untuk air minum umah tangga yang menandah samu tertentus sebagai air baku untuk air minum dalah air minum tumah tangga yang menatanah pengembangan kabupaten besarat pembipayannya, dalam suatu indikasi program utama, paku menengah lima tahunan adalah sir bungan yang berasal dari sumber air bungan yang menandah muang wilayah kabupaten pengendalannya dan disusun untuk selaja samu tangah pengaliran air muang dalam renana ninci tata ruang. Ari limbah adalah air yang terdapat dalam tangah yang selanjuhnya disebut kair minum mah tangga yang menentuh tarih tertentus sebagai air baku untuk air minum undalah air minum rumah tangga yang menistan/pengembangan kabupaten ayang memenuhi syarat kesehat dalam tangah program utama, lokasi besaran, waktu pelaksanaan, samber dan, adalah tengal-tengah pengaliran air mulai dari mahatan iruang wilayah kabupaten ayang menangah manusian dari bangan pengaliran air mulai dari mahatan mini tata ruang. Ketentuan pengendalan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan-yang dibuat atau disusun dalam ungan bermakangan pengaliran air mulai dari masa air sangai manusia dari mana mangabupat pengaliran air mulai dari masa air sangai manusia dari mana sangak menengah lima tahungan pengaliran air mulai dari masa sampai manusia dengan manusia dengan pengaliran air mulai dari masa sangai manusia dengan peng	eberapa kecamatan	nujan, dan air laut yang berada di darat		dalam pengertian ini air permukaan siat
program dalam kedalam perkolaan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjuhnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten pengaliran skala kecamatan atau beberapa kefungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 45. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjuhya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayan kegiatan skala antar desa. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program dan pelaksanaan program dan pelaksanaan program dan pelaksanaan program dan pelaksanaan dan penbasanaan program dan penbasanaan program dan penbasanaan program dan penbasanaan program dan pelaksana, dan waktu pelaksanaan, an waktu pelaksanaan, an waktu pelaksanaan, an waktu pelaksanaan, an waktu pelaksanaan, an waktu pelaksanaan dan pendah pe	Kawasan yang selanjutnya disebut 45.	Air permukaan adalah semua ais yang tani	1	hujan, dan air laut yang berada di darah
desa. Pusat Pelayana Lingkungan yang selanjuhnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiahar skala antara desa. Arahan pemanfiaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyasuan dan penjaksananan penjambangan kabupaten beserta pemahayaannya, dalam suatu indikasi program ulama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang bersi rencana program utama, sumber pendahan yang dalam suatu indikasi program untuk selap biokizona penruhkan yang mengalur tentang persyaratan pemandaatan ruang daraketentuan yang mengalur tentang persyaratan pemandaatan ruang daraketentuan pengendalannya dalam selama pengendalan yang mengalur tentang persyaratan pemandaatan ruang daraketentuan pengendalannya dalam selama pengendalan yang mengalur tentang persyaratan pemandaatan ruang daraketentuan pengendalannya dalam selama dalah ati buangan yang berasi dara mumuk selap biokizona pentulkan yang pentapaan zonanya dalam rencana ninci tala ruang. 50. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah bertangsung. 51. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah pemandalan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan ribatasi ketentuan yang dibatasi oleh batas hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah bertang sunga selanjutnya disebut dara mang mengalur mang pengaliran, dan pelepasan air tanah batakan dalam rang selanjutnya disebut dara mang mengalur mang pengaliran yang pengaliran yang dibatasi oleh batas hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah batakan dalam rang selanjutnya disebut dara mang mengalur mang pengaliran yang dibatasi oleh batas hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah dadah air yang terdapat dalam lamahatan dalah terman dalah air yang derapat dalam m	isan perkotaan yang berfungsi untuk	ada permukaan tanah	1	45. Air permukaan adalah asasa
Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang deriungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Arahan pengemantaan ruang wilayah kupuaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk melayan kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program untuk pengembangan walayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program utama jangka menengah lima tamuan kabupaten beserta pembigaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tanuang. Resturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk selap blokzona peruntukan yang pentapan zonanya dalam renoana rinci tata ruang. Kelentuan pengendalian pemanfaatan mang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten ang pengaliran, ang pengalirannya oleh garis permukkan perindan dalah untuk ari mirum rumah tangga yang mentatan pengengaliran yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung dirinium. 8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang mentatan program utama, bumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. 9. Air inium adalah air minum rumah tangga yang mentatan program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dalam ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk selap blokzona peruntukan yang penetapan zonanya dalam ruang walam renoana rinci tata ruang. 50. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batasi hari pangka menengah lima tanah yang selanjutnya disebut cata pengaliran, dan pelepasan air tanah bertangsung. 51. Sungai adalah ketentuan yang pengaliran rangka mengan dibatasi kanah dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mudal dari mata air sangai mudalah ketentuan pengan pengaliran rangka mengan dibatasi kanan dan kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten angar berbertuk ketentuan sengai mudalah wadah air yang terbertuk ketentuan yang		ir tanah adalah air uma tutu an a		nada permukaan tanah semua air yang terdap
disebut PPL adalah pusal permukiman yang berfungsi untuk melayan kegalah sakala antar desa. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk melyain kegalah sakala antar desa. Arahan pemanfaatan ruang dan pola tuang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melatui penyusunan dan pelaksanaan program utama jangka menengah lima tahunan kebapaten yang bersati dari suntuk setiap biok/zona peruntukan yang mengalur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dalah iar imituh setiap biok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana ata tangan yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang terbentuk selapah biok/zona peruntukan yang mengalur dalah selatu angan yang bersasi dari sumber selatu biokas pengelahan yang termasuk tinja manusia dari sundalah ketentuan yang mengalur dalah selatu angan yang penetapan zonanya dalam rencana indi tata ruang. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang delah tempat-tempat dan wadah-wadah sertu sepanjang pengaliran, dan pelepasan air tahah beriangsa pengaliran, dan pelepasan air tahah beriangsa pengaliran, dan pelepasan air tahah beriangsa pengaliran, dan pelepasan air tahah beriangsa pengaliran, dan pelepasan air tahah beriangsa pengaliran katan pengaliran air mulai dari mata air utah yang terbentuk selapah beriangka peng	1 .0.	and additional air yang terdapat dalam lapisan		i Pasa pormukadii (dilal).
disebut PPL adalah pusal permukiman yang berfungsi untuk melayan kegalah sakala antar desa. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk melyain kegalah sakala antar desa. Arahan pemanfaatan ruang dan pola tuang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melatui penyusunan dan pelaksanaan program utama jangka menengah lima tahunan kebapaten yang bersati dari suntuk setiap biok/zona peruntukan yang mengalur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dalah iar imituh setiap biok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana ata tangan yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang terbentuk selapah biok/zona peruntukan yang mengalur dalah selatu angan yang bersasi dari sumber selatu biokas pengelahan yang termasuk tinja manusia dari sundalah ketentuan yang mengalur dalah selatu angan yang penetapan zonanya dalam rencana indi tata ruang. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang delah tempat-tempat dan wadah-wadah sertu sepanjang pengaliran, dan pelepasan air tahah beriangsa pengaliran, dan pelepasan air tahah beriangsa pengaliran, dan pelepasan air tahah beriangsa pengaliran, dan pelepasan air tahah beriangsa pengaliran, dan pelepasan air tahah beriangsa pengaliran katan pengaliran air mulai dari mata air utah yang terbentuk selapah beriangka peng	n Lingkungan yang selanjutnya 🛺	anan alau baluan di bawah permukaan tanah.		40. Air tanan adalah air yang terdapat dalam lapisa
berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah kabupaten sessuai dengan RFRW kabupaten anga kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang derisi rencana program utama pensi kanan pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang derisi rencana program utama jangka tenengah lima tahunan kabupaten yang derisi rencana program utama jangka tenengah lima tahunan kabupaten yang derisi rencana program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang derisi rencana program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang derisi rencana nindi tala ruang. 49. Air limbah adalah air minum rumah tangga proses pengolahan yang pengalahan yang	dalan pusat permukiman yang l	ar baku untuk air minum rumah tangga, yang		I TO DAILUGII UI DAWAN NORMUMAAN IAM-L
Aranan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuh isaku mutu terlentu sebagai air baku untuk air mirum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuh isayarat kesehatan dan dapat tangsung diminum. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuh isyarat kesehatan dan dapat tangsung diminum. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuh isyarat kesehatan dan dapat tangsung diminum. 5. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuh isyarat kesehatan dan dapat tangsung diminum. 5. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuh isyarat kesehatan dan dapat tangsung diminum. 5. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuh isyarat kesehatan dan dapat tangsung diminum. 5. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuh isyarat kesehatan dan dapat tangsung diminum. 5. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuh isyarat kesehatan dan dapat tangsung diminum. 5. Air minum adalah air minum rumah tangga yang memenuh isyarat kesehatan dan dapat tangsung diminum. 5. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari rumah tangga pengaliran, dan pelepasan air tanah yang selanjutnya disebut dalah petunjuk yang memenuh separan air tanah pengaliran, dan pelepasan air tanah pengaliran, dan pelepasan air tanah	elayani kegiatan skala antar desa	cidilluliya UISEDUI ali bakii adalah air yang danat		47. All Daku untuk air minum rumoh tanana
adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesual dengan RTRW kabupaten melatur penyusunan dan pelaksanaan program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang mengahar tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang mengahar tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang mengahar tentang persyaratan pemanfaatan ruang dalah ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang mengahar tentang persyaratan pemanfaatan ruang dalah ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang mengahar tentang persyaratan pemanfaatan ruang dalah ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang mengahar tentang persyaratan pemanfaatan ruang dalah petunjuk yang dibatasi oleh batac hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, tempat semua kejadian program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang mengendalikan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dan, dan instansi pelaksana dalam rangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang mengendalikan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan-sumber dan, dan instansi pelaksana dalam rangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang dibatasi oleh batac hidrogeologis, tempat semua kejadian program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dan, dan instansi pelaksana dalam rangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang dibatasi oleh batac hidrogeologis, tempat semua kejadian program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dan, dan instansi pelaksana dalam rangka menengah lima tahunan dalah petunjuk yang dibatasi oleh batac hidrogeologis, tempat semua kejadian program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang waktu pelaksanaan, dan ketentuan pengendalian pemanfaat	latan ruang wilayah kabupatan	erasar udir sumber air dermukaan cekungan sis		and a discount of the second s
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penaksanaan program penaksanaan program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang beris rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang diah petunjuk yang menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menengah lima tahunan adalah petunjuk yang menengah lima tahunan adalah petunjuk yang mengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 51. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung, pengaliran, dan pelepasan air tanah pengaliran, dan pelepasan air tanah pengalirannya oleh garis sempadan. 52. Waduk adalah wadah wadah wadah wadah wadah serta jaringan pengalirannya oleh garis sempadan. 53. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah ketentuan pengaliran air mulai dari mata berlangsung pengalirannya oleh garis sempadan. 54. Air minum adalah air buangan yang berserat dari rumah tanga termasuk tinja manusia dari rumah tanga termasuk tinja manusia dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman. 55. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut wasan dalam ruang wilayah kabupaten yang berserat wasan air tanah bari barangan pengaliran air mulai dari mata wasan pengaliran air mulai dari mata wasan pengaliran yang mengalah pengalirannya oleh garis semajam pengaliran yang dibatasi kanan dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran ya		man udni/aldu aif Nujan vang memenuhi baku l		ooldoor dail sufficiel all normittage colours
48. Air minum adalah air minum rumah tangga yang menataan/pengembangan kabupaten melatui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang menataan/pengembangan kabupaten beserta permisiayaannya, dalam suatu indikasi program utama pangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Peraturan zonasi adalah ketentuan, yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dahakusun untuk setiap biok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam menatuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap biok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mencana tata ruang. Keientuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dibuat adalah wadah air yang terbentuk sebagai air baku utanpa program utama, termua dapat langsung diminum. 44. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melatu tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehata dar dapat langsung diminum. 45. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari ingkungan permukiman. 56. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batac hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah bertangsung. 56. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kangunan bendungar, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. 57. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungar, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung	fire groups day 1	iutu tertentu sebagai air baku untuk air minum		which delivered dil lillian Vand momenti i
penytsunan dan pelaksanaan program benataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Indikasi program utama, jokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka menengah lima tahunan adalah ketentuan-ketentuan yang dibutasi oleh garis sampai mutam dalam rangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka menengah lima tahunan adalah ketentuan-ketentuan yang dibutati dengan pengaliran air mulai dari mata air sampai mutam dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengaliran air mulai dari mata air sampai mutara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengaliran air mulai dari mata air sampai mutama dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengaliran air mulai dari mata air sampai mutama dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengaliran air mulai dari mata air sampai mutama dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengaliran air mulai dari mata air sampai mutama dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengaliran air mulai dari mata air sampai mutama dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengaliran air mulai dari mata air sampai mutama dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengaliran air mulai dari mata air sampai mutama dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengaliran air mulai dari mata air sampai mutama dengan dibatasi kanan dan kirinya s	dengan DTDW kebusatan 148.	r minum adalah air minum rumah tangga yang		mata to terita sepanal air nakii iintib oir mia
perlataran pengendalan kabupaten beserta pembiayaanannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sapan jangka mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendelian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang sebasua dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendelian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ayang sebasua dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendelian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ayang sebasua dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendelian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ayang sebasua dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendelian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ayang sebasua dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendelian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ayang sebasua dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendelian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ayang sebasua dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendelian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ayang sebasua dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendelian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ayang sebasua dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendelian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ayang dibuat alah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alaur bandarah pelak pengelolaan yang selanjutnya disebut wasa dalam rencana tata tata unang. Malam renc	lan nalokonomi	elalui proses pengolahan atau tanna proces l	1	To All Hillum adalah air minum nimoh tanan
pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengeliran yang penetapan zonanya dalam rencana inci tata ruang. 50. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran yang memuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana dalah ketentuan-ketentuan yang dibuat dana dalah ketentuan-ketentuan yang dibuat dana dalah ketentuan-ketentuan pengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adara sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuar undum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan peraturan zonasi, ketentuan peraturan zonasi, ketentuan peraturan zonasi, ketentuan peraturan zonasi, ketentuan peraturan zonasi, ketentuan peraturan zonasi, ketentuan peraturan zonasi dalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daetar aliran sungai dalam huara dara peraturan peraturan peratur	nangan kabupatan I	ingolarian yang memenuhi syarat kesebatan dan 1	1	moduli proses pendolanan stau topos
jangka menengah lima tahunan kabupaten yang beristi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/izona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisasi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/izona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisasi pelaksana, dan waktu pelaksanaan peruntukan yang mengaliran dan peruntukan yang mengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dibatasi kanan dalah ketentuan-ketentuan yang dibatasi kanan dan kabupaten yang berserti proses pengimbuhan, pengaliran air mulai dari mata air sampa mengaliran air mulai dari mata air sampa mengaliran air mulai dari mata air sampa mengaliran ruang wilayah kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berserti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampa pengaliran yang pe	alam suatu indikasi program uta	ipat langsung ciminum.	İ	Pongolation your memential systat keephoton de
berist rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan arencana itata ruang. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kriniya serta sepanjang pengaliranya oleh garis sempadan. Sungai adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan permanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan mumum peraturan zonasi, ketentuan panksi (finja mansusia dari lingkungan permukiman. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batac hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasaan air tanah berlangsen. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kaserta sepanjang pengaliranya oleh garis sempadan. Suga dalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungar, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu alu lebih daerah aliran sungai ketentuan insentif dan disinsentif dan dis	lima tahunan kabupatan yang 49.	r limbah adalah air buangan yang berasal dari		aapar angoniy dilliildin.
Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batac hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta jaringan pengalirannya oleh garis sempadan. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta jaringan pengalirannya oleh garis sempadan. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sempai dalam hal ini bangunan bendungar, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sepanjang pengaliran air mulai dari mata air sepanjang pengaliran air mulai dari mata pengaliran pengaliran air mulai dari mata pengaliran pengaliran air mulai dari mata pengaliran pengaliran air mulai dari mata pengaliran pengalir	Gram utama sumber pendangan	mah tangga termasuk tinia manusia dari		49. Air limbah adalah air buangan yang basa ka
Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jengka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jengka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jengka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jengka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jengka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jengka menengah lima serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 51. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 52. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungar, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. 53. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah ketentuan-wetertuan-ketentuan yang dibatasi oleh batas hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 54. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sempa dibatasi kanan dan kirinya serta jaringan pengalirannya oleh garis sempadan. 55. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut dalah ketentuan yang dibatasi oleh batas hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 56. Cekungan air tanah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 56. Cekungan air tanah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeolog	dan waktu nelaksanaan	gkungan permukiman.		rumah tangga termasuk tinia manusia
tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka meneujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berbentuk ketentuan dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berbentuk ketentuan pengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berbentuk ketentuan peraturan zonasi, ketentuan peraturan zonasi, ketentuan peraturan zonasi, ketentuan pengendifi serta arahan sansisi dalam satu atau ubih daerah aliran satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam satu atau lebih daerah aliran sungai air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai air d	adalah ketentuan yang 50.	kungan air lanah yang selanjutnya disahut CAT		lingkungan permukiman
blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinct tata ruang. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan, mperaturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi	tan nemanfactor mengatur	alah suatu wilayah yang dibatasi oleh batasi	1 :	50. Cekungan air tanah yang salarist
semuakan yang penerapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan gar RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta araban sanksi dan/atau pulau-pulau kecil yang tasaya kurasa	aliannya dan diauawa wat t	rogeologis tempat somus kaisati	·	adalah suatu wilayah yang selanjutnya disebut CAT
dalam rencana rinci tata ruang. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan perizinan, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan/atau pulau-pulau kecil yang liasaya kupasa	and the date disustrate the sellant.	- Ciacian	1	hidrogeologis tompet
Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan peraturan zonasi, ketentuan perizinan, dan pelepasan air tanah berlangs serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 52. Waduk adalah wadah air yang terbentuk seladah. Waduk adalah wadah air yang terbentuk seladah dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. 53. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut wadah perigelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang tasaya kurang air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang tasaya kurang air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang tasaya kurang air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang tasaya kurang air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang tasaya kurang air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dari dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang tasaya kurang air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dari dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dari dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dari dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dari dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dari dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dari dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dari dalam satu atau lebih daerah aliran sungai d	tata ruona	ngaliran, dan pelenasan air tapah barlangan,		hidrogeologis saporti semua kejadian
tartunan adalan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan pengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan untum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi	tata ruang.	anai adalah tempat tempat t	1	pengaiiran dan pelanggan sistem pengimbuhan,
sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan peraturan zonasi, ketentuan perizinan, dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 52. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. 53. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. 54. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. 55. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.	utama jangka menengah lima	la jaringan pengaliran sia salah wadah-wadah	5	1. Sungai adalah Arma dan berlangsung.
sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan peraturan zonasi, ketentuan perizinan, dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 52. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. 53. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. 54. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. 55. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.	petunjuk yang memuat usulan	nai muara dongon dibatasi la	1	serta iaringan nagar-tempat dan wadah-wadah
mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan yang dibuat adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi	asi, besaran, waktu pelaksanaan,	a sepanjang pangalisas Kanan dan kirinya		oota jannyan pengaliran air mulai dari
rencana tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi	instansi pelaksana dalam rangka	onadan pengalirannya oleh garis		- July mudia uchuan dinafasi kanan dan kist
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan perizinan, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam satu atau lebih daerah aliran sungai ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi				osta sepanjang pengalirannya oleh goria
kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan perizinan, ketentuan perizinan, ketentuan perizinan, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi	J2. VI	at dibensuarian wadan air yang terbentuk sebagai	50	Pagan.
atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dibuat alur/badan/palung sungai. 33. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang	alian nemanfaatan ruang wilough l	di dibanguninya pandinan singai dalam bal isi l) 52	waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai i
atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang berbentuk berbentuk pelet alur/badan/palung sungai. 53. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daera	ketentuan-ketentuan yang dibuat l	guildii Dengungac, dan herbentuk poloboron l		
dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan/atau pulau-pulau kecil yang terangan disebut WS 33. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS 43. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS 53. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut was umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan/atau pulau-pulau kecil yang terangan sanksi dalam satu atau lebih daerah aliran sungai air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut ws adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah al	alam upaya mengendalikan l	padan/palung sungai.		varigation belloutified than herbonius malat
umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan/atau pulau-pulau kecil yang tuasnya kurang disebut adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber day	Wilayah kabupaten agar sesuai 1 00. W	yan sungai yang selanjutnya disebut WS		with budging sinnar
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan/atau pulau-pulau kecil yang kusang kurang dan/atau pulau-pulau kecil yang kusang kurang dan/atau pulau-pulau kecil yang kusang dan kusang da	Daten vang berbentuk ketentuar 1 - au	an kesatuan wilayah pengelolaan sumbor daya 1	53	. Wilayah sungai yang selanjuinya disebut we
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang air dalam satu atau lebih dagrah air	ZONASI, ketentuan nerizinan l	laidill Satu atau lebih daerah aliran sungsi l	1	
	n disinsentif, serta arahan sanksi da	atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang	ſ	air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang

ΡĖ	RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
	untuk wilayah kabupaten.	dari atau sama dengan 2.000 km2.	PERTANYAAN	DRAFTREVISION
52.	Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten			dari atau sama dengan 2.000 km2.
	adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan			54. Daerah aliran sungai wasa ku
	ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur	DAS adalah suatu wilayah daratan yang		54. Daerah aliran sungai yang selanjutnya diseb
	pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk	merupakan satu kesatuan dengan sungai dan		DAS adalah suatu wilayah daratan yar
	setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai	anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,		merupakan satu kesatuan dengan sungai da
	dengan RTRW kabupaten.	menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari		anak-anak sungainya, yang berfungsi menampun
3.	Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan	curah hujan ke danau atau ke laut secara alami,		menyimpan, dan mengalikan air yang berasal da
	yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten	yang batas di darat merupakan pemisah topografis		curah hujan ke danau atau ke laut secara alam
	sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh	dan batas di laut sampai dengan daerah perairan		yang batas di darat merupakan pemisah topografi
		yang masih terpengaruh aktivitas daratan.		dan batas di laut sampai dengan daerah peraira yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
	digunakan sebagai alat dalam melaksanakan	55. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan		55 Irigasi adalah wasta
	pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan	pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian	·	55. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dal
	rencana tata ruang yang telah disusun dan	yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi	·	pembuangan air irigasi untuk menunjang pertaniar
	ditetapkan.	rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.		yang jenisnya meliput irigasi permukaan, irigasi
				rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dar irigasi tambak.
	dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang	56. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang		56 Decret ::
	cocusi dengen ketertura and	mendapat air dari satu jaringan irigasi.		56. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang
	undangan.	57. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur		mondapat ali dali Satu Isrindan iridasi
	Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat	dan/atau mengelompok, yang penggunaannya	1	57. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur
<i>,</i> .	atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap	lebili bersilat terbuka, tempat tumbuh tanaman 1	1	admidial Michigal Michigan Michigan
	pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana	baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang	ļ	iodii beisial lelulka lemnat tumbub tanamai
	tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah,	sengaja ditanam.	1	bank yang turibuli secara alamiah maupun yang
	membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan	58. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia		oongaja akanam.
,	Vana tidak sojalan dangan rangang tata aya	dan/atau proses alam yang berbentuk padat		58. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
	Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan	59. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutaya	j	darratau proses alam yang berhentuk nadat
. ,	sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran	uisebut IPA adalah tempat untuk memroses dan l	·	Dy. Tempat pemrosesan akhir yang palasist
ì	pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan	mengembalikan sampah ke media lingkungan l		discoul IFA dudidii femnat lintuk momenaa
1	rencana tata ruang yang berlaku.	secara aman bagi manusia dan lingkungan.	1	mengeriodikan sampah ke media lingkungan
	Satura Varia Paranskat Danat	0. Tempat penampungan sementara yang		seedia aman dagi manusia dan lingkungan
	Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya	selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum	6	OU. Tempat penampungan competers
ب. با	disingkat SKPD adalah instansi pemerintah	sampan diangkut ke tempat pendauran iilang i		Scialifullyd UISCOUT IPS adalah tompot askiri I
1	Kabupaten yang diberi kewenangan menangani suatu urusan pemerintahan.	pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah	J	Sumpar uldhykut ke tempat pendalyan ulasa I
-	Poden Keerdings D	terpadu.		pongolarian, udiratau tempat pengolahan sampah !
-	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat	1. Tempat pengolahan sampah temadu selahiutana		torpaud.
·S	selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat	disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya	6	Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disebut TRST adalah
d	id-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan	kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan		discoul IFOI analan tempat dilakaanalaa
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang	ulang, pendauran ulang, pengolahan dan l		Regidial peliculiionan nominator popular
E.	renataan Ruang di Kabupaten Demak dan	pemrosesan akhir sampah.		ulang, penuauran ulang pengulahan dan l
P	nempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.	. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor		penirosesan aknir sampah
	rapas dalam koordinasi penataan ruang di daerah.	Umum yang digunakan untuk mengatur	62	2. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor
		antak mengatui		Umum yang digunakan untuk mengatur

PE	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	113153	SILINTAS SEKTOR (KORLINSEK) DRAFT REVISI	SARANMASUKAN		SESUDAH KORLINSEK
э 9.	Penyidik adalah pejabat polisi negara Republi	lik	kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan	PERTANYAAN		DRAFT REVISI
	indunesia atau pelabat penawai negeri sinil todont	4	menurunkan orang dan/atau barang, serta		75-35-26	kedatasaan
	yang diben wewenang khusus oleh undang undan	ng	perpindahan moda angkutan.		- 1	kedatangan dan keberangkatan, menaikkan d
	untuk melakukan penyigikan.	. ما	Kereta ani adalah asasa a	1		Candia Vidila Ganzaran barana
U.	Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidil	ik Š	Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan	1	- 1	r - r pindunan njibua ahukhtan
	dalam man menurut cara yang diatur dalam	m	tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun			63. Kereta api adalah sarana perkeretaapian denga
	relaturari Daeran lintuk menceri corte		dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian	1		
	mengumpulkan bukti yang dengan hukti itu membuai		lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di			
	terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna	a 64	jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.		- 1	
	menemukan tersangkanya.	i	Jaidii fel adalah satu kesatuan konstruksi			January Tariu (Elkali (IEnnan haralanan kasasa .
1.	Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok	ı	terbuat dan bala. Delon afan konstruksi Isin		ı	VI. Juidi lei dualan satu koeshion kensi i .
	ording termasuk masyarakat hukum adat korporesi	: (terretak di permukaan, di hawah, dan di atao tamat 1			
	danialau pemangku kepentingan non nemerintah tain	;	atau bergantung beserta perangkataya wasa l			tonotal di perminasan di pawah dam ili i
	dalah penyelenggaraan penataan ruang	ا م	mengarankan lalahnya kereta ani	•		Polygitulu Deserra norangkata
	Peran masyarakat adalah partisinasi aktif masyarakat	65.	Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan		1.	3~
(dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,	٠,	gan benggettierifigti Keteta abi		16	oo. Stasiun kereta api adalah tempat pemberanakan
(dan pengendalian pemanfaatan ruang.	66.	Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan		-	r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
	, madan rading,		dantatan peralian dengan hatas-batas to-ta-t. I		6	66. Pelabuhan adalah tempat yang tarihi i
			schagai lellipal kedialan hemerintahan da- l		ł	
		}	regididi pengusanaan yang dipergunakan saka			
			tempat kapat bersandar naik turun nagura 1		1	
		1	danata bollokal lililat parang horupo to!!			
	•	1	dan tempat penapuh kanal yang dilangkasi da		1	Tanada Dollural Illiai Darana bassis .
		1	rosinas reselatifatati dan keamanan pelayaran dan	-	1	
		1	Registari periurijang pelabuhan serta sobore: l		1	
		t	tempar perpindanan intra dan antarmoda l			Table Penuniano nelaninan assa
	·	í	u ansportast.		1	tempat perpindahan intra dan antarmoda
		67.	Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri		İ	" who post tubi.
			atus varatan (idi) Derarran sekitoroyo dan 1		67.	Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri
		'	balas-balas lettentii senagai tempat kasista l		1	atas daratan dan perairan sekitarnya dengan
			Cinemitalian dan kediatan sistem hisnis-perikanan 1		1	batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
			ang uperupakan sebagai tompat taka l	The second secon	1	pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan
	·	ŗ	Circulati Delgalitar, Deriantin dan atau bazzliza i			yang dipergunakan sebagai tempat kapal
			idat ikali yaliu dilehakani dengan fasilisa l	i		perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar
	4,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	cociamatan pelayaran dan kediatan penuniang l			muat ikan yang dilangkari
	*	۲	Cirkaitali.			muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
		68. T	empat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut	1		perikanan.
		1.	r addidir (Cilidal Vand Secara khikuta digadi-ta-		68.	Tempat Pelalangan III
		. 0	Cii Fellielilian Daerah untuk molekuti	1		Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut
		ρı	soldingdii IKan Termasiik jasa notolongon a- i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
_		fa	silitas lainnya yang disediakan di tempat	. 1		Chichilan Daerah natuk
			7- Jong disculation of tempat			pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat
						yang disediakan di tempat

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	IN OUR LINEAU SERVICE (RORLINSER)	SARAN/MASUKAN/	OF OUR ATTENDED
MADUFATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
·	pelelangan.	10000000000000000000000000000000000000	DRAFT REVISION
	69. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang		pelelangan.
	dituniuk dan atau ditetankan alah D		69 Kawasan hutan adal J
	ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk		69. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu ya
	dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.	1	I artarijak dan alau dilejankan oleh Demorintek
•	1		dipertahankan keberadaannya sebagai hut
	70. Garis Sempadan adalah garis batas luar		totap.
	l pengamanan yang ditarik nada jarak tortontu		1 Compagal analah dang batas 1.
	l sejajai dengan tepi sungai, teni saluran kaki l		I POLISHINGHOU VOILL HURING DOMA LONGLE LAND
	l danggui, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air teni l		I column deliver teni column teni column teni
	Sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan teni luar l		I wanggui, tepi udildu. IPNI wadiik toni moto eta eta t
	kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat l		l Garigai pasally Sulut, tent nantai ae islan tan: t.
	jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang		l mobala lenibalan dan selalar sisi ruana ment-
	bolen dan tidak boleh didirikan l		yang merupakan batas tanah yar
	bangunan/dilaksanakannya kegiatan.	1	bolon dall lidak bolok uring
	71. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian		ud: iyunan/dilaksanakannya kediatan
	pantal yang lebarnya proporsional dengan bentuk l	·	71. Sempadan Pantai adalah daratan seperiasa tari
	dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) 1		Paintal Yally Ichalliva ninnorgional danses is
	meter dan tilik pasang tertinggi ke arah darat		Nondiol Holl Dallid Dallid Sodivit 100 /
	72. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri	1	motor dan duk pasang jernagai ka arah darak
	udii kalidii palung Sungal yang ditetankan sebagai !		12. Garis sempadan sungai adalah garis maya di Li
	batas perlindungan sungai.	1	and national patential value of the same as he are
	73. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas		Salas perinduridan Sundai
	pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan		73. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas
	irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan	1	pengamanan bagi saluran dan/atau bangunar
·	sekeliling bangunan.		ingasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dar sekeliling bangunan
·	74. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri		sekeliling bangunan.
	khas tertentu haik di darat mawasan dengan ciri	1 :	74 Kawasan suaka alam alah s
1	khas tertentu, baik di darat maupun di perairan		74. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri
	yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan	ļ.	midd tofterful, palk (il narat marinum et
	pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan		Jung manipulival lilings bokok cobage: It-
	satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi	-man in the first transfer of the second of	Polydovoldii keallekaranaman tumbut i
·	sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.		outro, porte, ettopisiembos, vand indo F-T-
1 '	5. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang	7	was migrall aloteth henvondd yddidus
	karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan l	1 '	v. Cayar alam adalah kawasan suoka -i
and the second s	tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau		narona neadagaii alailiiva mempunyai kalika
	ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan	vs (227.7)	turibulian, salwa. Ilan ekocictomore
·	perkembangannya berlangsung secara alami	·	organicini felicini vand portu dilipati
. 7	o. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan		Porteribunganinya penangsing secara alami
	dengan ciri khas tertentu haik di darat maupun di l	76	. Nawasan pelestarian alam adalah kanya
	perairan yang mempunyai jungsi perlindungan		derigent out Mids tellentit back di darat manne in l
	sistem penyangga kehidupan, pengawetan	1	perairan yang mempunyai fungsi perlindungan

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 203	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	
20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20.11.20	THE PART OF THE PA	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
	Reducted addition lens tumbuban dan actual	の対象には、これの	DRAFT REVISION
	Political Second lesiari sumbor dava -		keanekaragaman jenis tumbuhan dan adalah
·	l mayari dan ekosistemnya.		pemanfaatan secara lestari sumber daya al
	77. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat		hayati dan ekosistemnya.
	I HODDINGUILL DELILIS RONGO COSAS D I		77. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersi
	1 Danguigh Capal Bilitava Strubbur Osses B. 1		kebendaan berupa Banda Sudaya bers
	I Oldo Odudi Dililava nan kawaaaa Aasa baa		kebendaan berupa Benda Cagar Buda Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Buda Situs Cagar Budaya, dan K
	I all dailet dailealai (il air vana postu diletteri		Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Buday
			Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Buda di darat dan/atau di air wasan Cagar Buda
	1 2010/01/ 11110 0611101301100 2029/31/	l	di darat dan/atau di air yang perlu dilestarik
	Tarifold Rebuddyddii illeidiii ningeg nanotanan	l	keberadaannya karena memiliki nilai penting ba sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agam dan/atau kebudayaan malahi
	70. Flasilia fluttan adalah suhstansi hidupan namba		dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
	1 Oliat Motorollari Valla (1202) horizon arres 1 1 1		78. Plasma nuttah adalah salah
	atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad	·	78. Plasma nuttah adalah substansi hidupan pembay sifat kejurunan yang desah l
	Total	1	
	79. Pertanian yang mencakup tanaman pangan,	I	atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasa renik.
	1 "O' andita'd, DELKEUIDAD dan notornales		
	I SOLUTION TO DISCOUL DECISION Adolete - 1 1		79. Pertanian yang mencakup tanaman pangar
	; register yang melipiti ngana hulu wasta i i l	į.	
	agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang		
	l bougoidali sullingi usva alam bougit dele l		
	de de la la la la la la la la la la la la la		
	deligan partuali lektrologi model topoge teri		
	an manatchien millik mandanatkan (.)	1	
	Sobodi Desdittyd Daul Keselahteraan masyorakan		
	80. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah	1	
	"" of the body upy a Decision for items and a color of	8	sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. O. Kawasan Portanian D.
	perdesaan yang memiliki hamparan Lahan	1 5	Manadali Felialilali Panaan Dadala
	Felial Felial Rerelabilitas destal	1.	
	hamparan Lahan Cadangan Bortonian Distriction		Jany memiliki hamparan ilahari
	Dornolanjulan Sena imeni nonuningana d		
	Tarigor diding timik menditkung kemendir		
	moterially dall rendulatan nangan pagianal	1	
	or Landy Perlanan Pangan Berkelepintan III I	. 1	
	siddig idiidii Dellanian vang distorbas	81	
\		10%	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian pertanian bidang lahan pertanian pertan
	Same incliditastikan bandan palest, i i i		bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk
<u>.</u>	kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan	·	
	nasional.		guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional
•	2. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	ļ:	nasional.

DEDNA CONTRACTOR	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	The state of the s
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK-2011 2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
	adalah lahan potensial yang dilindungi	TO A SECOND PROPERTY OF THE PAR	DRAFT REVISI
	pemanfaatannya agar kesesuaian dan		adalah laha-
·	ketersediaannya tetap terkendali untuk		pemanfaatannya agar kesesusian
	dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan		ketersediaannya tetan terkendali
	Berkelanjutan pada masa yang akan datang.		dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Des
	83. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan		l sourcianifulati paga masa yang akan datang
	dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan		83. Hortikultura adalah segala hal yang berkai
	florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut,	j i	dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, o
•	dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran,	1	florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lum
	bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.	}	dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayur
	84. Perkebunan adalah sasata tarak		bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
·	mengusahakan tanaman tertentu pada tanah		04. Perkebunan adalah sasala tu tu
	dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem	1	mengusahakan tanaman tertentu pada tan
	yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng	1	dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosiste
	dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan		yang sesuai, mengolah dan memasarkan bare
·	ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta		dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantu
	manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi		ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan ser
	pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.		manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan ba
	85. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan	1	pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
	dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau	1:	85. Peternakan adalah segala urusan yang berkaita
	bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi		dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/ata
	daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan,		bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, bud
	pemasaran, dan pengusahaannya.		daya ternak, panen, pascapanen, pengolahar
	86 Perikanan adalah arawa I II		pemasaran, dan pengusahaannya.
	horhubungan danasa kegiatan yang	. 8	66. Perikanan adalah somus kestu
	pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya		berhubungan dengan pengelolaan dar
	mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan		pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya
	sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan		mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan
	dalam suatu sistem bisnis perikanan.		campai delidali (lemasaran Vana dilalasa -
	37. Kawasan permukiman adalah bagian dari		Goldin Sudiu Sisterii Dishis nerikanan
	lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik		/ Kawasan permukiman adalah k
	berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,		lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal	ĺ	20.3Pd Managall Delkolaan mailbin postere
	alau ingkungan nunian dan tempat keciatan yang l		July pelitridal senanal lingklingan tompolis
	mendukung perikehidupan dan penghidupan		didd iii llan ii llan an i tomnot ka atal
8	8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan	. 1	mondakung penkenkingan dan penghidupas
	landi yang diperuntukkan badi kediatan Industri I	88.	- Nawasan Peruntukan Industri adalah keru
	berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan	1	Tarian yang ulue: Dillikkan bagi kagiatan lada da
	idia yuna tanan yang ditetapkan sesuai dengan l	1	Total Control of the
	ketentuan peraturan perundang-undangan.		ata guna tandii vann difetankan coosa d
			ketentuan peraturan perundang-undangan.

•

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI		SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
ERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	LPD to be the control of the control
	89. Kawasan Industri adalah kawasan tempat	The second secon	00 1/
	pemusatan kegiatan Industri yang dilengkani		89. Kawasan Industri adalah kawasan tem
·	dengan sarana dan prasarana penunjang yang		pemusatan kegiatan Industri yang dilengk
	dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan		dengan sarana dan prasarana penunjang ya
	Kawasan Industri.		dikembangkan dan dikelola oleh Perusaha Kawasan Industri.
	90. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata		90. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisa
	dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha		dan didukung berbagai fasilitas serta layanan ya
•	disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.		disediakan oleh masyarakat, pengusa
			disediakan oleh masyarakat, pengusal Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
	91. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan		91. Pertahanan negara adalah senala usaha uni
	wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan		memperianankan kedalilatan negara koutub
	keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan		wiidydii Negara Kesaiuan Renublik Indonesia, d
	gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.	j	reselantatan segenap bangsa dari ancaman d
	92. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang		yangguan temadap keutunan bangsa dan negari
	ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk		92. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah ya
j	kepentingan pertahanan.		unetapkan secara nasional yang digunakan uni
	93. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang		repentingan pertananan.
	penataan ruangnya diprioritaskan karena	I	93. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yar
	mempunyai pengaruh sangat penting secara		penadan tuangnya diprioritaskan karor
	nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan		mempunyai pengaruh sangat penting seca
	dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,	·	nasional terhadap kedaulatan negara, pertahana
	dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisen dunia.		dan keamanan negara, ekonomi, sosial, buday dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang tela
			ditetapkan sebagai warisan dunia.
	vellayali yalig i] :	94. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yan
	penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam	1	penataan ruangnya diprioritaskan karen
	lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya,		mempunyai pengaruh sangai penting dalam
	dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala	1	inight provinsi temadan ekonomi sosial budaya
	provinsi:		uan/atau iingkungan bagi kepentingan fingkat/skala
·	5. Kawasan strategis daeran adalah kawasan yang		provinsi.
	penataan ruangnya diprioritaskan karena	9	5. Kawasan sirategis daerah adalah kawasan yang
	mempunyai pengaruh sangat penting dalam		penataan ruangnya diprioritaskan karena
	lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya		mempunyai pengaruh sangai penting dalam
	dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala		lingkup daerah terhadap ekonomi, sosiai, budaya,
	daeran.	1	dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
9	6. Indikasi program utama jangka menengah lima	96	
	tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan) 30	
	program utama, lokasi, besaran, waktu].	tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu
	pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana		pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana

DRÄFT, RAPERDA SEBELUM KOORI ERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT/REVISI	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
The state of the s	W STATE OF THE STA	CENTANTAAN	DRAFI REVISI
	dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang		dalam rangka mayujudka
	sesuai dengan rencana tata ruang.		dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten y sesuai dengan rencana tata ruang.
	97. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur	,	97 Porotures ====================================
	tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan	1	97. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang meng
	ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk	1	tentang persyaratan pemanfaatan ruang
	setiap blok/zona peruntukan yang penetapan		ketentuan pengendaliannya dan disusun ur
	zonanya dalam rencana rinci tata ruang.	<u> </u>	setiap blok/zona peruntukan yang peneta
	98. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan		zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
	yang ditetapkan oleh pemerintah daerah		98. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentu
	kabupaten sesuai kewenangannya yang harus		Jany unclaukan oleh nemerintah dan
	dipenuni oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan		kadupaten sesuai kewenannannya yang ba
	ruang, yang digunakan sebagai alat dalam		openum den sellab binak sehelum memanfacili
	melaksanakan pembangunan keruangan yang		rudily, yang digunakan sebagai alat dal
	tertio sesual dengan rencana tata ruang yang telah		melaksaliakan pembanginan kerjangan ya
	uisusuri dan ditetapkan.	1	terio sesual dengan rencana tata ruang yang ta
	99. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang		discoult dait ditetapkan.
	uipeisyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang		99. Izin pemanfaatan ruang adalah izin ya
	sesual dengan ketentuan peraturan l		dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan rual
	perundang-undangan.	1	dengan ketentuan peratur
	100. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah	1	perundang-undangan.
	perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan		100. Ketentuan insentif dan disinsentif adala
·	ternadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan		perangkat atau upaya uatuk memberikan imbala
	dengan rencana tata ruang dan juga perangkat l	ŀ	terriadap pelaksanaan kenjatan yang sajata
	untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau l	1.	dengan rencana tata ruang dan juga parangka
·	mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan l	·	untuk mencegan, membatasi nertumbuhan oto
	rencana tata ruang.		mengurangi kegiatan yang tidak sejalah danga
	101. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan		rencana tata ruang.
	sanksi bagi orang perseorangan dan/atau	, 1	01. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikar
<u> </u>	korporasi dan/atau pelabat nemerintah yang l	ŀ	odino Dayi Crand persentangan dantata
	melakukan pelanggaran pemantaatan ruang		Not pot doit udit/didit the parantal name into his a
	seningga tidak sesuai dengan rencana tata ruang		. Iliciakukali, pelanddarari nemanfaatan iruana
	yang berlaku.		ochangga duak sesuai dendan rencana tata ruang
· 1	102. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang		yang benaku.
·	selanjutnya disindkat TKPRD adalah tim adaban I	10	O2. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang
	yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan l	ar and a second	Soldiffutify d USITIONAL TRANSITION adalah tim ad har
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang l		yang uibentuk untuk mendukung polokoons
	penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah		Ordany-Unidang Nomor 26 Tabun 2007 topto-
	kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi		penalaan ruang di daerah provinsi dan di daerah
	membantu pelaksanaan tugas gubernur dan l		Madupaten/Kota, dan memoupyai fi
.37 .	bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi		membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi

` 0E

3

_

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD RERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011, 2031	INAS LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARANIMASUKANI	
·	penataan ruang di daerah. 103. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 104. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 105. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.		penataan ruang di daerah. 103. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 104. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 105. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
	Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 1 A, Pasal 1 B, dan Pasal 1 C, sehingga berbunyi sebagai berikut:	2	Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 1 A, Pasal 1 B, dan Pasal 1 C, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1	Pasal 1A Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadidasar untuk penerbitan perizinan lokasipembangunan dan administrasi pertanahan.	J 411	Pasal 1A encana tata ruang wilayah kabupaten menjadidasar tuk penerbitan perizinan lokasipembangunan dan ministrasi pertanahan.
R a b.	Pasal 16 RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk: penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka	RT a.	Pasal 1B RW Kabupaten menjadi pedoman untuk: penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
c. d.	menengan daeran;	c.	penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah kesembangan satas arbangah daerah;
e.	penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;		keseimbangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORI PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	The state of the s	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
The state of the s	A STATE OF THE STA	PERTANYAAN 🛧	
	dan		DRAFT REVISI
	f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.	·	dan
	Pasal 1C	Kemenko Perekonomian	f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
	(1) Wilayah kabupaten meliputi seluruh administrasi	1	Pasal 1C
	l rabupaten dendan luas kurang labib on saa		(1) Wilayah kabupaten meliputi seluruh administras
	(Semblan pulun sembilan ribu lima ratus tiga puluh	inasukali.	Napapaten dengan mae kurana lakik oo sa
	I uud) liektar vang terletak nada nosisi 60 42' 26"	Garis pantai yang dipakai	(Sombian paint Sembilan ribit lima ratus tica and t
	7º 09' 43" Lintang Selatan dan 110º 27' 58" – 110º 48' 47"Bujur Timur dengan batas administrasi		I God) Hevidi Adila lelletak bada bosisi ee 401 oon
	meliputi:	adalah garis pantai 2017.	7º 09' 43" Lintang Selatan dan 110º 27' 58" – 110º 48' 47" Bujur Timur dengan batas administrasi
	a. Sebelah utara : Laut Jawa;	1	meliputi:
	b. Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan	Tanggapan:	a. Sebelah utara : Laut Jawa;
	kabupaten Grobogan;	Dilayah Jawa Tenah disepakati	b. Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan
	c. Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan	bahwa garis pantai yang	Nabupaten Grobogan;
·	dan Kabupaten Semarang; dan	dipakai dasar pembuatan peta	c. Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan
•	d. Sebelah barat :Kota Semarang.	adalah garis pantai tahun 2013.	dan Kabupaten Semarang; dan
	(2) Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada	·	d. Sebelah barat : Kota Semarang.
·	ayat (1) terdiri atas 14 (empatbelas) kecamatan, meliputi:	!	(2) Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada
	a. Kecamatan Bonang;		ayat (1) terdiri atas 14 (empatbelas) kecamatan, meliputi:
	b. Kecamatan Demak;	·	a. Kecamatan Bonang;
	c. Kecamatan Dempet;		b. Kecamatan Demak;
	d. Kecamatan Gajah;	1	c. Kecamatan Dempet;
	e. Kecamatan Guntur;	1	d. Kecamatan Gajah;
	f. Kecamatan Karangtengah;		e. Kecamatan Guntur;
·	g. Kecamatan Karanganyar;	.	f. Kecamatan Karangtengah;
	h. Kecamatan Karangawen;		g. Kecamatan Karanganyar;
	i. Kecamatan Kebonagung;		h. Kecamatan Karangawen;
	j. Kecamatan Mijen;		i. Kecamatan Kebonagung;
	k. Kecamatan Mranggen;		j. Kecamatan Mijen;
	I. Kecamatan Sayung;		k. Kecamatan Mranggen;
	m. Kecamatan Wedung; dan		I. Kecamatan Sayung:
	n. Kecamatan Wonosalam.	"	m. Kecamatan Wedung, dan
	3) Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten		n. Kecamatan Wonosalam.
	mencakup:	(3	Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten
<u> </u>	o. tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata		incheditap.
	ruang;		o. tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata
			ruang;

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORE PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011:2031		TALL THE PARTY OF	SARANMASUKAN	SESUDAH KORLINSEK
The second secon		URAL I REVISI	PERTANYAAN	DRAFT/REVISI 2008
	p.	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	TO THE STATE OF TH	The state of the s
	۹.	rencana pola ruang;		p. rencana struktur ruang;
	1.	penetapan kawasan strategis;		1 4. Tonocha pola fuang,
	5.	arahan pemanfaatan ruang; dan	1	r. penetapan kawasan strategis;
BAB II	l.	ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.	1	s. arahan pemanfaatan ruang; dan
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH				t. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
Bagian Kesatu	 			
Tujuan Penataan Ruang				
Pasal 2	TETAP		1/2	
Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah			Kementerian ATR	Ketentuan Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai
Daerah berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industri.				berikut berikut
usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata.			Masukan:	Pasal 2
monorigan, atm panwisata.			Agar menyesuaikan	Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah
			rekomendasi KLHS	
				
			Tanggapan:	pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
Bagian Kedua			Telah disesuaikan	
Kebijakan Penataan Ruang				
Pasal 3	TETAP			
1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang	ILIAC			
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun l				·
kebijakan penataan ruang.		·		
2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud		İ		•
paga ayat (1) meliputi:			•	
a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;				
b. pengembangan komoditas pertanian yang prospektif;				
c. pengembangan kawasan pesisir,				
d. pengembangan pusat pelayanan;	•	ļ.		
e. pengembangan prasarana wilayah pada		.		
kawasan perketaan dan perdesaan;				
f. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;				

PER	DA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
	g. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;			DRAFT/REVISI
	h. pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang; dan i. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan			
	keamanan.			
	Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang			
	Pasal 4	TETAP	Kementerian ATR	
ı	Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 ayat 2) huruf a meliputi:	·	Masukan:	Pasal 4 (1) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertaniar produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ć	a. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan sawah irigasi; dan		Agar menyesuaikan rekomendasi KLHS;	ayat (2) huruf a meliputi: a. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan
t	n. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.		Pasal 4 ayat 2, Perlu ditambahkan poin dalam pasal	merupakan sawah irigasi; dan b. menetapkan tahan pertanjan pangan
ŗ	Strategi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pyat (2) huruf b meliputi :		tersebut dengan: c. intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan untuk	Derkelanjutan. (2) Strategi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
á	menentukan zona kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan hortikultura; dan		meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan.	a, menentukan zona kawasan pertanjan lahan
b	buahan.		Pasal 4 ayat 3, Perlu ditambahkan beberapa poin	basah, lahan kering, dan hortikultura; dan b. mengembangkan budidaya tanaman buah-
S	trategi pengembangan kawasan pesisir ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf meliputi :		ditambahkan beberapa poin dalam pasal tersebut dengan: d. mengembangkan kawasan	buahan; dan c. intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian
а	minapolitan;		konservasi mangrove sebagai pelindung abrasi,	(3) Strategi pengembangan kawasan nesisir
b c	melindungi kawasan yang terkena abrasi; dan mengembangkan kawasan pengolahan		perlindungan keanekaragaman hayati dan	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :
	perikanan. trategi pengembangan pusat pelayanan		wisata alam	 a. mengembangkan kawasan pesisir yang berbasis minapolitan;
S	ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf meliputi:		Pasal 4, ayat 5, perlu ditambahkan di belakang poin c	 b. melindungi kawasan yang terkena abrasi; c. mengembangkan kawasan pengolahan
a.		·	dan d atau ditambahkan tersendiri poin setelah d:	perikanan; dan d. mengembangkan kawasan konservasi
_			c. " sumber daya air yang	mangrove sebagai pelindung abrasi,

PEI	RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011:2031	DINAS! LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	200	SARAN/MASUKAN/	12 K. S.	SESUDAH KORLINSEK
	b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang	DRAFT.REVISI		PERTANYAAN		DDVITTO
	mampu bertungsi sebagai PKL; dan			mengutamakan air	· 20 2424	DRAFTIREVISIE
	c. mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan			permukaan dan	- 1	perlindungan keanekaragaman hayati dan wisata alam.
	sebagai PPK.			pembatasan air bawah	141	
(5)	Strategi pengembangan prasarana wilayah pada			tanah dengan prinsip	10	Strategi pengembangan pusat pelayanan
	Kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana			berkelanjutan".		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
	dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:		19	d. "mengembangkan sistem	1	
	a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang			sanitasi skala lingkungan		mongoribulighali SiStetti Keterkaitan akanam
	menghubungkan simpul-simpul kawasan		1.	dan wilayah"	1	kawasan perkotaan-perdesaan; b. mengembangkan pugat salan;
	produksi dengan kawasan pusat pemasaran:		e	ongombangkan sisiem	1	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
ì	 b. meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan 		- 1	TPA dengan sanitary		mampu berfungsi sebagai PKL; dan
	telekomunikasi di kawasan perdesaan;	1.		landfilldan waste to	1	c. mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan sebagai PPK.
(c. mengembangkan sistem prasarana sumberdaya	1 .	[energy"	(5)	Sebagai PPK.
	air; dan		"	"mengembangkan sistem	(3)	Strategi pengembangan prasarana wilayah pada
(d. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan di			pengelolaan limbah cair rumah tangga pada		"" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
	kawasan perkotaan.		- 1	rumah tangga pada kawasan perkotaan"		dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
3) 8	Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung			periotaan		
S	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf	·	De	nost 4 = 10 = 1		menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan
Ī	meliputi:		dit	sal 4 ayat 6, Perlu		produksi dengan kawasan pusat pemasaran; b. meningkatkan pelawasan sistembaran;
а			da	ambahkan beberapa poin n diperbaiki poin c daiam		b. meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di kawasan perdesaan;
	lindung sesuai dengan sifat perlindungannya		Da:	sal tersebut dengan:		C. Mendembanakan sistem
þ	. meningkatkan pemahaman masyarakat	·	i	-		c. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air yang mengutamakan air permukaan
	terhadap manfaat perlindungan kawasan		C.	memindahkan secara		dan pembatasan air bawah tanah dengan
	lindung; dan			bertahap permukiman yang berada di kawasan		prinsip berkelanjutan; dan
C.	memindahkan secara bertahap permukiman			rawan banjir dan/atau rob	C	d. mengembangkan sistem sanitasi skala
	berada di kawasan rawan banjir dan/atau rob		1	dan/atau abrasi dan/atau		lingkungan dan wilayah;
	dan/atau abrasi.			kawasan lindung.	е	
) SI	trategi pengendalian perkembangan kegiatan		d.	mengembangkan sistem		landfilldan waste to energy,
da	udidaya agar tidak melampaui daya dukung dan			agroforestry (wanatani)	f.	mengembangkan sistem pengelalaan linut
da	aya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud alam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :			pada kawasan pertanian		I was turned teleplace to the teleplace
a	membatasi porkombangan kasista da ku			lahan kering.	5) S	udieul pellifidikatan nengeloloon ko
u.	membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;		e.	mengembangkan kawasan		bagainana uimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
b.		·		konservasi pada kawasan	hι	indi i meliputi.
٠.	perkotaan secara efisien dan kompak;			lindung sebagai	· ∵ a.	" I manan nguluga Delinir minaan Ai
· c.	mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		perlindungan		kawasan iindung sesuai dengan sifat
٠.	perkotaan; dan			keanekaragaman hayati		perlindungannya
·d.	membatasi perkembangan kawasan terbangun	į		dan pengembangan wisata alam.	b.	""" "" " " " " " " " " " " " " " " " "
	di kawasan perkotaan.			manadada		terriadap mantaat perlindungan kawasan
	and politicadi.			mengembangkan ruang erbuka hijau pada		lindung; dan

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORE PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031		SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
o) Strategi pengembangan kawasan industri yang	DRAFT REVIS	PERTANYAAN	DRAFTIREVISI
mempertimbangkan efektivitas ruang sebagaimana		sempadan jalan, rel kereta	yang berada di kawasan rawan banjir
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi :		dan TPA.	dan/atau rob dan/atau abrasi dan/atau
 a. menentukan batas kawasan peruntukan industri; 			kawasan lindung;
 b. mengatur kegiatan industri pada masing-masing 		Pasal 4 ayat 8, Perlu	d. mengembangkan sistem agroforestry
kawasan peruntukan industri; dan		ditambahkan di belakang	(wanatani) pada kawasan pertanian lahan
c. meningkatkan pengelolaan kawasan industri.		beberapa poin dan diperbaiki	kening;
) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan		untuk poin b dan d	e. mengembangkan kawasan konservasi pada
keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3		b. mengatur kegiatan industri	nawasan iingung sebagai perlindungan
ayat (2) huruf i meliputi:		pada masing-masing	keanekaragaman hayati dan pengambangan
a. mendukung penetapan kawasan strategis		kawasan peruntukan	wisata alam; dan
nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;		industri dengan pendekatan kapasitas	f. mengembangkan ruang terbuka hijau pada
·		1	sempadan jalan, rel kereta dan TPA. (7) Strategi pengendalian porkembanasa i
 mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional 		tampung lingkungan hidup	
untuk menjaga fungsi pertahanan dan		c. meningkatkan pengelolaan	budidaya agar tidak melampaui daya dukung dar daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud
keamanan; dan		kawasan industri yano	dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :
c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset		dilengkapi dengan sarana	a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya
pertahanan		prasarana pengelolaan	terbangun di kawasan rawan bencana;
		limbah dan air baku yang	b. mengembangkan ruang kawasan perketaan
		berkelanjutan. d. mengembangkan kegiatan	perkotaan secara efisien dan kompak-
		d. mengembangkan kegiatan agroindustri pada kawasan	c. mengembangkan ruang terbuka bijau
·		industri yang berdekatan	kawasan perkotaan; dan
	·	dengan kawasan	d. membatasi perkembangan kawasan
		pertanian dan perikanan.	terpangun di kawasan perkotaan.
	·	10) Strategi pengembangan kawasan industri yang
1	1:	Tanggapan:	memperumbangkan etektivitas ruang cohocai
		Telah disesuaikan	dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi :
			menentukan batas kawasan peruntukan industri;
	• 1	- 1	b. mengatur kegiatan industri pada masing-
	·		masing kawasan peruntukan industri dengan
	• .		pendekalah kapasitas daya dukung dan daya
	The second secon		rampung inigkungan nidup
	1		C. meningkatkan pengelolaan kawasan industri
		1	yang dilengkapi dengan sarana prasarana
		1	pengelolaan limbah dan air baku yang
			berkelanjutan.
	·	:	d. mengembangkan kegiatan agroindustri pada
			kawasan industri yang berdekatan dengan

	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOOR	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
-	PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-203	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	The state of the s
•				kawasan pertanian dan perikanan. (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi: a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
	·			c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset
-	BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH			pertahanan
~	Bagian Kesatu Umum			
	Pasal 5 (1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas : a. rencana sistem pusat pelayanan; dan b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.	Ketentuan Pasal 5 ayat (1), sehingga berbunyi sebagaiberikut Pasal 5 Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas:		Ketentuan Pasal 5 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5
	(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	a. rencana sistem perkotaan; dan		 Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas: a. rencana sistem perkotaan; dan b. rencana sistem jaringan prasarana. Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
_	Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan Paragraf 1 Umum	opposition dann drattan Daerair-IIII.		terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-1	Pasal 6 (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas : a. sistem perkotaan;	(I) Rencond dictors north land a beautiful in the control of the c	Masukan	5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud
				, several sevagaintana dimaksud

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK 1987
 b. sistem perdesaan; dan c. sistem wilayah. (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pengembangan PKL; b. pengembangan PKLp; dan c. pengembangan PPK. (3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan PPL. (4) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penetapan satuan wilayah pembangunan; dan b. rencana fungsi satuan wilayah pembangunan. 	dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas : a. struktur perkotaan; dan b. sistem wilayah. (2) Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. PKL; b. PPK: dan	tentang RTR Kedungsepur, wilayah Demak masuk dalam KSN Kedungsepur. Tanggapan: Dalam sistem perkotaan sudah dimasukan penetapan PKN Kedungsepur di wilayah Kabupaten Demak.	dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. struktur perkotaan; dan b. sistem wilayah. (2) Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. PKN; b. PKL; c. PPK; dan d. PPL. (3) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penetapan satuan wilayah pembangunan; dai
Paragraf 2 Sistem Perkotaan dan Perdesaan Pasal 7			b. rencana fungsi satuan wilayah pernbangunan
Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi: a. Kawasan Perkotaan Demak; dan b. Kawasan Perkotaan Mranggen. Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berada di Kawasan Perkotaan Wedung. Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi: a. Kawasan Perkotaan Gajah; b. Kawasan Perkotaan Dempet; c. Kawasan Perkotaan Guntur; d. Kawasan Perkotaan Sayung; e. Kawasan Perkotaan Karangtengah; f. Kawasan Perkotaan Karangawen; h. Kawasan Perkotaan Karangawen; h. Kawasan Perkotaan Karanganyar; j. Kawasan Perkotaan Karanganyar; j. Kawasan Perkotaan Mijen; dan k. Kawasan Perkotaan Kebonagung.	f Kawasan Perketaan Banana	Masukan Berdasarkan Perpres 78/2017 tentang RTR Kedungsepur, wilayah Demak masuk dalam KSN Kedungsepur. Tanggapan: Wilayah Kabupaten Demak. yang masuk PKN Kedungsepur adalah berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen	6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (2) huruf a merupakan bagian dari kawasan perkotaan Semarang – Kendal – Demak – Ungaran –Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen. (2) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2) huruf b meliputi: a. Kawasan Perkotaan Demak; dan b. Kawasan Perkotaan Mranggen. (3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (2) huruf c meliputi: a. Kawasan Perkotaan Gajah; b. Kawasan Perkotaan Gajah; c. Kawasan Perkotaan Guntur; d. Kawasan Perkotaan Sayung; e. Kawasan Perkotaan Karangtengah; f. Kawasan Perkotaan Bonang;

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SECTIONALIZADINA
The state of the s	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
	i. Nawasan Perkotaan Kebonagung	The second secon	DRAFTIREVISI
	(3) Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan		g. Kawasan Perkotaan Wedung;
	r circladii wedung sehagamana dimakand mada l		h. Kawasan Perkotaan Karangawen;
	ayar (2) nurur u dan nurur hirit adidorona untuk l		I. Kawasan Perkotaan Wonosalam:
•	berperan sebagai PKL.		j. Kawasan Perkotaan Karanganyar;
	(4) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat		k. Kawasan Perkotaan Mijen; dan
	(2) huruf c meliputi :		I. Kawasan Perkotaan Kebonagung.
	a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;		(4) Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasa
	D. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di	i	Perkotaan Wedung sebagaimana dimaksud padayat (2) huruf di danaksud padayat (2) huruf danaksud padayat (2) huruf di danaksud padayat (2) huruf danaksud (2) huruf danaksud (2) huruf danaksud (2) huruf danaksud (2) hur
	Recamatan Dempet;		ayat (2) huruf d dan huruf gdidorong untu
	c. Desa Pamongan berada di Kecamatan		Solboran Sepadal SKI
·	Guntur;		(5) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal O aust
1	d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di		(2) huruf c meliputi :
1	Recamatan Sayung;	1	a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;
· .	e. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di	1	b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di
	Recamatan Karangtengah;	İ	Kecamatan Dempet;
·	f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di		c. Desa Pamongan berada di Kecamatan
	Recamatan Bonang;		Guntur;
	g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan	İ	d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di
	Karangawen;	1	Kecamatan Sayung;
	n. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli	1	e. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di
į.	berada di Kecamatan Wonosalam;		Kecamatan Karangtengah;
	i. Desa Cangkring berada di Kecamatan		f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di
	Karanganyar;		Kecamatan Bonang;
	j. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;	·	g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan
	K. Desa Werdoyo berada di Kecamatan	1	Karangawen;
	Kebonagung; dan	[h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli
	I. Desa Buko dan Desa Bungo berada di		beraua di Kecamatan Wonosalam.
	Kecamatan Wedung.		i. Desa Cangkring berada di Kecamatan
	I. Kawasan perkotaan PKL sebagaimana		Naidilyallyal,
	dimaksud pada ayat (1) dan PPK	1	j. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan	1	K. Desa Werdoyo berada di Kecamatan
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	disusun rencana detail tata ruangnya.		nebonagung; dan
		·	Desa Buko dan Desa Bungo berada di
			Necamatan Wedung.
		(5)	Kawasan perkotaan PKI sebagaimana dimed
	•		Pada ayal III dan PPK sehagaimana dimaka II
			pada ayat (2) akan disusun rencana detail tata

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDIN PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK:2011 2031	DRAFT:REVISION	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEKS
Pangambanan DDI	6 Pacal 9 Dibanna		7. Pasal 8 Dihapus
a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;			(Masuk ke Pasal 7)
 b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet; 			
c. Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur;			
d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung;			
e. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di Kecamatan Karangtengah;			·
f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang;			
 g. Desa Tiogorejo berada di Kecamatan Karangawen; h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam; 			
i. Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar;			
J. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen:			
k. Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung; dan	•		·
Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung.			
Paragraf 3			
Rencana Sistem Wilayah			
	ETAP		
1) Penetapan satuan wilayah pembangunan			
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a terdiri atas:			
a. satuan wilayah pembangunan I dengan pusat			
pelayanan di Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Demak meliputi :			
Kecamatan Sayung;		. !	· 1
Kecamatan Karangtengah;			es es estados estados estados estados estados estados estados estados estados estados estados estados estados e
Kecamatan Demak; dan		·	
Kecamatan Wonosalam. b. satuan wilayah nembangunan II dangan punat			
b. satuan wilayah pembangunan II dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Mranggen			

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDII	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINS	FK		State Special and production devices and an artist and an artist and artist artist and artist and artist artist and artist artist and artist artist and artist artist and artist artist artist artist artist artist artist and artist	
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFT REVI	The same of the sa	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	the facility of the second second	KORLINSEK
meliputi:	Many metabolic many section many section and section a			DRAFT.	REVISI
Kecamatan Mranggen;					
2. Kecamatan Karangawen; dan					
Kecamatan Guntur.				1	•
c. satuan wilayah pembangunan III dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Wedung meliputi :					
Kecamatan Wedung; dan			1		
Kecamatan Bonang.					
d. satuan wilayah pembangunan IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Gajah meliputi :					
Kecamatan Gajah;			·		
Kecamatan Karanganyar; dan					
3. Kecamatan Mijen.			·		
e. satuan wilayah pembangunan V dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Dempet meliputi :					
Kecamatan Dempet; dan					
Kecamatan Kebonagung.					
(2) Rencana fungsi satuan wilayah pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b terdiri atas:		·			
a. satuan wilayah pembangunan I dengan fungsi meliputi:					
pusat pemerintah Daerah;		·			
2. perdagangan dan jasa;		· į			
3. pertanian;			·		
4. perikanan;					
5. peternakan;				·	·
6. industri;					
7. transportasi; dan		"	•		
b. satuan wilayah pembangunan II dengan tungsi		į.	•		
b. satuan wilayah pembangunan II dengan fungsi meliputi:					∤. .
1. pertanian;		ľ			
2 perdagangan dan jasa;		. ,	·		
rgangan aan, jaoa,					
					
					20

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOOR	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	CECUDARIO
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-203	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
peternakan; dan	では、 100mmのでは、		DRAFTIREVISI
4. industri.			
 c. satuan wilayah pembangunan III dengan fungs 	si ¦		
meliputi :			
1. pertanian;			
2. perikanan;			
perdagangan dan jasa;			
4. peternakan;			
5. industri; dan			
6. pariwisata.			
 d. satuan wilayah pembangunan IV dengan fungs meliputi : 	i		
 pertanian; 	·		·
perdagangan dan jasa;	·		
perikanan;		<u> </u>	
4. peternakan; dan		1	
5. industri.			
 e. satuan wilayah pembangunan V dengan fungsi meliputi: 			
1. pertanian;			
perdagangan dan jasa;			
3. peternakan; dan		1	
4. industri.	1	1	· ·
Bagian Ketiga	Bagian Ketiga	 	
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	Sistem Jaringan Prasarana Wilayah		
Pasal 10	TETAP		
Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana			
imaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :	·		
. sistem jaringan transportasi;			
sistem jaringan energi;			
sistem jaringan telekomunikasi;			
sistem jaringan sumber daya air; dan			
sistem jaringan prasarana lainnya.		1	
Paragraf 1		·	<u> </u>
Sistem Jaringan Transportasi	:		
gar and or mo.		- '	

Dr.	DRAFT-RAPERDA SEBELUM KOOR	DINAS	ILINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/		SESUDAH KORLINSEK
	RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031		The state of the s	PERTANYAAN		DRAFTIREVISI
Sis	sal 11 Item jaringan transportasi sebagaimana dimaksud am Pasal 10 huruf a terdiri atas: rencana sistem transportasi darat; dan	7.	Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 11	A STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE	8	Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 11
b.	rencana sistem transportasi kereta api.	da a. b.	stem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud lam Pasal 10 huruf a terdiri atas: sistem jaringan transportasi darat; sistem jaringan transportasi sungai, danau; dan sistem jaringan transportasi laut.		d a b	Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud lalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: sistem jaringan transportasi darat; sistem jaringan transportasi sungai, danau; dan
(1) (2) (3)	Pasal 12 Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas: a. rencana prasarana jaringan jalan; b. rencana sarana pelayanan angkutan umum; dan c. rencana pelayanan angkutan umum. Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan: a. sistem jalan; dan b. fungsi jalan. Sistem jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. jalan primer; dan b. jalan sekunder. Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. jalan arteri;	(2)	Ketentuan Pasal 12diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksu dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas: a. sistem jaringan jalan; dan b. sistem jaringan kereta api. Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. rencana prasarana jaringan jalan;dan b. rencana angkutan umum.	rekomendasi KLHS; Pasal 12, Perlu ditambahkan pada ayat 5	9.	 Ketentuan Pasal 12diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Sistem jaringan transportasi darat sebagaima dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas: a. sistem jaringan jalan; dan b. sistem jaringan kereta api.
	b. jalan kolektor,c. jalan lokal; dand. jalan lingkungan;Rencana sarana pelayanan angkutan umum					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3)	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem terminal. Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum.					
	Pasal 13	9.	Ketentuan Pasal 13diubah sehingga berbunyi	Menambahkan rencana pembangunan terminal Tipe B	10.	Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi

TI ENDA OIZULIKI KWIKABUPATEN DEMAK 2	M KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) 011-2031	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana d	imaksud sebagai berikut :	PERTANYAAN	DDAFT DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA D
uaiaiii Pasai 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:	Pasal 13	(wenyesuaikan RTRW Jawa	sebagai berikut :
a. jalan arteri primer meliputi:	(1) Danassa	Tengah)	Pasal 13
pembangunan jalan arteri primer bebas hambatan Sanaran	(1) Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdin	1	(1) Rencana preserana iorinara i
hambatan Semarang-Rembang beserta	atas:	1	(1) Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdir
interchange yang melalui Kecamatan Sa Kecamatan Karang Tengah - Kecamatan	lyung - a. jaringan jalan nasional;	1	atas:
Wonosalam - Kecamatan Gajah - Kecan			a. jaringan jalan nasional;
Karanganyar.	c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan		b. jaringan jalan provinsi;
penambahan interchange jalan arteri prir	ner i kabupatèn;		c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan
pepas hambatan sebagaimana dimaksur	i nada d. jalan desa:		kabupaten;
nurur a dapat ditambah atau dikurangi de	ngan e. jalan khusus;		d. jalan desa;
izin Pemerintan; dan	f. terminal penumpana den	1	e. jalan khusus;
peningkatan jalan arteri primer bukan bet hambatan melalui Kanan peningkatan melalui Kanan peningkatan melalui Kanan peningkatan peni	pas g. terminal barang.	!	f. terminal penumpang;dan
hambatan melalui Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan i	(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud	!	g. terminal barang.
Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanyar	pada ayat (1) nurur a meliputi:		(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dirnaksud
jalan kolektor primer meliputi:	a. Jaian arten primer meliputi.		Pada dyar (1) norur a meliputi:
peningkatan ruas jalan Mranggen – Karar Cubus Kalangan Mranggen – Karar	1. Jaian Bts. Kab. Demak/Kudus – Jati;		a. Jalan arteri primer meliputi:
- Gubug - Kebonagung - Godong (Kabu	gawen 2. Jalan Lingkar Demak;		Jaian Bts. Kab. Demak/Kudus – Jati;
Grobogan);	3. Jaian Bts. Kota Demak – Trengguli		2. Jalan Lingkar Demak:
peningkatan ruas jalan Demak – Wonosal	am – 4. Jalan Trengguli - Bis Kah		3. Jalan Bts. Kota Demak – Trengguli;
Dempet – Godong (Kabupaten Grobogan)	; dan Demak/Kudus; dan	•	4. Jalan Trengguli - Bts. Kab
 peningkatan ruas jalan Trengguli/ Gajah – 	Mijen 5. Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota		Demak/Kudus; dan
– vveianan (Kabupaten Jepara).	Demak.		5. Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota
jalan lokal primer meliputi:	b. Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) meliputi:		Delilak.
peningkatan ruas jalan Demak - Bonang – Wodynasi	Jalan Trengguii - Bts. Kab. Demak/Bts.		b. Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) meliputi:
Wedung;	nau. Jepara;		Jalan Frengguli - Bts. Kab. Demak/Bts
 peningkatan ruas jalan Onggorawe – Waru Mranggen; 	2. Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara		nao. Jepara;
	- Margoyoso; c. Jafan tol meliputi:		2. Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara
 peningkatan ruas jalan Mranggen – Kangku Kebonbatur – Banyumeneng/ Girikusumo; 	ing – 1 John tol Commen	•	- Margoyoso; c. Jalan tol meliputi:
peningkatan ruas jalan Kangkung – Sumber	1. Jalan tol Semarang – Demak;		
Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;	rejo - 2. Jalan tol Demak - Tuban; dan		Jalan tol Semarang – Demak;
5. peningkatan ruas jalan Karangawen – Jragu	3. exit tol di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wonosalam.		2. Jalan tol Demak – Tuban; dan
peningkatan ruas jalan Karangtengah – Gur	utur – (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud		exit tol berada di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wonosalam.
Karangawen;	pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer		(3) Jaringan jalan provinsi sebagai a
7. peningkatan ruas jalan Pamongan - Bulusar	2 (JKP2) meliputi:		(3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer
- , Juliusai	a. Jalan Semarang - Godong		2 (JKP2) meliputi:

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDIN PERDA 6/2011 RTRW KABURATEN DEMAK 2011-2031		SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINGER
Banjardowo (Kota Semarang); 8. peningkatan ruas jalan Onggorawe – Suradadi; 9. peningkatan ruas jalan Karangtengah – Tambakbulusan; 10. peningkatan ruas jalan Desa Sriwulan – Bedono – Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan – Morodemak - Purworejo; 11. peningkatan ruas jalan Desa Berahan Wetan – Babalan – Kedungmutih – Kedungkarang – Tedunan; 12. peningkatan ruas jalan Wedung – Bungo – Jetak – Mijen; 13. peningkatan ruas jalan Karanganyar – Kedungwaru kidul – Gempolsongo – Mijen; 14. peningkatan ruas jalan Bungo – Mutih Kulon;	b. Jalan Demak – Godong; c. Jalan Semarang – Demak – Jepara (jalan pesisir); dan d. Rencana jalan lingkar Mranggen. (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer meliputi: a. Jalan Demak - Bonang – Wedung; b. Jalan Onggorawe – Waru – Mranggen; c. Jalan Mranggen – Kangkung – Kebonbatur – Banyumeneng/ Girikusumo; d. Jalan Kangkung – Sumberejo – Margohayu – Wonosekar - Tiogorejo; e. Jalan Karangawen – Jragung;	PERTANYAAN (4	kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer meliputi: a. Jalan Demak - Bonang – Wedung; b. Jalan Onggorawe – Waru – Mranggen; c. Jalan Mranggen – Kangkung – Kebonbatur – Banyumeneng/ Girikusumo; d. Jalan Kangkung – Sumberejo – Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;
 peningkatan ruas jalan Karangnyar – Sambung – Sidomulyo – Merak; peningkatan ruas jalan Gajah – Dempet; peningkatan ruas jalan Dempet – Sidomulyo; peningkatan ruas jalan Dempet – Kebonagung; peningkatan ruas jalan Karangtengah – Pasar Wonosalam – Doreng – Megonten; peningkatan ruas jalan Demak – Pasar Wonosalam; peningkatan ruas jalan Mranggen – Batursari – Pucanggading / TVRI – Kebonbatur; dan peningkatan ruas jalan Jalan lingkar Mranggen. jalan lingkungan berupa pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan berada di seluruh wilayah Daerah. 	f. Jalan Karangtengah – Guntur – Karangawen; g. Jalan Pamongan - Bulusari – Banjardowo (Kota Semarang); h. Jalan Onggorawe – Suradadi; i. Jalan Karangtengah – Tambakbulusan; j. Jalan Desa Sriwulan – Bedono – Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan – Morodemak – Purworejo; k. Jalan Desa Berahan Wetan – Babalan – Kedungmutih – Kedungkarang – Tedunan; l. Jalan Wedung – Bungo – Jetak – Mijen; m. Jalan Karanganyar – Kedungwaru kidul – Gempolsongo – Mijen; n. Jalan Bungo – Mutih Kuion;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	f. Jalan Karangtengah – Guntur – Karangawen; g. Jalan Pamongan - Bulusari – Banjardowo (Kota Semarang); h. Jalan Onggorawe – Suradadi; i. Jalan Karangtengah – Tambakbulusan; j. Jalan Desa Sriwulan – Bedono – Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan – Morodemak – Purworejo; k. Jalan Desa Berahan Wetan – Babalan – Kedungmutih – Kedungkarang – Tedunan; Jalan Wedung – Bungo – Jetak – Mijen; m. Jalan Karanganyar – Kedungwaru kidul – Gempolsongo – Mijen; n. Jalan Bungo – Mutih Kulon;
	Merak; p. Jalan Gajah – Dempet; q. Jalan Dempet – Sidomulyo; r. peningkatan ruas jalan Dempet – Kebonagung; s. Jalan Karangtengah – Pasar Wonosalam – Doreng – Megonten; t. Jalan Demak – Pasar Wonosalam;	p q r. s.	Jalan Karangnyar – Sambung – Sidomulyo – Merak; Jalan Gajah – Dempet; Jalan Dempet – Sidomulyo; peningkatan ruas jalan Dempet – Kebonagung;

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011:203	PDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
The state of the s		PERTANYAAN	
	u. Jalan Mranggen – Batursari – Pucanggading /	The second secon	
	TVRI – Kebonbatur; dan		u. Jalan Mranggen – Batursari – Pucanggading TVRI – Kebonbatur; dan
·	v. Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati		V. Jalan Jainnya yang ditetenkan punak
	(5) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		i and an initial falla discissional Britain
	huruf d meliputi rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di		(5) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (huruf d meliputi rencana peningkatan da
	seluruh Daerah.		pengembangan prasarana jalan perdesaan
	(6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat		seluruh Daerah.
	(1) IIUIUI @ Deruba nendembandan di kowasa		(6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada aya
	industri di Kecamatan Sayung dan Karang Tengah		I (!) !!U!U! & Denina hendembandan di kawa-
	(7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada		industri di Necamatan Sayung dan Karangtangah
	ayat (1) nurur r meliputi:		(7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada
	a. terminal penumpang Tipe A direncanakan di		ayar (1) nurur i melibuti:
	Kawasan Perkotaan Demak;		a. terminal penumpang Tipe A direncanakan d
	b. terminal penumpang Tipe C direncanakan		Nawasan Perkotaan Demak:
	meliputi :		b. ierminal penumpang Tipe B direncanakan di
	Kawasan Perkotaan Mranggen;	1	Kawasan Perkotaan Mranggen;
	Kawasan Perkotaan Wedung;		c. terminal penumpang Tipe C direncanakan meliputi :
	Ibukota Kecamatan Wonosalam;	**	Kawasan Perkotaan Mranggen;
	4. Ibukota Kecamatan Gajah;	I	Kawasan Perkotaan Wedung;
	5. ibukota Kecamatan Karanganyar;	•	Ibukota Kecamatan Wonosalam;
	6. Ibukota Kecamatan Mijen;		4. Ibukota Kecamatan Gajah;
	7. Ibukota Kecamatan Bonang;	Į.	5. Ibukota Kecamatan Karanganyar;
	8. Ibukota Kecamatan Sayung;		Ibukota Kecamatan Mijen;
	Ibukota Kecamatan Karangtengah;	1	7. Ibukota Kecamatan Bonang;
•	10. Ibukota Kecamatan Cuntur;	·	Ibukota Kecamatan Sayung;
	11. Ibukota Kecamatan Dempet;		Ibukota Kecamatan Karangtengah;
	12. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan -	<u> </u>	Ibukota Kecamatan Karangtengan; Ibukota Kecamatan Guntur;
	13. Ibukota Kecamatan Kebonagung.	1	11. Ibukota Kecamatan Dempet;
·	(8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat		12 Ibukota Kecamatan Dempet;
	(1) huruf g berada di Kecamatan Sayung.		Ibukota Kecamatan Karangawen; dan Ibukota Kecamatan Kebonagung.
		18	Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat
Pasal 14	10. Pasal 14 Dihapus		(1) huruf g berada di Kecamatan Sayung.
ncana sarana pelayanan anukutan umum sebagaimana	10. Tabai 14 Dillapus	11	Pasal 14 Dihapus
aksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi :			i i omupus
terminal penumpang Tipe A direncanakan di		į	

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 20	RDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	CECHDALL
Kawasan Perkotaan Demak;	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEKT
b. terminal penumpang Tipe C direncanakan meliputi :	1300 17	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	DRAFTEREVISION
Kawasan Perkotaan Mranggen;		·	
Kawasan Perkotaan Wedung;	·		
Ibukota Kecamatan Wonosalam;			
Ibukota Kecamatan Gajah;			
Ibukota Kecamatan Karanganyar;			
Ibukota Kecamatan Mijen;		ļ	
7. Ibukota Kecamatan Bonang;			
8. Ibukota Kecamatan Sayung;			
Ibukota Kecamatan Karangtengah; Ibukota Kecamatan Guntur:			
is a resident definer.			
11. Ibukota Kecamatan Dempet;			
12. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan			
13. Ibukota Kecamatan Kebonagung.			
terminal barang direncanakan di Kecamatan Sayung.			
Pasal 15	11. Ketentuan Pasal 15diubah sehingga berbugui		
encana pelayanan angkutan umum sebagaimana yang	school better	Menyesuaikan dengar	12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi
maksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa	Pasal 15	nomnklatur dalam RTRW Jawa Tengah	sebagai berikut :
eningkatan rute pelayanan angkutan umum meliputi :	(1) Rencana angkutan umum sebagaimaan dimaksud	rengan	Pasal 15
Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Lasem;	dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:		(1) Rencana angkutan umum sebagaima il
Semarang-Demak-Kudus,	a. Pengembangan angkutan umum		dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
Semarang-Demak-Kudus-Pati-Juana;	Kedungsepur.	·	a. pengembangan angkutan umum k
Fegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;	b. Rencana pelayanan angkutan umum		Torrotadii Neligal - Demak I Inggres
Kudus-Demak-Semarang-Secang-Wonosobo- Purwokerto:	(2) Pengembangan angkutan umum Kodunggan	·	I Surge - Semarang - Dupusded:
•	l sepayalitidila Olmaksiid nada avat (1) burut - (I (veganigsebar); dan
Semarang-Demak-Kudus-Rembang-Blora-Cepu;	l perupa periyedidan angkiran rim: massal dan l		b. rencana pelayanan angkutan umum.
Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;	i daliidas, pendukungnya yang menghibungkan l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(4) Pengembangan angkutan umum k
Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang;	Kawasan Kedungsepur.	•	1 Populational Children Dates and 141 1 6
Semarang-Demak-Kudus-Pati;	(3) Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana		I TO THE POST CUITAGE OF THE PROPERTY OF THE P
Semarang-Demak-Kudus-Jepara,	yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berupa peningkatan rute pelayanan angkutan	B_{ij}	pendukungnya yang menghubungkan Kawasan Kedungsepur
Jepara-Kudus-Demak-Semarang-Pekalongan-Tegal;	umum meliputi:		(3) Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana
Tegal-Semarang-Demak-Kudus;	a. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-		yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b
Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Bangsri;	Lasem;		berupa peningkatan rute pelayanan angkutan
Solo-Salatiga-Semarang-Demak-Kudus-Pati;	b. Semarang-Demak-Kudus;		aman menput.
· 1	c. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Juana;	i	a. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-

•

•

	RDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK). 1 DRAFT REVISIONALINAS SEKTOR (KORLINSEK).	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
o. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi;	d. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;		DRAFT REVISI.
p. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora;	e. Kudus-Demak-Semarang-Secang-Wonosobo-		b. Semarang-Demak-Kudus;
G. Semarang-Demak-Purwodadi-Solo;	Purwokerto;		c. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Juana;
Wedung-Demak-Godong-Purwodadi;	f. Semarang-Demak-Kudus-Rembang-Blora-		d. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;
s. Morodemak-Bonang-Demak; dan	Cepu;		e. Kudus-Demak-Semarang-Secang-Wonosobo-
Mranggen-Karangawen-Guntur-Karangtengah.	g. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;	1 .	I di woketto,
	h. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang;	İ	f. Semarang-Demak-Kudus-Rembang-Blora-
	i. Semarang-Demak-Kudus-Pati;		Г Сера,
	j. Semarang-Demak-Kudus-Jepara:	}	g Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;
	k. Jepara-Kudus-Demak-Semarang-Pekalongan-		ii. Seinarang-Demak-Kudus-Pati-Remhang.
	i egai,		i. Semarang-Demak-Kudus-Pati;
	I. Tegal-Semarang-Demak-Kudus;		j. Semarang-Demak-Kudus-Jenara-
	m. Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Bangsri		k. Jepara-Kudus-Demak-Semarang-Pekalongan-
•	n. Solo-Salatiga Semarang-Demak-Kudus-Pati		r cgai,
	c. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi:		I. Tegal-Semarang-Demak-Kudus;
	p. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora;		m. Semarang-Demak-Kudus-Jenara-Bangsri
	q. Semarang-Demak-Purwodadi-Solo;		11. Solo-Salatiga-Semarang-Demak-Kudus-Pali-
	r. Wedung-Demak-Godong-Purwodadi;	•	o. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-
	s. Morodemak-Bonang-Demak; dan		p. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora:
•	t. Mranggen-Karangawen-Guntur-		q. Semarang-Demak-Purwodadi-Solo:
	Karangtengah.		r. Wedung-Demak-Godong-Purwodadi:
			s. Morodemak-Bonang-Demak; dan
			t. Mranggen-Karangawen-Guntur-
Pasal 16	12. Ketentuan Pasal 16diubah sehingga berbunyi	No.	Karangtengah.
Rencana sistem transportasi kereta api sebagaimana	sebagai berikut :	 Menyesuaikan dengan RTRW Jawa Tengah 	13. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi
dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sesuai	Pasal 16	Menyoquaikan dai	sebagai berikut :
dengan rencana jaringan kereta api nasional terdiri atas;	(1) Sistem jaringan transportasi kereta api	Menyesuaikan dengan -rencana reaktivasi jalur KA	Pasal 16
a. rencana jaringan prasarana kereta api;	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 augu (4)	di Jawa Tengah	(1) Sistem jaringan transportasi kereta api
b. rencana pelayanan kereta api; dan	nului b dilakukan sesuai dengan rencana jaringan l		1 999444IIIIAIIA IIIIIAKKIIN MAIOM Donel 40
c. rencana prasarana pelayanan kereta api.	kereta aprinasional terdiri atas:	ı	I marar b unakukan sesuai dendan rercana iari 1
Rencana jaringan prasarana kereta api sebagaimana	a. jaringan jalur kereta api; dan		I wasan abi nasional feldiu stas:
dimpressid node evel (4) i e	b. stasiun kereta api.		a. jaringan jalur kereta api; dan
pengembangan rel kereta api menghubungkan	(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud	•	b. stasiun kereta api.
Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang.	pada ayat (1) nurut a terdiri atas:		(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud
Rencana pelayanan kereta api sebagaimana	a. jaringan jalur kereta api umum; dan		pada ayat (1) nurui a terdiri atas:
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan	b. jaringan jalur kereta api khusus.	ľ	a. jaringan jalur kereta api umum; dan b. jaringan jalur kereta api khusus.

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-203	RDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) 1 DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
pelayanan pergerakan kereta api komut menghubungkan Semarang – Demak – Kudus – P. – Rembang. (4) Rencana prasarana sarana kereta api sebagaimar dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa revitalisa stasiun kereta api berada di Kawasan Perkotaa Demak.	dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. jalur kereta api Jakarta-Surabaya; b. pengembangan jaringan kereta api perkotas	an an an an an an an an an an an an an a	(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaima dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya; b. jalur Utara menghubungkan Jakarta Semarang – Surabaya; c. pengembangan kereta api regional Semara – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lase – Jatirogo – Bojonegoro; dan d. pengembangan jaringan kereta api perkota: Kedungsepur. (4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimar dimaksud pada ayat (2) huruf b dari dan menuju: a. kawasan industri; b. kawasan Wisata; dan c. kawasan lainnya. (5) Rencanastasiun kereta api sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b berupa revitalisasi stasiu penumpang kereta api berada di: a. Kecamatan Demak; b. Kecamatan Mranggen; dan
	13. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:		 b. Kecamatan Mranggen; dan c. Kecamatan Sayung. 14. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 16A Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. huruf b meliputi: a. jaringan sungai untuk transportasi di Kecamatan Bonang. b. jalur transportasi sungai untuk wisata meliputi: 1. Kecamatan Sayung; dan 2. Kecamatan Karangtengah. c. pengembangan dermaga sebagai infrastruktur pendukung.		Pasal 16A Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1 huruf b meliputi: a. jaringan sungai untuk transportasi di Kecamatan Bonang. b. jalur transportasi sungai untuk wisata meliputi: 1. Kecamatan Sayung; dan 2. Kecamatan Karangtengah. c. pengembangan dermaga sebagai infrastruktur pendukung.

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOOR PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-203	1 DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi	(1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi : a. terminal khusus; dan b. pelabuhan perikanan. (2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Pelabuhan Perikanan Morodemak; b. Pelabuhan Perikanan Wedung; dan c. pangkalan pendaratan ikan meiiputi: 1. Pelabuhan Perikanan Babalan; 2. Pelabuhan Perikanan Betahwalang; dan Pelabuhan Perikanan Bungo.	Di Kabupaten Demak terdapa rencana pembanguna pelabuhan Pengumpan Loka	(1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi :
Pasal 17 Sistem jaringan energisebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: rencana sistem prasarana pipa minyak dan gas bumi rencana pengembangan energi listrik; dan rencana transmisi energi listrik. Pasal 18 1) Rencana sistem prasarana pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:	14. Ketentuan Pasal 17diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi: a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan d. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. 15. Ketentuan Pasal 18diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.		15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 Sistem jaringan energi sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi: a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan paringan infrastruktur ketenagalistrikan. 16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengelah selah selaman sebagai pangalah selah selaman sebagai pangalah selah selaman sebagai pangalah selah selaman sebagai pangalah selah selaman selaman sebagai pangalah selah selaman sebagai pangalah selah selaman sebagai pangalah selah selaman

,,

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	VASI LINTAS SEKTOR (KORLÍNSEK) DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
Semarang.	(2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi	PERTANYAAN	DRAFT REVIS
(2) Rencana jaringan pipa gas Semarang – Cirebon –	udii Kilang pengeolahan ke konsumon		(2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas h
Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui :	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melinuti:		l dali kilalia pengeolahan ko konsu-
a. Kecamatan Sayung;	a. jaringan pipa gas Semarang – Cirebon –		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melinuti:
b. Kecamatan Karangtengah;	bangkalan; dan		a. jaringan pipa BBM Cepu - Rembar
c. Kecamatan Karangtengan;	b. jaringan pipa gas Blora – Grobogan – Demak		Fengapon Semarang
d. Kecamatan Karanganyar.	- Semarang.		b. jaringan pipa gas regional meliputi:
3) Rencana jaringan jaringan pina gas Blora – Groboson	(3) Rencana jaringan pipa gas Semarang – Cirebon –		Kepodang - Rembang - Pati - Jepara Semarang; dan
Rencana jaringan jaringan pipa gas Blora – Grobogan Demak – Semarang sebagaimana dimaksud pada	Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui :		2. Blora - Grobogan - Demak - Somerone
ayat (1) huruf b melalui:	a. Kecamatan Sayung;		(9) Janinyan pipa BBM Cenii - Rembana Popasa-
a. Kecamatan Mranggen;	b. Kecamatan Karangtengah;		Semarahy sebagaimana dimaksud nada ayat /
b. Kecamatan Karangawen; dan	c. Kecamatan Gajah; dan		nurur a meralur:
c. Kecamatan Kebonagung	d. Kecamatan Karanganyar.		a. Kecamatan Sayung;
· 1	(4) Rencana jaringan jaringan pina gas Plata		b. Kecamatan Karangtengah;
	Groupgan - Demak - Semaranc sebagaimana I		c. Kecamatan Gajah; dan
·	ulmaksud pada ayat (2) huruf b melalui:	•	raingaryar.
	a. Kecamatan Mranggen;		(4) Rencanajaringan pipa gas regional Kepodang Rembang - Pati - Jepara - Semaran
	b. Kecamatan Karangawen; dan	•	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l
	d. Kecamatan Kebonagung		angka 1 melalui:
		•	a. Kecamatan Sayung;
			b. Kecamatan Karangtengah;
<u>`</u>			c. Kecamatan Gajah; dan
· •			d. Kecamatan Karanganyar.
	· ·	•	(5) Rencanajaringan pipa gas regional Blora -
		•	- Delliak - Semarang cohagoi
			dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 melalui: a. Kecamatan Mranggen;
			b. Kecamatan Karangawen; dan
Pasal 19		•	c. Kecamatan Kebonagung.
	6. Ketentuan Pasal 19diubah sehingga berbunyi		17 Ketentuan Paral 40 III July 1
ncana pengembangan energi listrik sebagaimana naksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui	sebagai berikut:		17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
ngembangan sumber energi listrik alternatif yang l	Doubled	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pasal 19
Sumber dan matahari air angin dan sumbor lainnnin l	Pasal 19		Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana
ng ramah lingkungan. Ja	ringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana naksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:		umaksuu ualam Pasal 17 hurut b terdiri atas:
a.	infrastruktur pembangkit tenaga listrik; dan		a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan
	- Formatignic toriaga listing, dali		b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK:2011-2031	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
And the resemble to the second	DIGHT THE THE THE THE THE THE THE THE THE T	PERTANYAAN	DRAFT REVISION DRAFT
	infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.	The second secon	pendukungnya.
Pasal 20			pondandigitya.
(1) Rencana transmisi energi listrik sebagaimana	 Ketentuan Pasal 20diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 	Kementerian ATR	18. Ketentuan Pagal 20 diskat
dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:	Pasal 20		 Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbun sebagai berikut:
 a. pengembangan sistem jaringan listrik meliputi : 		<u>Masukan :</u>	Pasal 20
 saluran udara tegangan ekstra tinggi; 	(1) Rencana infrastruktur pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a	i , aa, aisesaaikan dengan	(1) Infractivities
saluran udara tegangan tinggi;	Derupa pembangunan sumber energi lietrik	rekomendasi KLHS;	sebagaimana dimaksud dalam Pagal 10 b
saluran udara tegangan menengah; dan	alternatif yang bersumber dari matahari air angin	Pasal 20, Perlu ditambahkan	l beitha bellibandinan sumbor open:
saluran udara tegangan rendah.	dan sumber lainnnya yang ramah lingkungan.	pada ayat 5	and ridge yally becoming dan matches at-
b. pengembangan daya listrik.	(2) Rencana infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan	"rencana pengembangan energi alternatif melalui waste to	sampah, dan sumber lainnnya yang r lingkungan.
(2) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana	sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud	energy pada seluruh TPA serta	g.angun.
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :	dalam pasal 19 huruf b berupa rencana transmisi tenaga listrik terdiri atas:	energi angin dan mataharipada	(2) Ifrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sa pendukungnya sebagaimana dimaksud d
a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan	a jaringan transmisi tasa was	kawasan pesisir"	pasal 19 huruf b berupa rencana transmisi te
ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi	a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem		listrik terdiri atas:
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 melalui :	meliputi :	Tanggapan:	a. jaringan transmisi tenaga listrik t
Kecamatan Sayung;	 saluran udara tegangan ekstra tinggi; 	Sudah disesuaikan di pasal 1.	menyalurkan tenaga listrik antar si
Kecamatan Karangtengah;	dan		monputi.
3. Kecamatan Demak;	saluran udara tegangan tinggi.		saluran udara tegangan ekstra tir dan
4. Kecamatan Wonosalam;	b. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:		uaii
5. Kecamatan Gajah;	saiuran udara tegangan menengah; dan		
6. Kecamatan Bonang;	saluran udara tegangan rendah.		jamigan distribusi terlaga listrik melini iti-
7. Kecamatan Wedung;	C. gardu induk.	,	 saluran udara tegangan menengah; d saluran udara tegangan rendah.
8. Kecamatan Karanganyar; dan	(3) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana		c. gardu induk.
9. Kecamatan Mijen.	dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:		(3) Pengembangan sistem jaringan sekara
b. pengembangan jaringan saluran udara tegangan	a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi melalui:		dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 meliputi
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat	Kecamatan Mranggen; dan		a. pengembangan jaringan saluran udi
(1) huruf a angka 3 melalui :	Kecamatan Karangawen.		cogangan eksita tinggi melalui:
Kecamatan Mranggen; dan	b. saluran udara tegangan tinggi melalui :	·	 Kecamatan Mranggen; dan
2. Kecamatan Karangawen.	Kecamatan Sayung;		Kecamatan Karangawen.
c. pengembangan jaringan saluran udara tegangan	Kecamatan Karangtengah;	.mp (4.4.)	b. saluran udara tegangan tinggi melalui :
rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 di seluruh wilayah Daerah.	Kecamatan Demak;		r. Kecamatan Sayung:
(3) Pengembangan gardu induk distribusi kapasitas 20	4. Kecamatan Wonosalam;		Kecamatan Karangtengah;
(dua puluh) kilo volt meliputi:	5. Kecamatan Dempet;		Kecamatan Demak;
a. Kecamatan Sayung;	6. Kecamatan Gajah;		Kecamatan Wonosalam;
		• •	Kecamatan Dempet;

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
b. Kecamatan Demak; dan	A PAGE TO THE PAGE	PERTANYAAN	
c. Kecamatan Mranggen.	7. Kecamatan Bonang;	The second secon	
(4) Sampai dengan tahun 2031 seluruh wilayah Daerah	Kecamatan Wedung;	1	6. Kecamatan Gajah;
direncanakan sudah terlayani sistem energi listrik.	9. Kecamatan Karanganyar; dan	1	7. Kecamatan Bonang;
and the state of t	Kecamatan Mijen.	1	8. Kecamatan Wedung;
·	(4) Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik		9. Kecamatan Karanganyar; dan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h		10. Kecamatan Mijen.
	angka i dan angka 2 terdapat diseluruh wilayah		(4) Pengembangan jaringan distribusi tenaga listri
	Daerah Villayan) sebagainana ulmaksud pada avat (2) huruf
	(5) Pengembangan gardu induk sebagaimana		angka 1 dan angka 2 terdapat diseluruh wilayal Daerah
	dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:		Daeran
	a. Kecamatan Sayung;		(5) Pengembangan gardu induk sebagaimana
	b. Kecamatan Karangtengah;	<u>.</u>	dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
	c. Kecamatan Demak;		a. Kecamatan Sayung;
	d. Kecamatan Mranggen; dan		b. Kecamatan Karangtengah;
	e. Kecamatan Dempet		c. Kecamatan Demak;
	(6) Sampai dengan tahun 2031 seluruh wilayah		d. Kecamatan Mranggen; dan
	Daeran direncariakan sudah terlayani sistem l		e. Kecamatan Dempet
•	energi listrik.		(6) Sampai dengan tahun 2031 seluruh wilayah
			Daeran direncanakan sudah terlayani sistem
Paragraf 2			energi listrik.
Sistem Jaringan Telekomunikasi			
Pasal 21	18. Ketentuan Pasal 21diubah sehingga berbunyi		
Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud	sebagai berikut :		19. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi
alam Pasal 10 huruf c terdiri atas :	Pasal 21	-	sebagai berikut:
. jaringan kabel; dan	Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud		Pasal 21
. jaringan nirkabel.	dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:		Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimeterut
	a. jaringan tetap; dan		dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
	c. jaringan bergerak.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a. jaringan tetap, dan
			b. jaringan bergerak.
) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal	 Ketentuan Pasal 22diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 		20. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi
21 huruf a berupa pengembangan sistem prasarana	l de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de		sebagai berikut:
jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel l	Pasal 22		Pasel 22
berada di seluruh Kecamatan.	1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam	<u> </u>	(1) Jaringan tetan sebagaimana t
2) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan	Pasal 21 huruf a berupa pengembangan sistem		(1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa pengembangan sistem
kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan	prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan.		prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah
SUdah melayani seluruh ibukota Kocomoton I	3) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan	}.	Rabei perada di selurun Kecamatan
	kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan	10	2) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan
	aongan tanun 2001 unencanakan	1.	kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK: 2011-203	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	PERTANYAAN	DOVETO
Pasal 23	sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.		
(1) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasa	20. Ketentuan Pasal 23diubah sehingga berbunyi		sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.
21 nuruf b berupa pembangunan menari	sebagai benkut:		21. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi
telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.	1 asal 25		schagai belikut :
(2) Pemerintah Daerah mengarahkan penggupaan	(1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam		Pasal 23
persama menara telekomunikasi untuk meningkatkan	1		(1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalar
etisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.	nada aust (4) i	-	Pedal 21 horu b berupa laringan hemerak salular
(3) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan	pada ayat (1) berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.	1	(2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksu
menara telekomunikasi akan diatur dalam Peraturan	(3) Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan	1	pada ayat (1) berupa pembangunan menaratelekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.
Bupati.			(3) Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaar
	meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan		bersama menara telekomunikasi untuk
	ruang.		meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatar
	(4) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan		roung.
	menara telekomunikasi akan diatur dalam		(4) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan
Paragraf 3	Peraturan Bupati.		inclided telekomunikasi akan diatur dalam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air			Peraturan Bupati.
Pasal 24	21. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi		
Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :	sebagai berikut:		22. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi
a. sistem air baku dan irigasi; dan	Pasal 24		sebagai berikut:
b. sistem penggunaan air tanah.	sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud		Pasal 24
o. Gotom penggunaan an tanan.	dalahi pasal 17 nurut diterdiri atas:		sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
	a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten; dan	· ·	- and it pasar it mutul a fetally stas.
			a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten; dan
	b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.		9471
Pasal 25	00 1/4		b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
Sistem air baku dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam	22. Keteniuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :	,	23 Katantus B. War
Pasal 24 huruf a meliputi:	-	. 1.	23. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
n. peningkatan pengelolaan Wilayan Sungai Strategis	Pasal 25		· ·
Nasional Jratun Seluna berupa peningkataan	(1) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a	10	Pasal 25
pengelolaan daerah aliran sungai meliputi :	berupa peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai I	1	Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 hüruf a beruna popingkata.
Daerah Aliran Sungai Babon;	Su ategis Nasional Tratur Seluna.	•	borde permilikatan nendelolaan Miloyok Committee
Daerah Aliran Sungai Tuntang;	(2) Peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Stratasia		Oracegis Nasional Jratiin Seluna
Daerah Aliran Sungai Jragung; dan	Nasional Jeann Seluna herrina peningkatan l	(2	2) Peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai State
Daerah Aliran Sungai Serang.	pengelolaan daerah aliran sungai meliputi:		Nasional Jratun Seluna berupa peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai meliputi:

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOCRDINAS PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 b. peningkatan prasarana air irigasi terdiri atas: 1. pencegahan pendangkalan saluran irigasi; dan 2. peningkatan pintu-pintu air berada diseluruh bendungan dan jaringan irigasi. c. peningkatan prasarana air irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: 1. Daerah Irigasi Sedadi Dempet; 2. Daerah Irigasi Klambu Kiri; 3. Daerah Irigasi Sedadi Godong; 4. Daerah Irigasi Guntur Kanan; 5. Daerah Irigasi Guntur Kiri; 6. Daerah Irigasi Gablok;	a. Daerah Aliran Sungai Babon; b. Daerah Aliran Sungai Tuntang; c. Daerah Aliran Sungai Jragung; d. Daerah Aliran Sungai Serang. e. Daerah Aliran Sungai Dolok; f. Daerah Aliran Sungai Kaliombo; dan 8. Daerah Aliran Sungai Setu.	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK DRAFT REVISI a. Daerah Aliran Sungai Babon; b. Daerah Aliran Sungai Tuntang; c. Daerah Aliran Sungai Jragung; d. Daerah Aliran Sungai Serang. e. Daerah Aliran Sungai Dolok; f. Daerah Aliran Sungai Kaliombo; dan g. Daerah Aliran Sungai Setu.
8. Daerah Irigasi Glapan Kanan; 9. Daerah Irigasi Glapan Kiri; 10. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Baru; 11. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran; 12. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran; 13. Daerah Irigasi Dolok Kanan; 14. Daerah Irigasi Dolok Kiri; dan 15. Daerah Irigasi Pucanggading Kanan. pengembangan embung dengan fungsi menampung air dan mengendalikan banjir meliputi: 1. Kecamatan Karangawen;			
 Kecamatan Guntur; Kecamatan Dempet; Kecamatan Mijen; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Bonang; dan Kecamatan Wedung. 		·	
Pasal 26 em penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud seb am Pasal 24 huruf b meliputi: pemanfaatan sumber mata air secara optimal di kawasan perkotaan, ibukota kecamatan, dan daerah yang rawan kekeringan dan	dentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi pagai berikut : Pasal 26 em jaringan sumber daya air kabupaten agaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b iri atas:	·	4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf beterdiri atas:

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011:	RDINASI L'INTAS SEKTOR (KORLINSEK) SARANMASUKAN 31 DRAFT REVISI PERTANYAAN	SESUDAH KOREINSEK
b. pengendalian pengambilan dan pemanfaatar		DRAFT REVISI
tanah dalam meliputi:	b. prasarana sumber daya air.	a. sumber air; dan
Kecamatan Sayung;	(2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	b. prasarana sumber daya air.
Kecamatan Karangtengah;	huruf a meliputi:	(2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat
3. Kecamatan Demak;	a. air permukaan; dan	huruf a meliputi:
Kecamatan Bonang; dan	b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT).	a. air permukaan; dan
Kecamatan Wedung	(3) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat	b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT).
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(2) huruf a melputi:	(3) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada a (2) huruf a melputi:
	a. sungai;	•
	b. embung; dan	<u> </u>
	c. bendungan.	b. embung; dan c. bendungan.
	(4) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf	
	a meliputi:	(4) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hu a meliputi:
	a. Sungai Serang;	a. Sungai Serang;
	b. Kali Wulan;	b. Kali Wuian;
	c. Kali Kenceng;	c. Kali Kenceng;
	d. Kali Loben;	d. Kali Loben;
	e. Kali Jajar;	e. Kali Jajar;
	f. Kali Tuntang Lama;	f. Kali Tuntang Lama;
•	g. Kali Jragung;	g. Kali Jragung;
	h. Kali Setu;	h. Kali Setu;
•	i. Kali Dolog;	i. Kali Dolog;
•	j. Kali daleman;	j. Kali daleman;
	k. Kali Mondoliko; dan	k. Kali Mondoliko; dan
•	I. Kali Babon.	I. Kali Babon.
	(5) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	(5) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (
•	huruf b berupa pengembangan embung dengan	huruf b berupa pengembangan embung deng
	fungsi pengendalian banjir meliputi:	fungsi pengendalian banjir meliputi:
	a. Kecamatan Karangawen;	a. Kecamatan Karangawen;
· ·	b. Kecamatan Guntur;	b. Kecamatan Guntur;
- All Control of the	c. Kecamatan Dempet;	c. Kecamatan Dempet;
	d. Kecamatan Mijen;	d. Kecamatan Mijen;
•	e. Kecamatan Karanganyar;	e. Kecamatan Karanganyar;
	f. Kecamatan Bonang; dan	f. Kecamatan Bonang; dan
•	g. Kecamatan Wedung.	g. Kecamatan Wedung:
	(6) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	(6) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
	huruf c meliputi:		DRAFT:REVISION TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY
	a. Bendungan Gerak Kadilangu;		huruf c meliputi:
	b. Bendungan Gerak tedunan;		a. Bendungan Gerak Kadilangu;
	c. Bendungan Gerak Pucanggading;		b. Bendungan Gerak tedunan;
	d. Bendungan Gerak Barang;		c. Bendungan Gerak Pucanggading:
	e. Bendungan Gerak Jragung;		d. Bendungan Gerak Barang;
	f. Bendungan Gerak Guntur;		e. Bendungan Gerak Jragung;
	g. Bendungan karet Wonokerto;		f. Bendungan Gerak Guntur;
	h. Bendungan Karet Jatirogo;		g. Bendungan karet Wonokerto:
	i. Bendungan Karet kalu Kumpulan;		h. Bendungan Karet Jatirogo;
	j. Bendungan Gerak Glapan;		i. Bendungan Karet kalu Kumpulan:
	k. Bendungan Gerak Sedadi; dan		j. Bendungan Gerak Glapan:
	I. Bendungan Gerak Klambu Kiri.		k. Bendungan Gerak Sedadi; dan
	(7) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada		I. Bendungan Gerak Klambu Kiri
	ayat (2) nurur o meliputi:		(/) Cekungan air tanah sebagaimana dimakand d
	a. Cekungan Air Tanah Kudus		a yar (2) marar o menban:
	b. Cekungan Air Tanah Semarang Demak		a. Cekungan Air Tanah Kudus
	(8) Prasarana sumber daya air sebagaimana		b. Cekungan Air Tanah Semarang Demak
<i>,</i>	ulmaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:	1.5	o) Prasarana sumber daya air agharai
	a. sistem jaringan irigasi;		simulated page ayal (1) nurut b terdiri atas.
	b. sistem pengendalian banjir dan rob;		a. sistem jaringan iriyasi;
	c. jaringan air baku untuk air bersih; dan	·	 b. sistem pengendalian banjir dan rob; c. jaringan air baku uptik air bassik.
·	d. jaringan air bersilı ke kelompok pengguna.	Ī	James an Jaka untuk ali persin dan
	(9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:	100	James an politic refullibly bendance
		1	Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
	Sistem jaringan irigasi primer meliputi: Sistem jaringan irigasi primer meliputi:	1	Sistem jaringan irigasi primer meliputi:
	Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di:		Sistem jaringan injenti: Sistem jaringan injenti:
	a) Daerah Irigasi Sedadi;		Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di:
	b) Daerah Irigasi Glapan Timur;		a) Daerah Irigasi Sedadi;
· Ha	c) Daerah Irigasi Glapan Barat;		b) Daerah Ingasi Glapan Timur;
	d) Daerah Irigasi Klambu Kiri; dan	1	c) Daerah Irigasi Glapan Barat;
1	e) Daerah Irigasi Jragung;		d) Daerah Irigasi Klambu Kiri; dan
f	Sistem jaringan irigasi kewenangan	1	e) Daerah Irigasi Jragung;
	Pemerintah Provinsiyang berada di:		Sistem jaringan irigasi kewenangan
	a) Daerah Irigasi Guntur;		Pemerintah Provinsi yang berada di:
	, mgaor Ountur,		a) Daerah Irigasi Guntur,

DRAET RAPERDA SEBELUM KOORD PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031		SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
	b) Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Batu; c) Daerah Irigasi Penggaron; d) Daerah Irigasi Sumberejo; dan e) Daerah Irigasi Polder Batu, 3. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerahyang berada di:: a) Daerah Irigasi Gablok; b) Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran; dan c) Daerah Irigasi Dolok. b. Sistem jaringan irigasi sekunder berada di seluruh wilayah Daerah. (10) Sistem pengendali banjir dan rob sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi: a. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase; b. pembangunan sabuk pantai; c. pengendalian pengambilan air tanah; dan d. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir. (11) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi: a. pembangunan jaringan air minum perpipaan di seluruh kawasan perkotaan;		b) Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Batu; c) Daerah Irigasi Penggaron; d) Daerah Irigasi Sumberejo; dan e) Daerah Irigasi Sumberejo; dan e) Daerah Irigasi Polder Batu, 3. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah yang berada di:: d) Daerah Irigasi Gablok; e) Daerah Irigasi Gablok; e) Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran; dan f) Daerah Irigasi Dolok. b. Sistem jaringan irigasi sekunder berada di seluruh wilayah Daerah. (10) Sistem pengendali banjir dan rob sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi: a. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase; b. pembangunan sabuk pantai; c. pengendalian pengambilan air tanah; dan d: penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir. (11) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi: a. pembangunan jaringan air minum penanganan kawasan rawan banjir.
	 b. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan; dan c. pembangunan bendungan di sungai-sungai 		b. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan; dan
	yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku. (12) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d	(1)	c. pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku. 2) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDII PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) DRAFT REVISI berupa peningkatan pelayanan jangkaur	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK DRAFT REVISI
Paragraf 4 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	pelayanan air bersih kepada kelompok pengguna. Paragraf 4 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya		berupa peningkatan pelayanan jangkauan pelayanan air bersih kepada kelompok pengguna.
Pasal 27 Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas: a. rencana sistem pengelolaan persampahan; b. rencana sistem jaringan air minum; c. rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah; d. rencana sistem jaringan drainase; dan e. sistem evakuasi bencana.	24. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdriri atas: a. sistem jaringan persampahan; b. sistem penyediaan air minum; c. sistem pengelolaan air limbah; d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); e. sistem jaringan drainase; dan f. sistem evakuasi bencana.		25. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdriri atas: a. sistem jaringan persampahan; b. sistem penyediaan air minum; c. sistem pengelolaan air limbah; d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); e. sistem jaringan drainase; dan
(1) Kericana sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi : a. rencana lokasi tempat pemrosesan akhir; b. rencana lokasi tempat penampungan sementara; dan c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga. (2) Lokasi tempat pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a adalah.	 25. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi: a. rencana lokasi tempat pemrosesan akhir; b. rencana lokasi tempat penampungan sementara; dan c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga. 2) Lokasi tempat pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: 	Masukan: Agar disesuaikan dengan rekomendasi KLHS; Pasal 28 ayat 2 poin d, Perlu ditambahkan di belakang kalimat tersebut dengan " dan teknologi yang dapat mereduksi sampah" Tanggapan: Sudah disesuaikan.	f. sistem jaringan evakuasi bencana. 26. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi: a. rencana lokasi tempat pemrosesan akhir; b. rencana lokasi tempat penampungan sementara; dan c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga. (2) Lokasi tempat pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: a. Tempat Pemrosesan Akhir Kalikondang; b. Tempat Pemrosesan Akhir Candisari; c. Tempat Pemrosesan Akhir Berahan Kulca; dan d. pengelolaan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diarahkan menggunakan pendekatan sanitary landfill

Pl	RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031		SARANIMASUKANI PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
(4) (5)	Rencana lokasi tempat penampungan sementara sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal. Rencana lokasi tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.	(3) Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir dikembangkar pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempa pengolahan sampah terpadu. (4) Rencana lokasi tempat penampungan sementara sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal		dan teknologi yang dapat mereduksi sampa (3) Untuk mengurangi volume sampah yang masul lokasi Tempat Pemrosesan Akhir dikembang pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tem pengolahan sampah terpadu. (4) Rencana lokasi tempat penampungan sement sampah sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b ditempatkan pada kawasan ya memberikan pelayanan optimal. (5) Rencana lokasi tempat penampungan sementa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnakan diatur dalam rencana rinci tata ruang. (6) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berupa peningkatan partisipasi setiap ruma tangga untuk mengurangi sampah mulai da
1)	Pasal 29 Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas : a. jaringan perpipaan dan; b. non perpipaan.	 Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 29 Sistem penyediaan air minumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas : 		sumbernya. 27. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 29 (1) Sistem penyediaan air minum sebagaiman
2)	Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:	 a. jaringan perpipaan dan; b. bukan perpipaan. (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 		dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas : a. jaringan perpipaan; dan b. bukan jaringan perpipaan. (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
3)	Pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sampai dengan tahun 2031 telah melayani 60% penduduk di wilayah Daerah.	pengembangan unit air baku berupa pengembangan sumber air permukaan berasal dari: Sungai Jajar; Sungai Wonokerto;		a. pengembangan unit air baku berupa pengembangan sumber air permukaar berasal dari: 5. Sungai Jajar; Sungai Wonokerto;
)	Peningkatan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pembangunan reservoir dan prasarana kelengkapannya berada di seluruh kawasan perkotaan. Non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani	 3. Sungai Funtang; dan 4. Sungai Wulan; 5. Sungai Dombo Sayung; dan 6. Sungai lainnya sesuai kajian. b. pengembangan unit pengolahan berupa pengembangan fasilitas pengolah air minum meliputi: 		 Sungai Wonokerro; Sungai Tuntang; dan Sungai Wulan; Sungai Dombo Sayung, dan Sungai lainnya sesuai kajian. pengembangan unit pengolahan berupa pengembangan fasilitas pengolah air minum

.

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARANIMASUKANI	SESUDAH KORLINSEK
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN (*)	STATE OF THE PROPERTY OF THE P
jaringan perpipaan meliputi: a. penggalian atau pengeboran air tanah dangkal; b. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan; dan c. pengolahan air payau pada wilayah sekitar pantai.	1. Kecamatan Sayung; 2. Kecamatan Demak; 3. Kecamatan Wedung; 4. Kecamatan Mranggen; 5. Kecamatan Dempet; 6. Kecamatan Karanganyar; dan 7. Kecamatan Mijen. c. pengembangan unit produksi berupa peningkatan kapasitas produksi PDAM Tirta Darma. d. pengembangan unit distribusi berupa pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR). e. pengembangan unit pelayanan meliputi: 1. pencapaian 100% pelayanan kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen. 2. pengembangan pelayanan air minum pada kawasan yang rawan air minum. 3. Pengembangan pelayanan untuk kawasanperuntukan industri (3) Bukan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi: a. pengembangan sumur dangkal berada di seluruh kawasan permukiman perdesaan yang tidak mendapatkan pelayanan karingan perpipaan; b. pengembangan sumur pompa berada di Kecamatan yang kualitas air tanah dangkalnya tidak baik; dan d. pengembangan bak penampungan air hujan direncanakan di kawasan perkotaan dan		1. Kecamatan Sayung; 2. Kecamatan Demak; 3. Kecamatan Wedung; 4. Kecamatan Mranggen; 5. Kecamatan Maranganyar; dan 7. Kecamatan Mijen. c. pengembangan unit produksi berup peningkatan kapasitas produksi PDAM Tir Darma. d. pengembangan unit distribusi berup pengembangan prasarana jaringan perpipaa air minum dan sambungan rumah (SR). e pengembangan unit pelayanan meliputi: 1. pencapaian 100% pelayanan kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen. 2. pengembangan pelayanan air minum pada kawasan yang rawan air minum. 3. Pengembangan pelayanan untukawasanperuntukan industri (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi: a. pengembangan sumur dangkal berada di seluruh kawasan permukiman perdesaan yang tidak mendapatkan pelayanan jaringan perpipaan; b. pengembangan sumur pompa berada di Kecamatan yang kualitas air tanah dangkalnya tidak baik; dan c. pengembangan bak penampungan air hujan
	perdesaan dengan konsep pemanenan air hujan (<i>rain harvesting</i>).		direncanakan di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan konsep pemanenan air
Pasal 30 encana sistem jaringan pengelolaan air limbah bagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri	27. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut	28	hujan (<i>rain harvesting</i>). 3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	Character which is a second of the second of	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
atas:	DRAFT REVISI Pasal 30	PERTANYAAN	DRAFT REVISI
a. pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;	Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud		Pasal 30
b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan	dalam Pasal 27 nuruf c terdiri atas:	1	Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksu
limbah rumah tangga perkotaan; dan	a. pengembangan instalasi pengolahan limbah	·	udidin Pasar 27 nurur c terdiri atas:
c. pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.	industri;	1.	pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;
ne van ean raman tangga peruesaan.	 b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan; dan 		b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja
	dan imbah ruman tangga perkotaan; dan d. pengembangan instalasi pengolahan limbah		dan limbah rumah tangga perkotaan; dan
	kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.		C. pengembangan instalasi pengolahan limbah
Pasal 31	TETAP		kotoran hewan dan rumah langga perdesaan.
Pengembangan instalasi pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a			
meliputi:	·		
a. Kecamatan Sayung;		1	-
b. Kecamatan Karangtengah;			
c. Kecamatan Mijen;			
d. Kecamatan Mranggen; dan			
e. Kecamatan Karangawen.			
2) Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada		1	
kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggungjawab pengelola industri			
dengan izin Pemerintah Daerah.		1	
100	TETAP		<u> </u>
Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinia dan	ILIA)		
limbah rumah tangga perkotaan sebagaimana]	•
dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:			•
a. Kawasan Perkotaan Demak;			•
b. Kawasan Perkotaan Mranggen; c. Kawasan Perkotaan Wedung;			
d. Ibukota Kecamatan Wonosalam;	·		
e. Ibukota Kecamatan Gajah;			
f. Ibukota Kecamatan Karanganyar;		•	
g. Ibukota Kecamatan Mijen;	ا ب	,	and the second s
h. Ibukota Kecamatan Bonang;			
i. Ibukota Kecamatan Sayung;	·		
j. Ibukota Kecamatan Karangtengah;			
	————————i	}	$\epsilon = 0$

PERDA 6/2011 RTRW: KABUPATEN DEMAK: 2011-2031 k. Ibukota Kecamatan Guntur; I. Ibukota Kecamatan Dempet; m. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan n. Ibukota Kecamatan Kebonagung. (2) Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, pasar, lokasi sanimas, dan rumah tangga perkotaan.	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) DRAFT REVIS	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
 k. Ibukota Kecamatan Guntur; l. Ibukota Kecamatan Dempet; m. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan n. Ibukota Kecamatan Kebonagung. (2) Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, 			DRAFTREVISI
	i		
Pasal 33 Pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi: a. pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan peternakan rakyat di seluruh kecamatan; b. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan c. pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik.	TETAP		
	 Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasai 33 A berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 A (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. (2) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah B3. 		 29. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu pasal baru yaitu Pasal 33 A berbunyi sebaga berikut: Pasal 33 A (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dar beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasa 27 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dar penimbunan. (2) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah B3.
Pasal 34 Rencana sistem jaringandrainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi: a. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder meliputi:	TETAP		

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	The state of the s
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031.	DRAFTREVIS	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
Kawasan Perkotaan Demak;	では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	。 (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	DRAFT REVISI
Kawasan Perkotaan Mranggen;		1	
Kawasan Perkotaan Wedung;			
4. Ibukota Kecamatan Wonosalam;			
5. Ibukota Kecamatan Gajah;			
6. Ibukota Kecamatan Karanganyar;			
7. Ibukota Kecamatan Mijen;			
8. Ibukota Kecamatan Bonang;			
Ibukota Kecamatan Sayung;			
10. Ibukota Kecamatan Karangtengah;			
11. Ibukota Kecamatan Guntur;			i
12. Ibukota Kecamatan Dempet;	·	·	
13. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan			
14. Ibukota Kecamatan Kebonagung.			
b. peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan			
nasional Sayung – Karangtengah –Demak – Gajah – Karanganyar;			+
c. peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan		1	
provinsi Gajah – Mijen – Welahan, Demak –			
Wonosalam – Godong;			
d. normalisasi saluran sungai di seluruh wilayah Daerah;			
dan		·	1
e. penghijauan meliputi :	· .		
Kecamatan Mranggen; dan			
Kecamatan Karangawen.		·	
Pasal 35	TETAP		
(1) Rencana sistem evakuasi bencana sebagaimana			
dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi :			
a. pengembangan jalur evakuasi; dan			
b. ruang evakuasi bencana.			·
(2) Pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :		11	
a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir			
berupa jalan-jalan desa pada lokasi yang lebih aman meliputi:		1	1
1. Kecamatan Mranggen;			
i. Necamatan wildnygen,			

Sight was proposed to a galactic group of an experience of the contract of the	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	DRAFT REVISION OF THE PROPERTY
Kecamatan Guntur;		The state of the s	
Kecamatan Sayung;	·		
 Kecamatan Karangtengah; 		1	
Kecamatan Bonang;			
6. Kecamatan Mijen;			
Kecamatan Karanganyar;		Į.	
8. Kecamatan Kebonagung;			
9. Kecamatan Dempet;		1	
10. Kecamatan Gajah;			
11. Kecamatan Wedung;			
12. Kecamatan Demak;			·
13. Kecamatan Wonosalam; dan		·	·
14. Kecamatan Karangawen.			
b. pengembangan jalur evakuasi bencana	·		
gelombang pasang dan abrasi berupa			·
pengembangan jalan desa di Desa Sriwulan - Desa Purwosari dan Desa Bedono – Desa			
Timbulsloko.			
(3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud			
pada ayat (1) huruf b meliputi:		1	
a. lapangan;		1	·
h. stadion;			
c. taman publik;]	·
d. bangunan kantor pemerintah;			
e. bangunan fasilitas sosial; dan			
f. bangunan fasilitas umum.			
BAB-V	BAB V		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RENCANA POLA RUANG	RENCANA POLA RUANG		
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu		
Umum	Umum		
Pasal 36	29. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi	·	30. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi
(1) Rencana pola ruang terdiri atas:	sebagai berikut :		sebagai berikut:
a. kawasan lindung; dan	Pasal 36		Pasal 36
b. kawasan budidaya.	(1) Rencana pola ruang terdiri atas:		(1) Rencana pola ruang terdiri atas:
(2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud	a. kawasan peruntukan lindung; dan		a. kawasan peruntukan lindung; dan
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan	<u> </u>		
944			
	,		60
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORI	and programment the second contract of the se	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
PERDA: 6/2011: RTRW KABUPATEN DEMAK: 2011: 2031 tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampirar II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini.	b. kawasan peruntukan budidaya		b. kawasan peruntukan budidaya. (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaks pada ayat (1) digambarkan dalam peta deng tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalampiran II yang merupakan bagian tid terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kawasan Lindung Paragraf 1			·
Pasal 37 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 aya! (1) huruf a terdiri atas: a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan d. kawasan rawan bencana alam; dan e. kawasan lindung lainnya.	30. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan ekosistem mangrove; d. kawasan cagar budaya; e. kawasan rawan bencana alam; dan f. kawasan lindung lainnya.	Kementeria ATR/ BPN Masukan: Agar menyesuaikan Permen ATR/BPN 1/2018 lampiran II Tanggapan: Memasukan kawasan lindung geologi	31. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksu dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan ekosistem mangrove; d. kawasan cagar budaya; e. kawasan rawan bencana alam; f. kawasan lindung geologi; dan g. kawasan lindung lainnya.
Paragraf 1 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya			g. Kawasan indung lainnya.
Pasal 38 (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 622 Ha (enam ratus dua puluh dua hektar)	TETAP	Kementeria ATR/ BPN Masukan: Agar menyesuaikan luasan dalam file shp	 32. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 38 (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud
 (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kecamatan Karangawen; dan b. Kecamatan Mranggen. (3) Kawasan resapan air yang dimiliki masyarakat 		Tanggapan: Luasan telah disesuaikan dengan file shp	dalam Pasal 37 huruf a berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 322 (tiga ratus dua puluh dua hektar) (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang

	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	-SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	DRAFT REVISION
ditetapkan sebagai kawasan hutan rakyat.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dan
			b. Kecamatan Mranggen dengan luas kur lebih 140 (seratus empat puluh hektar).
Paragraf 2			(corates empat pular nextar).
Kawasan Perlindungan Setempat			
Pasal 39	31. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi		22 1/-1 2 1 2
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud	sebagai berikut:		33. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi
dalam Pasal 37huruf bterdiri atas:	Pasal 39		sebagai berikut:
a. sempadan pantai;	Kawasan perlindungan setempat sebagaimana		Pasal 39
o. sempadan sungai;	dimaksud dalam Pasal 37 huruf bterdiri atas:		Kawasan perlindungan setempat sebagaim
c. sempadan saluran irigasi; dan	a. sempadan pantai;		dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kur lebih 4 471 (empat ribu empat ratus kiril
d. sempadan embung.	b. sempadan sungai;	1	lebih 4.471 (empat ribu empat ratus tujuh puluh sa hektar terdiri atas:
	c. sempadan saluran irigasi;		a. sempadan pantai;
	d. sempadan embung; dan		b. sempadan sungai;
	e. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.		c. sempadan saluran irigasi;
			d. sempadan embung; dan
	·		e. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
Pasal 40	32. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi	Kementeria ATR/ BPN	34 Kotontuor Basel 40 III de Rotaan.
sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39	sebagai berikut:		 Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbui sebagai berikut:
uruf a meliputi:	Pasal 40	Masukan:	Pasal 40
. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 46	Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Sempadan pantai tidak perlu	
(empat puluh enam) hektar;	39 huruf a dengan luas kurang lebih474 (Empat ratus	dimunculkan luasan, cukup	Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pas 39 huruf a meliputi:
. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar;	tujuh puluh empat) hektar meliputi:	pengaturan teknis saja	a. Kecamatan Bonang;
Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 33 (tiga	a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 69 (Enam puluh sembilan) hektar;		b. Kecamatan Karangtengah;
puluh tiga) hektar; dan		Tanggapan:	c. Kecamatan Sayung; dan
. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 157	b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 50 (Lima puluh) hektar:	Telah disesuaikan dengan file	d. Kecamatan Wedung.
(seratus lima pulun tujuh) hektar	c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 102	shp	- Assamatan Wedning.
((Seratus dua) hektar; dan	ł	en en en en en en en en en en en en en e
	e. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 253		
	(Dua ratus lima puluh tiga) hektar.		·
Pasal 41	33. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi	Vernous is ATRICES	
I) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam	sebagai benkut:	Kementeria ATR/ BPN	35. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi
Pasal 39 huruf b terdiri atas :	Pasal 41		sebagai berikut:
a. sempadan sungai bertanggul di luar kawasan	(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam	Masukan:	Pasal 41
perkotaan;	Pasal 36 huruf b dengan luas kurang lebih 3,996	Sempadan sungai tidak perlu	(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam
b. sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan	(tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam)	dimunculkan luasan, cukup	rasai so nutur o meliputi:
			a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasar

PERDA 6/2011 RTRW:KABUPATEN DEMAK 2011-2031 perkotaan;	DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
c. sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; dan d. sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan. (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sungai Serang; b. Sungai Tuntang; c. Sungai Jragung; d. Sungai Wulan; e. Sungai Jajar; dan f. Sungai Dolog.	perkotaan; b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; dan e. sungai yang terpengaruh pasang air laut. (2) Sempadan sungai meliputi: a. Sungai Babon dan anak sungainya b. Sungai Bum dan anak sungainya; c. Sungai Dolog dan anak sungainya; d. Sungai Jajar dan anak sungainya; e. Sungai Jebor/ Gejoyo dan anak sungainya; f. Sungai Jragung dan anak sungainya; g. Sungai Kenceng dan anak sungainya; h. Sungai Lobener dan anak sungainya; i. Sungai Serang Lama dan anak sungainya; j. Sungai Serang-Lusi dan anak sungainya; k. Sungai Tuntang dan anak sungainya; l. Sungai Tuntang dan anak sungainya; Jkuran dan ketentuan pengaturan sempadan	pengaturan teknis saja Tanggapan: Telah disesuaikan dengan file shp	perkotaan; b. sungai tidak bertanggul di luar ka perkotaan; c. sungai bertanggul di dalam kar perkotaan; d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; e. sungai pertanggul di luar kawasan perkotaan e. sungai yang terpengaruh pasang air laut. (2) Sempadan sungai meliputi: a. Sungai Babon dan anak sungainya b. Sungai Bum dan anak sungainya; c. Sungai Dolog dan anak sungainya; d. Sungai Jajar dan anak sungainya; e. Sungai Jebor/ Gejoyo dan anak sungainya; f. Sungai Jragung dan anak sungainya; g. Sungai Kenceng dan anak sungainya; h. Sungai Lobener dan anak sungainya; i. Sungai Serang Lama dan anak sungainya; j. Sungai Serang-Lusi dan anak sungainya; k. Sungai Tulung/ Setu dan anak sungainya; l. Sungai Tuntang dan anak sungainya; dan m. Sungai Tuntang Lama dan anak sungainya; dan m. Sungai Tuntang Lama dan anak sungainya; dan m. Sungai Tuntang Lama dan anak sungainya; dan m. Sungai Tuntang Lama dan anak sungainya;
Pasal 42	Ukuran dan ketentuan pengaturan sempadan sungai sesuai peraturan perundangan-undangan.		sungai sesuai peraturan perundangan-undangar
Sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi : a. Daerah Irigasi Sedadi Dempet; b. Daerah Irigasi Klambu Kiri; c. Daerah Irigasi Sedadi Godong; d. Daerah Irigasi Guntur Kanan; e. Daerah Irigasi Guntur Kiri; f. Daerah Irigasi Polder Batu; g. Daerah Irigasi Gablok;	TETAP		

PERDA 6/2011 RTRW K A DITE	ATEN DEMAY 2014 202	ZANIUAS	SI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/		SESUDAH KORLINSEK
h. Daerah Irigasi Glapan Kan	JULIAN DE INTERNACIONALISMOS DE LA COMPANSION DE LA COMPA	7 <u>8</u> 53	DRAFT REVISI	PERTANYAAN		DRAFT REVISI
i. Daerah Irigasi Glapan Kiri;	411,	1		3.00		
j. Daerah Irigasi Jragung;			•	-		
k. Daerah Irigasi Pelayaran S	aviing Barii:					
I. Daerah Irigasi Pelayaran B						
m. Daerah Irigasi Dolok Kanai				1		
n. Daerah Irigasi Dolok Kiri; d		-				
o. Daerah Irigasi Pucanggadi						
Pasal 4		TE	TAP		\bot	
Sempadan embung sebagaima			IAF			
39 huruf d meiiputi	ia amakada dalam 1 asa	21				
a. Kecamatan Karangawen;].		ŀ		
b. Kecamatan Guntur;						
c. Kecamatan Dempet;						
d. Kecamatan Mijen;						
e. Kecamatan Karanganyar;		1				
f. Kecamatan Bonang; dan		}				
g. Kecamatan Wedung.					1	
·		34.	Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 serta disisipkan1	Kementerian ATR	+	20. 5:
1			(satu) pasal baru yaitu Pasal 43 A. sehingga	i	3	36. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 serta disisipka
			berbunyi sebagai berikut:	Masukan :	1	(satu) pasal baru yaitu Pasal 43 A, sehing berbunyi sebagai berikut:
		///	Pasal 43 A	Agar disesuaikan dengan		Pasal 43 A
,			Ruang terbuka hijau kawasan	rokomondos: I/I I I O	(1	1) Duong Andreit in
·		1	perkotaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berupa ruang terbuka hijau kawasan	r asai 43 ayat 2, Periu di		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf
			permukiman perkotaan	tambahkan poin e		berupa ruang terbuka hijau kawasan permukim
		(2)	Ruang terbuka hijau kawasan permukiman	"ruang terbuka hijau pada zona	10	perkulaan
	•	1	perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	buffer TPA"	1 (2	2) Ruang terbuka hijau kawasan permukima
			meliputi :	Tanaman		perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (meliputi:
		}	a. ruang terbuka hijau pekarangan;	Tanggapan:	1	a. ruang terbuka hijau pekarangan;
			b. ruang terbuka hijau taman dan hutan kota;	ruang terbuka hijau pada zona buffer TPA masuk dalam ruang		b. ruang terbuka hijau taman dan hutan kota;
		1	c. ruang terbuka hijau jalur hijau jalan;	terbuka hijau fungsi terientu		c. ruang terbuka hijau jalur hijau jalan;
İ	•	(3)	d. ruang terbuka hijau fungsi tertentu;	(ayat (2) huruf d)	ľ	d. ruang terbuka hijau fungsi tertentu:
		(3)	Pengembangan ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud		(3)) Pengembangan ruang terbuka bijau kawasa
		;	pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 1.776			Detilluklifiali Cerkoraan sehagaimana dimekan
		1 7	(seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar			pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 1.776

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	and the second s	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK DRAFT REVISI
	meliputi: a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 50 (Empat puluh sembilan) hektar; b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 309 (Tiga ratus sembilan) hektar; c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 51 (Lima puluh satu) hektar; d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 10 (Sembilan) hektar; e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 22 (Dua puluh dua) hektar; f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 43 (Empat puluh tiga) hektar; g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 59 (Lima puluh sembilan) hektar; h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 208 (Dua ratus delapan) hektar; i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 61 (Enam puluh) hektar; j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 431 (Empat ratus tiga puluh) hektar; k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 431 (Empat ratus tiga puluh) hektar; m. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 193 (Seratus sembilan puluh dua) hektar; m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 66 (Enam puluh enam) hektar; dan n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 259 (Dua ratus lima puluh delapan) hektar.		meliputi: a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lei 50 (lima puluh) hektar; b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lei 309 (Tiga ratus sembilan) hektar; c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lei 51 (Lima puluh satu) hektar; d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang leb 10 (Sepuluh) hektar; e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang leb 22 (Dua puluh dua) hektar; f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 43 (Empat puluh tiga) hektar; g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kuran lebih 59 (Lima puluh sembilan) hektar; h. Kecamatan Karangawen dengan luas kuran lebih 208 (Dua ratus delapan) hektar; i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 61 (Enam puluh satu) hektar; j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 431 (Empat ratus tiga puluh satu) hektar; k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 431 (Empat ratus tiga puluh satu) hektar; m. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 193 (Seratus sembilan puluh tiga) hektar; m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 66 (Enam puluh enam) hektar; dan n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 259 (Dua rätus lima puluh sembilan)
Paragraf 3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya	Paragraf 3 Kawasan Ekosistem Mangrove		hektar.
Pasal 44 awasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya ebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas	35. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 c. Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berupa kawasan	- Was to terripinal in	37. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK:2011-2031	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
a. pantai berhutan bakau; dan	pantai berhutan bakau.	TENTANTAAN	DRAFT REVISION OF THE PROPERTY
b. kawasan cagar budaya.	, sincian sanda.		berhutan bakau.
Pasal 45 Pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terletak di sepanjang pesisir pantai meliputi: a. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar; b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar; c. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar; dan d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar.	36. Ketentuan Pasal 45diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terletak di sepanjang pesisir pantai dengan luas kurang lebih 701 (tujuh ratus satu) hektar meliputi: a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 28 (Dua puluh delapan) hektar; b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 30 (Tiga puluh) hektar; c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 35 (Tiga puluh lima) hektar; dan d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 608 (Enam ratus delapan) hektar. (2) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan ekosistem mangrove yang selanjutnya disebut industri/ kawasan pantai berhutan bakau dengan iuas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektar meliputi: a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 101 (Seratus satu) hektar; b. Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang lebih 90 (Sembilan puluh) hektar; dan c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 255 (Dua ratus lima puluh lima) nektar. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan pengaturan menyesuaikan dengan Perpres 78/2017 tentang RTR Kedungsepur. RTRW Provinsi Jawa Tengah.	38. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbu sebagai berikut: Pasal 45 (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaima dimaksud dalam Pasal 44 terletak di sepanja pesisir pantai dengan luas kurang lebih 701 (tuj ratus satu) hektar meliputi: a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 28 (Dua puluh delapan) hektar; b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 30 (Tiga puluh) hektar; c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 35 (Tiga puluh lima) hektar; dan d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 608 (Enam ratus delapan) hektar. (2) Kawasan peruntukan industri yang berdasarka peraturan perundang-undangan masih ditetapka sebagai kawasan ekosistem mangrove yan selanjutnya disebut kawasan peruntukan industri kawasan pantai berhutan bakau dengan luas kurang lebih 448 (empat ratus empat puluh delapan) hektar meliputi: a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 101 (Seratus satu) hektar; b. Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang lebih 90 (Sembilan puluh) hektar; dan c. Kecamatan Sayung dengan iuas kurang lebih 257 (Dua ratus lima puluh tujuh) hektar. 3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan parandana sesuai dengan ketentuan
	Paragraf 4		peraturan perundang-undangan.
	Kawasan Cagar Budaya	·	
Pasa! 46 37 awasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam	7. Ketentuan Pasal 46 ditambahkan huruf c, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut :	39	Ketentuan Pasal 46 ditambahkan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031			SESUDAH KORLINSEK.
Pasal 37 huruf d meliputi : a. Masjid Agung Demak; dan b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu.	Pasal 46 Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi: a. Masjid Agung Demak; b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; dan c. cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati.		Pasal 46 Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi: a. Masjid Agung Demak; b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; dan c. cagar budaya lainnya yang ditetarkan Punati
Paragraf 4	Paragraf 5		c. cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati.
Kawasan Rawan Bencana	Kawasan Rawan Bencana		
Pasal 47	TETAP		
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimasud dalam Pasal 37 huruf d terdiri atas: a. kawasan rawan banjir;	•	·	
b. kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi;			·
c. kawasan rawan longsor;			
d. Kawasan rawan kekeringan; dan			
e. Kawasan rawan angin topan.			·
Pasal 48	TETAP		
Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:			
a. Kecamatan Mranggen;			
b. Kecamatan Guntur;			
c. Kecamatan Sayung;	,		
d. Kecamatan Karangtengah;			
e. Kecamatan Bonang;	1		
f. Kecamatan Mijen;			
g. Kecamatan Karanganyar;	** ··· ·		
h. Kecamatan Kebonagung;			
i. Kecamatan Dempet;			
j. Kecamatan Gajah;			
k. Kecamatan Wedung;	. **		
Kecamatan Demak; Kecamatan Wonosalam; dan	·		1
m. Kecamatan Wonosalam; dan n. Kecamatan Karangawen.			
	TETAD		
Pasal 49	TETAP		

DDAET DADEDOA CEDEUMIZOODI	WASHINTAS SELTOP WOOD INSPEC	The second of th	The entire of the transplace distributions are entire transplaced to the entire transplaced transplaced to the entire transplaced to the entire transplaced to the entire transplaced to the entire transplaced to the entire transplaced transplaced transplaced to the entire transplaced transp
DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI	Action of the second se	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	and the state of t	LICIANIAAN	л DRAFT REVISI
Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:		1	
a. Kecamatan Sayung; b. Kecamatan Karangtengah;			
c. Kecamatan Bonang; dan			
d. Kecamatan Wedung.	ł	·	
Pasal 50	TETAP		
Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud dalam	ILIA		
Pasal 47 huruf c meliputi:			
a. Kecamatan Mranggen; dan			
b. Kecamatan Kawangawen.			
Pasal 51	TETAP		
Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud			
dalam Pasal 47 huruf d meliputi:		İ	
a. Kecamatan Bonang;			
b. Kecamatan Demak ;			
c. Kecamatan Dempet;	, }		
d. Kecamatan Gajah;			
e. Kecamatan Guntur;			
f. Kecamatan Karanganyar;			
g. Kecamatan Karangawen;			
h. Kecamatan Karangtengah; i. Kecamatan Kebonagung;	·		
i. Kecamatan Kebonagung; j. Kecamatan Mijen;			
k. Kecamatan Mranggen;	·		
Kecamatan Natanggeri, Kecamatan Sayung;			
m. Kecamatan Wedung; dan		`. ' 	
n. Kecamatan Wonosalam.			·
Pasal 52	TETAP		
Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud			
dalam Pasal 47 huruf e meliputi:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	, man
a. Kecamatan Bonang;			
b. Kecamatan Demak;			
c. Kecamatan Dempet;			
d. Kecamatan Gajah;			

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOÖRI	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	Eli Single Congress of the State Congress of the Congress of t
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031		PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
e. Kecamatan Guntur;			DRAFT REVISI
f. Kecamatan Karanganyar;			
g. Kecamatan Karangawen;			
h. Kecamatan Karangtengah;			
i. Kecamatan Kebonagung;		1	
j. Kecamatan Mijen;			
k. Kecamatan Mranggen;			
I. Kecamatan Sayung;		1	
m. Kecamatan Wedung; dan			
n. Kecamatan Wonosalam.			
		Kementeria ATR/ BPN	40. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 52A, sehingga berbunyi
		Masukan:	sebagai berikut:
		Agar menyesuaikan Permen	Pasal 52A
		ATR/BPN 1/2018 lampiran II	(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupa kawasan yang
		Tanggapan: Memasukan kawasan iindung	memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah; dan (2) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana
	·	geologi berupa kawasan imbuhan air tanah.	dimaksud pada ayat (1) meliputi:
		·	a. Cekungan Air Tanah Kudus; dan
Paragraf 5	Paragraf 6		b. Cekungan Air Tanah Semarang-Demak.
Kawasan Lindung Lainnya	Kawasan Lindung Lainnya		}
Pasal 53	38. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga secara		
(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud	keseluruhan berbunyi sebagai berikut:		41. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi
dalam Pasal 37 huruf e meliputi :	Pasal 53		sebagai berikut:
a. ruang terbuka hijau perkotaan; dan	(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud		Pasal 53
b. kawasan plasma nutfah.	dalam Pasal 37 huruf e berupakawasan plasma	· .	(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupa kawasan plasma
(2) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	nutfah.	·	nutrah.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 5.385 Ha (lima ribu tiga ratus	(2) Kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan pesisir meliputi:		(2) Kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud
delapan puluh lima) hektar meliputi :	a. Kecamatan Sayung;		pada ayat (1) berada di kawasan pesisir meliputi :
a. Kawasan Perkotaan Demak;	b. Kecamatan Karangtengah;		a. Kecamatan Sayung;
b. Kawasan Perkotaan Mranggen;	c. Kecamatan Bonang; dan		b. Kecamatan Karangtengah;
c. Kawasan Perkotaan Wedung;	e. Kecamatan Wedung.		c. Kecamatan Bonang; dan
		<u>·</u>	d. Kecamatan Wedung.

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-203	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
d. Ibukota Kecamatan Gajah;	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	The state of the s
e. Ibukota Kecamatan Dempet;		The second secon	DRAFT REVISION OF THE PROPERTY
f. Ibukota Kecamatan Guntur;			
g. Ibukota Kecamatan Sayung;			
h. Ibukota Kecamatan Karangtengah;			
i. Ibukota Kecamatan Bonang;			
j. Ibukota Kecamatan Bonang,			1
k. Ibukota Kecamatan Wonosalam;			
		}	
I. Ibukota Kecamatan Karanganyar;			
m. Ibukota Kecamatan Mijen; dan			
n. Ibukota Kecamatan Kebonagung.			
 Kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di kawasan pesisir 		·	
meliputi :			
a. Kecamatan Sayung;			
b. Kecamatan Karangtengah;			
c. Kecamatan Bonang; dan			
d. Kecamatan Wedung.			
Bagian Ketiga			
Kawasan Budidaya	Bagian Ketiga		
asal 54	Kawasan Peruntukan Budidaya		
awasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal	39. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga secara		42 Ketentuan French Ed. II. I.
6 ayat (1) huruf b terdiri atas :	keseluruhan berbunyi sebagai berikut:		42. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
kawasan peruntukan hutan produksi;	Pasal 54		Pasal 54
kawasan peruntukan pertanian;	Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas:		Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud
kawasan peruntukan perikanan;	a. kawasan hutan produksi;		dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas :
kawasar peruntukan pertambangan;	b. kawasan pertanian;		a. kawasan hutan produksi;
kawasan peruntukan industri;	c. kawasan perkanan;		b. kawasan pertanian;
kawasan peruntukan pariwisata;	d. kawasan perlambangan dan energi;	•	c. kawasan perikanan;
kawasan peruntukan permukiman; dan	e. kawasan peruntukan industri;		d. kawasan pertambangan dan energi;
kawasan pertahanan dan keamanan.	f. kawasan pariwisata;	•	e. kawasan peruntukan industri;
kawasan pertahanan dan keamanan.	g. kawasan permukiman; dan		f. kawasan pariwisata;
	h. kawasan pertahanan dan keamanan.		g. kawasan permukiman, dan
Paragraf 2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	h. kawasan pertahanan dan keamanan.
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Paragraf 1		, san Acamanan,
- Tarreson Forantakan Flutcii i Toduksi	Kawasan Hutan Produksi		

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORE PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK:2011-2031	DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
Pasal 55 (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan luas kurang lebih 3.422 Ha (tiga ribu empat ratus dua puluh dua) hektar terdiri atas: a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan b. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 982 Ha (sembilan ratus delapan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Karangawen. (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.440 Ha (dua ribu empat ratus empat puluh) hektar meliputi: a. Kecamatan Karangawen; dan b. Kecamatan Mranggen.	 40. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:	ng as s))	43. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 55 (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana ya dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan lukurang lebih 3.278 (Tiga ribu dua ratus tujuh pul delapan) hektar terdiri atas: a. kawasan hutan produksi terbatas; dan b. kawasan hutan produksi terbatas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan lukurang lebih 568 (Lima ratus enam puluh delapa hektar berada di Kecamatan Karangawen. (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan lua kurang lebih 2.710 (dua ribu tujuh ratus sepuluh hektar meliputi: a. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.961 (Seribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar; dan b. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih satu) hektar; dan
Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Pertanian	hektar; Paragraf 2 Kawasan Pertanian		lebih 749 (Tujuh ratus empat puluh sembilan hektar;
Pasal 56 awasan peruntukan pertanian sebagimana yang imaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas : kawasan tanaman pangan; kawasan hortikultura; dan kawasan peternakan.	41. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut: Pasal 56 Kawasan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas: a. kawasan tanaman pangan; dan		44. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 Kawasan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas: a. kawasan tanaman pangan; dan
dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas : a. lahan sawah irigasi; dan	 b. kawasan hortikultura. 42. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut: Pasal 57 Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dengan luas kurang lebih 	(akibat penyesuaian dengan kawasan peruntukan industri	b. kawasan hortikultura. 45. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dengan luas kurang lebih

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2	OORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORI INSEK
(2) Lahan sawah irigasi sebagaimana dimakayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4 (empat puluh sembilan ribu delapan ratupuluh satu) hektar meliputi: a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sehektar; b. Kecamatan Demak dengan luas kurang 4.157 (empat ribu seratus lima puluh hektar; c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puhektar; d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang 3.539 (tiga ribu lima ratus tiga puluh sehektar; e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang 2.218 (dua ribu dua ratus delapan belas) f. Kecamatan Karanganyar dengan luas lebih 4.945 (empat ribu sembilan ratus puluh lima) hektar; g. Kecamatan Karangawen dengan luas lebih 2.786 (dua ribu tujuh ratus delapan enam) hektar; h. Kecamatan Karangtengah dengan luas lebih 3.672 (tiga ribu enam ratus tujuh dua) hektar; i. Kecamatan Kebonagung dengan luas lebih_3.315 (tiga_ribu_tiga_ratus_lima_hektar; j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang 3.834 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh ehektar; k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang 2.954 (dua ribu sembilan ratus lima empat) hektar; l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hekman Kecamatan Wedung dengan luas kurang 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hekman Kecamatan Wedung dengan luas kurang 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hekman Kecamatan Wedung dengan luas kurang 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hekman Kecamatan Wedung dengan luas kurang 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hekman Kecamatan Wedung dengan luas kurang 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hekman Kecamatan Wedung dengan luas kurang 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hekman Kecamatan Wedung dengan luas kurang 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hekman Kecamatan Wedung dengan luas kurang 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hekman Kecamatan Wedung dengan luas kurang 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hekman kecamatan Wedung dengan luas kurang 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hek	pada 41 Ha empat 56.813 (Lima puluh enam ribu delapan ratus tiga belas) hektar meliputi : a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 5.085 (Lima ribu delapanpuluh lima) hektar; b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 4.145 (Empat ribu seratus empat puluh lima) hektar; c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 4.914 (Empat ribu sembilan ratus empat belas) hektar; d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 4.392 (Empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar; e. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 4.714 (Empat ribu tujuh ratus empat puluh satu) hektar; f Kecamatan Karangengah dengan luas kurang lebih 2.942 (Dua ribu Sembilan ratus empat uluh dua) hektar; g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 5.786 (Lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektar; i. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 3.282 (Tiga ribu dua ratus delapan puluh empat) hektar; ii. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 3.354 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar; j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 3.081 (Tiga ribu delapan puluh satu) hektar; k. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) hektar; Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) hektar; Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 5.526 (Lima ribu lima ratus enam puluh dua) hektar; Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 5.526 (Lima ribu lima ratus enam puluh dua) hektar; Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 5.526 (Lima ribu lima ratus enam puluh satu)	PERTANYAAN PERTANYAAN A A B B B B B B B B B B B	SESUDAH KORLINSEK DRAFT REVISI 56.763 (Lima puluh enam ribu tujuh ratus enam pul tiga) hektar meliputi: a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang leti 5.085 (Lima ribu delapan puluh lima) hektar; b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 4.1 (Empat ribu seratus empat puluh lima) hektar; c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 4.914 (Empat ribu sembilan ratus empat belah hektar; d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 4.39 (Empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar; e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 4.71 (Empat ribu tujuh ratus empat belas) hektar; Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang lebih 2.894 (Dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) hektar; Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 5.786 (Lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektar; Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 3.282 (Tiga ribu dua ratus delapan puluh empat) hektar; Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 3.354 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar; Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 3.354 (Tiga ribu delapan puluh satu) hektar; Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 3.081 (Tiga ribu delapan puluh satu) hektar; Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 3.081 (Tiga ribu delapan puluh satu) hektar; Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) hektar; Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) hektar; Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 1.562 (Lima ribu lima ratus dua puluh enam) hektar;

	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORI	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	LIST CHREST TO ASSESSMENT CONTROL
() ()	PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFT REVIS	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
	 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) hektar; dan 	The second secon		DRAFT/REVISION OF THE PROPERTY
	 n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 3.773 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar. 			
	(3) Lahan sawah bukan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.195 Ha (seribu seratus embilan puluh lima) hektar meliputi:			
İ	 Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar; 			
	 Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar; 	•		
[Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan) hektar; 			
	 Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) hektar; dan 			
ļ	e. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar.			
	(4) Kawasan tanaman pangan diarahkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.			
	(5) Kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lokasinya diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata			
-	ruang kabupaten.			
	Pasal 58 (1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dengan luas kurang lebih 5.574 Ha	43. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: Pasal 58		46. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	(lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) hektar meliputi: a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih	Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dengan luas kurang lebih 1 558 (seribu	· •	Pasal 58 Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam
	547 (lima ratus empat puluh tujuh) hektar; b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih	lima ratus lima puluh delapan) hektar meliputi : a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;	· 25	Pasal 55 huruf b dengan luas kurang lebih 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) hektar meliputi : a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 4
	 105 (seratus lima) hektar; c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 423 (empat ratus dua puluh tiga) hektar; 	 Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan) hektar; 		b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 47 (empat puluh Tujuh) hektar;
	720 (ompartatus dua putur tiga) nektar,	c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 39		c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 39
	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

LICINDA 0/2011 RIKW KABUPATEN DEMAK 2011:203	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN	SESUDAH KODUNGEKANA
d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 19 (seratus sembilan puluh enam) hektar; e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 5 (lima puluh) hektar; f. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hektar; g. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar; h. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar; i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 675 (enam ratus tujuh puluh lima) hektar; j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 823 (delapan ratus dua puluh tiga) hektar; k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 945 (sembilan ratus empat puluh lima) hektar; i. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) hektar; m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hektar; dan n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar. (2) Kawasan yang ditetapkan dengan peruntukan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan kegiatan peternakan, pengembangan kegiatan pertanian pangan pengembangan kegiatan pertanian pangan pengembangan kegiatan pertanian pangan pengembangan kegiatan peternakan, pengembangan kegiatan peternakan, pengembangan kegiatan pertanian pangan pengembangan kegiatan pertanian pangan pengembangan kegiatan pertanian pangan pengembangan kegiatan pertanian pangan pengembangan kegiatan pertanian pangan pengembangan kegiatan pertanian pangan pengembangan kegiatan pertanian pangan pengembangan kegiatan pertanian pangan pengembangan kegiatan pertanian pangan pengembangan kegiatan pengembangan pangan berkelanjutan,	(tiga puluh Sembilan) hektar; d. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar; e. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar; f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) hektar; g. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar; h. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 59 (lima puluh Sembilan) hektar; i. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektar;	PERTANYAAN	(tiga puluh Sembilan) hektar; d. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih (dua puluh enam) hektar; e. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar; f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) hektar; g. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar; h. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 5 (lima puluh Sembilan) hektar; i. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektar; j. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar; k. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar; dan l. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar.
yang diatur dalam rencana rinci tata ruang.			
(1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri atas: a. ternak besar; b. ternak kecil; dan c. ternak unggas.	 44. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut: Pasal 59 (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan 56.530 (Lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh) hektar; 		47. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 59 (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan 56.530 (Lima puluh enam ribu
(2) Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :	Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:		lima ratus tiga puluh) hektar; (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimeksud sad

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DINASI LINTAS SEKTOR (KCRLINSEK) DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
a. Kecamatan Mranggen; b. Kecamatan Karangawen; c. Kecamatan Guntur; d. Kecamatan Dempet; f. Kecamatan Dempet; f. Kecamatan Karanganyar. (3) Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan di seluruh wilayah kecamatan. Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Kecamatan Karangtengah; b. Kecamatan Bonang; c. Kecamatan Wedung; d. Kecamatan Wedung; d. Kecamatan Karanganyar; g. Kecamatan Karanganyar; g. Kecamatan Demak; dan h. Kecamatan Wonosalam.	a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 55.520 Ha (lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh) hektar; dan b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.009 Ha (seribu sembilan) hektar. c. Penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan lahan pertanianpangan berkelanjutan diatur lebih lanjut oleh Bupati.	PERTANYAAN	a. lahan pertanian pangan berkelanjutan deng luas kurang lebih 55.520 (lima puluh lima ri lima ratus dua puluh) hektar; dan b. lahan cadangan pertanian panga berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.0 (seribu sepuluh) hektar. (3) Penetapan lokasi lahan pertanian panga berkelanjutan dan cadangan lahan pertania pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut ole Bupati.
Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 60 Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas :	45. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:		8. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
a. perikanan tangkap; b. perikanan budidaya tambak; c. perikanan budidaya air tawar; dan d. pengelahan perikanan.) Rencana pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan penangkapan ikan skala keci! dengan area tangkapan antara 0-3 mil dari pantai;	Pasal 60 (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas: a. budidaya tambak; b. budidaya air tawar; c. fasilitas perikanan tangkap; dan d. pengolahan perikanan. (2) Budidaya tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.062 (Enam ribu enam puluh sembilandua) hektar		Pasal 60

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARANIMASUKANI	SESUDAH KORLINSEK
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031		PERTANYAAN	DRAFT REVISI
pantai; dan c. kawasan penangkapan ikan skala besar dengan area tangkapan diatas 6 mil dari garis pantai. (3) Rencana untuk mendukung peningkatan hasil perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:	1.200 (Seribu dua ratus) hektar; b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hektar; c. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 26 (Dua puluh enam) hektar;		 b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hektar; c. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;
 a. pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Morodemak berada di Kecamatan Wedung; b. peningkatan sarana dan prasarana pendaratan kapal dan/atau perahu serta sarana dan prasarana TPI meliputi : Kecamatan Sayung; Kecamatan Karangtengah; Kecamatan Wedung. (4) Rencana pengembangan budidaya perikanan tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.219 Ha (seribu dua ratus sembilan belas) hektar; Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 548 Ha (lima ratus empat puluhh delapan) hektar; Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 	d. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) hektar; dan e. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 4.130 (Empat ribu seratus tiga puluh) hektar. (3) Budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kecamatan Mijen; b. Kecamatan Gajah c. Kecamatan Karanganyar; d. Kecamatan Wonosalam; e. Kecamatan Dempet; f. Kecamatan Kebonangung; g. Kecamatan Karangawen; dan h. Kecamatan Mranggen. (4) Fasilitas perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang; b. Pangkapan pendaratan ikan meliputi:		249 (dua ratus empat puluh Sembilan) hektar; dan e. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 4.130 (empat ribu seratus tiga puluh) hektar. (3) Budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kecamatan Mijen; b. Kecamatan Gajah c. Kecamatan Karanganyar; d. Kecamatan Wonosalam; e. Kecamatan Dempet; f. Kecamatan Kebonangung; g. Kecamatan Karangawen; dan h. Kecamatan Mranggen. (4) Fasilitas perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang; b. Pangkapan pendaratan ikan meliputi:
761 Ha (tujuh ratus enam puluh satu) hektar; dan ————————————————————————————————————	Kecamatan Bonang; dan Kecamatan Wedung. Pengembangan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:		Kecamatan Bonang; dan Kecamatan Wedung. Pengembangan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 (5) Rencana pengembangan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. Kecamatan Mijen; b. Kecamatan Gajah 	a. Kecamatan Bonang; dan b. Kecamatan Wedung.	vi.	a. Kecamatan Bonang; dan b. Kecamatan Wedung.
c. Kecamatan Karanganyar;			

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
d. Kecamatan Wonosalam;	DIVALLICATION	LITANTAAN	DRAFT REVISI-
e. Kecamatan Dempet;			,
f. Kecamatan Kebonangung;			
g. Kecamatan Karangawen; dan			
h. Kecamatan Mranggen.			
 Rencana pengembangan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 			
a. Kecamatan Bonang; dan			·
b. Kecamatan Wedung.		1	
Pengembangan kegiatan perikanan Pemerintah Daerah akan mendorong dan atau memfasilitasi pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewilayahan dengan pendekatan pembangunan minapolitan.			
Paragraf 4			
Kawasan Peruntukan Petambangan			
Pasal 61 awasan peruntukan pertambangan sebagaimana	Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:	TKPRD Kabupaten Demak.	49. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbun
maksud dalam Pasal 54 huruf d terdiri atas :	Pasal 61		sebagai berikut:
minyak dan gas bumi; dan	Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana	Masukan:	Pasal 61
mineral dan batubara.	dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:	Kabupaten Demak tidak perlu	Kawasan pertambangan dan energi sebagaiman
	a. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan	menetapkan pertambangan mineral non logam dan/atau	Juliansuu udidiii Pasal 54 hiiriit d henina kawasa
	b. kawasan pertambangan mineral.	batuan	pertambangan minyak dan gas bumi.
		Tanggapan:	
		Diakomodir	·
Pasal 62	TETAP		
Minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas :		•	
a. daerah terbuka; dan	·		
b. wilayah Kerja Blok Blora.			
Daerah terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :		·	
a. Kecamatan Gajah; dan	•		
b. Kecamatan Karangayar.		·	

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISION	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSE DRAFT REVISI	
(3) Wilayah Kerja Blok Blora sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. Kecamatan Sayung; b. Kecamatan Karangtengah;			Pro- Pro- Pro- Pro- Pro- Pro- Pro- Pro-	
c. Kecamatan Demak; d. Kecamatan Wonosalam; e. Kecamatan Mranggen; f. Kecamatan Karangawen;			·	
h. Kecamatan Dempet; dan i. Kecamatan Kebonagung.				
(1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61	 47. KetentuanPasal 63 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut: Pasal 63 (1) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimeksud dalam Pasal 61 husuf berbangai kawasan pertambangan mineral sebagaimana 	TKPRD Kabupaten Demak. Masukan: Kabupaten Demak tidak perlu	50. Pasal 63 Dihapus	
(2) Kawasan mineral bukan logam sebagaimana	dimaksud dalam Pasal 61 huruf b berupa kawasan pertambangan mineral bukan logam. (2) Kawasan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pasir sungai;	menetapkan pertambangan mineral non logam dan/atau batuan Tanggapan: Diakomodir (Pasal 63 Dihapus)		
c. batu gamping; dan d. tanah liat.	b. batu gamping; danc. tanah liat.3) Pasir sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	Diakomodii (Fasai os Dinapus)		
huruf a dengan luas kurang lebih 28 Ha (dua puluh delapan) hektar meliputi : a. Kecamatan Karangtengah;	huruf a meliputi : a. Kecamatan Karangtengah; b. Kecamatan Mranggen; dan			
b. Kecamatan Mranggen; dan	c. Kecamatan Karangawen.	y a manana manganan arawa sa		
(4) Tanah urug sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 2.290 Ha (dua ribu dua ratus sembilan puluh) hektar meliputi :	4) Batu gamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. Kecamatan Mranggen; dan b. Kecamatan Karangawen.			
a. Kecamatan Mranggen; dan b. Kecamatan Karangawen. (5) Batu gamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	 Tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. Kecamatan Wedung, 		en en en en en en en en en en en en en e	
huruf c dengan luas kurang lebih 48 Ha (empat puluh delapan) hektar meliputi : a. Kecamatan Mranggen; dan	b. Kecamatan Mijen; c. Kecamatan Karanganyar;			

DRAFT, RAPERDA SEBELUM KOORD	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
b. Kecamatan Karangawen. (6) Tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 21.430 Ha (dua puluh satu ribu sempat ratus tiga puluh) hektarmeliputi: a. Kecamatan Wedung; b. Kecamatan Mijen; c. Kecamatan Karanganyar; d. Kecamatan Gajah; e. Kecamatan Dempet; f. Kecamatan Demak; g. Kecamatan Wonosalam; h. Kecamatan Bonang; i. Kecamatan Sayung; j. Kecamatan Guntur; l. Kecamatan Guntur; l. Kecamatan Karangawen. (7) Pengaturan lokasi wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan (WPR) akan diatur dalam Peraturan Bupati	d. Kecamatan Gajah; e. Kecamatan Dempet	PERTANYAAN	DRAFT REVISI
-Paragraf 5- Kawasan Peruntukan Industri	 ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Industri 		
Pasal 64 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e terdiri atas: a. industri besar; b. industri menengah; dan c. industri kecil dan/atau mikro. (2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk kegiatan pengolahan dan	48. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut: Pasal 64 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dengan luas lebih 5.191 (Lima ribu seratus Sembilan puluh satu) hektar meliputi: a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih	Kementerian ATR/ BPN Masukan: 1. Rencana kawasan peruntukan industri yang luasannya diatas 300 Ha agar menyesuaikan dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah. 2. Rekomendasi KLHS;	 51. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dengan luas lebih 7.646 (tujuh ribu enam ratus empat puluh enam) hektar meliputi: a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	CECLINALLIZORE NOTE
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
pergudangan. (3) Industri menengah dan industri kecil dan/atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diarahkan untuk mendukung potensi ekonomi lokal meliputi: a. hasil pertanian; b. makanan; c. kerajinan; dan d. komoditas lainnya. (4) Industri menegah dan industri kecil dan/atau mikro yang memiliki keterkaitan produksi dengan potensi ekonomi lokal dapat bercampur dengan kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian dan daya dukung prasarana kawasan. (5) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 1800 Ha (seribu delapan ratus) hektar meliputi: a. Kecamatan Sayung; b. Kecamatan Karangtengah; c. Kecamatan Demak; d. Kecamatan Mijen; e. Kecamatan Mranggen; dan	258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar; b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 92 (Sembilan puluh dua) hektar; c. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 6 (Enam) hektar; d. Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang lebih 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hektar; e. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 92 (Sembilan puluh dua) hektar; f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 203 (Dua ratus tiga) hektar; g. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 251 (Dua ratus lima puluh satu) hektar; h. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 163 (Seratus enam puluh tiga) hektar; i. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 3.279 (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar; dan j. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 116 (Seratus enam belas) hektar. (2) Pengembangan kawasan industri terpadu berada di Kecamatan Sayung	Pasal 64, Perlu	359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hektar; b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar; c. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar; d. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 1050 (seribu lima puluh) hektar; e. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar; f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar; g. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 251 (dua ratus lima puluh satu) hektar; h. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektar; i. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 5.313 (lima ribu tiga ratus tiga belas) hektar; dan j. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektar. (3) Pengembangan kawasan industri terpadu berada di Kecamatan Sayung dan Karangtengah.
g. Kecamatan Karangawen.	(3) Pengembangan kegiatan usaha industri di Daerah meliputi: a. industri besar; b. industri menengah; dan c. industri kecil dan/atau mikro. (4) Jenis kegiatan industri yang dikembangkan di Daerah meliputi: a. industri pangan; b. industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan; c. industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka; d. industri alat transportasi; e. industri elektronika dan telematika; f. industri pembangkit energi; g. industri barang modal, komponen, bahan		 (4) Pembangunan perusahaan industri di kawasan peruntukan industri yang berbatasan langsung dengan kawasan peruntukan permukiman wajib menyediakan kawasan penyangga dalam bentuk sabuk hijau. (5) Pembukaan akses perusahaan industri menuju jalan arteri primer mempertimbangkan ketentuan pengaturan akses masuk ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundang-undangan.

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
্ৰাৰ কৰিব কৰা কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব	penolong dan jasa industri;		DRAFT REVISI
	h. industri agro;		
	i. industri logam dasar dan bahan galian bukan		
	logam;		
•	j. industri kimia dasar, dan		
	k. jenis industri lainnya.		
	Pembukaan akses perusahaan industri menuju		
	jalan arteri primer mempertimbangkan ketentuan		
	pengaturan akses masuk ke jalan arteri primer		
Paragraf 6	sesuai peraturan perundang-undangan.		
Kawasan Peruntukan Pariwisata	Paragraf 6		
	Kawasan Pariwisata		
Pasal 65	49. Ketentuan Pasal 65 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)		52 Ketentuan Pagal 65 cm (a)
Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54	oluban seningga keseluruhan berbunyi	!	 Ketentuan Pasal 65 ayat (2), ayat (3), dan ayat (diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
huruf f terdiri atas :	sebagaiberikut :		Pasal 65
a. pariwisata alam;	Pasal 65		(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimakan ka
b. pariwisata budaya; dan	(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f ierdiri atas :	İ	(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dala Pasal 54 huruf f terdiri atas :
c. pariwisata buatan.	a. pariwisata alam;		a. pariwisata alam;
Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat	b. pariwisata budaya; dan		b. pariwisata budaya; dan
(1) huruf a meliputi :	c. pariwisata budaya, dan	ĺ	c. pariwisata buatan.
a. Pantai Morosari;	(2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat		(2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada aya
b. Pantai Morodemak;	(1) huruf a meliputi:		(1) huruf a meliputi:
c. Pantai Surodadi;	a. Pantai Morosari dan Mangrove di Kecamatan		a. Pantai Morosari dan Mangroye di Kecamatar
d. Hutan Wisata Wonosekar; dan	Sayung;		Sayung;
e. Waduk Bengkah.	b. Pantai Morodemak dan Mangrove Kecamatan		b. Pantai Morodemak dan Mangrove Kecamatai
Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat	Bonang;	*****	bollarig,
(1) huruf b meliputi :	c. Pantai Surodadi di Kecamatan Sayung;	-	c. Pantai Surodadi di Kecamatan Sayung;
a. Masjid Agung Demak;	d. Hutan Wisata Wonosekar;		u. Hutan yvisata Wonosekar;
b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu;	e. Waduk Bengkah;		e. Waduk Bengkah;
c. Museum Masjid Agung;	f. Pantai Tambakbulusan dan Mangrove di		f. Pantai Tambakbulusan dan Mangrove di
d. Tradisi Grebeg Demak; dan	Kecamatan Karangtengah; dan		Kecamatan Karangtengah; dan
e. Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.	g. Pantai Ngojoyo dan Mangrove di Kecamatan		 g Pantai Nggojoyo dan Mangrove di Kecamatan Wedung.
Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat	Wedung.		
(1) huruf c meliputi :	(3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :		Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Bendung Gerak Kali Jajar;	a. Masjid Agung Demak,		a. Masjid Agung Demak;
	a. Masjid Agding Demak;		b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu;
•	•		Canan Kanjaya Kadilangu;
		•	81

ERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 203	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
b. Bendung Karet Kalijajar;	b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu;	PERTANYAAN	
c. Bendung Karet Kali Kumpulan;	c. Museum Masjid Agung;		c. Museum Masjid Agung;
d. Taman Ria Kota Demak, dan	d. Tradisi Grebeg Demak; dan		d. Tradisi Grebeg Demak; dan
e. Agrowisata.	e. Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.		e. Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.
	(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada		(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1) huruf c meliputi :	•	ayat (1) huruf c meliputi :
	a. Bendung Gerak Kali Jajar;		a. Bendung Gerak Kali Jajar;
	b. Bendung Karet Kalijajar,		b. Bendung Karet Kalijajar;
	c. Bendung Karet Kali Kumpulan;		c. Bendung Karet Kali Kumpulan;
	d. Taman Ria Kota Demak		d. Taman Ria Kota Demak
	e. Agrowisata Kebonbatur; dan		e. Agrowisata Kebonbatur; dan
	Agrowisata Jambu Leie.		f. Agrowisata Jambu Lele.
Paragraf 7			
Kawasan Peruntukan Permukiman			
Pasal 66	50. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga keseluruhan		·
Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana	berbunyi sebagaiberikut	ı	53. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi
dimaksud dalam Pasal 54 huruf g terdiri atas : a. kawasan permukiman perkotaan; dan	Pasal 66		sebagai perikut
b. kawasan permukiman perkotaan; dan	(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud		Pasal 66
Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana	ualam Pasal 54 huruf d dendan luas kurang lobib.		(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :	satu) hektar terdiri atas :		dalam Pasal 54 huruf g dengan luas kurang lebih 19.055 (sembilan belas ribu dua lima puluh tima)
a. Kawasan Perkotaan Demak,	a. kawasan permukiman perkotaan; dan		Homai terum atas .
b. Kawasan Perkotaan Mranggen;	b. kawasan permukiman perdesaan.		a. kawasan permukiman perkotaan; dan
c. Kawasan Perketaan Wedung;	(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana		b. kawasan permukiman perdesaan
d. Ibukota Kecamatan Gajah;	dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas l	·	(2) Kawasan permukiman perkotaan sahagaiman
e. Ibukota Kecamatan Dempet;	kurang lebih 10.485 (sepuluh ribu empat ratus l	.	diffacture page avait (1) huruif a dengen less l
f. Ibukota Kecamatan Guntur;	delapan puluh lima) hektar meliputi		kurang lebih 8.527 (Delapan ribu lima ratus duapuluh tujuh) hektar meliputi :
g. Ibukota Kecamatan Sayung;	Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 248 (Dua ratus empat puluh delapan) hektar;		a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih
h. Ibukota Kecamatan Karangtengah;	b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih		240 (Dua faius empat puluh delapan) hektar:
i. Ibukota Kecamatan Bonang;	1.486 (Seribu empat ratus delapan puluh l		D. Necamatan Demak dengan luas kurang labih
j. Ibukota Kecamatan Karangawen;	enam) nektar;	777	dulug delanan duluk l
k. Ibukota Kecamatan Wonosalam;	c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih		chan) neklar,
I. Ibukota Kecamatan Karanganyar; m. Ibukota Kecamatan Mijen; dan	255 (Dua ratus lima puluh lima) hektar;		c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 255 (Dua ratus lima puluh lima) hektar;
m. Ibukota Kecamatan Mijen; dan n. Ibukota Kecamatan Kebonagung.	d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 48 (Empat puluh delapan) hektar;		d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih
nonota neceniatan nenonagung.	e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih		40 (Ciripat pulun delapan) hektar.
	- songan idas kurang jedih		e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih
·			g and raing lebili

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	N/MASUKAN/
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011:2031	The state of the s	RTANYAAN
(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh wilayah Daerah	110 (Seratus sepuluh) hektar; f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 397 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh) hektar;	110 (Seratus sepuluh) hektar; f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 217 (Dua ratus tujuh belas)
	 g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 301 (tiga ratus satu) hektar; h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.045 (Seribu empat puluh lima) hektar; i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 303 (Tiga ratus tiga) hektar; j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) hektar; k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 2.159 (Dua ribu seratus lima puluh Sembilan) hektar; l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 2.512 (dua ribu lima ratus dua belas) hektar; m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 	hektar; g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 301 (Tiga ratus satu) hektar; h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.045 (Seribu empat puluh lima) hektar; i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 303 (Tiga ratus tiga) hektar; j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) hektar; k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 2.159 (Dua ribu seratus lima puluh sembilan) hektar; l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 736 (Tujuh ratus tiga puluh enam) hektar; m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih
······	 329 (Tiga ratus dua puluh sembilan) hektar; dan n. Kecamatan Wonesalam dengan luas kurang lebih 1.214 (Seribu dua ratus empat belas) hektar. 	329 (Tiga ratus dua puluh sembilan) hektar; dan n. Kecamatan Woncsalam dengan luas kurang lebih 1.214 (Seribu dua ratus empat belas) hektar.
	(4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.528 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar meliputi: a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 1.338 (Seribu tiga ratus tiga puluh delapan)	(6) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oengan luas kurang lebih 10.528 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar meliputi: a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih
	hektar; b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 311 (Tiga ratus sebelas) hektar; c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 955 (Sembilan ratus lima puluh lima) hektar; d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 778 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar; e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih	1.336 (Seribu tiga ratus tiga puluh delapan) hektar; b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 311 (Tiga ratus sebelas) hektar; c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 955 (Sembilan ratus lima puluh lima) hektar; d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 778 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar;
	1.365 (Seribu tiga ratus enam puluh iima) hektar;	e. Kecamatan Guntur dengan iuas kurang lebih 1.365 (Seribu tiga ratus enam puluh lima) hektar;

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK:
Paragraf 8	f. Kecamatan Karangtengah dengan luakurang lebih 468 (empat ratus enam puluh delapan) hektar; g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 571 (Lima ratus tujuh puluh satu) hektar; h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 837 (Delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar; i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 547 (Lima ratus empat puluh tujuh) hektar; j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 647 (Enam ratus empat puluh tujuh) hektar; k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 1.099 (Seribu sembilan puluh sembilan) hektar; l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) hektar; m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 755 (Tujuh ratus lima puluh lima) hektar; dan (5) Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 635 (Enam ratus tiga puluh lima) hektar.		f. Kecamatan Karangtengah dengan lakurang lebih 468 (empat ratus enam pudelapan) hektar; g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kuralebih 571 (Lima ratus tujuh puluh satu) hekt. h. Kecamatan Karangawen dengan luas kuralebih 837 (Delapan ratus tiga puluh tujuh hektar; i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kuralebih 547 (Lima ratus empat puluh tujuh hektar; j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang let 647 (Enam ratus empat puluh tujuh) hektar; k. Kecamatan Mranggen dengan luas kuralebih 1.099 (Seribu sembilan puluh sembilah hektar; l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang leb 222 (dua ratus dua puluh dua) hektar; m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang leb 755 (Tujuh ratus lima puluh lima) hektar; dan n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 635 (Enam ratus tiga puluh lima) hektar
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	·	
Pasal 67	TETAP		·
 Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h terdiri atas : 	ILIAF	Kemenkemhan	54. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 67diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:
 a. Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi: 1. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh Kecamatan; dan 		Masukan: Di Pelabuhan:Morodemak	Pasal 67 (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 54 huruf h terdiri atas :
kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Demak. Kantor Konolician Republik Indonesia melinuti.	*	Tanggapan: Sudah diakomodir	 a. Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi : 1. kantor Komando Rayon Militer (Korami berada di seluruh Kecamatan; dan
b. Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi : 1. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh Kecamatan; dan	.is		 kantor Komando Disuik Militer (Kodim berada di Kecamatan Demak;
kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Demak.			 kantor Komando Rayon Militer (Koramil berada di berada di seluruh Kecamatan dan
2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan	•		4. Pos angkatan laut berada di Kecamatar

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOO PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 20		SARAN/MASUKAN/	1 to 2 to 2 to 3 to 3 to 3 to 3 to 3 to 3
lebih lanjut dilakukan sesuai dengan ketentu peraturan perundang-undangan.	31 DRAFT.REVISI	PERTANYAAN	DRAFT REVISI
· ·			Bonang. b. Kantor Kepolisian Republik Indonesia mel 1. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) be di seluruh Kecamatan; dan 2. kantor Kepolisian Resor (Polres) bel di Kecamatan Demak. (2) Pengembangan kawasan pertahanan
BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH			keamanan lebih lanjut dilakukan sesuai den ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Pertama Umum			J
Pasal 68 Kawasan strategis wilayah terdiri atas: a. kawasan strategis provinsi di Daerah; dan b. kawasan strategis Daerah.	51. KetentuanPasal68 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 68 Kawasan strategis wilayah terdiri atas:		55. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah sehing berbunyi sebagai berikut: Pasal 68
Bagian Kedua	a. kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di Daerah; dan c. kawasan strategis Daerah.		Kawasan strategis wilayah terdiri atas : a. kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di Daerah; dan
Kawasan Strategis Provinsi Di Daerah Pasal 69			o. kawasan strategis Daerah.
Kawasan strategis provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas: a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendai - Demak - Ungaran - Salatiga – Semarang - Purwodadi (Kedungsepur)	52. KetentuanPasal69diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 69 Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf-a terdiri atas :6	Karamanan Ka	6. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 69 awasan strategis nasional dan kawasan strategis ovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a
kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak dan Kadilangu;	a. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga – Semarang - Purwodadi (Kedungsepur);	ter a.	kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran
Bagian Ketiga	c. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak;	b.	Purwodadi (Kedungsepur); kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak;

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOOR	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
Kawasan Strategis Daerah		大学的工作的工作。	DRAFT REVISI
Pasal 70 (1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi: a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosia dan budaya; dan c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungs dan daya dukung lingkungan hidup. (2) Peta rencana kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 70 (1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi: a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, b. dihapus c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. (3) Peta rencana kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran III yang merupakan		57. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dihapus, sehingg berbunyi sebagai berikut: Pasal 70 (1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksu dalam Pasal 68 huruf b meliputi: a. kawasan strategis dari sudut kepentingar pertumbuhan ekonomi; b. dihapus c. kawasan strategis dari sudut kepentingar fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. (2) Peta rencana kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercaptum dalam lampiran III.
Pasal 71 (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar; b. kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan c. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang. (2) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Industri; b. perdagangan dan jasa; c. outlet pemasaran hasil komoditas Daerah; dan d. permukiman perkotaan.	bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 54. KetentuanPasal 71 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 71 (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar; b. kawasan industri terpadu Sayung; c. kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan d. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang. (2) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:		tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 58. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 71 (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar; b. kawasan industri terpadu Sayung; c. kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan d. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang.) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
(3) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan		PERTANYAAN	DRAFT/REVISI
strategis wisata pantai Surodadi di Kecamatan	h parter i		a. Industri;
Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b	b. perdagangan dari jasa,		b. perdagangan dan jasa;
berupa pengembangan wisata bahari.	c. outlet pemasaran hasil komoditas Daerah;	;	c. outlet pemasaran hasil komoditas Daerah;
(4) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan	1	1	dan dan komoditas Daeran;
strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada			d. permukiman perkotaan.
ayat (1) huruf c berupa peningkatan prasarana	strategis kawasan industri terpadu Sayung		(3) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan
pelabuhan perikanan	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		I sudlegis kawasan industri ternadu Savung I
	meliputi :		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
	a. kawasan industri; dan		a. kawasan industri; dan
·	b. kawasan permukiman perkotaan.		b. kawasan permukiman perkotaan.
·	(4) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan		(4) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan
	strategis wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	1	I sudlegis wisata pantai Surndadi di Kooppotes I
•	huruf c berupa pengembangan wisata bahari.		Sayung sebagaimana dimaksud nada ayat (1)
	(5) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan		nurur c berupa pengembangan wisata bahari
	Strategis Pelahuhan Porikanan Dantai Maria	1	(b) Kegistan yang dituruk
	strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak		(5) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan
	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud		Strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Maradamat.
	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimekanal
Pasal 72	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan		Strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Maradamat.
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan
Nasai 72 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf di berupa penjagkatan
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang meliputi:	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang meliputi: a. kawasan perbatasan Kecamatan Sayung —	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang meliputi: a. kawasan perbatasan Kecamatan Sayung – Kecamatan Genuk (Kota Semarang);	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang meliputi: a. kawasan perbatasan Kecamatan Sayung – Kecamatan Genuk (Kota Semarang); b. kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen –	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang meliputi: a. kawasan perbatasan Kecamatan Sayung – Kecamatan Genuk (Kota Semarang); b. kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen – Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang); c. kawasan perbatasan Kecamatan Dempet –	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang meliputi: a. kawasan perbatasan Kecamatan Sayung – Kecamatan Genuk (Kota Semarang); b. kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen – Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang); c. kawasan perbatasan Kecamatan Dempet – Kecamatan Godong (Kabupaten Grobogan);	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang meliputi: a. kawasan perbatasan Kecamatan Sayung – Kecamatan Genuk (Kota Semarang); b. kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen – Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang); c. kawasan perbatasan Kecamatan Dempet – Kecamatan Godong (Kabupaten Grobogan); d. kawasan perbatasan Kecamatan Mijen –	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang meliputi: a. kawasan perbatasan Kecamatan Sayung – Kecamatan Genuk (Kota Semarang); b. kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen – Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang); c. kawasan perbatasan Kecamatan Dempet – Kecamatan Godong (Kabupaten Grobogan); d. kawasan perbatasan Kecamatan Mijen – Kecamatan Welahan (Kabupaten Jepara); dan	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang meliputi: a. kawasan perbatasan Kecamatan Sayung – Kecamatan Genuk (Kota Semarang); b. kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen – Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang); c. kawasan perbatasan Kecamatan Dempet – Kecamatan Godong (Kabupaten Grobogan); d. kawasan perbatasan Kecamatan Mijen – Kecamatan Welahan (Kabupaten Jepara); dan e. kawasan perbatasan Kecamatan Karanganyar –	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang meliputi: a. kawasan perbatasan Kecamatan Sayung – Kecamatan Genuk (Kota Semarang); b. kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen – Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang); c. kawasan perbatasan Kecamatan Dempet – Kecamatan Godong (Kabupaten Grobogan); d. kawasan perbatasan Kecamatan Mijen – Kecamatan Welahan (Kabupaten Jepara); dan e. kawasan perbatasan Kecamatan Karanganyar – Kecamatan Jati (Kabupaten Kudus).	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang meliputi: a. kawasan perbatasan Kecamatan Sayung – Kecamatan Genuk (Kota Semarang); b. kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen – Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang); c. kawasan perbatasan Kecamatan Dempet – Kecamatan Godong (Kabupaten Grobogan); d. kawasan perbatasan Kecamatan Mijen – Kecamatan Welahan (Kabupaten Jepara); dan e. kawasan perbatasan Kecamatan Karanganyar –	di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan 55. Pasal 72 Dihapus		di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan

. .

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
sarana lintas daerah.	UKALIKEVISI	PERTANYAAN	DRAFT REVISI.
Pasal 73 (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d meliputi :	ТЕТАР		TETAP
 a. kawasan rawan abrasi dan rob pantai di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang; dan 			
 kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul di Kecamatan Wedung. 	·		
 Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis rawan abrasi dan rob pantai di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penanganan masalah rob dan abrasi. 			
) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis rawan sedimentasi dan tanah timbul di Kecamatan Wedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa identifikasi tanah negara dan arahan pengelolaaannya.	·		
BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH	BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN		
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu		
	TETAP Umum		
Arahan pemanfaatan ruang meliputi:			
perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan	•		
b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis.	the second secon		
Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan			
ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas			

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011:2031	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan Daerah.		PERTANYAAN	DRAFT REVISION
Bagian Kedua Arahan Perwujudan Struktur Ruang	Bagian Kedua Arahan Perwujudan Struktur Ruang		
Paragraf 1 Perwjudan Sitem Pusat Pelayanan	Paragraf 1 Perwjudan Sistem Pusat Pelayanan		
Pasal 75 rahan perwujudan sistem perkotaan meliputi : pengembangan PKL dan PKLp dilakukan melalui :	56. Ketentuan Pasal 75 poin adiubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Memasukkan program terkait PKN	60. Ketentuan Pasal 75 poin a diubah sehingg berbunyi sebagai berikut:
 penyusunan rencana detail tata ruang kota; penyusunan peraturan zonasi; 	Pasal 75 Arahan perwujudan sistem perkotaan meliputi :		Pasal 75
3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;4. penyusunan panduan rancang kota, dan	pengembangan PKL dilakukan melalui : penyusunan rencana detail tata ruang kota;		Arahan perwujudan sistem perkotaan meliputi : a. pengembangan PKN dilakukan melali peningkatan keterpaduan pengembangan kawasa
 pengendalian kegiatan komersiai / perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya. 	penyusunan peraturan zonasi; penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;		b. pengembangan PKL dilakukan melalui :
pengembangan PPK dilakukan melalui: i. penyusunan rencana detail tata ruang kota;	penyusunan panduan rancang kota; dan pengendalian kegiatan komersial / perdagangan, mencakup pertokoan, pusat		 penyusunan rencana detail tata ruang kota; penyusunan peraturan zonasi; penyusunan rencana tata bangunan dan
penyusunan peraturan zonasi; penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan	belanja, dan sejenisnya. b. pengembangan PPK dilakukan melalui:		lingkungan; 4. penyusunan panduan rancang kota; dan 5. pengendalian kegiatan kemersial /
pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja.	penyusunan rencana detail tata ruang kota; penyusunan peraturan zonasi; penyusunan rencana tata bangunan dan		perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
pengembangan PPL dilakukan melalui: 1. penyusunan rencana detaii tata ruang kota; dan	lingkungan; dan 4. pengendalian kegiatan		c. pengembangan PPK dilakukan melalui: i. penyusunan rencana detail tata ruang kota; 2
pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja.	komersial/perdagangan, mencakup pertokoan . dan pusat belanja.		penyusunan peraturan zonasi; penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
	penyusunan rencana detail tata ruang kota; dan		pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja.
	pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja.	·	d. pengembangan PPL dilakukan melalui: 1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
	adii pasat belanja.		dan 2. pengendalian kegiatan

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	DRAFTIREVISI
		A STATE OF THE STA	dan pusat belanja.
Pasal 76 Arahan perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui: a. penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perdesaaan; dan b. pengembangan pusat pelayanan perdesaan.	57. Pasal 76 Dihapus		61. Pasal 76 Dihapus
Paragraf 2	Paragraf 2		
Perwujudan Sistem Jaringan Transpotasi	Perwujudan Sistem Jaringan Transpotasi		
Pasal 77 Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi meliputi :	58. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 77	Menyesuaikan rencana sistem jaringan prasarana transportasi	62. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 77
 pengembangan sistem prasarana jaringan jalan dilakukan melalui: 	Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi meliputi :		Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi meliputi :
pengembangan dan peningkatan jalan arteri primer	a. pengembangan sistem prasarana jaringan jalan dilakukan melalui:		a. pengembangan sistem prasarana jaringan jalan dilakukan melalui:
 a) pembangunan jalan bebas hambatan Semarang – Demak; b) peningkatan Ruas Jalan arteri; jalur Kota 	pengembangan dan peningkatan jalan arteri primer meliputi: a) Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus – Jati;		pengembangan dan peningkatan jalan arteri primer meliputi: a) Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus – Jati;
Semarang – Sayung – Karangtengah – Demak – Gajah – Karanganyar – Kudus; 2. peningkatan Jalan kolektor primer meliputi:	b) Jalan Lingkar Demak; c) Jalan Bts. Kota Demak – Trengguli;		b) Jalan Lingkar Demak; c) Jalan Bts. Kota Demak – Trengguli;
a) Jalur Semarang - Mranggen – Karangawen – Gubug – Kebonagung – menuju	d) Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Kudus, dan e) Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota	·	d) Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Kudus; dan
Purwodadi; b) Jalur Demak – Wonosalam – Dempet –	Demak. 2. pengembangan dan peningkatan Jalan		e) Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak.
menuju Purwodadi; dan c) Jalur Trengguli/ Gajah – Mijen – Welahan	- Kolektor Primer-1 (JKP1) meliputi:		pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP1) meliputi: a) Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts.
Jepara. 3. peningkatan Jalan lokal primer meliputi: a) jawak - Bonang / Wedung;	Kab. Jepara; b) Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara		Kab. Jepara; b) Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara
b) ruas jalan Demak - Bonang – Wedung; c) ruas jalan Kalikondang – Tlogodowo;	Margoyoso; s. pengembangan dan peningkatan Jalan tol meliputi:	· 6	Margoyoso; pengembangan dan peningkatan Jalan tol
d) ruas jalan Nainkondang – nogodowo, d) ruas jalan Onggorawe – Waru – Mranggen; e) ruas jalan Mranggen – Kangkung –	a) Jalan tol Semarang – Demak; b) Jalan tol Demak – Tuban; dan		meliputi: a) Jalan tol Semarang – Demak;
Kebonbatur – Banyumeneng/ Girikusumo;	c) exit tol di Kecamatan Sayung dan		b) Jalan tol Demak – Tuban; dan c) exit tol di Kecamatan Sayung dan

PERDA 6/201	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD 11 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011:2031		DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	in the second	SESUDAH KORLINSEK
f)	ruas jalan Kangkung – Sumberejo –	* Andrew Collection	Kecamatan Wonosalam.			DRAFT REVISION OF THE PROPERTY
_	Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;	4. p	engembangan dan peningkatan Jalan			Kecamatan Wonosalam.
g)	ruas jalan Karangawen – Jragung;	K	olektor Primer 2 (JKP2) meliputi:		4.	pengembangan dan peningkatan Jala
h)	ruas jalan Karangtengah – Guntur –	a)	obaong,			Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi: a) Jalan Semarang – Godong:
i)	Karangawen; ruas jalan Pamongan - Bulusari	b)				a) Jalan Semarang – Godong;b) Jalan Demak – Godong;
'/	Banjardowo (Semarang);	(c)	Coman Jopana			c) Jalan Semarang - Domak Jana
j)	ruas jalan Onggorawe – Suradadi;		(jalan pesisir); dan			 c) Jalan Semarang – Demak – Jepa (jalan pesisir); dan
k)	ruas jalan Karangtengah –) d)	januar inigatinggen.			d) Rencana jalan lingkar Mranggen.
,	Tambakbulusan;	5. p∈ ka	ningkatan jalan yang menjadi kewenangan bupaten meliputi:		7.	peningkatan jalan yang menjadi kewenanga
l)	ruas jalan Desa Sriwulan - Bedono -	a)	T I			kabupaten meliputi:
	Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan	b)	Jalan Onggorawe – Waru – Mranggen;		;	a) Jalan Demak - Bonang - Wedung;
>	- Morodemak - Purworejo ;	c)	Jalan Mranggen – Kangkung –	•	ĺ	b) Jalan Onggorawe - Waru - Mranggen;
m)	ruas jalan Desa Berahan Wetan – Babalan – Kedungmutih – Kedungkarang	-,	Kebonbatur – Banyumeneng/).	c) Jalan Mranggen – Kangkung
	Tedunan:		Girikusumo;			Kebonbatur – Banyumenen
n)	ruas jalan Wedung – Bungo –Jetak –	d)	Jalan Kangkung – Sumberejo –	·	,	Girikusumo;
	Mijen;	-1	Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;	· .		d) Jalan Kangkung – Sumberejo Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;
c)	ruas jalan Karanganyar – Kedungwaru	e) fl	Jalan Karangawen – Jragung;		e	e) Jalan Karangawen – Jragung;
	kidul – Gempolsongo – Mijen;	')	Jalan Karangtengah – Guntur – Karangawen;		f)) Jalan Karangtengah – Guntur -
	ruas jalan Bungo – Mutih Kulon;	g)	Jalan Pamongan - Bulusari – Banjardowo			Karangawen;
q)	ruas jalan Karangnyar – Sambung – Sidomulyo – Merak;	3/	(Kota Semarang);		g	
	ruas jalan Gajah – Dempet;	h)	Jalan Onggorawe – Suradadi;			(Kota Semarang);
	ruas jalan Dempet – Sidomulyo;	i)	Jalan Karangtengah – Tambakbulusan;	· ·	h)	, suggestante Curadadi,
	ruas jalan Demung Trengguli;	j)	Jalan Desa Sriwulan - Bedono -		· 1)	Jalan Karangtengah – Tambakbulusan;
•	ruas jalan Dempet – Kebonagung;		Timbulsluko – Surodadi –		1)	Jalan Desa Sriwulan - Bedono - Timbulsluko - Surodadi
-	ruas—jalan Karangtengah— Pasar	·	Tambakbulusan – Morodemak -			Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan – Morodemak -
· /	Wonosalam – Doreng – Megonten;	ν	Purworejo: Jalan Desa Berahan Wetan – Babalan –			Purworejo;
	ruas jalan Demak – Pasar Wonosalam;	· N)	Kedungmutih – Kedungkarang –	·	. k)	*** ***
x)	ruas jalan Mranggen - Batursari -	•	Tedunan;			Kedungmutih - Kedungkarang -
İ	Pucanggading / TVRI – Kebonbatur; dan	i)	Jalan Wedung – Bungo –Jetak – Mijen;		13	Tedunan;
	ruas jalan Jalan lingkar Mranggen.	m)	Jalan Karanganyar – Kedungwaru kidul –		ł)	Durido — Jolak — Milen
4. Penge	embangan dan peningkatan jalan		Gempolsongo – Mijen;		m)	Neutrigania - Neutrigani kini) -
	ngan diseluruh wilayah Daerah		Jalan Bungo – Mutin Kulon;		n)	Gempolsongo – Mijen;
	ngan angkutan umum dilakukan melalui:	0)	Jalan Karangnyar – Sambung –		o)	Jalan Bungo – Mutih Kulon;
1. studi k	kelayakan sistem angkutan;	<u> </u>	Sidomulyo – Merak;		. O)	Jalan Karangnyar – Sambung – Sidomulyo – Merak;

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	CECHNALIZODU
	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	The second secon
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031 2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai; dan 3. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal. c. pengembangan sarana transportasi dilakukan melalui: 1. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di Kawasan Perkotaan Demak. 2. peningkatan terminal penumpang tipe C meliputi: a) Kawasan Perkotaan Mranggen; b) Kawasan Perkotaan Wedung; c) Ibukota Kecamatan Wonosalam; d) !bukota Kecamatan Gajah; e) Ibukota Kecamatan Karanganyar; f) Ibukota Kecamatan Mijen; g) Ibukota Kecamatan Bonang; h) Ibukota Kecamatan Sayung; i) Ibukota Kecamatan Karangtengah;	In private a report to the property of the contract of the con		p) Jalan Gajah – Dempet; q) Jalan Dempet – Sidomulyo; r) peningkatan ruas jalan Dempet Kebonagung; s) Jalan Karangtengah – Pasar Wonosalan – Doreng – Megonten; t) Jalan Demak – Pasar Wonosalam; u) Jalan Mranggen – Batursari – Pucanggading / TVRI – Kebonbatur; dan v) Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati 8. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan diseluruh wilayah Daerah b. Pengembangan angkutan umum dilakukan melalui: 1. studi kelayakan sistem angkutan; 2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai; dan 3. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal. c. pengembangan sarana transportasi dilakukan melalui: 1. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di Kawasan Perkotaan Demak;
Kecamatan Sayung. d. Pengembangan jaringan transportasi kereta api dilakukan melalui 1. penetapan jalur perlintasan; dan 2. pembangunan stasiun kereta api.	meliputi: n) Kawasan Perkotaan Mranggen; o) Kawasan Perkotaan Wedung; p) Ibukota Kecamatan Wonosalam; q) Ibukota Kecamatan Gajah; r) Ibukota Kecamatan Karanganyar; s) Ibukota Kecamatan Mijen; t) Ibukota Kecamatan Bonang; u) Ibukota Kecamatan Sayung; v) Ibukota Kecamatan Karangtengah; w) Ibukota Kecamatan Guntur; x) Ibukota Kecamatan Dempet; y) Ibukota Kecamatan Dempet;		 pembangunan terminal penumpang tipe B berada di Kawasan Perketaan Mranggen; peningkatan terminal penumpang tipe C meliputi: A. Kawasan Perketaan Mranggen; B. Kawasan Perketaan Wedung; Ibukota Kecamatan Wedung; Ibukota Kecamatan Gajah; Ibukota Kecamatan Karanganyar; Ibukota Kecamatan Mijen; Ibukota Kecamatan Bonang; Ibukota Kecamatan Sayung; Ibukota Kecamatan Karangtengah; Ibukota Kecamatan Guntur;

PERDA 6/2011 PTPW//APHDATEN PENAMESON (2004)	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	z) Ibukota Kecamatan Kebonagung. 4. pengembangan terminal barang direncanakar di Kecamatan Sayung. d. Pengembangan jaringan transportasi kereta ap dilakukan melalui 1. penetapan jalur perlintasan; dan 2. pembangunan stasiun kereta api.	RERTANYAAN	k) Ibukota Kecamatan Dempet; I) Ibukota Kecamatan Karangawen; dan m) Ibukota Kecamatan Kebonagung. 5. pengembangan terminal barang direncanaka di Kecamatan Sayung. d. Pengembangan jaringan transportasi kereta al dilakukan melalui 1. penetapan jalur perlintasan; dan
Paragraf 3	Paragraf 3		2. pembangunan stasiun kereta api.
Perwujudan Sistem Jaringan Energi	Perwujudan Sistem Jaringan Energi		
Pasal 78	TETAP	ļ	
Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana energi dilakukan melalui: a. pembangunan jaringan pipa gas; b. Peningkatan sistem jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan tegangan menengah, dan saluran udara tegangan rendah;			
 pengembangan daya listrik; pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif. 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Paragraf 4	Paragraf 4		
Perwujudan Sistem Jaringan telekomunikasi	Perwujudan Sistem Jaringan telekomunikasi		
Pasal79	TETAP		
rahan perwujudan sistem jaringan prasarana elekomunikasi dilakukan melalui:			
peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap Kecamatan;			
pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran;	·		
peningkatan sistem hubungan telepon otomatis dan telepon umum; dan pengaturan penggunaan menara bersama.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		,	
Paragraf 5 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	Paragraf 5 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya		

ERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
LNDA-0/2011 (NTNA-NABUFA) EIN DEMAR-2011-2031	The state of the s	CRIANTAAN	DRAFTREVISI
5 100	Air		A STATE OF THE PROPERTY OF THE
Pasal 80 ahan perwujudan sistem jaringan prasarana sumber ıya air meliputi :	59. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		63. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
pelestarian sumberdaya air dilakukan melalui:	Pasal 80	,	5-100
pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air;	Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:		Pasal 80 Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya meliputi :
 pengawasan dan Penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam; pembangunan embung meliputi : 	a. pelestarian sumberdaya air dilakukan melalui; 1. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air;		a. pelestarian sumberdaya air dilakukan melalui: 1. pelestarian sumber mata air dan konservidaerah resapan air;
 a) Kecamatan Karangawen; b) Kecamatan Guntur; c) Kecamatan Dempet; 	pengawasan dan Penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam; pembangunan embung meliputi :		pengawasan dan Penertiban sumber air yar berasal dari sumber air tanah dalam;
d) Kecamatan Mijen; e) Kecamatan Karanganyar; f) Kecamatan Bonang; dan g) Kecamatan Wedung.	a) Kecamatan Karangawen; b) Kecamatan Guntur; c) Kecamatan Dempet; d) Kecamatan Mijen;		3. pembangunan embung meliputi : a) Kecamaian Karangawen; b) Kecamatan Guntur; c) Kecamatan Dempet;
peningkatan pelayanan air minum dilakukan melalui: 1. pengembangan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum; dan	e) Kecamatan Karanganyar; f) Kecamatan Bonang; dan g) Kecamatan Wedung. b. peningkatan pelayanan air minum dilakukan		d) Kecamatan Mijen; e) Kecamatan Karanganyar; f) Kecamatan Bonang; dan g) Kecamatan Wedung. b. peningkatan pelayanan air minum dilakukan
perbaikan jaringan pipa air minum yang ada secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air minum.	melalui: 1. pengembangan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum; dan		melalui: 1. pengembangan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum; dan
Paragraf 6	perbaikan jaringan pipa air minum yang ada secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air minum.		 perbaikan jaringan pipa air minum yang ada- secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air minum.
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Paragraf 6 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	No.	
Pasal 81 ujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas : program sistem prasarana persampahan meliputi:	60. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		64. Ketentuan Pasal 81 diuban sehingga berbunyi sebagai berikut:

	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
PERD	4 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFTREVISI	" PERTANYAAN	DRAFTIREVISION
1.	paramigration and paragraphic description	Pasal 81	The second secon	Pasal 81
2.	1 3	Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:		Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
	penampungan sementara;	a. programsistem jaringan persampahan meliputi:		a. programsistem jaringan persampahan meliputi:
3. 4.	program pengelolaan sampah 3R; penyediaan tempat sampah organik dan non-	peningkatan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir:	·	 peningkatan dan pengembangan tempat
5.	organik di kawasan perkotaan; studi kelayakan manajemen pengelolaan	peningkatan dan pengembangan tempat penampungan sementara;		pemrosesan akhir; 2. peningkatan dan pengembangan tempat
	sampah terpadu; dan	3. program pengelolaan sampah 3R;		penampungan sementara; 3. program pengelolaan sampah 3R;
6.	usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-	penyediaan tempat sampah organik dan non- organik di kawasan perkotaan;		4. penyediaan tempat sampah organik dan non-
b. pro	organik. Ogram sistem jaringan prasarana air minum meliputi	studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan		organik di kawasan perkotaan; 5. studi kelayakan manajemen pengelolaan
1.	penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah;	usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.		sampah terpadu; dan 6. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik
2.	pengembangan jaringan distribusi utama;	b. programsistem penyediaan air minum meliputi :		dan non-organik. b. Program sistem penyediaan air minum meliputi :
3.	penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan; dan	penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah;		penambahan kapasitas dan revitalisasi
4.	pengembangan dan peningkatan reservoir.	pengembangan jaringan distribusi utama;		sambungan rumah; 2. pengembangan jaringan distribusi utama;
	gram sistem jaringan prasarana pengelolaan air bah meliputi:-	penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan; dan		3. penambahan kapasitas dan revitalisasi
1.	pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri	4. pengembangan dan peningkatan reservoir.		jaringan perdesaan di seluruh kecamatan; dan 4. pengembangan dan peningkatan reservoir.
2.	pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;	c. programsistem pengelolaan air limbah meliputi:1. pembangunan instalasi pengolahan limbah		c. Program sistem pengelolaan air limbah meliputi:
3.	pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat	pada kawasan industri		pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri
	(sanimas) dan rumah tangga perkotaan; dan	pemantapan instalasi pengelahan limbah tinja; pengenbangan sistem pengelahan dan		pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;
4.	pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.	pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan; dan		pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga
1	gram sistem jaringan prasarana drainase meliputi:	4. pengembangan sistem pengolahan limbah		perkotaan; dan
1.	drainase perkotaan;	kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.		pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
2.	normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;	d. program sistem jaringan drainase meliputi:	d	
3.	normalisasi saluran sungai; dan	pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;		pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
4.	memantapkan rencana pengembangan dan	normalisasi peningkatan saluran primer dan		normalisasi peningkatan saluran primer dan

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	CCURATION CONTRACTOR NOTICE	
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK DRAFT REVISI	
pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan. e. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana dilakukan melalui : 1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan 2. pengembangan ruang evakuasi bencana.	sekunder; 3. normalisasi saluran sungai; dan 4. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan. e. Perwujudansistem jaringan evakuasi bencana	■ 2000年度日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	sekunder; 3. normalisasi saluran sungai; dan 4. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan.	
Bagian Ketiga	dilakukan melalui : 1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan 3. pengembangan ruang evakuasi bencana. Bagian Ketiga		e. Perwujudansistem jaringan evakuasi bencana dilakukan melalui : 1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan 2. pengembangan ruang evakuasi bencana.	
Arahan Perwujudan Pola Ruang	Arahan Perwujudan Pola Ruang			
Paragraf 1 Kawasan Lindung	Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Lindung			1
Pasal 82	TETAP			
Arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan melalui: a. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat	·			
menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah; b. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;		·		
 melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan penghijauan. 				
Pasal 83	61. Ketentuan Pasal 83 diubah dengan menambahkan		65. Ketentuan Pasal 83 diubah dengan menambahkan	
-Arahan- perlindungan- kawasan -perlindungan setempat meliputi :	huruf d, sehingga keseluruhan berbunyi		huruf d, sehingga berbunyi sebagaiberikut: Pasal 83	
 a. arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui: 1. penetapan batas sempadan pantai; 	Pasal 83 Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat meliputi:		Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat meliputi:	•
penetapan batas sempadan pantar, pengelolaan kawasan tanah timbul; penetapan batas kawasan pasang surut; dan	arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui :		arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui :	,
penerapan batas kawasan pasang surut, dan penghijauan.	penetapan batas sempadan pantai; pengelolaan kawasan tanah timbul;		 penetapan batas sempadan pantai; pengelolaan kawasan tanah timbul; 	

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOOF	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-203		PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
 penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan; penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; penertiban bangunan diatas sempadan sungai; dan penghijauan. arahan perlindungan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui: penetapan sempadan saluran irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan; penetapan pemanfaatan ruang sempadan saluran irigasi; penertiban bangunan diatas sempadan saluran irigasi; dan penghijauan. arahan perlindungan kawasan sempadan embung dilakukan melalui: penetapan batas sempadan embung; dan penghijauan. 	4. penghijauan. b. arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui: 1. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan; 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi; 3. penertiban bangunan di atas sempadan sungai; dan	FERIANYAAN	The state of the s
Pasal 84 Arahan perlindungan suaka alam, pelestarian alam dan	62. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:		66. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi
cagar budaya meliputi :	Pasal 84		sebagai benkut:
 a. arahan perlindungan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui: 1. pemeliharaan kawasan hutan bakau; dan 2. penghijauan 	Arahan perlindungan konservasi berupa arahan perlindungan kawasan pantai hutan bakau dilakukan melalui: a. pemeliharaan kawasan hutan bakau; dan	ļ r	Pasal 84 Arahan perlindungan konservasi berupa arahan perlindungan kawasan ekosistem mangrove dilakukan melalui:
o. arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui:	b. penghijauan.	a b	pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove; dan penghijauan.

DRAFT/RAPERDA SEBELUM KOORDI	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	OF CURAL PROPERTY AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031.	DRĂFT/REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
pelestarian bangunan cagar budaya; dan penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga	arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui: 1. pelestarian bangunan cagar budaya; dan 2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.		c. arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui: 1. pelestarian bangunan cagar budaya; dan 2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.
	63. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 serta disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 84 A sehingga sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: Pasal 84 A arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui: a. pelestarian bangunan cagar budaya; dan b. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.		67. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 serta disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 84 A sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 84 A Arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui: a. pelestarian bangunan cagar budaya; dan b. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.
Pasal 85	TETAP		benedapan kawasan ini dan kawasan penyangga.
Arahan perlindungan kawasan bencana alam meliputi:			•
a. arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui:			
pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;		·	
pengembangan jalur ruang evakuasi, dan melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.			
b. arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui:			
pembangunan tanggul penahan abrasi; dan penghijauan tepi pantai.			
c. arahan perlindungan kawasan rawan longsor dilakukan melalui program:		·	
pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya; dan	·	j	
pengembangan jalur dan ruang evakuasi. arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui:			
1. pembangunan sumur dalam;		1	
pengembangan bangunan penyimpan air; dan pengembangan kegiatan dan/atau komoditas			

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SECUPALIZABLE
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK(2011:2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK DRAFT REVISI
e. arahan perlindungan kawasan rawan angin topan dilakukan melalui: 1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya; 2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan 3. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan.			URAF REVISIS
·			68. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86serta disisipkan (satu) pasal baru yaitu Pasal 85 A dan Pasal 85 B sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:
			Pasal 85A Arahan perlindungan terhadap kawasan lindung geolog meliputi:
	·	•	 pengendalian kegiatan yang dapat menghalang meresapnya air hujan ke kawasan resapan ai tanah;
			d. membatasi eksploitasi air tanah dalam secara berlebihan; dan
<u> </u>			e. kerjasama pengelolaan CAT dengan Pemerintal Daerah lain.
			Pasal 85B Arahan perlindungan terhadap kawasan lindung lainnya meliputi:
			a. pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan plasma nutfah, dan
			 b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Paragraf 2 Kawasan Budidaya	Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Budidaya	**	
Pasal 86	TETAP		
Arahan perwujudan kawasan hutan produksi dilakukan melalui:			
a. penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian			

tanahnya; dan pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25-40% yang dikuasai masyarakat; Pasal 87 rahan perwujudan kawasan pertanian dilakukan melalui: penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air; dan pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi.	TETAP	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK DRAFT REVISI
pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25-40% yang dikuasai masyarakat; Pasal 87 rahan perwujudan kawasan pertanian dilakukan melalui: penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air; dan pemeliharaan sumber air untuk menjaga	ТЕТАР		UNAL REVIS
lahan yang berkelerengan 25-40% yang dikuasai masyarakat; Pasal 87 rahan perwujudan kawasan pertanian dilakukan melalui: penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air; dan pemeliharaan sumber air untuk menjaga	·		
Pasal 87 rahan perwujudan kawasan pertanian dilakukan melalui: penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air; dan pemeliharaan sumber air untuk menjaga	·		
Pasal 87 rahan perwujudan kawasan pertanian dilakukan melalui: penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air; dan pemeliharaan sumber air untuk menjaga	·		
rahan perwujudan kawasan pertanian dilakukan melalui: penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air; dan pemeliharaan sumber air untuk menjaga	·		
rahan perwujudan kawasan pertanian dilakukan melalui: penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air; dan pemeliharaan sumber air untuk menjaga	·		
penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air; dan pemeliharaan sumber air untuk menjaga	64 Digeters Develop I.		·
pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air; dan pemeliharaan sumber air untuk menjaga	C4 Digeters Develop I is a		·
kelebihan dan kekurangan air; dan pemeliharaan sumber air untuk menjaga	64 Digeters Develop I in a second		·
kelebihan dan kekurangan air; dan pemeliharaan sumber air untuk menjaga	64 Digeters Develop I.		·
	C4 Digeton Develop I in the second		·
kelangsungan irigasi.	64 Digetor Develop I		
	64 Digeters Develop I		·
	GA Dianters Developed in Section 1971		1
	64. Diantara Pasal 87 dan dan Pasal 88 disjentan		
	64. Diantara Pasal 87 dan dan Pasal 88 disispkan Pasal baru yaitu Pasal 87 A, berbunyi sebagai		69. Diantara Pasal 87 dan dan Pasal 88 disisipkan
	berikut:	·	Pasai baru yaitu Pasal 87 A, berbunyi sebagai
	Pasal 87 A		berikut:
	Arahan perwujudan kawasan perikanan dilakukan		Pasal 87 A
	melalui:		Arahan perwujudan kawasan perikanan dilakuk
w.c.	a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi penetapan		melalul:
	zona penangkapan ikan;	*	a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi penetapa
	b. peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas		zona penangkapan ikan;
	TPI;		b. peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas
!	c. pengembangan produksi perikanan tambak;		IPI;
	d. peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar;		c. pengembangan produksi perikanan tambak;
	dan		d. peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar;
	e. pengembangan umkm pengolah hasil perikanan.		uan
Pasal 88	65. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga keseluruhan		e. pengembangan umkm pengolah hasil perikanan.
han perwujudan kawasan pertambangan dilakukan	berbunyi sebagaiberikut:		70. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi
lalui:	Pasal 88	1	sebagai berikut:
identifikasi potensi tambang;	Arahan perwujudan kawasan pertambangan dan energi		Pasal 88
penetapan kawasan pertambangan yang dapat	dilakukan melalui:		Arahan perwujudan kawasan pertambangan dan energ
diakantaitasi dan	d. identifikasi potensi tambang;		Jilakukan melalui: **
pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi	e. penetapan kawasan pertambangan yang dapat	/ :	a. identifikasi potensi tambang;
permukaan tanah.	dieksploitasi; dan	j ı	o. penetapan kawasan pertambangan yang dapat
	f. pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi		diekspioitasi; dan
·	permukaan tanah.	. 0	pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah.

Perwujudan kawasan pariwisata dilakukan melalui: a. pengembangan pasti informasi wisata; dan c. peningkatan dan pengembangan objek wisata. Pasal 90 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian. b. mengembangian struktur unang perdesaan melalui: 1. pembentukan pusat pelayanan ingkungan; dan 2. meningkatkan keterhutungan ekonomi ankara pusat desa dan wilayah petsyariannya. c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui: A. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan yang nyaman; b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembargan kawasan perkotaan perwujudan kawasan ipermukiman perkotaan perkutah melalui: b. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terputu dengan kawasan permukiman perdesaan yang terputu dengan kawasan permukiman perdesaan yang terputu dengan tempat tusaha pertanian. Pasal 92 Arahan pewujudan kawasan ipermukiman perdesaan yang terputu dengan tempat tusaha pertanian. Pesal 92 Arahan pewujudan kawasan ipermukiman perdesaan yang terputu dengan tempat tusaha pertanian. Pesal 92 Arahan pewujudan kawasan ipermukiman perdesaan yang terputu dengan tempat tusaha pertanian. Pesal 92 Arahan pewujudan kawasan ipermukiman perdesaan yang terputu dengan tempat tusaha pertanian. Pesal 92 Arahan pewujudan kawasan permukiman perdesaan yang terputu dengan tempat tusaha pertanian.	DRAFT, RAPERDA SEBELUM KOORDIN ERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK	
a. pengembangan atraksi wisata; b. pengembangan pusat informasi wisata; dan c. peningkatan dan pengembangan objek wisata. Pasal 90 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalul: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian. b. mengembangkan struktur usang perdesaan melalul: 1. pembentukan pusat pelayanan hingkungan; dan 2. meningkatkan keterlubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayananniya. c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampur mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Pasal 91 Arahan perwujudan kawasan permukiman porkotaan dilakukan melalul: a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dilakukan melalul: b. mengembangkan salitas ruang publik dan ruang terbukah jilaku kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampur mendorong perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang nyaman; b. mengembangkan fasilitas sosial ekonomi yang mampur mendorong perkembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampur mendorong perkembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. penyediaan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: b. pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: b. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpodu dengan tempat usaha pertanian.	Pasal 89	TETAP	The state of the s		5206
b. pengmbangan pusat informasi wisata; dan c. peningkatan dan pengembangan objek wisata. Pasal 90 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalut: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian. b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui: 1. pembentukan pusat pelayanan lingkungan; dan 2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya. c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang manpu mendorong perkembangan kawasan perrdesan. Pasal 91 Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalut: a. penyediaaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman; b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbukah pilaya kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang manpu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalut: a. penyediaan berbagai fasilitas prang publik dan ruang terbukah pilaya kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas prang publik dan ruang terbukah pilaya kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas prang permukiman perdesaan dilakukan melalut; a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalut; a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalut; a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan nyang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	erwujudan kawasan pariwisata dilakukan melalui:				
c. peningkatan dan pengembangan objek wisata. Pasal 90 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian. b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui: 1. pembentukan pusat pelayanan finigkungan; dan 2. menigaktan keterbubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya. c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mangu mendorong perkembangan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dilakukan melalui: b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hija kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mangu mendorong perkembangan kawasan permukiman perkotaan nengembangkan fasilitas sosial ekonomi yang mangu mendorong perkembangan kawasan permukiman perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mangu mendorong perkembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. penyediaan kawasan permukiman perdesaan yang terpuba tha permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. penyediaan kawasan permukiman perdesaan yang terpuba tina terpat usaha pertanian.	pengembangan atraksi wisata;				
Pasal 90 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian. b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui: 1. pembentukan pusat pelayanan ingkungan; dan 2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya. c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang manpu mendorong perkembangan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaan saranu dan prasarana permukiman perkotaan dilakukan meladui: a. penyediaan saranu dan prasarana permukiman perkotaan permukiman perkotaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang manpu mendorong perkembangan kawasan permukiman perkotaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang manpu mendorong perkembangan kawasan permukiman perkotaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang manpu mendorong perkembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. penyediaan berbagai fasilitas permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. penyediaan berbagai fasilitas permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. penyediaan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	pengembangan pusat informasi wisata; dan				
Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian. b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui: 1. pembentukan pusa pelayanan fingkungan; dan 2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya. c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Pasal 91 Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang terpuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman perdesaan perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang terbukan herbagai fasilitas sosial ekonomi yang terbukan herbagai fasilitas sosial ekonomi yang terbukan herbagai fasilitas sosial ekonomi yang terbukan herbagai fasilitas perdesaan perkotaan.	peningkatan dan pengembangan objek wisata.				
dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian. b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui: 1. pembentukan pusat pelayanan lingkungan; dan 2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya. c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Pasal 91 Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman; b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijiau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang tepadu dengan tempat usaha pertanian.	Pasal 90	TETAP			\dashv
a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian. b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui: 1. pembentukan pusat pelayanan fingkungan; dan 2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya. c. penyediaan berbagai fisalitias sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Pasal 91 Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman; b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman perdesaan perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. penyediana berbagai kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	ahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan		1.		- 1
yang terpadu dengan tempat usaha pertanian. b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui : 1. pembentukan pusat pelayanan lingkungan; dan 2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya. c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Pasal 91 Arahan perwujudan kawacan permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dilakukan melalui: b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.			İ		İ
b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui: 1. pembentukan pusat pelayanan lingkungan; dan 2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya. c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Pasal 91 Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman; b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. penyediaan berbagai fasilitas permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. penyediaan berbagai fasilitas permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.					
1. pembentukan pusat pelayanan lingkungan; dan 2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya. c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Pasal 91 Arahan perwujudan kawacan permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dilakukan melalui: b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.					
2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya. c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Pasal 91 Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dilakukan melalui: b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.					
pusat desa dan wilayah pelayanannya. c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Pasal 91 Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman; b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman perdesaan perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.				·	Ì
mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Pasal 91 Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman; b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.					
Pasal 91 Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman; b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Pasal 92 Arahan penwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.		·			
Pasal 91 Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman; b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.					
dilakukan melalui: a. penyediaaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman; b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	•				Ì
perkotaan yang nyaman; b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	ahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan akukan melalui:				
terbuka hijau kota; dan c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.		. •			
mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.					
perkotaan. Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang		ļ		
Pasal 92 Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.					
Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.				1	1
dilakukan melalui: a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.		•			ļ
yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	akukan melalui:				
	pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	VA			
			·		
1. pembentukan pusat pelayanan lingkungan; dan		•			
meningkatkan keterhubungan ekonomi antara		·			
pusat desa dan wilayah pelayanannya.	pusat desa dan wilayah pelayanannya.				+
penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi			·		-

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.	The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DRAFTIREVISI
Pasal 94 Perwujudan ruang terbuka hijau meliputi: a. pengembangan taman lingkungan; b. pengembangan jalur hijau; c. pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan d. penghijauan makam.	 66. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:		71. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 94 Perwujudan kawasan pertahanan dan keama dilakukan melalui: c. pemantapan kawasan/lokasi pertahanan keamanan pendukung perwujudan kesatuan ru Daerah; d. identifikasi kepemilikan aset TNI dan POLRI; e. menetapkan zona penyangga kawasan pertahan dan keamanan yang berbahaya bagi aktiv masyarakat; f. peningkatan kantor Kodim 0716; g. peningkatan kantor Koramil dan Polsek berada seluruh wilayah Kabupaten Demak; dan h. peningkatan Pos Angkatan Laut Demak ya
Bagian Keempat	Bagian Keempat		berada di Kompleks Pelabuhan Morodemak.
Arahan Perwujudan Kawasan Strategis	Arahan Perwujudan Kawasan Strategis		
Pasal 95 erwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan konomi meliputi : perwujudan kawasan sepanjang koridor jalan arteri	67. Ketentuan Pasal 95 ditambahkan huruf b, seningga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut: Pasal 95 Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan		72. Ketentuan Pasal 95 ditambahkan huruf b, sehing berbunyi sebagai berikut: Pasal 95 Penwujudan kawasan etrotosia bid
primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan – Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan-Gajah - Kecamatan Karangayar dilakukan melalui: 1. pengaturan pengembangan pengendalaian pernanfaatan ruang; 2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;	ekonomi meliputi : a. perwujudan kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan – Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar dilakukan melalui: 1. pengaturan pengembangan pengendalaian	·	Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuh ekonomi meliputi : a. perwujudan kawasan sepanjang koridor jalan art primer yang melewati Kecamatan Sayung Kecamatan - Karangtengah - Kecamatan Demal Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangay dilakukan melalui:
 pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan; dan peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri. 	pemanfaatan ruang; 2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan; 3. pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan; dan		 pengaturan pengembangan pengendalaian pemanfaatan ruang; penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaa pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatual pengembangan; dan

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	INASI LINTAS SEKTOR (KORI INSEK)	SARAN/MASUKAN/	
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	mention that the property of t	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
b. perwujudan kawasan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung dilakukan melalui: 1. pembangunan sarana tambat perahu/ kapal;	peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri. b. perwujudan kawasan industri terpadu Sayung	The state of the s	DRAFT REVISI peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri.
2. pengembangan kegiatan wisata bahari; dan	dilakukan melalui:		b. perwujudan kawasan industri terpadu Sayung dilakukan melalui:
3. pembangunan sarana pendukung wisata utama.c. perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	pengembangan kawasan industri berserta fasilitasnya; dan		pengembangan kawasan industri berserta fasilitasnya; dan
Morodemak berada di Kecamatan Bonang dilakukan melalui:	pengembangan kawasan permukiman perkotaan beserta fasilitasnya.		pengembangan kawasan permukiman perkotaan beserta fasilitasnya.
peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;	c. perwujudankawasan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung dilakukan melalui:		c. perwujudankawasan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung dilakukan melalui:
pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi;	 pembangunan sarana tambat perahu/ kapal; pengembangan kegiatan wisata bahari; dan 		pembangunan sarana tambat perahu/ kapal; pengembangan kegiatan wisata bahari; dan
pengembangan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan	pembangunan sarana pendukung wisata utama.		pengembangan keglatan wisata bahan; dan pembangunan sarana pendukung wisata utama.
pengembangan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.	d. perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang dilakukan melalui:		e. perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang dilakukan melalui:
·	peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;		peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
	pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi;		pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi;
	pengembangan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan		pengembangan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan
	5. pengembangan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.	·	pengembangan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.
Pasal 96	68. Pasal 96 DIHAPUS		73. Pasal 96 DIHAPUS
Arahan perwujudan kawasan strategis bidang sosial budaya (kawasan perbatasan) dilakukan melalui:			70. I disal 30 DiviAFUS
a. pemaduserasian pengembagan kawasan perbatasan;			
b. peningkatan koordinasi pemecahan masalah ketimpangan untuk mengurangi konflik sosial;			
c. peningkatan kerja sama penyediaan infrastruktur wilayah;		·	
Pasal 97	TETAP		
Arahan perwujudan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :			
a. kawasan rawan abrasi dan rob pantai berada di			

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	the same and the same of the same property and the same same and the same of the same same same same same same	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Bonang dilakukan melalui: 1. pembangunan sarana penahan gelombang; 2. penghijauan kawasan pantai; dan 3. rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena abrasi. b. kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul berada di Kecamatan Wedung dilakukan melalui: 1. pendataan lokasi dan luas tanah timbul; dan 2. pengelolaan tanah timbul bersama masyarakat.			DRAFT.REVISI
BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH	BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH		
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu		
Umum	Umum	· ·	
Pasal 98 Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan umum perizinan; c. ketentuan umum pembarian insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi.	ТЕТАР		
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
Paragraf 1 Umum	Paragraf 1 - Umum		
Pasal 99 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	 69. Ketentuan Pasal 99ayat (3) huruf a diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut: Pasal 99 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi. 	·	 74. Ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;	(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :		Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. sistem pusat kegiatan; b. sistem piaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem piaringan sumber daya air; f. sistem pengelolaan lingkungan; dan g. sistem prasarana lainnya. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kawasan lindung; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kawasan lindung; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kawasan lindung; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kawasan lindung; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kawasan sirategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan d. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan d. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan d. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan d. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan d. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan d. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan d. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan d. kawasan strateg	SESUDAH KORLINSEK	SESUDAH KORLINSEK	SESU		SARAN/MASUI	The house the more always and the property of the second o	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI	12.325
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sorial pudapa surang sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Paragraf 2 Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah La c. ketentuan umum peraturan zonasi strakeur umum peraturan zonasi strakeur umum peraturan zonasi strakeur umum peraturan zonasi kawasan strategis sidang pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis	DRAFT REVISITE	DRAFT REVISION		AN	PERIANYA		to the same the first the same as a second control of processing of the same beginning the same and the same in the control of the same in the control of the same in the control of the same in the same in the control of the same in th	ar in 12 days wiles
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. sistem pusat kegiatan; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan sumber daya air; f. sistem pengelolaan lingkungan; dan g. sistem pengelolaan lingkungan; consistem jaringan energi; d. sistem jaringan sumber daya air; f. sistem pengelolaan lingkungan; dan g. sistem prasarana lainnya. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya; (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi : a. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang sosi	ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang	ruang; b. ketentuan umum peraturan zonasi	ruang; b. ketentuan u			ruang; b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan	dan c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.	
Paragraf 2 Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah	atuan umum peraturan zonasi struktur ruang paimana dimaksud pada ayat (2) huruf paimana dimaksud pada ayat (2) huruf paimana dimaksud pada ayat (2) huruf patistem perkotaan; patistem jaringan telekomunikasi; patistem jaringan sumber daya air; patistem jaringan sumber daya air; patistem pengelolaan lingkungan; dan patistem prasarana lainnya. Patistem prasarana lainnya. Patistem prasarana lainnya. Patistem prasarana lainnya. Patistem prasarana lainnya. Patistem prasarana lainnya. Patistem prasarana lainnya. Patistem prasarana lainnya. Patistem prasarana lainnya. Patistem prasarana lainnya. Patistem prasarana lainnya. Patistem prasarana lainnya. Patistem prasarana lainnya. Patistem prasarana lainnya. Patistem perkotaan; pala ruang patistem patiste	strategis. Ketentuan umum peraturan zonasi strasebagaimana dimaksud pada ayat (2 meliputi : a. sistem perkotaan; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem jaringan sumber daya air; f. sistem pengelolaan lingkungan; dan g. sistem prasarana lainnya. Ketentuan umum peraturan zonasi p sebagaimana dimaksud pada ayat (2 meliputi : a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya; Ketentuan umum peraturan zonasi strategis sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi : a. kawasan strategis bidang periekononii; b. kawasan strategis bidang sosial buda	strategis. (3) Ketentuan umun sebagaimana di meliputi: a. sistem perko b. sistem jaring c. sistem jaring d. sistem jaring e. sistem pengo g. sistem prasa (4) Ketentuan umun sebagaimana dir meliputi: a. kawasan lind b. kawasan bud (5) Ketentuan umun strategis sebagai huruf c meliputi: a. kawasan si ekononii; b. kawasan strategis serategis sebagai huruf c meliputi: a. kawasan si ekononii; b. kawasan strategis serategis serategis sebagai huruf c meliputi: a. kawasan strategis serategis sebagai huruf c meliputi: a. kawasan strategis serategis sebagai huruf c meliputi: a. kawasan strategis serategis sebagai sekononii;			strategis. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. sistem perkotaan; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem jaringan sumber daya air; f. sistem pengelolaan lingkungan; dan g. sistem prasarana lainnya. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya; (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan d. kawasan strategis bidang fungsi dan daya	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi a. sistem pusat kegiatan; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan sumber daya air; f. sistem pagelolaan lingkungan; dan g. sistem prasarana lainnya. Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya; Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya	(4)
Wilayah 70 Katadan Bankatan Ba	- 3 mg. ang.					· ·	-	
Pasal 100 70 Ketentuan Pasal 100 ayat (3) bugut a diubah	in one	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e				Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang		K
political landing backwith a back	an Pasal 100 ayat (3) huruf a diubah a berbunyi sebagai berikut: Pasal 100	sehingga berbunyi sebagai berikut:	sehingga berbunyi	KUPZ udahkan	sistem perkotaan. Penyempurnaan untuk memu	Pasal 100	agaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a puti :	sebaq melip

TIAN CARE	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI	ILINTAS SEKTOR (KOI	RLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	37 1 1	SESUDAH KORLINSEK
PI	RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAF	The world the state of the stat	PERTANYAAN	100	DRAFT/REVISI
	kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan skala kabupaten;	bagaimana dimaksud dal eliputi : peraturan zonasi pad kabupaten yang didu	lam Pasal 99 ayat (3) huruf da PKL, kegiatan berskal ukung dengan fasilitas da	a pengendalian pemanfa ruang la n		perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
b.	peraturan zonasi pada PKLp, kegiatan berskala beberapa kecamatan, penetapan batas perkotaan sebagai PKLp;	kegiatan ekonomi y	an yang sesuai denga yang dilayaninya, denga otaan sebagai pusat kegiata	n		 ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
c.	peraturan zonasi pada PPK, kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan	skala kabupaten;	la PPK, kegiatan berskal			 ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK); dan
d.	kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan peraturan zonasi pada PPL, kegiatan berskala	kecamatan, dengan p	penetapan batas perkotaa masing ibukota kecamatar	n		 d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
	beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agro bisnis.	dan peraturan zonasi pad beberapa desa, denga	da PPL, kegiatan berskal an penetapan batas PPL o n pusat pertumbuhan atai	a li		Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatari Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan; diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala Nasional sesuai rencana Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur.
) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya.
					. (4)	Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kecamatan/beberapa kecamatan yang didukung
	,					dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya, dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kegiatan Kecamatan.
		· . A4-	441 .		(5)	Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan; diarahkan pada pengembangan
		· .				kegiatan berskala beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya, dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kawasan

DEDI	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	The state of the s	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
PEKL	0A 6/2011:RTRW.KABUPATEN DEMAK 2011:2031	DRAFT REVISI	PERTÁNYAAN	DRAFT REVISI 125
			A STATE OF THE PROPERTY OF THE	perdesaan.
tr d a	Pasal 101 Tetentuan umum peraturan zonasi jaringan ansportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud alam Pasal 99 ayat (3) huruf b meliputi : Teraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan; dan	 71. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut: Pasal 101 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b meliputi: 	 Menyesuaikan rencana jaringan transportasi. Penyempurnaan KUPZ untuk memudahkan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan 	76. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 101 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Si di	kereta api. eraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun engan ketentuan:	a. peraturan zonasi pada sistem jaringarı jalan; b. peraturan zonasi pada siste jaringan kereta api; dan c. peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut.	ruang.	99 ayat (3) huruf b meliputi : a. peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan; b. peraturan zonasi pada siste jaringan kerel api; dan c. peraturan zonasi pada sistem jaringa
a. b.	diizinkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta	(2) Peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:		transportasi laut. (2) Peraturan zonasi pada sistem jaringan jala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf disusun dengan ketentuan:
C.	interchange jalan bebas hambatan kecuali dengan izin Pemerintah; dilarang seluruh pemanfaatan pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;	 a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; b. dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan 		 a ketentuan umum peraturan zonasi untu jaringan jalan nasional berupa jalan arte primer meliputi: 1. diperbolehkan pengembangan prasaran pelengkap dan utilitas jalan;
d.	dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan; dan	kecuali dengan izin Pemerintah; c. dilarang seluruh pemanfaatan pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;		 diperbelehkan bersyarat pemasangai iklan dan media informasi pada daeral milik jalan;
e. 3) Pe	penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. eraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta	d. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan; dan		diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan dilarang menggunakan dan memperbadkan dan memperbadkan dan memperbadkan dan memperbadkan dan dan memperbadkan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d
ap dis	i sebagaimana-dimaksud pada-ayat (1) huruf-b- susun dengan ketentuan:	e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.		memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
a. b.	transportasi kereta api; dilarang membuat perlintasan sebidang antara	(3) Peraturan zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:		 ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan tol meliputi:
C.	jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah; dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan	a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api; b. dilarang membuat perlintasan sebidang antara		dilarang melakukan kegiatan yang dapat menganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol; dinerholehkan, bersyarat pambasah
	keselamatan transportasi perkeretaapian;	jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah;		 diperbolehkan bersyarat pemberdayaan di bidang jalan tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	Harrison, 15 to 200 to 1
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	the strains and the second sec	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
d. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan	c. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;		3. diwajibkan membuat bangunan pengaman pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol.
dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.	kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur		 c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten berupa jalan kolektor primer meliputi: 1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
	kereta api. (4) Peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:		diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
	a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal; b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung		memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan. d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan
	fungsi kepelabuhanan; c. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; dan f. dilarang melakukan kegiatan yang dapat		desa meliputi: 1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan
	mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.		diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau.
			ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan khusus meliputi:
			diperbolehkan bersyarat pembangunan dan pengembangan jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat
			kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; 2. diperbolehkan bersyarat jalan khusus
			yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
			3. diperbolehkan jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSFK)	SARAN/MASUKAN/
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031		DEDTANYAAA
The Control of the Co		AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
		f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal penumpang meliputi:
		1. diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan panwisata;
		2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;
	·	3. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan
		4. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.
		g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal barang meliputi:
		1. diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa;
		2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;
		3. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan
		4. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.
		(3) Peraturan zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
		f. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
		g. dilarang membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah;
		h. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang

ند به بیشد

	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
[PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	DRAFT REVISION
				dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
				 i. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
				j. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
				(4) Peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
				d. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
		·		e. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
				f. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; dan
	Pasal 102	72 Votentum Decel 102 diubeb estimate		g. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.
	Peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c	72. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut	 Menyesuaikan rencana jaringan energi. 	77. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
	disusun dengan ketentuan:	Pasal 102 Peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi	Penyempurnaan KUPZ untuk memudahkan	Pasal 102
٠.,	adiizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf cadisusun dengan ketentuan:	kegiatan pemanfaatan dan	Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
į	b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa	a. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan	ruang.	ayat (3) huruf c meliputi:
	c. dilarang mendirikan bangunan di bawah saluran	energi di kawasan lindung untuk kepentingan - umum.		(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan
	udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi;	b. dilarang mendirikan bangunan selain fasilitas pendukung energi di atas jaringan pipa gas	·	yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen disusun dengan
	d. dilarang menanam pohon yang menganggu jaringan listrik; dan	Negara; c. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di		ketentuan: a. diperbolehkan bersyarat persilangan jaringan
	e. dilarang mendirikan bangunan di sekitar pembangkit listrik.	bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi;		prasarana dengan jaringan pipa pipa minyak dan gas bumi;
		d. dilarang menanam pohon yang menganggu jaringan listrik; dan		 b. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri, permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertambangan dan pariwisata;

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
	f. dilarang mendirikan bangunan selain fasilitas pendukung di dalam kawasan pembangkit lis	Commission 1997 1973 1973 1974 1975 1975 1975 1975 1975 1975	c. diperbolehkan bersyarat pengemban jaringan pipa minyak dan gas bumi bes fasilitas pendukungnya di kawasan lindung budi daya; d. dilarang kegiatan yang berpotensi menimbul bahaya kebakaran; dan e. dilarang mendirikan bangunan di atas jaring pipa minyak dan gas bumi.
			(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaring infrastruktur ketenagalistrikan disusun deng ketentuan:
			a. diperbolehkan pengembangan jaringan lisi kabel terpadu dengan jaringan utilitas d prasarana lainnya; b. diperbolehkan pengembangan fasilit
			pendukung ketenagalistrikan; c. diperbolehkan bersyarat pengembang, jaringan transmisi dan distribusi listrik da fasilitas pendukungnya di kawasan peruntuka lindung dan budi daya;
			 d. diperbolehkan bersyarat mendirikan banguna di bawah jaringan transmisi dan distribusi listri dan
			dilarang kegiatan yang menimbulkan bahay kebakaran dan mengganggu fungsi jaringa transmisi dan diskilusi yanggu fungsi jaringa
Pasal 103	TETAP		transmisi dan distribusi listrik.
eraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi ebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf d isusun dengan ketentuan:	and the second s		
. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;			
menetapkan sempadan menara telekomunikasi; dan mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama.			
Pasal 104 eraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air ada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal	TETAP		<u> </u>

	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORI RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	The second secon	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
99	ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan:		a described from a substitution of the	DRAFT REVISI
a. b.	diizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan embung, dan sempadan jaringan irigasi; dan			
C.	diizinkan bersyarat mendirikan bangunan pendukung pengelolaan sumberdaya air.			
	Pasal 105	73. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga keseluruhan	 Menyesuaikan rencana 	70 Votesting D. L. 102 iii
(2)	Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf f meliputi: a. peraturan zonasi pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir dan tempat penampungan sementara; b. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum; c. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah; dan d. peraturan zonasi pada jaringan drainase. Peraturan zonasi pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir dan tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf disusun dengan ketentuan: a. diizinkan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir;	Pasal 105 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf f meliputi : a. peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahan; b. peraturan zonasi pada sistem penyediaan air minum; c. peraturan zonasi pada sistem pengelolaan air limbah; dan d. peraturan zonasi pada sistem pengelolaan limbah B3; e. peraturan zonasi pada sistem drainase; dan f. peraturan zonasi pada sistem jaringan evakuasi bencana.	prasarana lainnya. Penyempurnaan KUPZ untuk memudahkan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.	78. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbun sebagai berikut: Pasal 105 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi prasaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahan; b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem penyediaan air minum; c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pengelolaan air limbah; dan d. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pengelolaan limbah B3; e. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem drainase; dan
	b. dilarang mengembangkan permukiman di- kawasan tempat pemrosesan akhir;	(2) Peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf disusun dengan ketentuan:		f. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem evakuasi bencana. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem
	 c. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan tempat pemrosesan akhir; dan d. mengatur penempatan tempat penampungan sementara di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya. 	diperbolehkan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir; dilarang mengembangkan permukiman di kawasan tempat pemrosesan akhir; diperbolehkan bersyarat pembangunan		jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan melakukan penghijauan kawasan sekitar tampat pemrosesan akhir; b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di
(3)	Peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada	fasiiltas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan tempat pemrosesan akhir, dan		kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga; c. diperbolehkan bersyarat penyimpanan

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI	IASI LINTAS SEKTÖR (KORLINSEK)	
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031.	JASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) DRAFT REVISI PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. diizinkan mengembangkan ruang terbuka hijau; b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum; c. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi diatas jaringan air minum; dan d. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun di sekitar kawasan sumber air minum. (4) Peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada	d. mengatur penempatan tempat penampungan sementara di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya. (3) Peraturan zonasi pada sistem pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan mengembangkan ruang terbuka hijau; b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum; c. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan	dan/atau tempat pengolahan limbah B3 okawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST da pengelolaan sampah skala rumah tangga; d. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan tempat pemrosesan akhir; dan e. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan tempat pemrosesan akhir. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: a. diizinkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi; b. dilarang mendirikan bangunan umum diatas jaringan air limbah; dan c. diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas pendukung pengelolaan limbah. (5) Peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan: a. diizinkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang	fasilitas pendukung kegiatan distribusi diatas jaringan air minum; dan d. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun di sekitar kawasan sumber air minum. (4) Peraturan zonasi pada sistem kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi; b. dilarang mendirikan bangunan umum diatas jaringan air limbah; dan	pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan mengembangkan ruang terbuka hijau; b. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan fasilitas sistem penyediaan air minum di kawasan peruntukan lindung dan budi daya; c. dilarang mendirikan bangunan di atas sistem penyediaan air minum kecuali untuk pengelolaan air minum; dan d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat
jalur drainase. b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan c. dilzinkan secara terbatas mendirikan bangunan diatas salurah drainase untuk mendukung fungsi drainase.	c. diperbolehkan secara terbatas pembangunan fasilitas pendukung pengelolaan limbah. (5) Peraturan zonasi pada sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:	(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
	prasarana pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); b. diwajibkan melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (B3); 6) Peraturan zonasi pada sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:	 a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah diatas sistem pengelolaan air limbah; b. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi; c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem pengelolaan air limbah; dan d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem pengelolaan air
·	a. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi	limbah. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	DRAFT REVISI
	disepanjang jalur drainase. b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan		pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
	c. diperbolehkan secara terbatas mendirikan bangunan diatas salurah drainase untuk mendukung fungsi drainase.		 a. diperbolehkankan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
	(7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : a. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana		 b. diperbolehkankan bersyarat melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (83) bagi kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (83);
	disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan 2. dilarang melakukan pemanfaatan badan		 c. dilarang melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa proses pengelolaan yang benar.
	jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi dilarang.		(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
	b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan pembangunan fasilitas		a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan drainase diatas sistem drainase;
	pendukung kegiatan pengungsi; dan d. dilarang mengembangkan kegiatan permanen		b. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang sistem drainase;
	yang dapat menganggu fungsi ruang evakuasi		c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem drainase; dan
			d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem drainase.
			Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
			a. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:
			diperbolehkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan
	*		dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi dilarang.
			b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:
			diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi, dan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/		SESUDAH KORLINSEK
PE	RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN		DRAFT REVISION
					dilarang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat menganggu fungsi ruang evakuasi.
	Pasal 106 Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan	74. Pasal 106 Dihapus		79.	Pasal 106 Dihapus
(1)	prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf g meliputi :				
	 peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana; dan 				
	d. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana.				
(2)	Ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :				
ı	a. diizinkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan				
	 b. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi dilarang. 				
(3)	Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :				
	 a. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi; dan 				
dil	arang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat menganggu fungsi ruang evakuasi.				
	Paragraf 3	Paragraf 3			
	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang			·
(1)	Metentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a meliputi:	75KetentuanPasal 107.ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut : Pasal 107	 Menyesuaikan rencana kawasan peruntukan lindung. Penyempurnaan KUPZ 	ait	etentuan Pasal 107 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 107
	a. peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;	(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a meliputi:	untuk memudahkan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan	. pe Pa	etentuan umum peraturan zonasi kawasan runtukan lindung sebagaimana dimaksud dalam isal 99 ayat (4) huruf a meliputi:
	b. kawasan perlindungan setempat;	a. ketentuan umum peraturan zonasi pada	ruang.	u.	ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan
	c. peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan	kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;	·	b.	terhadap kawasan bawahannya; ketentuan umum peraturan zonasi pada
L_	·	b. ketentuan umum peraturan zonasi pada			kawasan perlindungan setempat;

d. peraturan zonas poda kawasan bercana alam. (2) Peraturan zonas poda kawasan pragamemberkan perfaturan zonas pada kawasan yang memberkan perfaturan zonas pada kawasan yang memberkan perfaturan zonas pada kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. dizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak sebangun yang memilik kemanguan tinggi dalam menahan timpasan air hujan; b. dizinkan untuk kesiada alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam c. dizinkan untuk kesiada pada ayat di huruf bentang alam, d. dizinkan diakukan penyediaan sumur resapan afatu waduk pada lahar terbangun yang bentang alam, d. dizinkan diakukan penyediaan sumur resapan afatu waduk pada lahar terbangun yang sudah ada; dan a. ditarang untuk sekruh jenis kegiatan yang mengangu fungsi resapan air dada wasan perifindungan terbadap kawasan perifindungan bentang alam; d. Peraturan zonas pada kawasan perifindungan diakawasan pada peraturan zonas pada kawasan yang memberikan perifindungan diakawasan perifindungan diakawasan yang memberikan perifindungan bentang alam; d. Peraturan zonas pada kawasan perifindungan data wasan perifindungan diakawasan yang memberikan perifindungan diakawasan pada pada ayat (1) huruf a disusun denga ketentuan: a. digerbolehkan bersyaratuntuk kegiatan budi daya pertanian, kehutanan, dan perkebunan baksu di kawasan perifindungan lehadap kawasan perifindungan	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI		SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
d. peraturan zonasi pada kawasan alam, Peraturan zonasi pada kawasan peraturan zonasi pada memberikkan penjedindingan terhadap kawasan bawahannya sebagainana dimakaud pada yat (1) huruf adisusun dengan ketentuan: a. didinikan terbadas nutuk kegilatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemanguan linggi dalam menahan limpasan air hujan; b. dizinikan untuk kegilatan pendidikan den penelilan dengan syarat tidak mengubah heritang alam; d. dizinikan dilakukun penyedisan sumur rosapan adar waduk pada ishara terbangun yang sudah ada dan waduk pada ishara terbangun yang sudah ada dan waduk pada ishara terbangun yang sudah ada dan zonasi pada kawasan perindungan setempat sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf b melipudi a. peraturan zonasi pada kawasan perindungan setempat sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf b melipudi a. peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 1. dizinikan melakukan kegilatan yang menganggu lunga kawasan perindungan kewasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 2. dizinikan melakukan kegilatan yang menganggu lunga kanga membulukhan bekaru di Bangan pengangangan lunga kanga mampu memidinungi alau mempertuat perindungan kewasan sengandan pantai diaksusan pengalan pantai melipuli pelabuhan, tempal pelangan ikan, towa penjaja kecalaman penguninga panta diantatu kasi di tepi pantal. b. peraturan zonasi pada sama pengangan pantai diaksusan dengan ketentuan: 1. diginkan melakukan kegilatan yang diperbolehkan diantatu kegilatan pang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai melipuli pelabuhan, tempal pelangan ikan, towa penjaja kecalaman penguninga panta diantatu kegilatan pang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai melipuli pelabuhan, tempal pelangan ikan, towa penjaja kecalaman penguninga panta diantatua kegilatan pang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai diantatua kegilatan pangan diperbolehkan di kawasan sempadan pantai diantatua kegilatan pang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai diantatua kegilatan panga diperbolehkan di kawasan sempadan pantai diantatua kegil	PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	DRAFT REVISI
Journal of disusun dengan ketemban: a. dizirikan letrislats untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memilik kemanguan inngi dalam menahan limpasan air hujan; b. dizirikan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; d. dizirikan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; d. dizirikan dilakukan penyediaan sumur resapan alau waduk pada lahar terbangun yang mempangung lungaji resapan air. d. dizirikan dilakukan penyediaan sumur resapan alau waduk pada lahar terbangun yang mempangung hungaji resapan air. (2) Ketentuan unum peraturan zonasi pada kawasan perlandungan edipangung hungaji resapan air. (3) Peraturan zonasi pada kawasan perlandungan setempat sebagaimana dimaksud pada syat (1) huruf aidisusun dengan ketentuan: a. peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan: badau di kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 1. "diperbolekhan bersyaratuhutuk kegiatan budidan peraturan zonasi pada sempada pantai disusun dengan ketentuan: 2. dizirikan melakukan penjihijauan flutan badau di kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 4. diperbolekhan bersyaratuhutuk kegiatan budidan pendidikan dan penelitian; badau di kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 4. diperbolekhan bersyaratuhutuk kegiatan budi daya pertantan zonasi pada kawasan peraturan zona peraturan zona peraturan zona peraturan zona peraturan zona peraturan zona peraturan zona peraturan zona peraturan zona dimaksud pada ayat (1) huruf ai disusun dengan ketentuan: 1. "diperbolekhan bersyaratuhuk kegiatan budi daya pertantan penjindungan setempat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf ai disusun dengan ketentuan: 1. "diperbolekhan bersyaratuhutuk kegiatan budi diperbolekhan bersyaratuhutuk kegiatan budi diperbolekhan bersyaratuhutuk kegiatan budi diperbolekhan bersyaratuhutuk kegiatan budi diperbolekhan bersyaratuhutuk kegiatan budi diperbolekhan melakukan kepiatan pantai disusun dengan ketentuan: 1. diperbolekhan melakukan kepiatan pant	(2) Peraturan zona peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan	c. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan ekosistem		c. ketentuan umum peraturan zonasi pa kawasan ekosistem mangrove;
terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan ilmpasan air hujah; b. diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam c. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penetitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam c. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penetitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam c. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahar terbangun yang sudah ada; dan dengang untuk seluruh jenis kegiatan yang menggangu fungsi resapan air. (2) Peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: 1. didizinkan melakukan segiatan pantai disusun dengan ketentuan: 2. dizarkan melakukan kegiatan pantai dari ebitasi dari untuk peraturan zonasi pada kawasan perindungan butan bakat di kawasan penindungan hutan bakat di kawasan sempadan pantai dari ebitsisi-dian infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan sempadan pantai dari ebitsisi-dian kepalan bangan pantai disusun dengan ketentuan: 3. mengatir kegiatan dari-atau usaha-usaha kebutan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai dari-abitsi-dian dari perindungan kewasan sempadan pantai dari-abitsi-dian dari perindungan kewasan sempadan pantai dari-abitsi-dian dari perindungan kewasan sempadan pantai dari-abitsi-dian dari perindungan kewasan sempadan pantai dari-abitsi-dian dari perindungan kewasan sempadan pantai dari-abitsi-dian dari perindungan kewasan sempadan pantai dari-abitsi-dian dari perindungan kewasan sempadan pantai dari-abitsi-dian dari perindungan kewasan sempadan pantai dari-abitsi-dian dari perindungan kewasan sempadan pantai dari-abitsi-dian dari perindungan kewasan sempadan pantai dari-abitsi-dian dari perindungan kelentuan untum peraturan zonasi pada kawasan perindungan kelentuan untum peraturan zonasi pada kawasan perindungan kelentuan untum peraturan zonasi pada kawasan perindungan kelentuan untum peraturan zonasi pada kawasan perindungan kelentuan untum peraturan zonasi pada kawasan perindungan kelentu	huruf a disusun dengan ketentuan:	d. ketentuan umum peraturan zonasi pada		peraturan zonasi pada kawasan cag budaya;
adam, dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alarm; d. dizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahar terhangun yang sudah ada; dan e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air. (3) Peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 1. dizinkan, melakukan penghijauan hutan. bakau di kawasan sempadan pantai dari abrasi dan mengatur kegiatan danikau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan bersyarat perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: 2. dizinkan melakukan kegiatan yang mampi melindungi atau mempertuat perlindungan kegalatan pantai meliputi pelabuhan, tempat petangan ikan tewa pengangan pantai meliputi pelabuhan, tempat petangan ikan tewa pengangan yang diesusun dengan keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantal. b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan ketentuan: c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya pertanian, kebulanan, dan penelitian; d	terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;	budaya; e. ketentuan umum peraturan zonasi pada		peraturan zonasi pada kawasan raw
penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; d. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan alaw waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang menganggu fungsi resapan air. (3) Peraturan zonasi pada kawasan penilindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. peraturan zonasi pada kawasan sampadan pantai disusun dengan ketentuan: 1.1-ridizinkan, melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai dari abrasi dan jenifidungan setempat pelangah penala-dia-al-apirasi-dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan 3. mengatur kegiatan dan/atau kegiatan pantai diraksud pada ayat (1) huruf berilifungan setempat pelangan ikan lower penjaga keselamatan pengujung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantail. b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan ketentuan: b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan ketentuan: b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan ketentuan: b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan ketentuan: b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan ketentuan: b. peraturan zonasi pada kawasan peraturan zonasi pada kawasan peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perilindungan hutan disusun dengan ketentuan: b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pungan dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan kegiatan budi daya pertanian pendidikan dan penelitian; d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pengungan setempat sebagaimana dimaksu dan penelitian; d. diperbolehkan mesapatan pantai disusun dengan ketentuan: b. diperbolehkan mesapatan pantai disusun dengan ketentuan: b. diperbolehkan mesapatan pantai disusun dengan ketentuan: b. diperbolehkan mesapatan pantai disusun dengan ketentuan: b. diperbolehkan mesapatan pantai disusun dengan ketentuan: b. diperbolehkan mesapatan pantai disusun dengan ketentuan: b. diperbolehkan mesapatan pantai disus	mengubah bentang alam	alam; dan		f. ketentuan umum peraturan zonasi pad peraturan zonasi pada kawasan lindur geologi dan
atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan ketentuan; adisusun dengan	penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;	peraturan zonasi pada kawasan plasma nutfah.		g. ketentuan umum peraturan zonasi pad peraturan zonasi pada kawasan lindun
e. ditarang untuk segitatan yang mengganggu fungki resapan air. (3) Peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan: bakau di kawasan sempadan pantai yang diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan diperbolehkan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan diperbolehkan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan diperbolehkan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan depata ayat (1) huruf b meliputi a. ketentuan: a. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pana pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan depata ayat (1) huruf beripiti a. ketentuan: a. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pana pendidikan dan penelitian; dan diperbolehkan terbatas untuk kegiatan burata bakauda perindungan sebangan pantai diperbolehkan terbatas untuk wisata alam; dan diperbolehkan terbatas untuk kegiatan pana pantai penelitian; dan diperbolehkan terbatas untuk kegiata	atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan	pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana		(2) Ketentuan umum peraturan zona peraturan zona pada kawasan yang memberikan perlindunga
b. diperbolehkan bersyarat untuk wisata alam; a. peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 1. diizinkan melakukan pendhijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai. b. peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan kewasan sempadan pantai disusun dengan kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelangan ikan, lower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai. b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan memperhatikan ketentuan: b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan memenjakan hanah; dan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan memenjakikan respan air kedalam tanah; dan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bur	mengganggu fungsi resapan air.	ketentuan: a. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi		terhadap kawasan bawahannya sebagaimar dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun denga
dengan ketentuan: 1. diizinkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah-rusak; 2. diizinkan melakukan kegiatan yang mampu melindungan kawasan-sempadan pantai dari-abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan 3. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan dengan ketentuan: 1. diperbolehkan dan penelitian; dan daya pertanian, hutan rakyat, da perkebunan; 2. dizinkan melakukan kegiatan yang mampu melindungan kawasan-sempadan pantai dari-abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan 3. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai. b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan memperhatikan ketentuan: b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan ketentuan: c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bu daya pertanian, hutan rakyat, da perkebunan; d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bu daya pertanian, hutan rakyat, da perkebunan; a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 2. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan bu daya pertanian, hutan rakyat, da perkebunan; a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai di kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksu penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 2. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksu pengan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksu perlindungan setempat sebagaimana dimaksu perlindungan setempat sebagaimana dimaksu perlindungan setempat sebagai	b meliputi :	b. diperbolehkan bersyarat untuk wisata alam;		meningkatkan resapan air kedalam tanah;
telah rusak; 2. diizinkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat pertindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan 3. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai. b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan ketentuan: b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai. b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan 1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksud perkebunan; a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 2. diperbolehkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai dan/atau kegiatan jang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksud di kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 2. diperbolehkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 3. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan terbatas bangunan yara dilengkapi dengan sarana peresapan air; a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksud perlindungan setempat sebagaimana dimaksud sempadan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksud di kawasan sempadan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksud perlindungan setempat sebagaimana dimaksud di kediatan yang	dengan ketentuan: 1diizinkanmelakukanpenghijauan hutan.	pendidikan dan penelitian; dan d. diperbolehkan bersyaratpembangunan sumur		pendidikan dan penelitian; c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan bud
helintotrig atau memperkutar perinturgan kawasan-sempadan pantai dari-abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 3. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak; 2. diperbolehkan melakukan kegiatan yang membutuhkan lokasi di tepi pantai. 3. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 4. diperbolehkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak; 5. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 5. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan katan umum peraturan zonasi pada kawasan perindungan setempat sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: 6. dilarang kegiatan pertambangan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang. 7. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: 8. diperbolehkan terbatas untuk wisata; dan — 9. dilarang kegiatan pertambangan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang. 8. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempata sempadan pantai disusun dengan katan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai disusun dengan katan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai disusun dengan katan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai disusun dengan kawasan sempadan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dan hutan bakau di kawasan sempadan pantai disusun dengan kawasan sempadan yang mampu melindungi atau memperkuat yang mampu melindungan kawasan sempadan pantai dan huta	telah rusak; 2. diizinkan melakukan kegiatan yang mampu	(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud	·	daya pertanian, hutan rakyat, dar perkebunan; d. diperbolehkan terbatas bangunan yang
3. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai. b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan memperhatikan ketentuan: 1. diperbolehkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai di kawasan sempadan pantai di kawasan sempadan pantai di kawasan sempadan pantai dan abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan 1. diperbolehkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dan abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan 1. diperbolehkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai dan abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam sempadan pantai disusun dengan pantai d		a. ketentuan umum peraturan zonasi pada		dilengkapi dengan sarana peresapan air, e. diperbolehkan terbatas untuk wisata; dan
tempat pelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai. b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan memperhatikan ketentuan: 2. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infi!trasi air laut ke dalam tanah; dan 3. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan setempat sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempada pantai dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempada pantai dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai dimaksu pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai dimaksu pada ay	kelautan yang diperbolehkan di kawasan	hutan bakau di kawasan sempadan		berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.
tepi pantai. b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan memperhatikan ketentuan: dari abrasi dan infi!trasi air laut ke dalam tanah; dan disusun dengan memperhatikan ketentuan: 1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang	keselamatan pengunjung pantai dan/atau	diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat		perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
The state of the s	b. peraturan zonasi pada sempadan sungai	dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan		sempadan pantai disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang

•

DRAFT RAPERDA SERELLIM KOOR	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
PERDA 6/2011 RTRW:KABUPATEN DEMAK 2011;203	and the second s	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
diizinkan aktivitas wisata alam denga	The state of the s	THE PART AND THE PART OF THE P	DRAFT REVISI
syarat tidak mengganggu kualitas a	ir sudah ada saat peraturan daerah ini		perlindungan kawasan sempadan panta dari abrasi, intrusi air laut dan infiltrasi air
sungai; 2. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruan	ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang syah menurut peraturan		laut ke dalam tanah;
terbuka hijau;	perundang-undangan;		diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;
3. diizinkan kegiatan pemasangan papa	diperbolehkan bersyarat pengembangan		 diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana transportasi,
reklame, papan penyuluhan da peringatan, rambu-rambu pengamanan	1		tempat pelelangan ikan, bangunan
serta sarana bantu navigasi pelayaran;	fasilitas energi, sarana bantu navigasi		pengendali air, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran,
4. diizinkan kegiatan pemasangan jaringa kabel listrik, kabel telepon, dan pipa a			tower penjaga keselamatan pengunjung
minum;	yang membutuhkan lokasi di tepi pantai.		pantai dan/atau kegiatan lain yang
5. dilarang mendirikan bangunan pad	1		membutuhkan lokasi di tepi pantai; 4. diperbolehkan terbatas kegiatan
kawasan sempadan sungai; 6. dilarang melakukan kegiatan yan	meninerhatikan ketentuan:		permukiman yang sudah ada yang
mengancam kerusakan dan menurunka	1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk		dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah; dan
kualitas sungai;	ruang terbuka hijau; 2. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata	·	5. dilarang kegiatan yang menurunkan
7. diizinkan terbatas pendirian banguna untuk menunjang fungsi pengelolaar	alam dengan syarat tidak mengganggu		fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak
sungai dan taman rekreasi; dan	kualitas air sungai;		bentang alam, dan kelestarian fungsi
8. penetapan lebar sempadan sungai.c. peraturan zonasi pada sempadan saluran irigas	nomeconan none relie-		kawasan.
disusun dengan memperhatikan ketentuan:	penyuluhan danperingatan, rambu-		b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan
dijzinkan pemanfaatan ruang terbuka hijau;	rambu pengamanan; 4. diperbolehkan bersyarat kegiatan -	1. 16 37	memperhatikan ketentuan:
 dijzinkan kegiatan pemasangan papar reklame, papan penyuluhan dar 	pemasangan jaringan kabel listrik, kabel		diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau; diperbolehkan bersyarat aktivitas urisata.
peringatan, dan rambu-rambu	telepon; dan pipa air minum;		 diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu
pengamanan,	hangunan untuk menunjang tunggi		kualitas air sungai;
3. diizinkan kegiatan pemasangan jaringar kabel listrik, kabel telepon, dan pipa ai	pengelolaan sungai, taman rekreasi.		3. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan
minum;	lainnya yang membutuhkan lokasi diteni		penyuluhan dan peringatan, serta rambu-
dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan saluran irigasi;	sungai sesuai ketentuan peraturan		rambu pengamanan;
5. diizinkan terbatas pendirian bangunan	perundang-undangan; dan 6. dilarang melakukan kegiatan yang		4. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel
penunjang fungsi pengelolaan sungai dan	mengancam kerusakan dan menurunkan		telepon, dan pipa air minum;
taman rekreasi; dan 6. penetapan lebar sempadan irigasi.	kualitas sungai.		5. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi
(4) Peraturan zonasi pada kawasan suaka alam,	c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi disusun dengan	·	pengelolaan sungai, pemanfaatan air
pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana	memperhatikan ketentuan:		wisata alam, dermaga, fasilitas energi dan fungsi lainnya yang membutuhkan

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFT REVISI PE	N/MASUKAN/ RTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. peraturan zonasi pada kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan ketentuan: 1. diizinkan melakukan penanaman bibit bakau; 2. dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman; 3. dilarang penebangan liar hutan bakau dan	 diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air irigasi; diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan ramburambu pengamanan; diperbolehkan bersyarat kegiatan 	RTANYAAN	lokasi ditepi sungai sesuai denga ketentuan peraturan perundan undangan; 6. diperbolehkan terbatas permukiman yar pada saat Peraturan Daerah i ditetapkan sudah ada, sampai denga Pemerintah Daerah atau institusi yan berwenang memindahkan; dan 7. dilarang kegiatan yang menurunka fungsi ekologis dan estetika kawasai
memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau; dan 4. dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak wilayah pesisir. b. peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya	pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; 5. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan irigasi; dan 6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan	·	dengan mengubah dan/atau merusa bentang alam, dan kelestarian fungs sungai. c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi disusun dengar memperhatikan ketentuan:
dan disusun dengan ketentuan: 1. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; 2. diizinkan bersyarat pendidian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;	kualitas air irigasi. d. Ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan embung disusun dengan memperhatikan ketentuan: 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan penghijauan dan pelestarian		 diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang lerbuka hijau; diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air irigasi; diperbolehkan bersyarat kegiatan
3. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya; 4. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai-manfaat-untuk-pengembangan	sumber mata air; 2. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan menunjang budi daya perikanan, pemanfaatan air bersih dan irigasi pengairan; dan 3. dilarang mendirikan bangunan rumah		pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan ramburambu pengamanan; 4. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
ilmu pengetahuan; 5. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggaian sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan 6. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat 5) Peraturan zonasi pada kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disusun	dan permukiman baru. e. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan pembangunan lapangan, lapangan, taman, hutan kota dan sejenisnya yang dapat berfungsi sebagai kawasan evakuasi bencana; 2. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan rekreasi, olah raga, perayaan hari besar, pentas seni, perdagangan		 5. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan irigasi; dan 6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air irigasi. d. Ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan embung disusun dengan memperhatikan ketentuan: 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031.	The state of the s	PERTANYAAN	DRAFT REVISI
dengan ketentuan: a. peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir disusun dengan memperhatikan: 1. penetapan batas dataran banjir; dan	kecil/mikro dan jasa secara terbatas pada sebagian lokasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan 3. dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada ruang terbuka hijau.	The second secon	sumber mata air; 2. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan menunjang budi daya perikanan, pemanfaatan air bersih dan irigasi
diizinkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah. b. peraturan zonasi pada kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi disusun dengan ketentuan:	(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. diperbolehkan melakukan penanaman bibit bakau;	·	pengairan; 3. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi rekreasi dan wisata air dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas badan air embung/waduk; dan
 diizinkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan; diizinkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove; diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi; dan dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa 	b. dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman; c. dilarang penebangan liar hutan bakau dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau; dan d. dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak wilayah pesisir. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan		4. dilarang mendirikan bangunan rumah dan permukiman baru. e. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan pembangunan lapangan, lapangan, taman, hutan kota dan sejenisnya yang dapat berfungsi sebagai kawasan evakuasi bencana; 2. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan rekreasi, olah raga, perayaan hari besar, pentas seni, perdagangan kecil/mikro dan jasa secara terbatas
mempertimbangkan mitigasi lingkungan. c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan longsor disusun dengan ketentuan: 1. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bengana; 2. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan 3. diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. d. ketentuan umum peraturan zonasi pada	pendidikan, penelitian dan wisata; b. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan; penelitian dan wisata; c. kegiatan yang sebelumnya telah ada dan tidak berpotensi mengganggu pelestarian peninggalan sejarah; bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu masih dapat dilakukan d. diperbolehkan terbatas pembangunan permukiman diluar zona inti dan zona penyangga; dan e. dilarang melakukan kegiatan yang		pada-sebagian lokasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan 3. dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada ruang terbuka hijau. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. diperbolehkan melakukan penanaman bibit bakau; b. dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman; c. dilarang penebangan liar hutan bakau dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi
kawasan rawan kekeringan disusun dengan ketentuan: 1. diizinkan pembuatan bangunan	mengganggu atau merusak kekayaan budaya. (6) Peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e disusun		dalam melestarikan hutan bakau; dan d. dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak wilayah pesisir.

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011:2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	
	d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan kekeringan disusun dengan ketentuan:	Processing the Control of the Contro	DRAFT REVISI dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
	diperbolehkan pembuatan bangunan penampungan air baku; diperbolehkan revitalisasi jaringan irigasi;		 diperbolehkan terbatas untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang
	diperbolehkan peningkatan penghijauan dan reboisasi; diperbolehkan penanganan kondisi		sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang pasang dan abrasi;
	darurat dengan pengerahan mobil tanki air minum; 5. diperbolehkan melakukan sosialisasi dan		 diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan wisata pantai, pengamanan
	pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana kekeringan; dan		pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan serta bangunan umum untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
	6. dilarang melakukan kegiatan yang membutuhkan air skala besar.		5. diperbolehkan terbatas pengambilan air
	e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan angin topan disusun dengan ketentuan:		bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan; dan
	diperbolehkan peningkatan dan revitalisasi bangunan tahan angin topan; diperbolehkan peningkatan informasi dini		6. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan.
	dan jaringan data bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika dengan stakeholder terkait; dan	Mark A	c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan longsor disusun dengan ketentuan:
	diperbolehkan melakukan sosialisasi, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat —mengenai kawasan rawan bencana		diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana longsor;
	angin topan. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat		diperbolehkan pemasangan informasi lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
	(1) huruf d meliputi : a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; dan		diperbolehkan mendirikan bangunan penahan longsor dan prasarana untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana:
	dilarang kegiatan yang mengakibatkan terganggu dan musnahnya plasma nusfah.		4. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budi daya hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, dan perkebunan dengan
			penanaman vegetasi yang tepat dan

lair)		DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	INAS		SARAN/MASUKAN/		CECUPALITY OF THE PROPERTY OF
P	RD/	A 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	\$ \$2.75 13 \$7.55	DRAFT REVISI	PERTANYAAN		SESUDAH KORLINSEK
(5)	d. Pe	untuk perikanan darat; dan pengaturan kawasan budidaya perikanan air tawar dan air payau. raturan zonasi pada kawasan peruntukan rtambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		 c. diperbolehkan terbatas penyelenggaraan bangunan komersial dan/atau pariwisata perikanan; dan d. dilarang segala melakukan kegiatan budi daya 		\$33x V	DRAFT REVISI diperbolehkan pengembangan budi day tanaman pangan, perkebunar peternakan, perikanan dan hutan rakyat; diperbolehkan untuk pengembangai
		ruf d disusun dengan ketentuan: diizinkan melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan pertambangan dengan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;	(5)	yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:			ruang terbuka hijau; 3. diperbolehkan bersyarat pengembangar usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian, perkebunan
	b. c.	diizinkan membangun jalan pertambangan dengan dengan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan dilarang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan lindung.		 a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pertambangan; b. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri yang mengolah hasil tambang; dan c. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan 			kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam; 4. diperbolehkan bersyarat untuk rumah tunggal dan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja di sektor
(6)	set	raturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri pagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun ngan ketentuan:	(0)	pertambangan diluar kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			pertanian; dan 5. dilarang kegiatan budi daya yang mempengaruni fungsi lahan dan kualitas tanah.
	d. b.	diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri; diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau;	(0)	Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau;		(4)	 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dirilaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan
		diizinkan mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri; dan		 b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pembangkit energi; c. diperbolehkan pembangunan fasilitas 			pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan.
(7)	par	diizinkan mengembangkan instalasi pengolah air limbah. aturan zonasi pada kawasan peruntukan iwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		pendukung industri; d. diperbolehkan terbatas mengembangkan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;			 diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri perikanan; diperbolehkan terbatas penyelenggaraan bangunan komersial dan/atau pariwisata perikanan; dan
	a.	uf f disusun dengan ketentuan: diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;		e. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.		•	d. dilarang segala melakukan kegiatan budi daya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat.
	b.	diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik		Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan terbatas pengembangan			Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
	C.	pariwisata; dan diizinkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata.		aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata; diperbolehkan terbatas pengembangan			diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	CECIDALIZADIA
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
(8) Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan: a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal; b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya; c. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; d. penetapan ketentuan teknis bangunan; e. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan. (9) Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan: a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang; b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya; c. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; d. dilarang pengembangan bangunan dan lingkungan; dan – f. penetapan kelengkapan bangunan dan bangunan yang diizinkan. (10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan: a. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan; dan b. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikonsultasi dengan Pemerintah Daerah.	aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; c. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata; dan d. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar	PERTANYAAN	。
·	pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:		c. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata; dan

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINA: PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031.	DRAFT REVISI PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
	a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan; dan c. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikonsultasi dengan Pemerintah Daerah.	d. dilarang melakukan kegiatan yang melangginorma sosial, agama dan kesusilaan. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasa permukiman perkotaan sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan ruang terbuka hijau; b. diperbolehkan pembangunan prasarana sarana dan utilitas; c. diperbolehkan pembangunan pariwisata; d. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengar mempertimbangkan dampak lingkungan; e. dilarang kegiatan industri menengah dar
Section 1. The section of the sectio		 (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan ruang terbuka hijau; b. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;
		 c. diperbolehkan pembangunan pariwisata; d. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan memperlimbangkan dampak lingkungan;
		e. diperbolehkan pembangunan bersyarat fasilitas penampung dan usaha pengolahan hasil pertanian
		f. dilarang kegiatan industri menengah dan- besar. 9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
	757	pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan: a: diperbolehkan bersyarat pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan di semua kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
·		b. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertahanan dan

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	SI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) DRAFT REVISI		SARAN/MASU PERTANYA	AL SA	SESUE	OALISCO TOTAL	
					DR linet	DAH KORLINSEK	
				T	MUOKUDOSO A	The state of the s	
Pasal 109	TAP			- 1	keamanan pe	engan mempertimbangkar nduduk disekitarnya; dan	n fa
pertumbuhan disusun dengan keterbu	TAP				c. dilarang kegi:	aton	foo
u. uiiziiikan mengemban-i					pertahanan da	n keamanan.	,,,
prasarana vano mendorona minata		1		- 1			
sesuai kondisi kawasan mangunan vertikal							
sesuai rencana tata masing-masing dan							
I G. Ulizinkan nenyedigan ruga i		.		1			
				1			
sosial budaya disusun dengan ketentuan: a. diizinkan melakukan ketentuan:		-					
a. diizinkan melakukan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana terpadu di kawasan perbatasan; dan							
perbatasan; dan							
b. diizinkan melakukan peningkatan sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdaya asa							
masyarakat melalui pemberdayaan: (3) Ketentuan umum penant		1		1:			
(3) Ketentuan umum pengaturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan disusun dengan ketentuan:		.				·	
ketentuan:					,		- 1
a. diizinkan melakukan penghijaun;				.			- [
Ulidiano melakukan kasi k							-
ekologi: dan keselmbangan	•			- 1			
C. diizinkan mensosialisasikan							İ
				- .			1
pesisir. Pesisir.	•			1			1
D						The second of th	ļ.,
Pasal 110 77. Keten	tuan Pagal 440			1.			-
rtentuan yang belum termuat dalam ketentuan umum 77. Keten raturan zonasi akan ditentukan dengan mekanisme	tuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi aiberikut:	-		\perp			
mbanasan di BKPRD.	Day Lava			82. Keter	ntuan Pasal 110 -		
Ketentuan y	(and hall		• •	seba	ntuan Pasal 110 diubah gai berikut:	seḥingga berbunyi	
pembahasa	rang belum termuat dalam ketentuan umi onasi akan ditentukan dengan mekanisr n di TKPRD.	um . ne	•	1	ъ.	1	
	TO AD.		•	peraturan	Pasal 110 yang belum termuat da zonasi akan ditentukan an di TKPRD.	lam keteniuan	
				Dembahas	conasi akan ditentukan	dengan - dengan	

	น . (จั ผูฟต์ฟ้า:	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOÖRDI	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARANIMASUKANI	Par SAN SECULATION OF THE PROPERTY OF THE PROP
	PEI	RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT, REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK DRAFT REVISI
		Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan	Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan	(1)	DRAFIKEVISI
-		Paragraf 1	Paragraf 1		
		Umum	Umum		
İ		Pasal 111	TETAP		
	` .	Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.			
	(2)	Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi tata ruang.			
.	(3)	Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:			
		 a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang; 	·		
		 amplop ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan 			
		bangunan; dan c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan			
		fauna.	·	•	
	(4)	Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.	·		
	(5)	Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan.			
					<u> </u>
		Paragraf 2 Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang	Paragraf 2 Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang		
ļ		Pasal 112	TETAP		
		pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam al 111 ayat (1) meliputi:			
	a.	izin lokasi;			
Ì	b.	izin penetapan lokasi; izin penggunaan pemanfaatan tanah;	·		·
	c. d.	izin mendirikan bangunan; dan			

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDII	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK 3.2.	ලිකුත <u>්</u>
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	The state of the s	
e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.		Line Control of the C	DRAFTREVISI	
Pasal 113 (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan. (2) Izin lokasi diberikan kepada setiap orang yang akan	TETAP			
melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.				
Pasal 114 1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.	TETAP			
Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untukmelakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.				
 Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan izin prinsip. 				
Pasal 115	TETAP			_
Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c merupakan izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan.				
izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.				
Pasal 116	TETAP			1
Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam: Pasal: 146 huruf dimerupakan perizinan_yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon				
untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.				
 Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan yang akan mendirikan bangunan. 				
Paragraf 3	Paragraf 3			

	547.464 STUMBER	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
	PER	DA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	DRAFTIREVISI
	744	Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang	Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang		The state of the s
		Pasal 117	TETAP		
1	•	Semua bentuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan perizinan yang dimaksud.			
	2)	Tatacara pemberian perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.			
Г		Bagian Keempat	Bagian Keempat		
		Ketentuan Insentif dan Disinsentif	Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif	į	
		Paragraf 1	Paragraf 1		
		Umum	Umum		
		Pasal 118	TETAP		
1		Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.	· .		
		Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.			
	. ,	Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.			
Ť		Paragraf 2	Paragraf 2		
İ		Bentuk Insentif dan Disinsentif	Bentuk Insentif dan Disinsentif		
		Pasal 119	TETAP		
-		Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif- non fiskal.			
	(2)	Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:			
		a. keringanan pajak;	"	• 14	
		b. kompensasi;	·		
		c. subsidi silang;			
ł		d. imbalan;			
		e. sewa ruang; dan f. kontribusi saham.	· .	·	

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
 (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pembangunan dan pengadaan prasarana; b. kemudahan prosedur perizinan; dan c. penghargaan. 	A TAIL INCAINT	PERTANYAAN	DRAFT REVIS
Pasal 120 Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.	TETAP		
Pasal 121 Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.	TETAP		
Pasal 122 1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) terdiri atas :	TETAP		
a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;			
b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan			
c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah: kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.			
Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan:			
 a. keringanan biaya sertifikasi tanah; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan 			
c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.			

PER	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORI DA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	第155年15年15年1	DRAFT		SARANIMA	SUKAN	Salvana Salvana	SESUDAH KO	DIVINOPINA	A TONGE ALL ON COMMUNICATION OF THE PARTY OF
(3) I	Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk: a. kemudahan prosedur perizinan;)	UNACI I	YEVISI	Z PERTAN	YAAN			EVISINGER:	
c d					·					
e f. 9	kontribusi saham; dan									
(4) Ir po la se di	nsentif yang diberikan pemerintah kepada emerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah ainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang ejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana imaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian enghargaan.									·
1) Pe	Pasal 123 emberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam asal 118 ayat (3) terdiri atas:	TETAP			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· .
a.										·
b.	disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.	•								
pei yar	sinsentif yang diberikan kepada masyarakat, ngusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan ng tidak sejalan dengan rencana tata ruang pagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi	· •••·· <u>•</u>	**************************************	- 10 mm and and and an and an an an an an an an an an an an an an	 			<u></u>	ITU	· : -
a.	pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;						, -		·	
b.	pembatasan penyediaan infrastruktur;							•		

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDIN PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	ASUKANI NYAAN
c. penghentian izin; dan d. penalti. (3) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.		NYAAN DRAET REVISI
Davidad	ETAP .	
Bagian Kelima Arahan Sanksi	Bagian Kelima Arahan Sanksi	
Pasal 125 (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.	ETAP	
2) Peraturan dalam pemberian sanksi meliputi : a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;		
b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan -sesuai ketentuan perundang-undangan:		
c. di samping ketentuan sanksi pidana, bagi pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya;		
 dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin 		

bushing dan hukum; dan e. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat ienwujud, dengan memberikan sanksi administralif, sanksi perdata dan sanksi pidana. 3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pemanfaatan ruang, yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif.	FERDA 0/2017/RTRW:KABUPATEN DEMAK 2011-2031	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) DRAFT REVISI	SARANIMASUKANI	SESUDAH KORLIN	SEK CHARLES OF THE SECOND
pernantatahan ruang di kawasan perkaban/perdasaan yang dienecanakan dapat lerwujuh, dengan memberikan sanksi administralik, sanksi perdata dan sanksi pidana. 3) Dalam hai penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikanai sanksi secuai dengan kelentuan peraturan pernaturan pe	usaha dan atau pencabutan status badan hukum; dan		FERIANYAAN		
dapat icrwijud, dengan memberikan sanksi administratik, sanksi perdata dan sanksi pidana. 3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenal sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Peranifaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilenkapal dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi. 5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) penghentian sementara kepiatan; c. penghentian sementara kepiatan; d. pendupan lokasi; e. pencebutan izin; f. pembangkaran bangunan; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang, dan atau I. denda administratif. Peningatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat. (5) hutuf a dapit dilakanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran penanadaan ruang dapat memberikan peringalan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis melalui penertiban surat peningatan penertiban sementara kepiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hutuf a dapit dilakakunga dapat memberikan peringatan tertulis melalui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hutuf bagatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hutuf a dapit dilakukan melaluir.	pemantaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan				
pentataan ruang, pihak yang melakukan penyinpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan ruang, paik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegietan; c. penghentian sementara kegietan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokas; e. pencebutan izin; f. pembatalan izin; f. pembatalan izin; h. pemutinan fungsi ruang; dan atau I. denda administratif. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat. (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosectur bahwa Pejabat yang berwenang dalam peneriban pelanggaran pemantalan unang dapat memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat. (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosectur bahwa Pejabat yang berwenang dalam peneriban pelanggaran pemantalan unang dapat memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilakukan melalui: a. peneriban surat penintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang sementara dari pejabat yang herwenang dalam sementara dari pejabat yang herwenang dalam sementara dari pejabat yang herwenang dalam sementara dari pejabat yang herwenang dalam sementara dari pejabat yang herwenang dalam sementara dari pejabat yang herwenang dalam sementara dari pejabat yang herwenang dalam sementara dari pejabat yang herwenang dalam sementara	dapat ierwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi				
1) Pemafaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif. 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencebutan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulinan fungsi mang; dan atau i. denda administratif Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dileksanekan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwanan disang penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyakhya diliga) kati. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pelabat yang berwenana	penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan				
ayat (4) meilpui: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan atau i. denda adminishatif. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat— (5) huruf a dapat dilaksanakah dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan dirinaksud pada ayat (5) huruf bahyaya 3 (liga) kali. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dirinaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang sementara dari pejabat yang berwenang sementara dari pejabat yang berwenang	 Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif. 		·		
b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; g. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulinan fungsi ruang; dan atau i. denda administratif. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapet dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyak-banyak-banyak-banyakhya 3 (tiga) kali. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dan pelabat yang berwenang	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:				
c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; g. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan atau i. denda administratif. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapet dilaksanakah dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemuliinan fungsi ruang; dan atau i. denda administratif. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapet dilaksanakah dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang	b. penghentian sementara kegiatan;				
e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulinan fungsi ruang; dan atau i. denda administratif. Peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat- (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang sementara dari pejabat yang berwenang sementara dari pejabat yang berwenang	 c. penghentian sementara pelayanan umum; 			1	1
f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan atau i. denda administratif. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat— (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang		•			
g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan atau i. denda administratif. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat— (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyakhya 3 (tiga) kali. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang	· ·				
h. pemulinan fungsi ruang; dan atau i. denda administratif. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang sementara dari pejabat yang berwenang	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1
i. denda administratif. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang sementara dari pejabat yang berwenang					
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang			1		
bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pelabat yang berwenang	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				ſ
pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang	(5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur l	And the second of the second o			
peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dan pejabat yang berwenang	banwa Pejabat yang berwenang dalam penertihan				
Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang herwenang	peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan				
sementara dan pelabat yang herwegang	Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan				
r 33 stan pointainatain	sementara dari pejabat yang herwenang				
					ŀ

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011:2031	INASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARANIMASUKANI	SESUDAH KORLINSEK
ruang;		PERTANYAAN	DRAFT REVISI
b. apabila pelanggar mengabaikan perintah			1000000000000000000000000000000000000
penghentian kegiatan sementara, pejabat yang		İ	
berwenang melakukan penertiban dengan			
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi			
penghentian sementara secara paksa terhadap	·		
kegiatan pemanfaatan ruang;			
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan			
penertiban dengan memberitahukan kepada		1	
pelanggar mengenai pengenaan sanksi		1	
penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh			
aparat penertiban;			
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi,	·		
pejabat yang berwenang melakukan penertiban			·
dengan bantuan aparat penertiban melakukan			
penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara		1	
paksa; dan			
e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan,		1	· .
pejabat yang berwenang melakukan			
pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang			
yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai			
dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk			
menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan			
rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.		·	
Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat			
dilakukan melalui :		ľ	
a. penertiban surat pemberitahuan penghentian		1	
sementara pelayanan umum dari pejabat yang	Comment of the second of the s		min and the second seco
berwenang melakukan penertiban pelanggaran			10 to 10 to
pemanfaatan ruang (membuat surat			
pemberitahuan penghentian sementara			
pelayanan umum);			· ·
b apabila pelanggar mengabaikan surat		ſ	
pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang		1	
berwenang melakukan penertiban dengan			
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum			·
penghentian sementara pelayanan umum	<u> </u>	1	

RD	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORI A 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031		And the same of a second section in the section in the sec	ALCOHOLOGICAL STATE OF THE STAT	<u>tr</u> ijiya ≓S	ARANIMASUKAI	V	SESUDAH	KORI INSEK	Andrews
<u>9-15-</u>	kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis	And the resemble to the state of the state of	DRAFT REVI	SI		PERTANYAAN		Waller of the Country	REVISI	
	jenis pelayanan umum yang akan diputus;								(KEVIS)	
C.	pejabat yang berwenang melakukan tindakar	n								
	penertiban dengan memberitahukan kepada									
	pelanggar mengenai pengenaan sanks penghentian sementara pelayanan umum yang	! }								
	akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-				•		İ			
	jenis pelayanan umum yang akan diputus;	į					1			
d.	pejabat yang berwenang menyampaikan				- 1					
	perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum									
	untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; dan									
e.	penyedia jasa pelayanan umum menghentikan									
	pelayanan kepada pelanggar;					•	1			
f.	pengawasan terhadap penerapan sariksi	}								
	penghentian sementara pelayanan umum									
	dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai									
	dengan pelanggar memenuhi kewajibannya						1			
	untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya					•				
	dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis									
Don	pemanfaatan ruang yang berlaku.		.•				1.			
/5)	nutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d dapat dilakukan melalui:	1					[٠.
	penertiban surat perintah penutupan lokasi dari									
	pejabat yang berwenang melakukan penertiban						•			
	pelanggaran pemanfaatan ruang;									
b.	apabila pelanggar mengabaikan surat perintah					,				
	yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi			-						
	penutupan lokasi kepada pelanggar;				1			_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
c.	pejabat yang berwenang melakukan tindakan		•	• .		•		•		
	penertiban dengan memberitahukan kepada						ļ·			
	pelanggar mengenai pengenaan sanksi						İ			
	penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;	ř				,		42		
	berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi,						1			
	pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat								•	1
	penertiban melakukan penutupan lokasi secara									
_	paksa; dan				<u>}</u>					ľ

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DE	BELUM KOORDINASI LINTA MAK 2011-2031	DRAFT REVISI	S	ARAN/MASUKAN/	SESUDAH	(ORLINSEK
	erapan sanksi tikan lokasi yang sampai dengan ibannya untuk angnya dengan etentuan teknis	DRAF REVIS		PERTANYAAN	DRAET	
 Pencabutan izin sebagaimana dimal huruf e dapat dilakukan melalui : 	ksud pada ayat					
 a. menerbitkan surat pemberitah pencabutan izin oleh pejabat ya melakukan penertiban pelanggara ruang; 	ang berwenang [
 b. apabila pelanggar mengal pemberitahuan yang disampaikar berwenang menerbitkan sur pengenaan sanksi pencabutan izi ruang; 	n, pejabat yang at keputusan in pemanfaatan			·	,	
 c. pejabat yang berwenang m kepada pelanggar mengenai pen pencabutan izin; 	emberitahukan genaan sanksi					
 d. pejabat yang berwenang melak penertiban mengajukan pencabutan izin kepada pejabat kewenangan untuk melakukan pen 	permohonan vang memiliki					·
e. pejabat yang memiliki kewen melakukan pencabutan izin keputusan pencabutan izin;	angan untuk					
f. memberitahukan kepada pema mengenai status izin yang te sekaligus perintah untuk menghen pemanfaatan ruang secara perman dicabut izinnya; dan	elah dicabut, Titat in tikan keciatan					
 g. apabila pelanggar mengabaikan p menghentikan kegiatan pemanfaat dicabut izinnya, pejabat yang melakukan penertiban kegiatan tan peraturan perundang-undangan. 	an yang telah berwenang	·				
) Pembatalan izin sebagaimana dimaksu (5) huruf f dapat dilakukan melalui :	ıd pada ayat					

PERDA	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD A 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031		DRAFT REVISI	Bein Charles	SARAN/MASUKAN	The second second	SESUDAH KO	DENETVE	in the San San Change
а.	membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan	a ta management (Carl & Carl & Carl	DRAFT REVISIT		PERTANYAAN		DRAFT	The state of the s	
	arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana					4 8 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	PIVACIO	EVISI	
	tata ruang yang berlaku;			İ					
b.	memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihat rencana			1					
	memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat								
	mengambil langkah-langkah yang diperlukan								
	untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan	1		1			·		
	izin;			1					
C.	menerbitkan surat keputusan pembatalan izin		•			1			ļ
	oleh pejabat yang berwenang melakukan								
d.	penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; memberitahukan kepada pemegang izin tentang			1					
٥.	keputusan pembatalan izin;	•		1					1
e.	menerbitkan surat keputusan pembatalan izin			1		1		•	
	dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk								
	melakukan pembatalan izin; dan			!		·			- 1
I.	memberitahukan kepada pemanfaat ruang			ĺ					j
2) Pem	mengenai status izin yang telah dibatalkan. nbongkaran bangunan sebagaimana dimaksud			j		1			
pada	a ayat (5) huruf g dapat dilakukan melalui :					1			1
a.	menerbitkan surat pemberitahuan perintah			1					
	pembongkaran bangunan dari pelabat yang l			ĺ		İ			
	berwenang melakukan penertiban pelanggaran								ĺ
	pemanfaatan ruang; apabila pelanggar mengabaikan surat								
D.	apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang			1					
	berwenang melakukan penertiban mengeluarkan			'	. •	1.			.
	surat keputusan pengenaan sanksi	* 144 - 14			•	•			
	pembongkaran bangunan:			·					1
C.	pejabat yang berwenang melakukan tindakan						The state of the s	· · <u>= -</u> :	
1	penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran			ĺ	•		•		- 1
ŀ	bangunan yang akan segera dilaksanakan;								
d. t	perdasar surat keputusan pengenaan sanksi,								j
p	pejabat yang berwenang melakukan tindakan			·				•	
F	penertiban dengan bantuan aparat penertiban								
n n	melakukan pembongkaran bangunan secara			ļ.					
P	oundu.				•	1			1 .

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINA PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFT REVIS	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
13) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dapat dilakukan melalui :	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	FERTANYAAN	DRAFT:REVISI
a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;			
 b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang; 			
c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;			
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;	·		
e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.			
f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan			
g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan			
pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.			
) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.			
) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif, sanksi pidana		·	

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD	NASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	The state of the s
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
penjara, dan/atau sanksi pidana denda akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.	and the second s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DRAFTIREVISI
BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT	BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT		
Bagian Kesatu Hak Masyarakat	Bagian Kesatu Hak Masyarakat		
Pasal 126	TETAP		
(1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk:			
 a. mengetahui RTRW Daerah dan rencana rinci yang akan disusun kemudian; 			
 b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah; 			
 memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Daerah; 			
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah di wilayahnya;			
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah kepada pejabat yang berwenang;			
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Daerah yang menimbulkan kerugian;	· ·		
g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang kabupaten.			
Agar masyarakat mengetahui RTRW Daerah dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka SKPD yang			~
berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada			
seluruh aparat Daerah dan komunitas masyarakat di	·		

1910	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORD		SARAN/MASUKAN/	CECUDALIVODA
PI	RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
	Daerah.	and the second s		DRAFTREVISI
(3)	Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati			
-	pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan			
	ketentuan peraturan perundang-undangan.	·		
(4)	Hak memperoleh penggantian sebagaimana			
	dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini			
	diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara fihak yang berkepentingan atau sesuai dengan			
	peraturan perundang-undangan.			
	Bagian Kedua	Bagian Kedua		
· [Kewajiban Masyarakat	Kewajiban Masyarakat		
	Pasal 127	TETAP		·
(1)	Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wajib :			
	a. mentaati RTRW Daerah yang telah ditetapkan;			
ļ	b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;c. memberikan akses terhadap pelaksanaan			
	kegiatan pembangunan yang sesuai dengan			
	RTRW Daerah; dan			
	d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan			
	ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-			and the second of the second o
.	faktor daya dukung lingkungan, estetika	·		
-	lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan	. 1		
	ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.			
(2)	Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara			
'-'	kualitas ruang.			
(3)	Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan			
	mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang,	·		
	dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan			·
	sesuai dengan peraturan perundang-undang.			
	Pasal 128	TETAP		
(1)	Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:			
	a. perencanaan tata ruang;			
_	a. poronountain tata ruang,			

PERD	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDI A 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	NO STATE OF THE ST	NSEK)	SARAN/MASI	JKAN/	SESUDAH KOF	PLINCEL -	56.0 1
b.	pemanfaatan ruang; dan	DRAET RE	VISI	PERTANYA	A A Lettera	DRAFT RE	VICE	
C.	pengendalian pemanfaatan ruang.				- STORY OF THE PARTY OF THE PAR	A STANDING TO SERVICE	VIOLENTE	
(2) Be	ntuk peran masyarakat dalam perencanaan tata							
rua	ang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a eliputi:				·			
a.	masukan mengenai:							
	 persiapan penyusunan rencana tata ruang; 							
	penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;							
	pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;							
•	 perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 							
	5. penetapan rencana tata ruang.					·		
b.	kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesarna unsur masyarakat dalam perencanaan							
(3) Ber	tata ruang.				į			
seb	ntuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi							
ā.	masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;							
b.	kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;	·						
C.	kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;							
d	peningkatan efisiensi, efektivitas, dan	A COMMAND AND A	· · popuje i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				ľ	
	keserasian dalam pemanfaatan ruang darat		- 2 · 2 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 ·	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		The second secon		
	ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam				:		. 1	
	bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan							
	perundangundangan;							
e.	kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan							
	keamanan serta memelihara dan meningkatkan							•
	kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan						1	
f.	kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang					•	·	•
	peniamatan ruang			· ·				
					·			
	·					•	144	

PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 203	DINASI LINTAS SEKTOR (KÖRLINSEK) DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. masukan terkait arahan dan/atau peraturar zonasi, perizinan, pemberian insentif dar disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dar mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hai menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai			DRAET REVISI
dengan rencana tata ruang. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN	BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN		83. Judul bab IX diubah sebagai berikut: BAB IX
Pasal-129 Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.	78. Ketentuan Pasal 129 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 129 (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah. (2) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dengan Keputusan	Kemendagrri Masukan: Belum mengakomodir kelambagaan Tanggapan: Sudah diakomodir	KELEMBAGAAN 84. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 129 (1) Dalam rangka mengkoordinasika penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasam antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah: (2) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Tin Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana diatur, pada anat (2)
BAB X PENGAWASAN PENATAAN RUANG Pasal 130	Bupati. BAB X PENGAWASAN PENATAAN RUANG TETAP		diatur pada ayat (2) diatur dengan Keputusar Bupati.

PE	RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-203	DINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK)	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
	penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasa	1	PERTANYAAN	DRAFT REVIS
	4, dilakukan pengawasan terhadap kineri			
	pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataa	ı		
	ruang.			
(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	}	
	terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dar		1	
	pelaporan.		1	
(3)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)			
	dilaksanakan oleh Bupati.			
(4)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)			
	dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.			
(5)	Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat			
	(4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan			
	dan/atau pengaduan kepada Bupati.			·
	Pasal 131	TETAP		
(1)	Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud			
	dalam Pasal 130 ayat (2) dilakukan dengan			
	mengamati dan memeriksa kesesuaian antara			
	penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan		1	
	peraturan perundang-undangan.	·	1	
(2)	Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana		1	
	dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan	,		
	administratif dalam penyelenggaraan penataan			
:	ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian.			
	Pasal 132	TETAP		
(1)	Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang			
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan			
	melalui :			
	a pengawasan terhadap kinerja fungsi dan			
	manfaat penyelenggaraan penataan ruang; dan			
	b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal		·	
0)	bidang penataan ruang.		·	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
2)	Pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat			
	penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana	ļ.	* vs	
,	dimassud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan			
,	menggunakan pedoman bidang penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan			·
r	penataan ruang sesuai ketentuan peraturan	1	j	
! !	perundang-undangan.		i	
<u>_</u>	, <u> </u>		. 1	
				·
		•		146

ΡĒ	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORU RDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011 2031	THE RESIDENCE STATE AND AND AN ADDRESS OF A DESCRIPTION O	The state of the s	SARAN	MASUKAN	SF	SUDAH KORLINSEK	Selections
	Pelaksanaan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.	And A Service	FT REVISI	PERT	ANYAAN	Charles and the second of the second of the second	DRAFF REVISI	ACT HOS GIVEN HAR CONTINUES AND
	BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA		AB XI NAN SENGKETA					
(1)	Pasal 133 Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.	TETAP						
(2)	Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.							
	BAB XII PENYIDIKAN		B XII				and the second second	
	Pasal 134	TETAP	IDIKAN					t tea to
	Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terientu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkun	TETAP						,
.:	tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara				-			
	Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.							
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan meliputi:				was co	, 17 -		
	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;							

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDIN	ASILINTAS SEKTOR (KORLÍNSEK)	SARANMASUKAN	The state of the s	SANITA DI PARTE DE LA CONTRACTOR DE LA C
PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	PERTANYAAN	SESUDAH KORLINSEK DRAFT REVISI:	The second second
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang		- And the professional state of the state of	記事に含まれる場合を含まれた。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	
diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;				
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana				
dalam bidang penataan ruang;		İ		
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-		1		
dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;				
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang		ł		
diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan			1	
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran			1 .	
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak				·
pidana dalam bidang penataan ruang; dan			ŀ	į
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka	·			
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.				
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan				
dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.				
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan				
tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik				
Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik		·		.
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan				
perundang-undangan.				
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil				
penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat				
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	en en en en en en en en en en en en en e			
dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan			•	
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-				
undangan.	we the second of			
BAB XIII	BAB XIII		25	
KETENTUAN PIDANA	KETENTUAN PIDANA			
Pasal 135 T	ETAP			
Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah				

10 1 m	DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORI ERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031	1.2	TO THE RESERVE TO THE		SARANIMASUKANI		
alte	etapkan dapat dikenakan sanksi pidana asasi t	- A	DRAFT REVISI		PERTANYAAN	Official Sec.	SESUDAH KORLINSEK
ket	entuan Peraturan Perundang-Undangan.	"					DRAFT REVISI
	BAB XIV	+					
	KETENTUAN LAIN-LAIN	1	BAB XIV	\top			
	Pasal 136		KETENTUAN LAIN-LAIN			- 1	
(1)	Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh)	7	 Ketentuan Pasal 136 berubah, sehingga berbunyi sebagai beribut: 	1	Monogodka III		
. ,	yaitu tahun 2011 – 2031 dan dapat ditinjau kembali 1		copagai petikut.	l n	lenegaskan pelaksanaan rogram:		85. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	(satu) kali dalam 5 (lima) tahun;	1	Pasal 136	1 -	-	- 1	sebagai berikut:
(2)	RTRW Doorsh at a second	(1	1) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah disusun	-	Sarana dan prasarana unt kepentingan umum.	uk	Pasal 136
	penyusunan rencana rinci tata ruang	1	Totodila Millo 1888 Milano dan/atau Pongga Taka	١.	l okasi yang balan m	- 1	3041700
(3)	Dalam kondisi lingkungan stratogis tostaatu	1,0	Rudrig Rawasali Strategis Kabupaten		Lokasi yang belum diatur RTRW Daerah akibat		(1) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah disusun
	Solution deligation the chair boses 4) Pada lokasi yang belum diatur RTRW Daerah		permasalahan presisi batas		
	perubahan balas leretorial provinci yang di tota-tra-		umbat permasalahan presisi batas Daerah I		Daerah.	9	
	Congan peratural perundang-lindang DTDM Dagget		pelaksanaan pemanfaatan ruang dan	•	Presisi lokasi program yang	, ,	The soliday belanday House
	dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	1	pengendalian pemanfaatan ruangnya diselesaikan melalui kajian TKPRD dengan mempertimbangkan:		masin membutuhkan kajian	' ((2) Pelaksanaan program pomonfort
			a. kondisi eksisting; dan	•	Pembangunan prasarana		man perumbangkan nai sebagai herikut-
') :	Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada		b. keserasian dengan rencana tata ruang		uan tasilitas pendukungnya.		a. pelaksanaan program untuk tu
j	ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijaan nasional dan strategi yang mempengaruhi		oongon kawasan disekiramva, dan i	-	Amanah kepada bunati		
F	pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika	(0)	C. Damnak yang ditimbulkan		untuk mengatur ketentuan	-	
j	ntemal kabupaten.	(3)	Hasil kajian TKPRD sehagaimana dimeksus as l		teknis pelaksanaan program	- 1	
			mandanatta-	. 1	pemanfaatan		b. pada lokasi yang belum diatur RTRW Daerah akibat permasalahan presisi batas Daerah,
	1	(4)	mendapatkan persetujuan.		•		
		(4)	Pelaksanaan program sistem jaringan prasarana		•	1	poligoriudiidii Demanfaatan maa i
			focilities and the mempertimbangkan kebutuhan			1	Por arribarignari.
		(5)	Pelaksanaan program assauti			ĺ	kondisi eksisting; dan keserasian danaan
		(-)	Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian		•	1	" " " Tool dold!! UB!!! Toncono total
			lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi				
			dongan stakenoluer terkali.			1	dampak yang ditimbulkan. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan presisinya- dilakukan
	((6)	RTRW Daerahdapat ditiniau kembali 1 (actual la	:	7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7	ļ	Programme and the model of the contract of the
			dalam 5 (lima) tahun.		•	ĺ	The state of the s
							polarisariadii program sistem iorinaa
	· 1						prasarana dilakukan dengan
							mempertimbangkan kebutukan dengan l
						(3)	DECIDIKUDANYA
					1	\ - /	Pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
					. 1		kajian dan/ atau rekomendasi Tikana
		<u> </u>			.	1	organisasi perangkat daerah wasan TKPRD atau
				·		(4)	Ketentuan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang

DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDIN PERDA 6/2011 RTRW.KABUPATEN DEMAK 2011-2031	DRAFT REVISI	SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
	·····································	PERTANYAAN	diatur dengan peraturan Bupati. (5) RTRW Daerah dapat ditinjau kembali 1 (satu) ka
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN	BAB XV KETENTUAN PERALIHAN		dalam 5 (lima) tahun.
Pasal 137	TETAP		
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:	ILIAF		
a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;			
 izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; 			
c. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :			•
untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuiakan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;			
untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan			
3. untuk yang sudah dilaksanakan		1	
pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat			
pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.			
pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini;			

The second of th		SARAN/MASUKAN/	SESUDAH KORLINSEK
 e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peratutan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. 		PERTANYAAN	DRAFT/REVISI
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	BAB XVI KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 138 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1998 Jomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	TETAP		
asal 139 eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal undangkan. gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan engundangan Peraturan Daerah ini dengan enempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten emak.	TETAP		
	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Baerah Kabupaten Demak.	~~··	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.